



PEMERINTAH KABUPATEN
CILACAP



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025



bappeda.cilacapkab.go.id



[bappeda_clp](https://www.instagram.com/bappeda_clp)



Jl. Kauman No. 28 B, Cilacap



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **17**/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan melakukan Perencanaan Pembangunan di Daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 dan untuk mewujudkan kesinambungan perencanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor

- 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025.

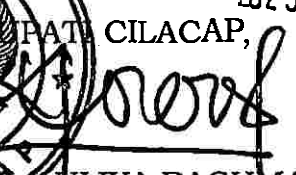
Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 18) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

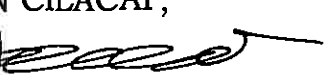
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 28 MAY 2025
BUPATI CILACAP,

SYAMSUL AULIYA RACHMAN

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 28 MAY 2025


P. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

SALIMOKO DANARDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 17

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Perubahan RKPD	I-8
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I RKPD TAHUN 2025.....	II-1
2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cilacap Sampai Tahun 2025 (Triwulan I) dan Realisasi RPD.....	II-3
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2025 (Triwulan I) dan Realisasi RPD	II-5
2.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	II-5
2.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	II-14
2.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-29
2.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-34
2.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-36
2.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	II-40
2.2.7. Unsur Kewilayahan.....	II-41
2.2.8. Unsur Pemerintahan Umum	II-42
2.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-44
2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	II-44
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	II-45
2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-50
2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-51
2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-52
2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	II-53
2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum	II-54

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah.....III-1

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-7

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....III-8

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-11

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-15

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

.....IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IV-5

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025.....IV-5

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025 IV-6

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025 IV-12

4.2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025

..... IV-17

4.2.5 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025 IV-24

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 IV-26

4.4 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.....IV-26

4.5 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025

.....IV-27

4.6 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cilacap IV-28

4.7 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025.....IV-36

4.8 Pembangunan Kewilayahan IV-52

4.9 Inovasi dan Inovasi IV-60

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025..... V-1

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan Tahun 2025..

..... V-19

5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar..... V-19

5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar..... V-31

5.2.3 Urusan Pilihan..... V-53

5.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan V-59

5.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	V-61
5.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	V-66
5.2.7 Unsur Kewilayahan	V-67
5.2.8 Unsur Pemerintahan Umum	V-68
5.2.9 Program Rutin di semua Perangkat Daerah.....	V-70
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025 (Triwulan I).....	II-2
Tabel 2. 2 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 (Triwulan I) Terhadap Target Kinerja RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.....	II-3
Tabel 2. 3 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan s.d Triwulan I Tahun 2025	II-5
Tabel 2. 4 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan s.d Triwulan I Tahun 2025	II-6
Tabel 2. 5 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d Triwulan I Tahun 2025	II-9
Tabel 2. 6 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman s.d Triwulan I Tahun 2025.....	II-11
Tabel 2. 7 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat s.d Triwulan I Tahun 2025	II-12
Tabel 2. 8 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial s.d Triwulan I Tahun 2025	II-13
Tabel 2. 9 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja s.d Triwulan I Tahun 2025	II-14
Tabel 2. 10 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Triwulan I Tahun 2025	II-15
Tabel 2. 11 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan s.d Triwulan I Tahun 2025.....	II-16
Tabel 2. 12 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan s.d Triwulan I Tahun 2025	II-17
Tabel 2. 13 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup s.d Triwulan I Tahun 2025	II-18
Tabel 2. 14 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil s.d Triwulan I Tahun 2025.....	II-19
Tabel 2. 15 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa s.d Triwulan I Tahun 2025.....	II-20
Tabel 2. 16 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s.d Triwulan I Tahun 2025	II-21
Tabel 2. 17 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan s.d Triwulan I Tahun 2025	II-22

Tabel 2. 18	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika s.d Triwulan I Tahun 2025.....	II-23
Tabel 2. 19	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah s.d Triwulan I Tahun 2025.....	II-23
Tabel 2. 20	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal s.d Triwulan I Tahun 2025	II-24
Tabel 2. 21	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga s.d Triwulan I Tahun 2025.....	II-26
Tabel 2. 22	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik s.d Triwulan I Tahun 2025	II-27
Tabel 2. 23	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian s.d Triwulan I Tahun 2025	II-27
Tabel 2. 24	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan s.d Triwulan I Tahun 2025	II-29
Tabel 2. 25	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan s.d Triwulan I Tahun 2025	II-28
Tabel 2. 26	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan s.d Triwulan I Tahun 2025	II-29
Tabel 2. 27	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perikanan s.d Triwulan I Tahun 2025	II-29
Tabel 2. 28	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata s.d Triwulan I Tahun 2025	II-30
Tabel 2. 29	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian s.d Triwulan I Tahun 2025	II-31
Tabel 2. 30	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan s.d Triwulan I Tahun 2025	II-32
Tabel 2. 31	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian s.d Triwulan I Tahun 2025	II-33
Tabel 2. 32	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Sekretariat Daerah s.d Triwulan I Tahun 2025	II-35
Tabel 2. 33	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Sekretariat DPRD s.d Triwulan I Tahun 2025	II-36
Tabel 2. 34	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Perencanaan s.d Triwulan I Tahun 2025	II-36
Tabel 2. 35	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Keuangan s.d Triwulan I Tahun 2025	II-37

Tabel 2. 36 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Kepegawaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 II-38

Tabel 2. 37 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan s.d Triwulan I Tahun 2025 II-39

Tabel 2. 38 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan s.d Triwulan I Tahun 2025 II-39

Tabel 2. 39 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Daerah s.d Triwulan I Tahun 2025 II-40

Tabel 2. 40 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan s.d Triwulan I Tahun 2025.....II-41

Tabel 2. 41 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik s.d Triwulan I Tahun 2025 II-42

Tabel 3.1 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Cilacap Dengan Migas Tahun 2020-2024 III-2

Tabel 3.2 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Cilacap Tanpa Migas Tahun 2020-2024 III-3

Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 ..III-3

Tabel 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 Dengan Migas III-4

Tabel 3.5 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 Tanpa Migas (persen) III-4

Tabel 3.6 PDRB Perkapita di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 III-5

Tabel 3.7 Laju Inflasi Kabupaten Cilacap Dirinci Per Bulan Tahun 2020-2024 (persen).....III-6

Tabel 3.8 Laju Inflasi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dirinci Menurut Bulan Tahun 2024 (persen) III-7

Tabel 3.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Target RKPD Tahun 2024, Target RKPD Tahun 2025 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2025 III-7

Tabel 3.10 Realisasai Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2025 III-8

Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025.III-9

Tabel 3.12 Realisasai Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2024 III-11

Tabel 3.13 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025.....III-15

Tabel 3.14 Realisasai Pembiayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2024.....III-16

Tabel 3.15 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025.....III-17

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025	IV-2
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cilacap Tahun 2025	IV-6
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025.....	IV-7
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Cilacap Tahun 2025	IV-12
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025	IV-17
Tabel 4. 6 Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Cilacap Tahun 2025	IV-24
Tabel 4. 7 Keterkaitan Tujuan Sasaran RPD Tahun 2023-2026 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025	IV-44
 Tabel 4. 8 Keselarasan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cilacap dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025	 IV-49
Tabel 4. 9 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis (RPD) dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025	IV-49
Tabel 4. 10 Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.....	IV-61
Tabel 5. 1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025	V-2
Tabel 5. 2 Pagu Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025.....	V-3
Tabel 5. 3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Cilacap	V-72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Inflasi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%) III-6

Gambar 4. 1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025.....IV-51

Gambar 4. 2 Peta Pengembangan Kawasan dan Pusat Pengembangan Wilayah Kabupaten Cilacap IV-55

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI CILACAP NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyusun perencanaan pembangunan tahunan Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025.

RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 yang disusun mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah perlu memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Oleh karena ini, Pemerintah Kabupaten Cilacap memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sampai dengan triwulan I Tahun 2025, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta program prioritas Bupati Cilacap terpilih periode 2025-2030.

Sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan antara lain meliputi :

1. Pergeseran pagu antar Perangkat Daerah, penambahan atau penghapusan kegiatan, penambahan atau penghapusan subkegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan dan subkegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Hasil evaluasi program/kegiatan Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 terhadap capaian target kinerja dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Triwulan I tahun 2025 yang menunjukkan adanya program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan asumsi awal RKPD;
3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

4. Keadaan Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Di samping berpedoman pada ketentuan tersebut, perubahan RKPD Tahun 2025 juga memperhatikan hasil reviu atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025 oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kabupaten Cilacap Nomor : 700.121/0686/14 tanggal 31 Mei 2024 perihal Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025, yang perlu diperhatikan dan diadakan perbaikan/penyesuaian lebih lanjut serta dituangkan pada dokumen perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 juga disusun dalam upaya menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 345 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : 1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; 2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan 3) penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan sebagai arah serta pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Cilacap dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, Dan Kawasan Brebes-Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 196);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 207);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik

- Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
 29. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 27);
 30. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 18).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas pembangunan serta berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) antara DPRD Kabupaten Cilacap dengan Bupati Cilacap yang

selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025;

3. Menjaga konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib serta urusan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024.
3. Menampung program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas dan kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran/pengurangan pagu yang berdampak terhadap terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta penambahan atau penghapusan kegiatan.
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dengan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.
5. Melakukan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang belum terakomodir pada APBD Induk/Definitif Tahun Anggaran 2025.
6. Menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika perubahan RKPD.
- BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I RKPD TAHUN 2025
- Memuat telaahan terhadap hasil evaluasi, status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025.
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025
- Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta pembangunan kewilayahan.
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- Berisikan program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2025 serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.
- BAB VI PENUTUP
- Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I RKPD TAHUN 2025

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026. Mendasarkan pada hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025 sampai dengan triwulan I terdapat 204 indikator program pembangunan daerah.

Pada pelaksanaan evaluasi sebagai bahan identifikasi terhadap capaian kinerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 terhadap pencapaian target RKPD Tahun 2025, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menggunakan Tabel E.1 sebagai berikut:

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KETERANGAN
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi (ST)	Pencapaian / realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
76% ≤ 90%	Tinggi (T)	
66% ≤ 75%	Sedang (S)	Pencapaian / realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
51% ≤ 65%	Rendah (R)	Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi / masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
≤ 50%	Sangat Rendah (SR)	

Secara umum, penyebab indikator berstatus rendah dan sangat rendah dikarenakan sampai dengan triwulan I Tahun 2025, antara lain :

- a. Kegiatannya masih berjalan, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung/diukur;
- b. Kegiatannya belum dapat dilaksanakan pada triwulan I, karena menyesuaikan dengan aktivitas diluar rencana daerah (misalnya indikator perhitungan energi per kapita baru dapat dilakukan pada akhir tahun);
- c. Capaian indikator tidak dapat dihitung secara triwulan dan hanya dapat dihitung secara tahunan (data tahunan);

Rekapitulasi hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah per urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (sampai dengan triwulan I) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Cilacap
Tahun 2025 (Triwulan I)

No	Status Pencapaian Indikator	2025 (Triwulan I)	
		Jumlah Indikator	Persentase
1.	Sangat tinggi (ST)	81	39,71
2.	Tinggi (T)	8	3,92
3.	Sedang (S)	5	2,45
4.	Rendah (R)	4	1,96
5.	Sangat Rendah (SR)	106	51,96
Total Indikator		204	100

Berdasarkan data pada tabel 2.1 di atas, persentase capaian indikator kinerja pembangunan Kabupaten Cilacap triwulan I tahun 2025 masih tergolong sedang. Namun demikian capaian tersebut masih bersifat sementara mengingat program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator masih berjalan, sehingga keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan baru dapat diukur dan diperbandingkan pada akhir tahun 2025. Selanjutnya terhadap indikator-indikator dengan status Sedang, Rendah dan Sangat Rendah telah dilakukan analisis terkait dengan faktor penyebab dan upaya yang akan dilakukan agar target indikator tersebut dapat dicapai pada akhir tahun 2025.

Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 terhadap target RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cilacap Sampai Tahun 2025 (Triwulan I) dan Realisasi RPD

Tabel 2. 2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cilacap Tahun 2025 (Triwulan I)
Terhadap Target Kinerja RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Target 2025	Realisasi 2025 (TW I)	Capaian Kinerja Tahun 2025 (TW I)	Status Kinerja Th. 2025	Capaian Kinerja RPD s.d.2025	Status Capaian terhadap target RPD
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75	76,77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.	Angka kriminalitas *	Indeks	20	17,12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,68	72,91	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4.	Pertumbuhan Ekonomi (dengan migas)	%	3,5-4,0	5,40-6,10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5.	Pertumbuhan Ekonomi (tanpa migas)	%	5,46-6,0	5,40-6,10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6.	Inflasi	%	2,5-4,5	2,5-4,5	0,37	14,8	SR	14,8	SR
7.	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	91,32	89,28	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8.	Indek Kinerja Sistem Irigasi	%	49,35	48,85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9.	Vc Rasio *	Indeks	0,30-0,40	0,30-0,40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7199	0,7455	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
11.	Penurunan Gas Rumah Kaca	Gg Co2e	13.500	739.415	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
12.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	112,25	96,93	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
13.	Nilai SAKIP	Nilai	74,7	74,75	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
14.	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Indeks	73,5	71,146	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15.	Indeks Merit System	Indeks	333	319	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,1	3,46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,5	87,97	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Target 2025	Realisasi 2025 (TW I)	Capaian Kinerja Tahun 2025 (TW I)	Status Kinerja Th. 2025	Capaian Kinerja RPD s.d.2025	Status Capaian terhadap target RPD
18.	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai (Zonasi)	93 (Zona Hijau)	96,52 (Zona Hijau)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
19.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,83	87,78	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
20.	Angka kemiskinan *	%	10	10,14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
21.	Tingkat Pengangguran Terbuka *	%	5,85	8,84-7,82	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

*) Rumus Invers : capaian semakin menurun semakin baik

Pada Tahun 2025 Kabupaten Cilacap menetapkan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah yang sudah dapat diukur sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah Inflasi. Inflasi dari target tahun 2025 sebesar 2,5 – 4,5 persen realisasi Inflasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 0,37 persen atau dengan capaian 14,8 persen. Pada bulan Januari (-0,26 %) dan Februari (-0,74 %) terjadi deflasi, salah satu penyebabnya karena diskon tarif listrik. Pada bulan Maret terjadi inflasi yang cukup tinggi sebesar 1,39 % sebagai dampak penghentian diskon listrik serta lebaran yang mengakibatkan konsumsi rumah tangga meningkat.

Sedangkan untuk IKU lainnya belum dapat diukur capaiannya di triwulan I dikarenakan hanya dapat di ukur di akhir tahun.

2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program RKPD Sampai Tahun 2025 (Triwulan I) dan Realisasi RPD

2.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.2.1.1. Pendidikan

Penyelenggaraan urusan Pendidikan di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 2 Program dengan 7 indikator. Selengkapny kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	100	100	100	100	100	ST	DINAS P DAN K
	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.	%	100	100	100	100	100	ST	DINAS P DAN K
	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	%	100	100	100	100	100	ST	DINAS P DAN K
	% PAUD yang memiliki sarpras sesuai SNP dan Kesetaraan yang dibina.	%	72,58	71,48	70,39	70,38	98,46	ST	DINAS P DAN K
	% SD yang memiliki Sarpras sesuai SNP.	%	45,12	42,32	38,92	39,52	93,38	ST	DINAS P DAN K
	% SMP yang memiliki sarpras sesuai SNP.	%	55,88	53,88	58,33	51,88	96,29	ST	DINAS P DAN K
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	%	93,07	92,32	92,53	94,8	102,69	ST	DINAS P DAN K

2.2.1.2. Kesehatan

Penyelenggaraan urusan Kesehatan di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 4 Program dengan 24 indikator. Selengkapnya kinerja penyelenggaraan urusan Kesehatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKP S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% FKTP Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	ST	DINKES KB
	% Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pusingling dengan Kondisi Sarana dan Prasarana Memadai	%	91,07	90,17	89,5	89,5	99,26	ST	DINKES KB
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	23,38	23,38	SR	DINKES KB
	Jumlah Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	%	100	100	100	20,75	20,75	SR	DINKES KB
	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	30,2	30,20	SR	DINKES KB
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	21,75	21,75	SR	DINKES KB
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	25,01	25,01	SR	DINKES KB
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	ST	DINKES KB
	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	16,05	16,05	SR	DINKES KB
	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun ke atas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	20,96	20,96	SR	DINKES KB

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKP S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun ke atas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	20,24	20,24	SR	DINKES KB
	Jumlah Warga Negara Penderita Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	30,02	30,02	SR	DINKES KB
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	22,46	22,46	SR	DINKES KB
	Jumlah Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	64	64	R	DINKES KB
	% Desa/Kelurahan STBM	%	60	40	32,04	35,21	88,03	T	DINKES KB
	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan	%	90	87	99,01	98,17	112,84	ST	DINKES KB
	Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB/Potensi KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	ST	DINKES KB
	% Menurunnya Angka Kesakitan dan Kecacatan Akibat Penyakit	%	23	22	80	80	363,63	ST	DINKES KB
	% Pemanfaatan SIK Terintegrasi di Fasyankes	%	80	75	97,5	36,16	48,21	SR	DINKES KB
	% RS Rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	ST	DINKES KB
Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	% Tenaga Kesehatan Teregistrasi	%	94	94	100	27,52	29,28	SR	DINKES KB
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	% Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Memenuhi Syarat	%	65	63	76	20,83	33,06	SR	DINKES KB
	% Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	%	100	100	100	25	25,00	SR	DINKES KB
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	% Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	86	85,9	91,76	24,3	28,29	SR	DINKES KB

Masih terdapat indikator program pada Urusan Kesehatan dengan status Sangat Rendah, yaitu :

1. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (23,38 persen), jumlah sasaran lebih tinggi daripada jumlah riil ibu hamil, perhitungan sasaran baru dapat dilakukan di akhir tahun sesuai jumlah riil 1 tahun.
2. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan (20,75 persen), jumlah sasaran lebih tinggi daripada jumlah riil karena penurunan jumlah ibu hamil, perhitungan sasaran baru dapat dilakukan di akhir tahun sesuai jumlah riil 1 tahun.
3. Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (21,75 persen), jumlah sasaran lebih tinggi daripada jumlah riil karena penurunan jumlah ibu bersalin, perhitungan sasaran baru dapat dilakukan di akhir tahun sesuai jumlah riil 1 tahun.
4. Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (16,05 persen), jumlah sasaran lebih tinggi daripada jumlah riil karena penurunan jumlah warga negara usia produktif, perhitungan sasaran baru dapat dilakukan di akhir tahun sesuai jumlah riil 1 tahun.
5. Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (20,24 persen), jumlah sasaran lebih tinggi daripada jumlah riil karena penurunan jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas, perhitungan sasaran baru dapat dilakukan di akhir tahun sesuai jumlah riil 1 tahun.
6. Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (30,02 persen), Jumlah ODGJ riil sudah tertangani, jumlah kasus lebih sedikit daripada jumlah sasaran, perhitungan sasaran baru dapat dilakukan di akhir tahun sesuai jumlah riil 1 tahun.
7. Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (22,46 persen), kegiatan ACF (*Active Case Finding*) dan ICF (*Intensif Case Finding*) belum maksimal, akan optimalkan kegiatan tersebut pada triwulan berikutnya.

8. Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan (25 persen), pembinaan ke apotek dan toko obat masih berjalan.
9. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) (24,3 persen), pendataan dimulai bulan April dan sampai saat ini masih proses pendataan.

2.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 9 Program dengan 11 indikator. Selengkapnya Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penyelenggaraan Jalan	% panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	71	70	58,28	58,8	84	T	DPUPR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	% kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	%	93	91	97,88	91	100	ST	DPUPR
Program Penataan Bangunan Gedung	% bangunan pemerintah dalam kondisi baik	%	80,8	75,1	77,72	77,72	103,49	ST	DPUPR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	48,43	41,43	34,43	0	0,00	SR	DPUPR
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	% Jaringan Irigasi yang Berfungsi Baik	%	50,09	49,09	45,76	45,76	93,22	ST	DINAS PSDA
	% Ketersediaan Penunjang Data SDA	%	67,69	61,3	55,39	55,39	90,36	ST	DINAS PSDA
	% Pendayagunaan dan Pengendalian Daya Rusak Air	%	11	10,5	9,61	9,61	91,52	ST	DINAS PSDA
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	% penanganan sampah	%	70,05	69,05	68,05	0	0,00	SR	DPUPR

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	94,24	92	92	97,62	ST	DINAS PSDA
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	0	0	SR	DPUPR
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	% Drainase dalam keadaan baik	%	95,1	93,6	92,75	92,75	99,09	ST	DINAS PSDA

Masih terdapat indikator program pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan status Sangat Rendah, yaitu :

1. Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (0 persen), pelaksanaan Diklat Jasa Konstruksi dilaksanakan pada triwulan III.
2. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (0 persen), pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual, akan dilaksanakan pada triwulan II.
3. Persentase penanganan sampah (0 persen), pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual, akan dilaksanakan pada triwulan II.

2.2.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 3 Program dengan 4 indikator. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 6
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	%	100	100	100	0	0	SR	DPUPR
	Persentase penyediaan rumah layak huni sebagai tempat tinggal bagi korban bencana kab/kota yang mengalami kerusakan	%	100	100	100	0	0	SR	DPUPR
Program Kawasan Permukiman	% kawasan kumuh yang tertangani	%	100	90,31	68,63	0	0	SR	DPUPR
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	% Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	%	89	88	87	0	0	SR	DPUPR

Semua indikator program pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan status Sangat Rendah, disebabkan karena pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual, akan dilaksanakan pada triwulan II.

2.2.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 3 Program dengan 7 indikator. Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 7
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	% Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	25	25	SR	SATPOL PP
	% Linmas yang Dibina	%	14	3,5	27,55	9,59	274	ST	SATPOL PP
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	% warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	25	25	SR	SATPOL PP
Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	ST	BPBD
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	ST	BPBD
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	0	0	SR	BPBD
	% cakupan daerah yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi	%	100	100	100	0	0	SR	BPBD

Masih terdapat indikator program pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan status Sangat Rendah, yaitu :

1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (0 persen), karena tidak ada kondisi kedaruratan di Kabupaten Cilacap.
2. Persentase cakupan daerah yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi (0 persen), karena pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual, akan dilaksanakan pada triwulan II.

2.2.1.6. Sosial

Penyelenggaraan urusan Sosial di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 5 Program dengan 6 indikator. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Sosial sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 8
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPd S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pemberdayaan Sosial	% TKSK, PSM, Orsos dan LKS yang dibina	%	100	84,61	79,36	2,62	3,09	SR	DINSOS PP PA
Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	100	100	100	ST	DINSOS PP PA
	Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang direhabilitasi	%	0,34	0,34	1,3	0,85	250	ST	DINSOS PP PA
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	% daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100	100	100	100	100	ST	DINSOS PP PA
Program Penanganan Bencana	Jumlah warga negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	ST	DINSOS PP PA
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	% pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	60,75	60,25	59,75	59,75	99,17	ST	DINSOS PP PA

Masih terdapat indikator program pada Urusan Sosial dengan status Sangat Rendah, yaitu Persentase TKSK, PSM, Orsos dan LKS yang dibina (2,62 persen) dikarenakan belum semua kegiatan dilaksanakan sampai dengan periode triwulan I dan akan diupayakan peningkatan koordinasi, pemantauan dan monitoring untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan.

2.2.2. **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

2.2.2.1. **Tenaga Kerja**

Penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 2 Program dengan 2 indikator. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 9
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	% Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	33	32	31,72	2,92	9,125	SR	DISNAKERIN
Program Penempatan Tenaga Kerja	% Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	49	50,65	59,43	45,5	89,83	T	DISNAKERIN

Masih terdapat indikator program pada Urusan Tenaga Kerja dengan status Sangat Rendah, yaitu Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi dikarenakan penyelenggaraan kegiatan masih berjalan.

2.2.2.2. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 5 Program dengan 8 indikator. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 10
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	% Oganisasi Wanita yang Aktif	%	98	99	97,14	100	101,01	ST	DINSOS PP PA
	Rasio Program dan Kegiatan responsif gender	%	100	96	100	100	104,17	ST	DINSOS PP PA
	Rasio Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	%	0,00005	0,00006	0,00003	0,000005	191,67	ST	DINSOS PP PA
	Persentase Perempuan yang menjadi Calon Legislatif	%	25	25	58,67	58,67	234,68	ST	DINSOS PP PA
Program Perlindungan Perempuan	% Perempuan yang Bekerja atau Mempunyai Usaha	%	62	57	64,93	64,93	113,91	ST	DINSOS PP PA
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga yang terlayani Puspaga	%	0,00022	0,00015	0,00012	0,0029	1933,33	ST	DINSOS PP PA
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% Pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak	%	50	47	75,35	53,25	113,30	ST	DINSOS PP PA
Program Perlindungan Khusus Anak	% Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	%	0,000195	0,000205	0,01128	0,00003	14,63	SR	DINSOS PP PA

2.2.2.3. Pangan

Penyelenggaraan urusan Pangan di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 4 Program dengan 5 indikator. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Pangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 11
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	% Ketersediaan Pangan	%	182	179	188,42	0	0	SR	DISHANPAN
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita	%	100	100	100	0	0	SR	DISHANPAN
	% Kelompok yang Dibina dalam rangka Pengembangan Konsumsi Pangan	%	29,4	7,2	14,2	0	0	SR	DISHANPAN
Program Penanganan Kerawanan Pangan	% Daerah Rentan Rawan Pangan	%	10,56	11,62	9,15	0	0	SR	DISHANPAN
Program Pengawasan Keamanan Pangan	% Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	72	81,42	97,27	0	0	SR	DISHANPAN

Masih terdapat indikator program pada Urusan Pangan dengan status Sangat Rendah, yaitu :

1. Persentase Ketersediaan Pangan (0 persen), dan Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita (0 persen), karena perhitungan indikator tersebut pada akhir tahun.
2. Persentase Kelompok yang Dibina dalam rangka Pengembangan Konsumsi Pangan (0 persen), Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (0 persen), dan Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan (0 persen), karena kegiatan dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan III.

2.2.2.4. **Pertanahan**

Penyelenggaraan urusan Pertanahan di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 2 Program dengan 2 indikator. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Pertanahan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 12
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penyelesaian Sengketa TanaH Garapan	% Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	100	100	100	0	0	SR	DPUPR
Program Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian maslah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100	100	0,5	0	0	SR	DPUPR

Semua indikator program pada Urusan Pertanahan dengan status Sangat Rendah, karena pelaksanaan kegiatan dimulai pada triwulan II.

2.2.2.5. **Lingkungan Hidup**

Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 8 Program dengan 8 indikator. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 13
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPd S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	% ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100	100	100	0	0	SR	DLH
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai pengukuran indeks kualitas air	indeks	40	39,68	48,97	0	0	SR	DLH
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	%	0,55	0,44	0,34	0	0	SR	DLH
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	% kegiatan/usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3	%	100	100	83,33	25	25	SR	DLH
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	% penataan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan atau persetujuan pemerintah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	25	25	SR	DLH
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase sekolah adiwiyata	%	71,78	71,07	81,36	81,8	115,09	ST	DLH
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran / kasus lingkungan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	25	25	SR	DLH
Program Pengelolaan Persampahan	% pengurangan sampah	%	14,5	14,3	12,44	13,58	94,96	ST	DLH

Masih terdapat indikator program pada Urusan Lingkungan Hidup dengan status Sangat Rendah, yaitu :

1. Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup (0 persen), terdapat penyesuaian dengan DPUPR Kabupaten Cilacap dan DLHK Provinsi Jawa Tengah terkait KHLS RDTR. Diupayakan dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi / penyelarasan kegiatan agar dapat dilakukan dengan lebih baik.
2. Nilai pengukuran indeks kualitas air (0 persen), karena perhitungan indikator tersebut pada akhir tahun.
3. Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (0 persen). Tutupan Lahan Kewenangan Kabupaten/Kota cukup terbatas karena banyak kewenangan yang bukan kewenangan Kabupaten/Kota. Upaya yang akan dilakukan adalah mempercepat pengumpulan data; meningkatkan koordinasi antar stakeholder yang terkait dengan tutupan vegetasi.

2.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 4 Program dengan 8 indikator. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 14
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP elektronik	%	99,5	99,49	99,24	99,31	99,82	ST	DISDUKCAPIL
	% anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	30,4	36,02	36,79	35,97	99,86	ST	DISDUKCAPIL
	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	%	96,01	99,93	99,78	99,78	99,85	ST	DISDUKCAPIL

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPd S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	30,19	28,3	19,2307692	19,23	67,95	S	DISDUKCAPIL
Program Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	%	89,61	94,4	95,47	95,45	101,11	ST	DISDUKCAPIL
	% cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	35,03	35,02	39,2	39,2	111,94	ST	DISDUKCAPIL
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	%	100	100	100	100	100	ST	DISDUKCAPIL
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	%	100	100	100	100	100	ST	DISDUKCAPIL

2.2.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 4 Program dengan 4 indikator. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 15
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPd S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penataan Desa	% Pengentasan Desa Tertinggal	%	100	100	100	100	100	ST	DISPERMADES
Program Peningkatan Kerjasama Desa	% desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga	%	100	100	100	100	100	ST	DISPERMADES
Program Administrasi Pemerintahan Desa	% Desa memiliki Dokumen RPJMDes, APBDes dan RKPDes	%	100	100	100	100	100	ST	DISPERMADES

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKP S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	% Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina	%	14,96	12,96	12,88	12,88	99,38	ST	DISPERMADES

2.2.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 3 Program dengan 5 indikator. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 16
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKP S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengendalian Penduduk	% Usia Kawin Pertama yang Istrinya Dibawah Usia 20 Tahun	%	15,3	16,1	3,12	8,3	148,45	ST	DINKES KB
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	% Jumlah Peserta KB / CPR	%	69,53	68,65	59,99	60,77	88,52	T	DINKES KB
	% Unmeet Need	%	11,76	12,04	13,87	12,49	103,74	ST	DINKES KB
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	% Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Aktif	%	90	85	84,75	64,44	75,81	S	DINKES KB
	% Kelompok Masyarakat dibidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera yang di Bina	%	75	70	73,91	26,66	38,08	SR	DINKES KB

2.2.2.9. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan Perhubungan di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 2 Program dengan 4 indikator. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Perhubungan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 17
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Perlengkapan Jalan	%	58	54	51,44	51,44	95,26	ST	DISHUB
	Rasio Ijin Trayek	%	63	62	58,62	3,45	5,56	SR	DISHUB
	% Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	97,66	97,65	62,02	19,86	20,34	SR	DISHUB
Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio ketersediaan rambu Angkutan Sungai dan Penyeberangan	%	60	50	82	82	164	ST	DISHUB

2.2.2.10. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 2 Program dengan 2 indikator. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 18
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	% masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	73	73	56	73	100	ST	DISKOMINFO
Program Aplikasi Informatika	% perangkat daerah yang mengimplementasikan/ replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai masterplan	%	100	75	42,86	42,86	57,15	R	DISKOMINFO

2.2.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 5 Program dengan 5 indikator. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 19
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	%	13,23	12,23	12,62	12,94	105,77	ST	DPKUKM
Program Pengembangan UMKM	% Pertumbuhan UMKM	%	2,75	3,3	2,65	1,08	32,82	SR	DPKUKM

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	% Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	%	100	72	45	45	62,5	R	DPKUKM
Program Pendidikan dan Latihan Perkopersian	% Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi	%	84	71,84	66,64	66,64	92,76	ST	DPKUKM
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	37,59	37,28	42,79	43,41	116,44	ST	DPKUKM

2.2.2.12. Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 5 Program dengan 5 indikator. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 20
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	% Kebijakan Penanaman Modal yang Diterbitkan	%	100	100	100	0	0	SR	DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal	% Promosi Di Tingkat Regional Dan/ Atau Nasional Yang Diikuti	%	100	100	100	0	0	SR	DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	% Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	%	100	100	97,74	32,21	32,21	SR	DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	% Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	80	75	100,43	27,32	36,43	SR	DPMPTSP

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	% Ketersediaan Profil Investasi Sektor Perizinan Berusaha	%	100	100	100	0	0	SR	DPMPTSP

Masih terdapat indikator program pada Urusan Penanaman Modal dengan status Sangat Rendah, yaitu :

1. Persentase kebijakan Penanaman Modal yang diterbitkan (0 persen). Hal ini dikarenakan kajian potensi investasi akan dilaksanakan pada triwulan II, sedangkan kajian kebijakan tidak dapat dilaksanakan sebab adanya efisiensi anggaran.
2. Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang diikuti (0 persen). Hal ini dikarenakan pameran investasi akan dilaksanakan pada triwulan III dan pembuatan video profil investasi akan dilaksanakan pada triwulan IV.
3. Persentase ketersediaan profil investasi sektor perizinan berusaha (0 persen) dikarenakan adanya efisiensi anggaran, sehingga cetak buku profil investasi sektor perizinan berusaha yang semula akan dilaksanakan per triwulan, menjadi dilaksanakan per semester (bulan Juni dan Desember).

2.2.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 2 Program dengan 2 indikator. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 21
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100	80	80	T	DISPARPORA
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pramuka Tingkat kabupaten yang di Bina	%	100	100	100	0	0	SR	DISPARPORA

Masih terdapat 1 indikator program pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga dengan status Sangat Rendah, yaitu pramuka tingkat Kabupaten yang di bina (0 persen), hal ini dikarenakan kegiatan Pramuka tahun 2025 dilaksanakan pada triwulan II.

2.2.2.14. Statistik

Penyelenggaraan urusan Statistik di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 1 Program dengan 1 indikator. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Statistik sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 22
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	% OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan daerah	%	100	100	100	100	100	ST	DISKOMINFO

2.2.2.15. Persandian

Penyelenggaraan urusan Persandian di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 1 Program dengan 1 indikator. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Persandian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 23
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Indeks KAMI	1,3	1,02	3	3	294,12	ST	DISKOMINFO

2.2.2.16. Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan Kebudayaan di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 4 Program dengan 4 indikator. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Kebudayaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 24
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengembangan Kebudayaan	% Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	%	31,25	31,25	25	25	80	T	DINAS P DAN K
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	% Kesenian Tradisional yang dibina.	%	52,9	50	54,54	50	100	ST	DINAS P DAN K
Program Pembinaan Sejarah	% sejarah lokal yang dibina	%	13,33	12,22	11,11	10	81,83	T	DINAS P DAN K
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	% Cagar Budaya yang teregistrasi	%	27,56	27	26,83	27	100	ST	DINAS P DAN K

2.2.2.17. Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan Perpustakaan di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 2 Program dengan 2 indikator. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Perpustakaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 25
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk	%	4,15	9,98	58,2	20,78	208,21	ST	DINAS ARPUS
Program Pelestarian Koleksi Nasional	% koleksi nasional dan naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	%	33,33	25	16,67	0	0	SR	DINAS ARPUS

Masih terdapat 1 indikator program pada Urusan Perpustakaan dengan status Sangat Rendah, yaitu Persentase koleksi nasional dan naskah kuno milik daerah yang dilestarikan, hal ini dikarenakan kegiatan dilaksanakan pada triwulan II.

2.2.2.18. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan Kearsipan di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 2 Program dengan 2 indikator. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Kearsipan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 26
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKP S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	%	75,35	75,34	75,97	76,29	101,26	ST	DINAS ARPUS
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	% Jumlah Arsip yang dilindungi dan diselamatkan	%	65	50	41,94	0	0	SR	DINAS ARPUS

Masih terdapat 1 indikator program pada Urusan Kearsipan dengan status Sangat Rendah, yaitu Persentase Jumlah Arsip yang dilindungi dan diselamatkan (0 persen), hal ini karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III.

2.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan
2.2.3.1. Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 4 Program dengan 4 indikator. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Perikanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 2. 27
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perikanan s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKP S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	100	80	80	80	100	ST	DINAS PERIKANAN

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	100	80	78	78	97,5	ST	DINAS PERIKANAN
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Cakupan kelompok masyarakat pengawas aktif	%	100	80,65	61,29	61,29	75,99	S	DINAS PERIKANAN
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	100	77,78	55,56	55,56	71,43	S	DINAS PERIKANAN

2.2.3.2. Pariwisata

Penyelenggaraan urusan Pariwisata di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 4 Program dengan 4 indikator. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Pariwisata sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 28
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	% peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	40	10	6	0	0	SR	DISPARPORA
Program Pemasaran Pariwisata	% obyek wisata yang dipromosikan	%	100	24	24	0	0	SR	DISPARPORA
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Presentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan	%	100	25	25	0	0	SR	DISPARPORA
Program pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif semua 17 Subsektor yang di kembangkan	%	100	33,33	34	0	0	SR	DISPARPORA

Masih terdapat indikator program pada Urusan Pariwisata dengan status Sangat Rendah, yaitu :

1. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota (0 persen), karena perhitungan indikator tersebut pada akhir tahun.
2. Persentase obyek wisata yang dipromosikan (0 persen), Presentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan (0 persen), Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif semua 17 Subsektor yang di kembangkan (0 persen), hal ini karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II.

2.2.3.3. Pertanian

Penyelenggaraan urusan Pertanian di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 5 Program dengan 6 indikator. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Pertanian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 29
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Tanaman Pangan	Ton	4.037.934	1.010.489	891.739	203.342	20,12	SR	DISPERTAN
	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	285.103	71.967	187.521,47	17.991,7	24,99	SR	DISPERTAN
	Populasi ternak	Ton	9.166.151	9.075.397	9.060.766	4.248.313	46,81	SR	DISPERTAN
	Produksi Komoditas Perkebunan	Ton	249.467,20	62.495,80	125.357,62	16.123,71	25,80	SR	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	% Luas pelayanan Jaringan Irigasi	%	10	9,8	10,45	0	0	SR	DISPERTAN
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	% Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	25	24,9	24,5	6	24,09	SR	DISPERTAN

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Bencana Pertanian yang Tertangani	%	100	100	100	0	0	SR	DISPERTAN
Program Penyuluhan Pertanian	% Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	8	7,8	9,34	0,1	1,28	SR	DISPERTAN

Masih terdapat indikator program pada Urusan Pertanian dengan status Sangat Rendah, yaitu :

1. Persentase luas pelayanan jaringan irigasi (0 persen), disebabkan kegiatan pembangunan prasarana pertanian yang terbatas dan baru dimulai pada triwulan II. Terkait dengan hal tersebut upaya yang perlu dilakukan adalah dengan percepatan pelaksanaan kegiatan terkait pembangunan jaringan irigasi tersier usaha tani.
2. Prosentase Persentase Bencana Pertanian yang Tertangani (0 persen), karena belum adanya laporan bencana pertanian sehingga belum ada penanganan bencana.

2.2.3.4. Perdagangan

Penyelenggaraan urusan Perdagangan di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 5 Program dengan 6 indikator. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Perdagangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 30
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	% kinerja realisasi pupuk	%	55,55	54	62,71	0,08	0,15	SR	DPKUKM

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	% ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok	%	100	100	100	25	25	SR	DPKUKM
Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor	%	6	4	3,6	3,6	90	ST	DPKUKM
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	% alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), yang ditera/ tera ulang dalam tahun berjalan	%	56	100	100	0,47	0,47	SR	DPKUKM
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	0,45	0,43	0,38	0,38	88,37	T	DPKUKM
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	27,59	25,26	25,26	25	98,97	ST	DPKUKM

2.2.3.5. Perindustrian

Penyelenggaraan urusan Perindustrian di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 4 Program dengan 5 indikator. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Perindustrian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 31
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Hubungan Industrial	% perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	45	40	37,71	37,71	94,275	ST	DISNAKERIN
	% perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100	100	100	0	0	SR	DISNAKERIN
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	% sentra industri terbina	%	100	100	100	0	0	SR	DISNAKERIN

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	% jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	2,94	2,64	2,355	0	0	SR	DISNAKERIN
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	77,5	95	95	0	0	SR	DISNAKERIN

Masih terdapat indikator program pada Urusan Perindustrian dengan status Sangat Rendah, yaitu :

1. Persentase perselisihan hubungan industrial melalui mediasi (0 persen), karena tidak terdapat perselisihan yang didaftarkan untuk mediasi pada triwulan I.
2. Persentase sentra industri terbina (0 persen), Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (0 persen), dan Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (0 persen), hal ini karena kegiatan akan dimulai pada triwulan II.

2.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.2.4.1. Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Daerah di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 3 Program dengan 10 indikator. Hasil Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 32
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Sekretariat Daerah s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKP S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang terlayani sesuai standar.	%	100	100	100	25	25	SR	SETDA
	Persentase pemenuhan dokumen penataan organisasi.	%	100	100	100	25	25	SR	SETDA
	Persentase pelayanan pejabat sesuai kebutuhan	%	100	100	100	25	25	SR	SETDA
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	% koordinasi bidang pemerintahan	%	100	100	100	25	25	SR	SETDA
	% koordinasi bidang hukum sesuai kebutuhan	%	100	100	100	25	25	SR	SETDA
	% koordinasi bidang kesra	%	100	100	100	25	25	SR	SETDA
	Jumlah naskah kerjasama yang diterbitkan	Dokumen	180	50	80	2	4	SR	SETDA
Program Perekonomian dan Pembangunan	% penyerapan APBD	%	95	94,75	96,43	17,37	18,33	SR	SETDA
	% koordinasi bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	34	34	SR	SETDA
	Cakupan tingkat keberhasilan e-Tendering	%	100	100	100	25	25	SR	SETDA

2.2.4.2. Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat DPRD di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 2 Program dengan 2 indikator. Hasil Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 33
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Sekretariat DPRD s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban fasilitasi terhadap DPRD yang terselesaikan sesuai SOP	%	100	100	100	25	25	SR	SETWAN
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	% fasilitasi rapat-rapat tepat jadwal	%	100	100	100	25	25	SR	SETWAN

2.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.2.5.1. Perencanaan

Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 2 Program dengan 4 indikator. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Perencanaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 34
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Perencanaan s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	% Pencapaian Realisasi Target Program Tahunan	%	81,73	93	98,79	43,59	46,87	SR	BAPPEDA
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	% realisasi indikator OPD dibawah rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	81	80	100	52,5	65,63	R	BAPPEDA

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	% realisasi Indikator OPD dibawah rumpun Perekonomian	%	83	82	98,33	21,74	26,51	SR	BAPPEDA
	% Realisasi Indikator OPD dibawah rumpun Infrastruktur dan Kewilayahan	%	83	82	94,59	41,38	50,46	SR	BAPPEDA

2.2.5.2. Keuangan

Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 3 Program dengan 7 indikator. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 35
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Keuangan s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditure)	%	66,11	64,05	68,4	85,14	132,93	ST	BPKAD
	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	%	-0,09	-0,087	-0,032	-0,867	-796,55	SR	BPKAD
	% Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	ST	BPKAD
	Persentase penyaluran dana transfer ke desa	%	100	100	100	20,27	20,27	SR	BPKAD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	Ya = 1 Tidak = 2	1	1	1	0	0,00	SR	BPKAD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dan APBD	%	0,053	0,053	0,055	-0,85	14,35	SR	BAPPENDA
	% Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	%	7,8	11,4	23,1	-33,38	-292,81	SR	BAPPENDA

Masih terdapat 1 indikator program pada Urusan Keuangan dengan realisasi 0 persen yaitu Manajemen Aset disebabkan karena manajemen aset belum dilakukan pada triwulan I.

2.2.5.3. Kepegawaian

Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 1 Program dengan 4 indikator. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Kepegawaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 36
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Kepegawaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Kepegawaian Daerah	% terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN	%	59,19	63,38	60,55	31,84	50,24	SR	BKPSDM
	% Penempatan ASN sesuai Kompetensi	%	99,49	99,32	97,77	99,86	100,54	ST	BKPSDM
	% kepatuhan ASN terhadap peraturan perundangan dibidang kepegawaian	%	99,921	99,92	99,95	99,98	100,06	ST	BKPSDM
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	28,74	42,89	36,36	57,74	134,62	ST	BKPSDM

2.2.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 1 Program dengan 1 indikator. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 37
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	% Kesesuaian Kompetensi ASN dengan Persyaratan / Standar Jabatan	%	58,06	56,55	56,58	57,38	101,47	ST	BKPSDM

2.2.5.5. Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 1 Program dengan 2 indikator. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 38
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	% Riset Daerah yang ditindaklanjuti	%	45	40	35,1	0	0	SR	BAPPEDA
	% Jumlah Inovasi Daerah yang ditindaklanjuti	%	91	90	95,62	0	0	SR	BAPPEDA

Masih terdapat indikator program pada Urusan Penelitian dan Pengembangan dengan status Sangat Rendah, kinerja inovasi sudah berjalan mulai triwulan 1 dalam kegiatan Krenova dan LINDA, namun tindak lanjut kinerja baru dimulai triwulan 2. Pada triwulan I, capaian masih 0 persen disebabkan belum dilaksanakannya kegiatan-kegiatan utama yang mendukung pencapaian indikator tersebut, salah satunya riset kajian mandiri, pendampingan rintisan desa inovasi, penyusunan jurnal

inovasi daerah. Kegiatan tersebut baru dijadwalkan untuk dilaksanakan pada triwulan berikutnya, sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Dengan demikian, meskipun belum terdapat realisasi pada triwulan I, hal ini bukan disebabkan oleh hambatan pelaksanaan, melainkan karena kegiatan memang belum direncanakan pada periode tersebut

2.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.2.6.1. Inspektorat Daerah

Penyelenggaraan unsur pengawasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah di Kabupaten Cilacap mempunyai 2 Program dengan 4 indikator. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pengawasan Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 39

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Daerah s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPd S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penyelenggaraan Pengawasan	% Perangkat Daerah dengan Nilai Kinerja Baik	%	100	80	80	40	50	SR	INSPEKTORAT
	% Pemerintahan Desa dengan Nilai Kinerja Baik.	%	100	80	60	40	50	SR	INSPEKTORAT
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	% Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	0	0	SR	INSPEKTORAT
	% komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi	%	100	88	83,33	0	0	SR	INSPEKTORAT

Masih terdapat 2 indikator program pada Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Daerah dengan realisasi 0 persen yaitu Persentase Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi, karena kegiatan mulai dilaksanakan pada triwulan III.

2.2.7. Unsur Kewilayahan
2.2.7.1. Kecamatan

Penyelenggaraan unsur kewilayahan Kecamatan di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 5 Program dengan 5 indikator. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 40
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	%	100	100	100	0	0	SR	KECAMATAN
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	%	100	100	100	100	100	ST	KECAMATAN
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban	%	100	100	100	25	25	SR	KECAMATAN
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Forkompincam	%	100	100	100	25	25	SR	KECAMATAN
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	ST	KECAMATAN

Masih terdapat 1 indikator program pada Penyelenggaraan Kecamatan dengan realisasi 0 persen yaitu Persentase implementasi pelimpahan kewenangan karena belum ada kegiatan terkait pelimpahan kewenangan dari Perangkat Daerah.

2.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

2.2.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan unsur pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui 5 Program dengan 5 indikator. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2. 41
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik s.d Triwulan I Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan kecamatan yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela Negara	Kecamatan	24	24	24	0	0	SR	KESBANGPOL
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	% pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu	%	70	70	72,23	72,23	103,18	ST	KESBANGPOL
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	% LSM/ormas yang dibina	%	100	75	50	0	0,00	SR	KESBANGPOL

URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET AKHIR RPD (2026)	TARGET 2025	REALISASI S/D 2024	REALISASI TRIWULAN I 2025	% CAPAIAN RKPD S/D TRIWULAN I 2025	STATUS CAPAIAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kecamatan	24	24	24	3	12,5	SR	KESBANGPOL
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial	Kecamatan	24	24	24	0	0	SR	KESBANGPOL

Masih terdapat indikator program Penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan realisasi 0 persen, yaitu Cakupan kecamatan yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela Negara, Persentase LSM/ormas yang dibina, dan Cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial, hal ini karena kegiatan akan dimulai pada triwulan II.

2.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1 Pendidikan

- a. Masih tingginya angka putus sekolah jenjang SD/MI (0,03%) dan jenjang SMP/MTs (0,16%) yang ditandai dengan rendahnya rata-rata lama sekolah dan masih ditemukannya anak usia sekolah yang tidak sekolah yang berasal dari pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs).
- b. Kondisi sarana dan prasarana sesuai SNP masih rendah untuk PAUD (69,31%), SD/MI (36,79%) dan SMP/MTs (50%).
- c. Masih rendahnya persentase guru pada jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP dengan kualifikasi S1/D IV (66,7%)
- d. Masih rendahnya indeks distribusi guru SD (0,34%) dan indeks distribusi guru SMP (0,64%), serta sebaran guru di Kabupaten Cilacap masih kurang merata.

2 Kesehatan

- a. Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan kematian balita.
- b. Masih ditemukannya masyarakat dengan gizi rendah dan gizi kurang, serta masih adanya perbedaan metode pengukuran gizi masyarakat.
- c. Belum optimalnya upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).
- d. Masih rendahnya akses sanitasi tingkat Desa/Kelurahan (STBM).
- e. Belum semua masyarakat Kabupaten Cilacap ikut dalam kepersertaan Jaminan Kesehatan.
- f. Belum semua Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi baru lahir, warga negara usia produktif, penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas, warga negara dengan gangguan jiwa berat, warga negara terduga tuberkulosis, dan Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) mendapatkan pelayanan kesehatan.
- g. Masih kurangnya Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan.
- h. Masih kurangnya rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum optimalnya penanganan jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana pendukungnya.
- b. Belum optimalnya kinerja pelayanan air minum dan air limbah.
- c. Belum optimalnya fungsi drainase saluran pembuang di kawasan perkotaan.
- d. Belum optimalnya fungsi dan pengelolaan saluran irigasi sekunder.
- e. Masih rendahnya capaian kinerja pengelolaan LPJU dan penerangan fasilitas umum.
- f. Belum optimalnya penanganan sampah.
- g. Masih rendahnya tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.

4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Belum seluruh Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mendapatkan penanganan menjadi Rumah Layak Huni (RLH).
- b. Belum semua wilayah permukiman memiliki Prasarana Sarana Utilitas (PSU).
- c. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh.

5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Pelindungan Masyarakat

- a. Belum optimalnya upaya pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat.
- b. Belum semua Warga Negara memperoleh layanan informasi rawan bencana.

6 Sosial

- a. Belum seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mendapat penanganan kesejahteraan sosial.
- b. Masih adanya desa/kelurahan yang tidak melakukan verifikasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- c. Belum optimalnya pendampingan bagi Penerima Manfaat (PM) dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- d. Masih kurangnya pembinaan terhadap TKSK, PSM, Orsos dan LKS.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1 Tenaga Kerja

- a. Belum semua tenaga kerja ditempatkan sesuai mekanisme layanan Antar Kerja (50,65 persen);

- b. Masih rendahnya jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi (31,69 persen)
- c. Belum optimalnya kerjasama Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan dunia usaha dalam melakukan fasilitasi dan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk ikut program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Masih terjadinya kesenjangan pembangunan responsif gender.
- b. Masih adanya kasus kekerasan pada anak dan perempuan.
- c. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan.
- d. Masih diperlukannya pembentukan Forum Anak, terutama ditingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

3 Pangan

- a. Belum optimalnya capaian pola pangan harapan.
- b. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan.
- c. Belum optimalnya cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- d. Masih adanya daerah yang berpotensi rawan pangan (rawan pangan transien dan kronis).
- e. Masih rendahnya Produksi Komoditas Perkebunan (Bidang Perkebunan).

4 Pertanahan

- a. Masih rendahnya capaian kinerja pengadaan tanah untuk pembangunan/kepentingan umum.
- b. Masih ditemukannya kasus konflik pertanahan.
- c. Belum optimalnya penataan bidang tanah yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- d. Masih rendahnya Pembinaan Tertib Administrasi Pertanahan.
- e. Masih rendahnya Penyelesaian Redistribusi Tanah.
- f. Masih rendahnya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
- g. Masih rendahnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

5 Lingkungan Hidup

- a. Masih rendahnya pengelolaan persampahan dan semakin tingginya potensi timbulan sampah setiap tahun.
- b. Belum optimalnya akses terhadap informasi lingkungan hidup.
- c. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan upaya pengurangan kerusakan lingkungan hidup.

- d. Masih rendahnya pengurangan sampah.
- e. Masih kurangnya ketersediaan dokumen lingkungan hidup.
- f. Masih kurangnya Kegiatan/Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3.
- g. Masih rendahnya tutupan Lahan pendukung Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Pertambahan wajib KTP pemula yang belum melakukan perekaman KTP elektronik dan tinggal di luar wilayah Kabupaten Cilacap.
- b. Masih banyak peristiwa kematian yang belum dicatatkan akta kematiannya.
- c. Persetujuan ijin akses untuk pemanfaatan data kependudukan sampai dengan saat ini belum diatur jangka waktu penyelesaian mulai dari permohonan diterima sampai dengan diterbitkannya ijin sehingga jangka waktu penyelesaian PKS masih bergantung pada pemberian ijin hak akses oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri.

7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Masih rendahnya akuntabilitas pengelolaan APBDes yang bersumber dari Dana Desa.
- b. Belum optimalnya peran lembaga pos pelayanan teknologi tepat guna dalam mendayagunakan TTG.
- c. Belum semua BUMDesa/BUMDesa Bersama Bersertifikat Badan Hukum.
- d. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur/sarana prasarana dasar perdesaan.
- e. Belum dipahaminya tahapan tata cara kerjasama desa baik kerjasama desa dengan pihak ketiga, kerjasama antar desa dan pembangunan kawasan perdesaan oleh pemerintah desa.

8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya upaya Pemerintah Daerah untuk mengendalikan jumlah penduduk.
- b. Masih tingginya angka Un Meet Need.
- c. Masih rendahnya jumlah peserta KB/CPR.

9 Perhubungan

- a. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan.
- b. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan.
- c. Belum optimalnya penyediaan pelayanan angkutan umum.
- d. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum.

- e. Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- f. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
- g. Masih rendahnya uji KIR Kendaraan Bermotor Wajib Uji.

10 Komunikasi dan Informatika

- a. Masih lemahnya manajemen SPBE, terutama dalam hal infrastruktur dan keamanan informasi. Jaringan internet (target 52 OPD) baru 32 OPD yang terlayani fiber optik (disediakan Diskominfo), hal ini pengaruh terhadap keamanan informasi.
- b. Masih ada wilayah yang *blank spot* akses internet atau jaringan seluler.

11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Belum optimalnya pembinaan/fasilitasi/pengawasan kelembagaan perkoperasian.
- b. Belum optimalnya pemberdayaan usaha mikro, ditandai dengan belum optimalnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil.
- c. Belum optimalnya sarana promosi produk UMKM.
- d. Belum optimalnya fasilitasi perijinan terhadap UMKM.
- e. Belum optimalnya pertumbuhan UMKM.

12 Penanaman Modal

- a. Meningkatnya nilai investasi tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja, mengingat penanaman modal lebih banyak terdapat disektor industri pengolahan dan industri besar yang padat teknologi.
- b. Investasi yang masuk di Kabupaten Cilacap, belum sesuai dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan keterampilan sumber daya manusia (SDM).
- c. Belum optimalnya promosi investasi untuk menarik investor.
- d. Masih rendahnya kebijakan Penanaman Modal yang diterbitkan.
- e. Masih rendahnya promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang diikuti.

13 Kepemudaan dan Olahraga

- a. Kurangnya pembinaan organisasi kepemudaan agar menjadi organisasi kepemudaan yang aktif.
- b. Kurangnya pembinaan atlet-atlet olahraga berprestasi.
- c. Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengembangan olahraga.
- d. Masih rendahnya pramuka tingkat Kabupaten yang di bina.

- e. Masih rendahnya Wirausaha Muda.

14 Statistik

- a. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah. Jenis data masih sangat kurang (buku data dasar Kabupaten, Data Dasar Kecamatan, dan PDRB).
- b. Belum tersedianya data real time dari masing-masing sektor.
- c. Aplikasi SATU DATA belum disosialisaikan secara maksimal untuk dimanfaatkan perangkat daerah secara optimal.

15 Persandian

- a. Belum maksimalnya penanganan pengamanan informasi (rendahnya Indeks KAMI dan Indeks Manajemen SPBE).
- b. Belum adanya kerjasama dengan TNI POLRI yang ada di daerah untuk memanfaatkan tenaga ahli siber.

16 Kebudayaan

- a. Masih perlunya pembinaan, perlindungan dan pelestarian peninggalan sejarah benda purbakala/situs/benda cagar budaya.
- b. Belum optimalnya promosi seni budaya daerah melalui berbagai festival/pentas seni yang sementara masih menggunakan media sosial dan website karena keterbatasan anggaran.
- c. Belum adanya verifikator, petugas juru pelihara serta terbatasnya tenaga ahli cagar budaya yang kompeten sehingga banyak cagar budaya belum teridentifikasi dan memperoleh perlindungan hukum.
- d. Belum adanya lembaga dan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam memahami teks dan perawatan naskah terkait Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).
- e. Pada seni tradisi terdapat stagnasi pemain dan tidak adanya gedung kesenian yang representatif untuk penyelenggaraan kegiatan seni.

17 Perpustakaan

- a. Masih kurangnya budaya literasi masyarakat.
- b. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan Daerah dan Desa.
- c. Belum optimalnya pelestarian naskah kuno milik Daerah.
- d. Masih rendahnya rasio pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat.

18 Kearsipan

- a. Gedung Depot Arsip sudah semakin penuh dan sarana penyimpanan dan preservasi arsip sangat kurang.

- b. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas.
- c. Penyelenggaraan kearsipan belum sepenuhnya sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan.
- d. Masih rendahnya Jumlah Arsip yang dilindungi dan diselamatkan.

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya tingkat produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- b. Belum optimalnya fasilitasi perijinan bagi kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan.
- c. Belum optimalnya pembinaan kelompok nelayan dan kelompok budidaya ikan.

2. Pariwisata

- a. Belum optimalnya pemerintah dalam melakukan pembinaan/fasilitasi obyek wisata.
- b. Belum optimalnya Pemerintah Daerah dalam menjalin kerjasama dengan para pelaku wisata dan investor pariwisata.
- c. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata dan penyelenggaraan event pariwisata melalui upaya promosi/pemasaran.
- d. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana pariwisata.

3. Pertanian

- a. Produktivitas dan produksi tanaman pangan tidak optimal dan produksinya menurun, disebabkan terjadinya fenomena elnino. Fenomena elnino dengan curah hujan yang rendah menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekeringan. Kondisi kering ini menyebabkan lahan tidak dapat ditanami komoditas pangan utama (padi dan jagung), tetapi petani masih bisa mengupayakan beralih ke komoditas palawija yaitu kedelai dan kacang hijau.
- b. Kurangnya sarana pertanian yaitu bibit/benih unggul, pupuk dan pestisida serta alat dan mesin (alsintan), serta prasarana pendukung yaitu jalan usaha tani dan irigasi yang dibutuhkan untuk kelancaran distribusi air. Ketersediaan dan akses terkait pupuk besubsidi dan benih/bibit unggul akan mempengaruhi hasil produksi. Sementara itu kondisi prasarana jaringan irigasi tersier juga perlu ditingkatkan, mengingat saat ini 78,57 persen masih berupa konstruksi alam/ tanah.

- c. Masih rendahnya minat petani untuk mengajukan pinjaman modal usaha melalui lembaga keuangan/ perbankan karena kekhawatiran terhadap tingkat suku bunga pinjaman dan hasil pertanian di akhir masa panen yang tidak sesuai harapan, serta adanya persyaratan berupa jaminan/ agunan.
- d. Masih rendahnya Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular.
- e. Masih rendahnya Luas pelayanan Jaringan Irigasi.

4. Perdagangan

- a. Belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat/pasar tradisional.
- b. Belum optimalnya penataan dan pembinaan pelaku usaha/pedagang mikro dan kecil.
- c. Belum optimalnya pengembangan produk-produk unggulan daerah yang dapat diterima oleh pasar internasional (ekspor) yang ditandai dengan minimnya jumlah kerjasama perdagangan internasional.
- d. Belum memadainya sarana distribusi milik Pemerintah Daerah.
- e. Masih kurangnya alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera ulang dalam tahun berjalan.
- f. Masih rendahnya Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal.

5. Perindustrian

- a. Belum optimalnya upaya pembinaan terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan pengembangan usaha dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses produksi guna meningkatkan nilai tambah.
- b. Belum optimalnya peningkatan *One Village One Product* (OVOP).

2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1 Sekretariat Daerah

- a. Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan pembangunan dan tertib administrasi kewilayahan. Seperti sering tidak sesuainya antara target pelaksanaan kegiatan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sehingga sering dijumpai deviasi realisasi di sebagian perangkat daerah yang juga mempengaruhi capaian kegiatan secara keseluruhan.
- b. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.

- c. Belum optimalnya fasilitasi pelayanan dan kinerja bidang kesejahteraan masyarakat, antara lain keterbatasan jumlah SDM dalam pelayanan bidang kesejahteraan masyarakat menyebabkan waktu penyelesaian dalam pelayanannya menjadi lebih lama.

2 Sekretariat DPRD

- a. Belum optimalnya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
- b. Belum optimalnya penetapan Peraturan Daerah (Perda) sesuai Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah).
- c. Latar belakang pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbeda-beda di Sekretariat DPRD menyebabkan tugas terhadap pelayanan terhadap kegiatan Dewan belum optimal. Kemajuan teknologi yang pesat khususnya di bidang informatika khususnya aplikasi keuangan dan kepegawaian mendorong semua pegawai untuk lebih menguasai kemampuan digital.

2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1 Perencanaan

- a. Belum optimalnya integrasi perencanaan pembangunan, penganggaran dan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah karena adanya perubahan sistem yang baru pada SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).
- b. Belum optimalnya usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD.

2 Keuangan

- a. Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan objek dan kewajiban pajaknya secara objektif baik PBB-P2, BPHTB dan Pajak Daerah lain dan penataan basis data dan pemanfaatan IT untuk mendukung kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah.
- c. Belum optimalnya peningkatan kapasitas fiskal daerah, dilihat dari masih tingginya kontribusi pendapatan dari dana transfer dalam APBD.
- d. Belum optimalnya pengelolaan barang dan aset milik daerah secara akuntabel. SDM pengurus barang belum sepenuhnya paham dengan praktik dan tata cara penyusunan laporan BMD pada setiap akhir tahun.

- e. Aplikasi SIMDA BMD belum mendukung sepenuhnya sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, sehingga untuk memenuhi permintaan pelaporan pertriwulan dan semester masih secara manual.
- f. Belum optimalnya pelaksanaan rekonsiliasi BMD.
- g. Masih rendahnya Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD.
- h. Masih kurangnya Persentase penyaluran dana transfer ke desa.

3 Kepegawaian

- a. Belum semua pegawai ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- b. Masih dijumpai ASN yang belum mengetahui peraturan perundang-undangan tentang Disiplin ASN;
- c. Belum semua pegawai pegawai mengikuti *assessment* dalam rangka penilaian kompetensi.

4 Pendidikan dan Pelatihan

- a. Belum semua ASN memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan/ pengembangan kompetensi;
- b. Masih banyak pejabat struktural yang belum mengikuti pendidikan penjenjangan struktural.

5 Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum optimalnya upaya pembinaan dan fasilitasi kerjasama jaringan penelitian (Jarlit).
- b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil inovasi daerah dan hasil litbang.
- c. Belum optimalnya upaya pembinaan dan fasilitasi pengembangan inovasi daerah pada masing-masing perangkat daerah.
- d. Masih rendahnya jumlah inovasi daerah yang ditindaklanjuti.

2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Daerah

- a. Belum optimalnya fungsi dan kinerja pengawasan dibidang pemerintahan, kepegawaian, pembangunan dan sosial kemasyarakatan karena keterbatasan jumlah APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah).
- b. Belum optimalnya nilai maturitas SPIP Pemerintah Daerah dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB).

2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Belum Optimalnya Pembinaan dan Pendidikan Politik Masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.
- b. Belum Optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) dan Meminimalisir kasus SARA, Permasalahan Ekonomi serta Budaya.
- c. Melemahnya pemahaman dan implementasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dikalangan Generasi Muda seiring Pengaruh Globalisasi dan Kebebasan dalam ruang Demokrasi.
- d. Kecenderungan peningkatan konflik sosial dengan memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan lainnya untuk memecah belah keutuhan Bangsa.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 didasarkan atas berbagai asumsi antara lain : asumsi terkait capaian indikator makro ekonomi baik nasional, regional maupun daerah, dan berbagai asumsi serta estimasi/proyeksi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil maupun Bantuan Provinsi, di samping juga asumsi terkait dengan penggunaan anggaran untuk memenuhi belanja daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2025.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja pembangunan. Keberadaan kilang minyak sangat berpengaruh terhadap PDRB Cilacap, maka dalam penghitungan PDRB dibedakan menjadi PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas. Dilihat PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Cilacap dengan Migas tahun 2020-2024, laju pertumbuhan yang cenderung positif, pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 PDRB ADHB Kabupaten Cilacap sebesar Rp104.542.660 juta meningkat menjadi Rp109.653.598 juta pada tahun 2021 dengan indeks perkembangan 4,89 persen. Adapun tahun 2022 meningkat menjadi Rp121.021.798 juta dengan indeks perkembangan 10,37 persen, tahun 2023 meningkat menjadi Rp132.442.290 juta dengan indeks perkembangan 9,44 persen dan tahun 2024 meningkat kembali menjadi Rp135.990.850 juta dengan indeks perkembangan 2,68 persen. Sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2020 sebesar Rp90.011.584 juta meningkat menjadi Rp91.944.588 juta pada tahun 2021 dengan indeks perkembangan 2,15 persen. Adapun tahun 2022 meningkat menjadi Rp96.677.843 juta dengan indeks perkembangan 5,15

persen, tahun 2023 meningkat menjadi Rp101.839.741 juta dengan indeks perkembangan 5,34 persen dan tahun 2024 meningkat kembali menjadi Rp104.540.670 juta dengan indeks perkembangan 2,65 persen.

Perkembangan PDRB Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 5 (lima) tahun selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Cilacap
Dengan Migas Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah (juta rupiah)	Indeks Perkembangan (%)	Jumlah (juta rupiah)	Indeks Perkembangan (%)
2020	104.542.660	-8,39	90.011.584	-10,28
2021	109.653.598	4,89	91.944.588	2,15
2022	121.021.798	10,37	96.677.843	5,15
2023	132.442.290	9,44	101.839.741	5,34
2024	135.990.850	2,68	104.540.670	2,65

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2025

Sama seperti PDRB dengan Migas, PDRB Kabupaten Cilacap ADHB dan ADHK tanpa migas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, walau demikian pada tahun 2020 ada sedikit kenaikan untuk PDRB ADHB dan sedikit penurunan untuk PDRB ADHK. Pada tahun 2020 PDRB ADHB Kabupaten Cilacap sebesar Rp65.991.354 juta meningkat menjadi Rp69.826.769 juta pada tahun 2021 dengan indeks perkembangan 5,81 persen. Adapun tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp77.148.500 juta dengan indeks perkembangan 10,49 persen dan kembali terjadi peningkatan di tahun 2023 menjadi Rp85.033.720 juta dengan indeks perkembangan 10,22 persen. Tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi Rp91.770.280 juta dengan indeks perkembangan 7,92 persen. Sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2020 sebesar Rp46.849.019 juta mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan indeks -1,36 persen, akan tetapi kembali meningkat menjadi Rp48.435.235 juta pada tahun 2021 dengan indeks perkembangan 3,39 persen. Adapun tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp51.231.900 juta dengan indeks perkembangan 5,77 persen dan meningkat kembali pada tahun 2023 mencapai Rp54.194.480 juta dengan indeks perkembangan 5,78 persen. Tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi Rp56.909.970 juta dengan indeks perkembangan 5,01 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Cilacap
Tanpa Migas Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah	Indeks Perkembangan (%)	Jumlah	Indeks Perkembangan (%)
	(juta rupiah)		(juta rupiah)	
2020	65.991.354	0,29	46.849.019	-1,36
2021	69.826.769	5,81	48.435.235	3,39
2022	77.148.500	10,49	51.231.900	5,77
2023	85.033.720	10,22	54.194.480	5,78
2024	91.770.280	7,92	56.909.970	5,01

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2025

Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas dan tanpa migas di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024), pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas Kabupaten Cilacap sangat dipengaruhi oleh produksi industri minyak, dimana kontribusi industri minyak terhadap PDRB secara total mempunyai andil yang cukup besar. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap dengan migas sebesar -10,28 persen, mulai tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mulai mengalami peningkatan sebesar 2,15 persen. Adapun tahun 2022 dan 2023 meningkat kembali menjadi 5,15 persen dan 5,34 persen. Sedangkan tahun 2024 pertumbuhan ekonomi tidak setinggi tahun sebelumnya sebesar 2,65 persen.

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi tanpa migas, pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi mencapai -1,36 persen. Peningkatan juga dialami mulai tahun 2021 sebesar 3,39 persen. Sedangkan tahun 2022 dan 2023 laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas mengalami peningkatan kembali menjadi 5,77 persen dan 5,76 persen. Sedangkan tahun 2024 mencapai 5,01 persen.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

T a h u n	Dengan Migas (%)	Tanpa Migas (%)
2020	-10,28	-1,36
2021	2,15	3,39
2022	5,15	5,77
2023	5,34	5,78
2024	2,65	5,01

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2025

PDRB Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi dengan migas telah mengalami pemulihan dari - 10,28 persen pada tahun 2020 menjadi 2,15 persen pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan menjadi 5,15 persen dan 5,34 persen pada tahun 2022 dan tahun 2023. Adapun tahun 2024 pertumbuhan positif meski tidak

setinggi tahun sebelumnya yaitu 2,65 persen. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi dengan migas tertinggi terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,06 persen, dan terendah terjadi pada Industri Pengolahan sebesar 1,06 persen. Kontribusi terbesar PDRB berasal dari sektor Industri Pengolahan mencapai 55,46 persen. Peningkatan ini diikuti oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,58 persen dan Konstruksi sebesar 7,44 persen.

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024 Dengan Migas

Kategori/Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,08	-1,49	1,74	2,55	1,7
B	Pertambangan dan Penggalian	1,63	5,13	-2,74	2,03	3,79
C	Industri Pengolahan	-13,85	1,99	3,57	5,52	1,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,91	4,11	3,12	7,14	9,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,83	4,99	6,17	6,17	8,69
F	Konstruksi	-4,2	5,53	3,09	6,31	7,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,74	4,59	3,89	5,45	5,84
H	Transportasi dan Pergudangan	-29,89	2,4	89,11	6,17	3,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,45	6,1	11,28	11,41	11,06
J	Informasi dan Komunikasi	9,1	2,74	1,02	9,11	9,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,1	0,53	0,55	1,96	2,36
L	Real Estate	-0,07	0,71	5,17	6,89	6,46
M,N	Jasa Perusahaan	-6,65	1,78	6,32	5,05	8,58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,02	-0,44	1,16	2,35	8,81
P	Jasa Pendidikan	-0,31	0,16	1,99	3,64	7,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,1	0,44	2,81	1,56	5,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	-7,64	0,51	10,87	3,9	6,58
Pertumbuhan PDRB Kab. Cilacap		-10,28	2,15	5,15	5,34	2,65

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas menurun dari 5,78 persen pada tahun 2023 menjadi 5,01 persen pada tahun 2024. Tidak ada perbedaan pada lapangan usaha jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan migas, hanya perbedaan pada sektor Industri Pengolahan.

Tabel 3.5
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cilacap
Tahun 2020-2024 Tanpa Migas (persen)

Kategori/Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,08	-1,49	1,74	2,55	1,7
B	Pertambangan dan Penggalian	1,63	5,13	-2,74	2,03	3,79
C	Industri Pengolahan	1,83	5,33	1,19	7,4	4,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,91	4,11	3,12	7,14	9,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,83	4,99	6,17	6,17	8,69
F	Konstruksi	-4,2	5,53	3,09	6,31	7,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,74	4,59	3,89	5,45	5,84
H	Transportasi dan Pergudangan	-29,89	2,4	89,11	6,17	3,43

Kategori/Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,45	6,1	11,28	11,41	11,06
J	Informasi dan Komunikasi	9,1	2,74	1,02	9,11	9,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,1	0,53	0,55	1,96	2,36
L	Real Estate	-0,07	0,71	5,17	6,89	6,46
M,N	Jasa Perusahaan	-6,65	1,78	6,32	5,05	8,58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,02	-0,44	1,16	2,35	8,81
P	Jasa Pendidikan	-0,31	0,16	1,99	3,64	7,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,1	0,44	2,81	1,56	5,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	-7,64	0,51	10,87	3,9	6,58
Pertumbuhan PDRB Kab. Cilacap		-1,36	3,39	5,77	5,78	5,01

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2025

PDRB Per kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Cilacap menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun sejalan dengan tujuan ke-8 SDG’s yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.

PDRB Per kapita, dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukan kenaikan dari tahun ke tahun walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 mencapai 55.836,26 ribu rupiah untuk PDRB per kapita ADHB dan 46.818,73 ribu rupiah untuk PDRB per kapita ADHK. Adapun tahun 2024 mengalami peningkatan mencapai 67.077,17 ribu rupiah untuk PDRB per kapita ADHB dan 51.564,44 ribu rupiah untuk PDRB per kapita ADHK.

Tabel 3.6
PDRB Perkapita di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB per Kapita (Ribu Rp)		Pertumbuhan (persen)	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
2020	53.753,39	46.281,85	-19,04	-20,71
2021	55.836,26	46.818,73	3,87	1,16
2022	60.857,12	48.615,50	8,99	3,84
2023	65.962,93	50.721,32	8,39	4,33
2024	67.077,17	51.564,44	1,69	1,66

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2025

Inflasi

Perkembangan Laju Inflasi bulanan di tahun 2024, menunjukkan bahwa selama kurun waktu dua belas bulan laju inflasi di Kabupaten Cilacap cenderung mengalami fluktuasi. Di Kabupaten Cilacap terjadi beberapa kali inflasi yang cukup tinggi dari bulan-bulan lain pada tahun 2024, di bulan Maret sebesar 0,65 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran, yaitu pada kelompok kelompok makanan, minuman dan tembakau serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Penyebab utama terjadinya inflasi di Kota Cilacap adalah naiknya harga cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, bawang merah, dan gula pasir.

Sedangkan komoditas utama yang menahan laju inflasi di Kota Cilacap antara lain turunnya harga daging ayam ras, bensin, sabun cair/cuci piring, jeruk, dan ikan lele.

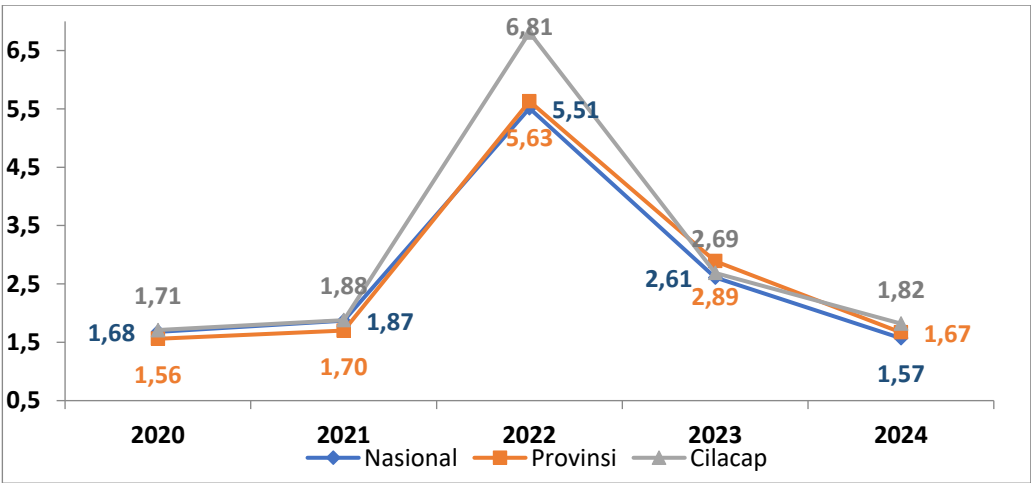
Tabel 3.7
Laju Inflasi Kabupaten Cilacap Dirinci Per Bulan
Tahun 2020-2024 (persen)

Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	-0,03	0,27	0,66	0,45	-0,01
Februari	0,49	0,12	0,07	0,27	0,51
Maret	0,06	0,03	1,19	0,19	0,65
April	0,05	0,05	1,68	0,28	0,08
Mei	0,29	0,25	0,59	0,22	-0,16
Juni	0,28	-0,25	0,71	0,05	-0,23
Juli	-0,17	0,06	0,35	0,02	-0,06
Agustus	-0,09	0,06	-0,55	0,04	-0,04
September	-0,03	-0,12	1,11	0,41	0,06
Oktober	0,12	0,23	0,01	0,12	0,2
November	0,39	0,36	0,2	0,42	0,3
Desember	0,35	0,82	0,59	0,18	0,52
Inflasi Tahun Kalender	1,71	1,88	6,81	2,69	1,82

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2025

Inflasi di tahun 2024 tercatat meningkat menjadi 1,82 persen, lebih rendah dari tahun 2023 yang tercatat sebesar 2,69 persen. Inflasi tahun kalender 2022 lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender 2021, jika diasumsikan tidak ada kondisi ekonomi yang berubah secara ekstrim.

Inflasi Kabupaten Cilacap dari tahun 2020-2024 menunjukkan capaian yang fluktuatif seperti halnya nasional dan provinsi. Lebih rinci dapat kita lihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2025

Gambar 3.1
Inflasi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2020-2024 (%)

Apabila dibandingkan perkembangan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dengan laju inflasi Kabupaten Cilacap hingga bulan Desember tahun 2024, laju Inflasi Kabupaten Cilacap berada diatas laju inflasi Nasional dan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah masing-masing sebesar 1,57 persen dan 1,67 persen.

Tabel 3.8
Laju Inflasi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
dirinci Menurut Bulan Tahun 2024 (persen)

Bulan	Cilacap	Jawa Tengah	Nasional
Januari	-0,01	-0,08	0,04
Februari	0,51	0,57	0,37
Maret	0,65	0,6	0,52
April	0,08	0,2	0,25
Mei	-0,16	-0,22	-0,03
Juni	-0,23	-0,28	-0,08
Juli	-0,06	-0,13	-0,18
Agustus	-0,04	-0,07	-0,03
September	0,06	0,05	-0,12
Oktober	0,2	0,19	0,08
November	0,3	0,26	0,3
Desember	0,52	0,57	0,44
Inflasi Tahun Kalender	1,82	1,67	1,57

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Selanjutnya sebagai salah satu kota industri dan daerah tujuan investasi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,2 – 6,0 persen dan inflasi 2,50 – 4,50. Namun demikian, seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi secara nasional, regional maupun daerah mengalami fluktuasi, sehingga masih terus diupayakan agar bisa mengalami dampak positif bagi pembangunan daerah.

Tabel 3.9
Indikator Ekonomi Kabupaten Cilacap Target RKPD Tahun 2024,
Target RKPD Tahun 2025 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Indikator	Target		
		RKPD 2024	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)			
	- Dengan Migas	2,5 - 3,0	5,40-6,10	2,7-3,0
	- Tanpa Migas	5,2 - 6,0	5,40-6,10	5,40-6,10
2.	Inflasi (persen)	2,50 – 4,50	2,50 – 4,50	2,50 – 4,50
3.	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Milyar Rupiah)	1.583,189	1.991,31	3.766,66
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	7,24	8,84-7,82	7,82-7,73
5.	Kemiskinan (persen)	10,33	10,14	10,66-10,14

Sumber : Bappeda Kab. Cilacap. 2025

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan RKPD yang akan berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non-APBD seperti APBN, hibah, swadaya masyarakat serta

kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Corporate Social Responsibility (CSR), Basnaz dan filantropi.

Kerangka pendanaan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025 secara keseluruhan sampai dengan triwulan I telah mengalami perubahan. Beberapa hal yang mempengaruhi perubahan tersebut antara lain adanya perubahan pendapatan asli daerah dan pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang berdampak pada kerangka pendanaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemanfaatan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 memuat kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penentuan kinerja pendapatan daerah diukur dengan membandingkan pertumbuhan pada masing-masing sumber pendapatan.

Tabel 3.10
Realisasai Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2025

No	URAIAN	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025*)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah	700.428.762.449	768.640.705.768	884.443.305.096	221.845.487.275
1.1	Pajak Daerah	280.277.331.102	296.270.228.744	362.088.365.068	83.428.526.573
1.2	Retribusi Daerah	19.813.134.112	19.684.990.112	344.865.875.423	95.686.902.313
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57.360.003.796	61.133.781.992	59.866.939.663	14.004.405.121
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	342.978.293.439	391.551.704.920	117.622.124.943	28.725.653.268
2	Pendapatan Transfer	2.563.412.247.062	2.684.312.641.684	2.953.373.887.666	462.118.298.700
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.286.284.520.504	2.404.202.119.337	2.660.745.994.168	462.118.298.700
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	277.127.726.558	280.110.522.347	292.627.893.498	0
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	29.291.129.832	23.559.328.200	4.754.039.000	0
Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)		3.293.132.139.343	3.476.512.675.652	3.842.571.231.762	683.963.785.975

*) Realisasi Triwulan 1

Pendapatan asli daerah relatif naik dari tahun ke tahun terutama pada Pendapatan BLUD. Kemudian belanja transfer meningkat pada tahun 2023

dan 2024 terkait dengan penambahan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan dalam negeri yang dihibahkan bidang sanitasi.

Pada Tahun 2025 proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Cilacap dalam RKPD Tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp 3.110.388.764.542,- yang bersumber dari PAD sebesar Rp 1.031.189.898.742,- Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.075.766.865.800,- dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 3.432.000.000,-. Selanjutnya pada APBD definitif Tahun 2025 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 3.827.886.125.032,- bersumber dari PAD sebesar Rp 1.029.147.158.032,-, Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.798.738.967.000,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 0,-. Kemudian pendapatan daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 3.784.401.342.190,- bersumber dari PAD sebesar Rp 1.059.021.128.634,-, Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.716.845.872.135,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 8.534.341.421,-.

Secara lengkap proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.11				
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025				
KODE	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
4	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.031.189.898.742	1.029.147.158.032	1.059.021.128.634
4.1.1	Pajak Daerah	504.117.000.000	490.419.979.000	490.672.000.000
4.1.2	Retribusi Daerah	372.555.738.138	378.332.875.570	390.569.270.908
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	61.650.000.000	61.650.000.000	60.207.808.888
4.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	92.867.160.604	98.744.303.462	117.572.048.838
4.2	Pendapatan Transfer	2.075.766.865.800	2.798.738.967.000	2.716.845.872.135
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.906.563.390.800	2.629.535.492.000	2.541.678.397.135
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	169.203.475.000	169.203.475.000	175.167.475.000
4.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	3.432.000.000	0	8.534.341.421
4.3.1	Pendapatan Hibah	3.432.000.000	0	0
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8.534.341.421
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)		3.110.388.764.542	3.827.886.125.032	3.784.401.342.190

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat kenaikan Pajak Daerah dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Perubahan Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

antara lain dikarenakan peningkatan pajak daerah. Lain-lain Pendapatan yang Sah berasal dari pengembalian hibah dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Cilacap. Kemudian dalam rangka mencapai target pendapatan daerah Tahun 2025, diperlukan langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memberatkan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah.
- d. Optimalisasi pengelolaan anggaran-anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisien dan efektif.
- e. Peninjauan kembali terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang terkait dengan optimalisasi pendapatan daerah dan yang menghambat investasi.
- f. Optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- g. Sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Optimalisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Selanjutnya, perubahan pendapatan transfer pada Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan penyesuaian dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kemudian dalam rangka meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah perlu dilakukan upaya antara lain dengan meningkatkan koordinasi ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi, dalam rangka peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian dan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan Pemasangan Stiker Belum Bayar Pajak sebagai sanksi moral kepada wajib pajak;
- b. Mengadakan Gebyar Hadiah Pelunasan PBB P2 baik bagi wajib pajak maupun aparat pemungut tingkat desa/kelurahan sebagai pemacu motivasi sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak dan aparat pemungut tingkat desa/kelurahan;
- c. Mengintensifkan pemungutan retribusi daerah melalui penerapan e-retribusi.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran akan sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian, apabila besaran penerimaan pendapatan daerah relatif kecil dibandingkan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana. Berikut realisasi belanja dari tahun 2022 sampai dengan 2024.

Tabel 3.12
Realisasai Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025*)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	2.320.737.241.789	2.443.369.777.401	2.808.031.595.245	491.586.023.480
1.1	Belanja Pegawai	1.276.549.760.531	1.347.024.602.981	1.582.456.838.280	332.579.024.261
1.2	Belanja Barang dan Jasa	927.982.437.486	946.328.971.742	1.055.771.843.437	153.806.999.219
1.3	Belanja Subsidi		370.902.000	538.883.400	0
1.4	Belanja Hibah	110.755.993.772	148.484.800.678	168.947.030.128	5.200.000.000
1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.449.050.000	1.160.500.000	317.000.000	0
2	Belanja Modal	537.110.858.819	468.852.514.719	423.250.109.253	7.692.156.642
3	Belanja Tidak Terduga	4.204.295.318	279.100.208	364.493.038	27.500.000
4	Belanja Transfer	539.983.224.804	588.604.429.000	622.570.040.840	65.591.414.675
4.1	Belanja Bagi Hasil	23.312.112.400	29.206.572.700	28.480.836.800	20.765.475.400
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	516.671.112.404	559.397.856.300	594.089.204.040	44.825.939.275
Total Jumlah Belanja (1+2+3+4)		3.402.035.620.730	3.501.105.821.328	3.854.216.238.376	564.897.094.797

*) Realisasi Triwulan 1

Kebijakan Umum Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025, meliputi :

- 1) Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai dianggarkan untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya dan Silpa

DAK non Fisik Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru. Pada perubahan tahun 2025 juga dilakukan penyesuaian pada belanja pegawai dengan mempertimbangkan adanya pegawai pensiun dan/atau meninggal dunia.

- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian pada belanja barang jasa antara lain untuk mendukung kecamatan berdaya dan posyandu, penganggaran Silpa DAK Non Fisik, Silpa Dana BOS, Silpa DBHCHT, Silpa DID, dan Silpa BLUD. Kemudian dengan target kenaikan pajak daerah, belanja barang jasa juga dioptimalkan untuk Verifikasi Data PKB dan Opsen PKB, serta Sosialisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah.
 - c. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.
- 2) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Penyesuaian pada belanja modal antara lain untuk menganggarkan Bantuan Keuangan Provinsi, DAK dan DBHCHT. Kemudian untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi jalan kabupaten, rehabilitasi sarpras pendidikan, pengadaan tanah untuk pembangunan talang irigasi primer serta pengembangan TPI di Desa Jetis Kecamatan Nusawungu

dalam rangka Pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI) modern di Cilacap Timur.

- 3) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penyesuaian belanja tidak terduga juga dilakukan dalam rangka pendampingan Bantuan Keuangan Provinsi.
- 4) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Terdiri dari:
 - a. Transfer Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025.
 - b. Transfer Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah

dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Kebijakan belanja daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 yang kemudian dialihkan untuk mengimplementasikan program prioritas Bupati Cilacap terpilih dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan bersinergi dengan Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Alokasi anggaran program dan kegiatan difokuskan antara lain untuk:

1. Penguatan sumber daya manusia bidang pendidikan melalui Perbaikan sistem di dunia pendidikan SD SMP, peningkatan pendamping BOS SD SMP dan penataan lahan untuk calon sekolah rakyat.
2. Fasilitasi dan promosi dalam memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyelenggaraan Cilacap Fashion Trend (CFT) dan Cilacap In Fashion (ClF).
3. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur terutama dengan mengalokasi kembali kegiatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum.

Perubahan anggaran tahun 2025 juga dialokasikan untuk belanja kegiatan yang secara spesifik bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2025.

Belanja daerah pada RKPD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 3.491.124.031.100,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 2.328.412.087.203,-, Belanja Modal Rp 529.964.885.100,-, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 10.000.000.000,- dan Belanja Transfer sebesar Rp

622.747.058.797,-. Selanjutnya dalam APBD Tahun 2025 Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp 3.926.886.125.032,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 2.925.096.599.391,-, Belanja Modal Rp 384.200.323.730,-, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 19.000.000.000,- dan Belanja Transfer sebesar Rp 598.589.201.911,-. Sedangkan Belanja Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 3.912.826.863.999,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 2.921.347.774.720,-, Belanja Modal Rp 357.395.248.582,-, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 3.727.950.000,- dan Belanja Transfer sebesar Rp 630.355.890.697,-. Secara lengkap proyeksi belanja daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025

NO	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
2	Belanja			
2.1	Belanja Operasi	2.328.412.087.203	2.925.096.599.391	2.921.347.774.720
2.1.1	Belanja Pegawai	1.420.647.949.134	1.744.104.403.872	1.657.096.834.938
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	822.342.304.779	1.044.910.201.629	1.121.126.998.602
2.1.3	Belanja Subsidi	1.045.200.000	1.038.609.600	1.038.609.600
2.1.4	Belanja Hibah	74.203.383.290	130.330.134.290	135.606.857.222
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.173.250.000	4.713.250.000	6.478.474.358
2.2	Belanja Modal	529.964.885.100	384.200.323.730	357.395.248.582
2.2.1	Belanja Modal Tanah	30.255.276.395	7.160.100.000	10.655.100.000
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.488.983.023	77.554.415.893	87.401.054.269
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.605.702.150	80.208.428.712	65.641.690.539
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	335.762.762.322	207.668.526.825	181.430.019.339
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	140.249.950	10.118.602.300	10.112.284.435
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.711.911.260	1.490.250.000	2.155.100.000
2.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	19.000.000.000	3.727.950.000
2.4	Belanja Transfer	622.747.058.797	598.589.201.911	630.355.890.697
JUMLAH BELANJA DAERAH		3.491.124.031.100	3.926.886.125.032	3.912.826.863.999

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut realisasi pembiayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2022 sampai dengan 2024:

Tabel 3.14
Realisasai Pembiayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2024

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025*)
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	314.067.155.485	185.663.674.098	140.070.528.423	0
3.1.1	SiLPA	314.067.155.485	185.663.674.098	140.070.528.423	0
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	19.500.000.000	21.000.000.000	0	0
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo				
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	19.500.000.000	21.000.000.000		
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan				
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	294.567.155.485	164.663.674.098	140.070.528.423	0

*) Realisasi Triwulan 1

Kemudian perubahan pembiayaan daerah pada tahun 2025 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) yang menyesuaikan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2024, yang saat ini masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rincian perubahan pembiayaan daerah yang ditetapkan adalah dalam rangka menutup defisit perubahan anggaran Tahun 2025. Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada RKPD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 385.735.266.558,- dan pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp 99.000.000.000,-. Selanjutnya dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 128.425.521.809,- berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang merupakan penyesuaian dari proses audit BPK atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dari besaran silpa sebesar 128,42 miliar tersebut terdapat 23,83 miliar rupiah merupakan SiLPA Earmark dari Dana BOS, JKN dan SiLPA BLUD RSUD Cilacap dan RSUD Majenang. Kemudian terdapat 9,08 miliar yang harus dianggarkan kembali bersumber dari DAK, dan DBHCHT, DBH sawit dan Insentif Fiskal. Sehingga jumlah Silpa yang bersifat "bebas" (bisa dialokasikan sesuai prioritas daerah tahun 2025) sebesar 95,5 miliar.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp Rp 5.000.000.000,-. Selanjutnya dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar Rp 0,-.

Tabel 3.15
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025

NO	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
3	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	385.735.266.558	99.000.000.000	128.425.521.809
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya	385.735.266.558	99.000.000.000	128.425.521.809
3.2	Pengeluaran pembiayaan	5.000.000.000	-	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	5.000.000.000	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	-	-	-
	Pembiayaan netto	380.735.266.558	99.000.000.000	128.425.521.809

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Penetapan skala prioritas pembangunan daerah dalam perumusan rencana pembangunan daerah didasarkan pada kebijakan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten, pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM), isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Prioritas pembangunan yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, akan tetapi tidak terpisah dari prinsip berkesinambungan dan terpadu dari satu periode perencanaan ke periode perencanaan berikutnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Skala prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 memuat program dan kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan prioritas pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Sedangkan sasaran pada RKPD adalah untuk memastikan capaian kinerja sasaran RPD pada tahun rencana (2025).

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 ini diperlukan sebagai rujukan pertama dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Perubahan Tahun 2025. Kebijakan Umum Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat antara lain :

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan disesuaikan dengan skala prioritas;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang dan/atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dokumen RPJMD merupakan dokumen yang berisi penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat

tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Berdasarkan kondisi eksisting, periode RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 dan masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Cilacap berakhir di tahun 2022, sehingga Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang memuat arah prioritas pembangunan dan target kinerja indikator yang harus dicapai setiap tahunnya secara berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam dokumen RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Sebagai salah satu landasan implementasi RKPD Tahun 2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 yang akan dicapai, sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1. di bawah ini :

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	76,77	85,89
		Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	74,75	75,48
			Maturitas SPIP terintegrasi Kabupaten Cilacap Level 3	Nilai (level)	3,249	3,259
			IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Indeks	74,146	74,146
		Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	Indeks Merit System	Indeks	319	320
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,46	3,46
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,97	90,9
			Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai (Zonasi)	96,52 (Zona Hijau)	98,54 (Zona Hijau)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
			Cakupan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)	%	40,95	40,95
		Meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah (IID)	kategori	62 (sangat inovatif)	62 (sangat inovatif)
Meningkatkan stabilitas keamanan ketentraman wilayah	Angka kriminalitas			Indeks	17,12	17,12
		Menurunnya gangguan keamanan di wilayah	Kasus konflik sosial	Jumlah	0	0
			Persentase penurunan gangguan keamanan skala kabupaten	%	1	1,9
Meningkatkan Kesejahteraan Dan Daya Saing Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	72,91	72,91
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,25	13,25
			Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7,76	7,76
		Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,94	74,97
		Meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak	IPG	Indeks	87,78	87,82
		Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Angka kemiskinan	%	10,14	10,66-10,14
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,84-7,82	7,82-7,73
Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal	Pertumbuhan Ekonomi (dengan migas dan tanpa migas)			%	5,40-6,10	2,7-3
				%	5,40-6,10	5,40-6,10
	Inflasi			%	2,5-4,5	2,5-4,5
		Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB	%	7,4	7,4

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
		Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan kontribusi pertanian dalam PDRB	%	2,55	2,55
		Meningkatnya investasi dalam penanaman modal	Nilai investasi	Milyar	1.991,31	3.766,66
		Meningkatnya kualitas pertumbuhan perdagangan, dan Usaha mikro Kecil	Pertumbuhan Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran; bukan mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	%	5,45	5,84
		Meningkatkan pengembangan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,05	0,05
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur			Indeks	89,28	89,28
		Meningkatnya kualitas kebinamargaan	Tingkat Kemantapan Jalan	%	76,00	76,827
		Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang wilayah	Persentase ketaatan tata ruang terhadap RTRW baik pola ruang maupun struktur ruang	%	94	97,8
		Terwujudnya pemenuhan universal akses	Persentase capaian rata rata universal akses (sanitasi, air bersih dan Kawasan kumuh/ dalam persentase bukan luasan)	%	92,84	92,84
		Meningkatnya Capaian Reforma Agraria	Persentase Kegiatan Reforma agraria yang dilaksanakan	%	100	100
	Indek Kinerja Sistem Irigasi			%	48,85	48,85
		Meningkatnya pengelolaan irigasi kewenangan Kabupaten	Debit air yang tersedia	%	0,61	0,61
	Vc Rasio			Indeks	0,30-0,40	0,30-0,40

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	
					RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
		Meningkatnya kinerja perhubungan	Persentase Layanan Perhubungan	%	56,77	72,13
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan	Indeks Desa Membangun			Indeks	0,7455	0,7679
		Meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah pedesaan	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	15,67	35,87
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.	Penurunan Gas Rumah Kaca			TonCO2eq	739.415	739.415
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65,66	65,66
Meningkatkan Pengelolaan Bencana	Indeks Resiko Bencana			Indeks	96,93	96,93
		Meningkatnya kesiapsiagaan bencana di setiap desa/ kelurahan	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	18,3	19,014

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Cilacap dapat diukur dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada di Kabupaten Cilacap. Indikator-indikator pembangunan tersebut menjadi target yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025, telah ditetapkan target yang harus dicapai pada indikator kinerja utama tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cilacap Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,77	85,89
2	Angka kriminalitas	Indeks	17,12	17,12
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,91	72,91
4	Pertumbuhan Ekonomi (dengan migas)	%	5,40-6,10	2,7-3,0
5	Pertumbuhan Ekonomi (tanpa migas)	%	5,40-6,10	5,40-6,10
6	Inflasi	%	2,5-4,5	2,5-4,5
7	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	89,28	89,28
8	Indek Kinerja Sistem Irigasi	%	48,85	48,85
9	Vc Rasio	Indeks	0,30-0,40	0,30-0,40
10	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7455	0,7679
11	Penurunan Gas Rumah Kaca	TonCO2eq	739.415	739.415
12	Indeks Resiko Bencana	Indeks	96,93	96,93
13	Nilai SAKIP	Nilai	74,75	75,48
14	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Indeks	74,146	74,146
15	Indeks Merit System	Indeks	319	320
16	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,46	3,46
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,97	90,9
18	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai (Zonasi)	96,52 (Zona Hijau)	98,54 (Zona Hijau)
19	IPG	Indeks	87,78	87,82
20	Angka kemiskinan	%	10,14	10,66-10,14
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,84 - 7,82	7,82-7,73

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu : 1) aspek kesejahteraan masyarakat, 2) aspek pelayanan umum, dan 3) aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap tertuang pada Tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4. 3
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025	Perubahan 2025
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,91	72,91
2	Pertumbuhan ekonomi (dengan migas)	%	5,40-6,10	2,7-3,0
3	Pertumbuhan ekonomi (tanpa migas)	%	5,40-6,10	5,40-6,10
4	Inflasi	%	2,5-4,5	2,5-4,5
5	IPG	Indeks	87,78	87,82
6	Angka kemiskinan	%	10,14	10,66-10,14
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,84 - 7,82	7,82-7,73
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,25	13,25
9	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,76	7,76
10	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,94	74,97
11	Pertumbuhan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB	%	7,4	7,4
12	Pertumbuhan kontribusi pertanian dalam PDRB	%	2,55	2,55
13	Pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran; bukan mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	%	5,45	5,84
14	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,05	2,43
	ASPEK DAYA SAING			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	76,77	85,89
2	Angka kriminalitas	Indeks	17,12	17,12
3	Indeks kualitas infrastruktur	indek	89,28	89,28
4	Indek Kinerja Sistem Irigasi	%	48,85	48,85
5	Vc Rasio	Indeks	0,30-0,40	0,30-0,40
6	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7455	0,7679
7	Penurunan Gas Rumah Kaca	TonCO2eq	739.415	739.415
8	Indek Resiko Bencana	indeks	96,93	96,93
9	Nilai SAKIP	Nilai	74,75	75,48
10	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Indeks	74,146	74,146
11	Indeks Merit System	Indeks	319	320
12	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,46	3,46
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,97	90,9
14	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai (Zonasi)	96,52 (Zona Hijau)	98,54 (Zona Hijau)
15	Maturitas SPIP terintegrasi Kabupaten Cilacap Level 3	Nilai (level)	3,249	3,259
16	Cakupan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)	%	40,95	40,95
17	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Kategori	62 (sangat inovatif)	62 (sangat inovatif)
18	Kasus Konflik Sosial	Jumlah	0	0
19	Persentase Penurunan gangguan keamanan skala kabupaten	%	1	1,9
20	Nilai Investasi	Milyar	1.991,31	3.766,66
21	Tingkat Kemantapan Jalan	%	76	76,827
22	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	94	94

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025	Perubahan 2025
23	Persentase capaian rata-rata universal akses (sanitasi, air bersih dan kawasan kumuh / dalam persentase bukan luasan)	%	92,84	92,84
24	Persentase Kegiatan Reforma Agraria yang dilaksanakan	%	100	100
25	Debit air yang tersedia	%	0,61	0,61
26	Persentase Layanan Perhubungan	%	56,77	72,13
27	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	15,67	35,87
28	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65,66	65,66
29	Persentase Desa/Kelurahan tangguh Bencana	%	18,3	19,014
	ASPEK PELAYANAN UMUM			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	indeks	100	100
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	96,11	96,11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
3	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,5	0,5
4	Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan	indeks	100	100
5	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	94,74	94,74
6	Persentase fasilitas kefarmasian dan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat	%	81	81
7	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	38,03	38,03
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
8	Persentase Rekomtek Izin Mendirikan Bangunan/PBG dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)	%	0,298	0,298
9	Persentase bangunan publik dalam kondisi baik (%)	%	20,09	20,09
10	Pertumbuhan tingkat kemantapan jalan	%	3,5	3,5
11	Persentase dokumen Rencana Tata Ruang	%	91	91
12	Persentase Prasarana Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	49,86	49,86
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
13	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	%	85,96	85,96
14	Indeks pencapaian SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman	indeks	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
15	Indeks Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas	indeks	100	100
16	Persentase penegakkan perda dan perkara di Kabupaten Cilacap (%)	%	33	33
17	Tingkat response time penanganan kebakaran	%	95	95
18	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100
19	Response time Penanganan Bencana	menit	15	15
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025	Perubahan 2025
20	Persentase penurunan jumlah PPKS	%	13,99	13,99
21	Persentase PPKS yang tertangani	%	59,19	59,19
22	Persentase PSKS yang terakreditasi	%	58,11	58,11
23	Indeks Pencapaian SPM Sosial	indeks	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
24	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,84 - 7,82	7,82-7,73
25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,6	66,6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
26	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,78	87,82
27	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	72,09	72,09
28	Kategori KLA	kategori	Nindya	Nindya
29	Persentase Kecamatan yang mampu memenuhi hak Anak	%	33,33	33,33
30	Persentase Pemenuhan indikator data gender dan anak dalam Siga	%	96	96
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
31	Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	89,3	89,3
32	Konsumsi energi per kapita per hari	Kkal/kapita / hari	2096	2096
33	Konsumsi protein per kapita per hari	Gram/kapita / hari	57,4	57,4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
34	Persentase Penanganan Sengketa Tanah yang dilakukan melalui Mediasi	%	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
35	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,66	65,66
36	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	%	100	100
37	Persentase Pengelolaan Sampah	%	83,35	83,35
38	Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan	%	12,96	12,96
39	Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air pendukung IKLH yang Memenuhi Baku Mutu	%	41,83	41,83
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
40	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)	%	40,95	40,95
41	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	68	68
42	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	51	51
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
43	Nilai IDM	Rata-rata	0,7455	0,7679
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
44	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,89	0,89

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025	Perubahan 2025
45	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,04	2,04
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
46	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan LLAJ	%	63,54	63,54
47	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan	%	50	50
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
48	Indeks Kebijakan Internal SPBE	Poin	81	81
49	Indeks Tata Kelola SPBE	Nilai	79	79
50	Indeks Manajemen SPBE	%	75	75
51	Persentase Layanan SPBE	%	73	73
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
52	Pertumbuhan sub sektor Koperasi dan Perdagangan Besar dan Eceran	%	5,45	5,45
53	Persentase koperasi aktif	%	73,14	73,14
54	Persentase UMKM yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	46,07	46,07
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
55	Persentase realisasi Investasi	%	100	100
56	Jumlah Investor yang masuk di Kabupaten Cilacap	investor	39686	39686
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA			
57	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	100	100
58	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	75	75
59	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	21	21
60	Jumlah Prestasi olahraga	Cabor	16	16
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
61	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang diimplementasikan	%	40	40
62	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	29,5	29,5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
63	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	76,24	76,24
64	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	63,25	63,25
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
65	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai NSPK	%	11,32	11,32
66	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	71,64	71,64
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025	Perubahan 2025
67	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	ton/tahun	59081,41	59081,41
68	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	42974,77	42974,77
69	Produksi perikanan budidaya	Ton/Tahun	16106,64	16106,64
70	Angka konsumsi ikan	kg/kapita	30,448	30,448
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
71	PAD Sektor Pariwisata	Rp	500.000.000	500.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
72	Produktivitas Pertanian per hektar per tahun (padi)	Kw/ha	64,69	64,69
73	Produksi Tanaman padi	Ton	839793	839793
74	Produktivitas cabai (cabai rawit)	Kw/ha	80	80
75	Produksi Tanaman cabai (aneka cabai)	Ton	9686	9686
76	Populasi ternak (Sapi, Kambing, dan Domba)	ekor	224659	224659
77	Produksi daging	Ton	8749,2	8749,2
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
78	Persentase pertumbuhan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	16,6	16,6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
79	Pertumbuhan /kontribusi industri pengolahan dalam PDRB	%	7,4	7,4
80	Pertumbuhan IKM	%	9,5	9,5
	SEKRETARIAT DAERAH			
81	Indeks Kematangan Perangkat Daerah Setda	indeks	42 (tinggi)	42 (tinggi)
82	Tingkat pencapaian koordinasi peningkatan kinerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100
83	Tingkat pencapaian koordinasi peningkatan kinerja perangkat daerah bidang perekonomian dan pembangunan	%	100	100
	SEKRETARIAT DPRD			
84	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP	Persen	100	100
	PERENCANAAN			
85	Tingkat ketercapaian perencanaan pembangunan daerah	%	75,44	75,44
86	Persentase Realisasi Sasaran Pembangunan	%	100	100
	KEUANGAN			
87	Persentase ketercapaian target pendapatan	%	100	100
88	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	%	27,19	27,19
89	Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD nya baik	%	100	100
90	Persentase Ketepatan Pelaporan BMD	%	100	100
	KEPEGAWAIAN			
91	Indeks Sistem Merit	Nilai	319	319

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025	Perubahan 2025
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
92	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	56	56
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
93	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan	%	23,35	23,35
94	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	71,82	71,82
	INSPEKTORAT DAERAH			
95	Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap Level 3	Nilai (level)	3,249	3,259
96	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan penjaminan kualitas penerapan SPIP terintegrasi dengan level 3	%	80	80
	KECAMATAN			
97	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
98	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
99	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
100	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
101	Jumlah Kasus konflik sosial	Kasus	0	0
102	Persentase Cakupan kecamatan yang dibina dalam keamanan wilayah	%	100	100
No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025	

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Cilacap tahun 2025 merupakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran Perangkat Daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran Perangkat Daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun yang tersebar di seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Cilacap Tahun 2025

No	Urusan/Bidang/Indikator	Satuan	Tahun 2025	Perubahan 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

No	Urusan/Bidang/Indikator	Satuan	Tahun 2025	Perubahan 2025
a	Pendidikan			
1	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100
2	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100
3	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	100
4	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100
b	Kesehatan			
5	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100
6	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
7	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
8	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
9	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
10	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
11	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
12	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
13	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
14	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
15	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
16	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
17	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100
c	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
18	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100
19	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100
20	Tingkat Kemantapan Jalan	%	76	76,827
21	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	41,43	41,43
d	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
22	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100

No	Urusan/Bidang/Indikator	Satuan	Tahun 2025	Perubahan 2025
23	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100
e	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
24	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100
25	Persentase penegakkan perda dan perkada di Kabupaten Cilacap (%)	%	33	33
26	Tingkat response time penanganan kebakaran	%	95	95
27	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100
28	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	%	100	100
29	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100
30	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100
31	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100
32	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100
f	Sosial			
33	Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
34	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
a	Tenaga Kerja			
35	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	-	-
36	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	32	32
37	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	%	48	48
38	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	40	40
b	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
39	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 pddk	0,00006	0,00006
40	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,000205	0,000205
c	Pangan			

No	Urusan/Bidang/Indikator	Satuan	Tahun 2025	Perubahan 2025
41	Persentase ketersediaan pangan	%	179	179
42	Ketersediaan energi dan protein per kapita	%	100	100
d	Pertanahan			
43	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100
e	Lingkungan Hidup			
44	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65,66	65,66
45	Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	39,68	39,68
f	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
46	Perekaman KTP elektronik	%	99,49	99,49
47	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	30,35	30,35
48	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	28,3	28,3
49	Kepemilikan akta kelahiran	%	89,61	89,61
g	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
50	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	15,67	35,87
51	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	100	100
h	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
52	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,04	2,04
53	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	69,09	69,09
54	Persentase Un Meed Need	%	12,04	12,04
i	Perhubungan			
55	Vc Rasio	Indeks	0,30-0,40	0,30-0,40
j	Komunikasi dan Informatika			
56	Persentase Layanan SPBE	%	73	73
57	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	73	73
58	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	75	75
k	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
59	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	37,28	37,28
60	Persentase UMKM yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	46,07	46,07
61	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	%	72	72
62	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	%	59,41	59,41
63	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	12,23	12,23
l	Penanaman Modal			
m	Kepemudaan dan Olahraga			
64	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	100	100

No	Urusan/Bidang/Indikator	Satuan	Tahun 2025	Perubahan 2025
65	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi mandiri	%	75	75
66	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	10	10
n	Statistik			
67	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100
o	Persandian			
68	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks	1,02	1,02
p	Kebudayaan			
69	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	29,5	29,5
q	Perpustakaan			
70	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	76,24	76,24
71	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	63,25	63,25
r	Kearsipan			
72	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	71,64	71,64
73	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	%	75,34	75,34
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
a	Kelautan dan Perikanan			
74	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	ton/tahun	59081,41	59081,41
b	Pariwisata			
75	Persentase kontribusi pariwisata dalam PAD	%	0,05	0,05
76	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	%	10	10
c	Pertanian			
77	Produktivitas Pertanian per hektar per tahun (padi)	Kw/ha	64,69	64,69
78	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	24,9	24,9
d	Perdagangan			
79	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	54	54
80	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	25,26	25,26
e	Perindustrian			
81	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	2,64	2,64
82	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	75	75
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
a	Sekretariat Daerah			
b	Sekretariat DPRD			
V	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			

No	Urusan/Bidang/Indikator	Satuan	Tahun 2025	Perubahan 2025
a	Perencanaan			
b	Keuangan			
83	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure)	%	64,05	64,05
84	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	%	-0,087	-0,087
85	Manajemen Aset	(Ya/Tidak)	Ya	Ya
86	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	0,053	0,053
c	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
87	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	24,27	24,27
d	Penelitian dan Pengembangan			
VI	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
a	Pengawasan			
88	Maturitas SPIP terintegrasi Kabupaten Cilacap Level 3	Nilai (level)	3,249	3,259
VII	UNSUR KEWILAYAHAN			
a	Kecamatan			
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
a	Kesbangpol			

4.2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada *level intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025

No	IKU OPD	SATUAN	TAHUN 2025	PERUBAHAN 2025
1	2	3	4	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,25	13,25
2	Rata-Rata Lama Sekolah	%	7,76	7,76
3	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	indeks	100	100
4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	96,11	96,11
5	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang diimplementasikan	%	40	40
6	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	29,5	29,5
	Dinas Kesehatan			
1	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,5	0,5
2	Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan	indeks	100	100
3	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	94,74	94,74
4	Persentase fasilitas kefarmasian dan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat	%	81	81
5	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	38,03	38,03

No	IKU OPD	SATUAN	TAHUN 2025	PERUBAHAN 2025
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1	Persentase Rekomtek Izin Mendirikan Bangunan/PBG dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)	%	0,035	0,035
2	Persentase bangunan publik dalam kondisi baik (%)	%	20,09	20,09
3	Tingkat kemantapan jalan	%	76	76,827
4	Pertumbuhan tingkat kemantapan jalan	%	3,5	3,5
5	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	94	94
6	Persentase dokumen Rencana Tata Ruang	%	91	91
	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air			
1	Debit air yang tersedia	%	0,61	0,61
2	Persentase Prasarana Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	49,86	49,86
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan			
1	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	%	85,96	85,96
2	Indeks pencapaian SPM	indeks	100	100
3	Persentase Kegiatan Reforma Agraria yang dilaksanakan	%	100	100
4	Persentase Penanganan Sengketa Tanah yang dilakukan melalui Mediasi	%	100	100
	Satuan Polisi Pamong Praja			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala kabupaten	%	1	1,9
2	Indeks Pencapaian SPM	indeks	100	100
3	Persentase penegakkan perda dan perkada di Kabupaten Cilacap (%)	%	33	33
4	Tingkat response time penanganan kebakaran	%	95	95
5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	18,3	19,014
2	Response time Penanganan Bencana	menit	15	15
3	Indeks Pencapaian SPM	indeks	100	100
	Dinas Sosial			
1	Persentase penurunan jumlah PPKS	%	13,99	13,99
2	Persentase PPKS yang tertangani	%	59,19	59,19
3	Persentase PSKS yang terakreditasi	%	58,11	58,11
4	Indeks Pencapaian SPM	indeks	100	100
	Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian			
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,84 - 7,82	7,82-7,73
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,6	66,6
3	Pertumbuhan/kontribusi industri pengolahan dalam PDRB	%	7,4	7,4
4	Pertumbuhan IKM	%	9,5	9,5
	Dinas Pangan Dan Perkebunan			
1	Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	89,3	89,3
2	Konsumsi energi per kapita per hari	Kkal/kapita/hari	2096	2096
3	Konsumsi protein per kapita per hari	Gram/kapita/hari	57,4	57,4
	Dinas Lingkungan Hidup			
1	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,66	65,66
2	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	%	100	100
3	Persentase Pengelolaan Sampah	%	83,35	83,35
4	Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan	%	12,96	12,96
5	Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air pendukung IKLH yang Memenuhi Baku Mutu	%	41,83	41,83

No	IKU OPD	SATUAN	TAHUN 2025	PERUBAHAN 2025
	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
1	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA)	%	40,95	40,95
2	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	68	68
3	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	51	51
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
1	Nilai IDM	Rata-rata	0,7455	0,7679
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	15,67	35,87
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,66	87,82
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	72,09	72,09
3	Kategori KLA	kategori	Nindya	Nindya
4	Persentase Kecamatan yang mampu memenuhi hak Anak	%	33,33	33,33
5	Persentase Pemenuhan indikator data gender dan anak dalam Siga	%	96	96
6	Usia Harapan Hidup		74,94	74,97
7	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,89	0,89
8	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,04	2,04
	Dinas Perhubungan			
1	Persentase Layanan Perhubungan	%	56,77	72,13
2	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan LLAJ	%	63,54	63,54
3	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan	%	50	50
	Dinas Komunikasi Dan Informatika			
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	75	75
2	Indeks Kebijakan Internal SPBE	Poin	81	81
3	Indeks Tata Kelola SPBE	Nilai	79	79
4	Indeks Manajemen SPBE	%	75	75
5	Persentase Layanan SPBE	%	73	73
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
1	Persentase realisasi Investasi	%	100	100
2	Jumlah Investor yang masuk di Kabupaten Cilacap	investor	39686	39686
	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata			
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	100	100
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	75	75
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	21	21
4	Jumlah Prestasi olahraga	Cabor	16	16
5	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	0,05	2,43
6	PAD Sektor Pariwisata	Rp	500.000.000	500.000.000
	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	76,24	76,24
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	63,25	63,25
3	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai NSPK	%	11,32	11,32
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	71,64	71,64
	Dinas Perikanan			
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton/tahun	59081	59081

No	IKU OPD	SATUAN	TAHUN 2025	PERUBAHAN 2025
2	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	42974	42974
3	Produksi perikanan budidaya	Ton/Tahun	16106	16106
4	Angka konsumsi ikan	kg/kapita	30,448	30,448
	Dinas Pertanian			
1	Produktivitas Pertanian per hektar per tahun (padi)	Kw/ha	64,69	64,69
2	Produksi Tanaman padi	Ton	839798	839798
3	Produktivitas cabai (cabai rawit)	Kw/ha	80	80
4	Produksi Tanaman cabai (aneka cabai)	Ton	9686	9686
5	Populasi ternak (Sapi, Kambing, dan Domba)	ekor	224659	224659
6	Produksi daging	Ton	8749	8749
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah			
1	Pertumbuhan sub sektor Koperasi dan Perdagangan Besar dan Eceran	%	5,45	5,45
2	Persentase koperasi aktif	%	73,14	73,14
3	Persentase UMKM yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	46,07	46,07
4	Persentase pertumbuhan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	16,6	16,6
	Sekretariat Daerah			
1	Indeks Kematangan Perangkat Daerah Setda	indeks	42 (tinggi)	42 (tinggi)
2	Tingkat pencapaian koordinasi peningkatan kinerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100
3	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai (Zonasi)	96,52 (Zona hijau)	98,54 (Zona Hijau)
4	Tingkat pencapaian koordinasi peningkatan kinerja perangkat daerah bidang perekonomian dan pembangunan	%	100	100
	Sekretariat DPRD			
1	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP	Persen	100	100
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah			
1	Tingkat ketercapaian perencanaan pembangunan daerah	%	75,44	75,44
2	Persentase Realisasi Sasaran Pembangunan	%	100	100
3	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan	%	23,35	23,35
4	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	71,82	71,82
	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah			
1	Persentase ketercapaian target pendapatan	%	100	100
2	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	%	27,19	27,19
3	Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD nya baik	%	100	100
4	Persentase Ketepatan Pelaporan BMD	%	100	100
	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah			
1	Indeks Sistem Merit	Nilai	319	319
2	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	66,56	66,56
	Inspektorat			
1	Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap Level 3	Nilai (level)	3,249	3,259
2	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan penjaminan kualitas penerapan SPIP terintegrasi dengan level 3	%	80	80
	Kecamatan Adipala			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1

No	IKU OPD	SATUAN	TAHUN 2025	PERUBAHAN 2025
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Bantarsari			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Binangun			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Cilacap Selatan			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Cilacap Tengah			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Cilacap Utara			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Cimanggu			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Cipari			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Dayeuhluhur			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1

No	IKU OPD	SATUAN	TAHUN 2025	PERUBAHAN 2025
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Gandrungmangu			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Jeruklegi			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Kampunglaut			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Karangpucung			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase gangguan keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa yang berkembang	%	100	100
	Kecamatan Kawunganten			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase gangguan keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa yang berkembang	%	100	100
	Kecamatan Kedungreja			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Kesugihan			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Kroya			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1

No	IKU OPD	SATUAN	TAHUN 2025	PERUBAHAN 2025
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Majenang			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Maos			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Nusawungu			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Patimuan			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Sampang			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Sidareja			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Kecamatan Wanareja			
1	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan	%	1	1
2	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani Kecamatan	%	100	100
3	Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat Kecamatan	%	100	100
4	Persentase Desa Yang Berkembang	%	100	100
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			
1	Jumlah Kasus konflik sosial	Kasus	0	0
2	Persentase Cakupan kecamatan yang dibina dalam keamanan wilayah	%	100	100

4.2.5 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Terdapat 56 Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Cilacap dan selaras dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama 20 tahun ke depan, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 6
Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Cilacap Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	2025	Perubahan 2025
1	2	3	4	5
1	Tingkat Kemiskinan	%	10,14	10,14
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (Sumber data dari <i>Angka PoU Jawa Tengah (BPS Provinsi Jawa Tengah)</i>)	%	12	10,9
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (<i>Sumber data dari Badan Pangan Nasional</i>)	Angka	84,65	84,90
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,94	74,97
5	Jumlah kasus kematian Ibu	Kasus	11	11
6	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	10,77	10,77
7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	90,00	90,00
8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	90	90
9	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	90,03	90,03
10	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):			
	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	64,14	64,14
	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	58,11	58,11
	c) Numerasi SD/Sederajat	%	55,12	55,12
	d) Numerasi SMP/Sederajat	%	63,30	63,30
11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,76	7,76
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,25	13,25
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	4,91	4,91
14	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	77,68	77,68
15	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan		97,38	97,38
	a. PAUD	%	100	100
	a. SD	%	100	100
	b. SMP	%	92,15	92,15
16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	37,48	37,48
17	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang		
18	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	18,70	18,70

No	Indikator	Satuan	2025	Perubahan 2025
1	2	3	4	5
19	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,13	0,13
20	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0
21	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	62,49-62,54	62,49-62,54
22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,38 - 0,37	0,38 - 0,37
23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	58,12	58,12
24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,49	1,49
25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	332	332
26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,80	3,80
27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,62	0,62
28	Return on Aset (ROA) BUMD	%	3,09	3,09
29	Disparitas Harga	%	± 10	± 10
30	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	20,93	20,93
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,34	0,34
32	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	0,24	0,24
33	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	0,23	0,23
34	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,15	2,15
35	Persentase Desa Mandiri	%	4,83	4,83
36	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,84 - 7,82	8,84 - 7,82
37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	50,17	50,17
38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	7,74	7,74
39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	69,10	69,10
40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	55,63	55,63
41	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	76,00	76,00
42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	51,316	51,316
43	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,3	4,3
44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	28,4	28,4
45	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	48,85	48,85
46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	75,10	75,10
47	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	53,94	53,94
48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	99,34 - 96,68	96,93
49	Penurunan Emisi GRK	TonCO2eq	739.415	739.415
50	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70,67	85,89
51	Indeks Reformasi Hukum	Angka	51	51
52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,46	3,46
53	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,49	4,49
54	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,16	77,16
55	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	71,37-71,85	71,37-71,85
56	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	19,67-19,87	19,67-19,87

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Kebijakan Pemerintah yang mengubah paradigma perencanaan pembangunan dari *money follow function* menjadi *money follow programme*, bertujuan agar pencapaian pembangunan dan penetapan prioritas pemerintah dapat berjalan maksimal (berhasil), fokus dan tepat sasaran.

Kebijakan ini diimplementasikan dengan mengarahkan alokasi anggaran untuk fokus pada prioritas pembangunan, relokasi program kegiatan yang telah memenuhi target dan efisiensi anggaran program non prioritas. Di samping itu, program dan kegiatan diprioritaskan untuk menyelesaikan pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cilacap serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 256 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goal's* (SDGs) Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022.

4.4 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025

Tahun 2025 adalah tahun pertama untuk pemenuhan target sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 diarahkan pada untuk mendukung tema dan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029. Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025–2029 diarahkan untuk Penguatan Fondasi Transformasi yang terdiri atas :

1. Transformasi Sosial

Transformasi Sosial ditempuh melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan social pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

2. Transformasi Ekonomi

Transformasi Ekonomi ditempuh melalui hilirisasi Sumber Daya Alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

3. Transformasi Tata Kelola

Transformasi Tata Kelola ditempuh melalui kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Perwujudan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia ditempuh melalui memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi ditempuh melalui memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Berdasarkan kondisi nasional dan mempertimbangkan perkembangan geopolitik regional dan global, maka target Indikator Makro Nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,1 - 5,5 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5 - 5,0 persen;
3. Angka Kemiskinan 8,0 - 7,0 persen;
4. Rasio Gini 0,379 – 0,382;
5. Indeks Modal Manusia (nilai) 0,56;
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 38,6.

4.5 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan pada tema "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter," dengan prioritas pembangunan diarahkan pada:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2025 yang tercantum dalam dokumen Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yaitu:

1. PDRB per kapita sebesar 48,53-48,66 juta rupiah;
2. Angka Kemiskinan sebesar 9,66-9,00 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,362;
4. Pertumbuhan Ekonomi antara 4,90–5,60 persen;
5. Inflasi pada angka $2,5 \pm 1$ persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,81 – 4,42 persen;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 107,52;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 59,92;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,13;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,50;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,68;
13. Indeks Risiko Bencana turun 4 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

4.6 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cilacap

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan peninjauan kerja, rapat kerja, reses, dan menerima audiensi dari masyarakat yang menjadi salah satu bahan kebijakan dalam penyusunan prioritas serta fokus pembangunan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cilacap didalam penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 menitikberatkan pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun penjabaran pokok-pokok pikiran DPRD sebagai berikut :

1. Bidang Pekerjaan Umum
 - a. Aplikasi BASO agar ditinjau ulang penerapannya agar dapat mengakomodir aspirasi masyarakat Desa.
 - b. Optimalisasi pembangunan jalan kabupaten.
 - c. Pembangunan infrastruktur lebih mengutamakan skala prioritas.
 - d. Menekankan agar pembangunan infrastruktur yang dialokasikan melalui aspirasi DPRD untuk lebih maksimal. Hasil dari pembangunan

sementara baru tercapai 700 km yang dialokasikan dari 1300 km, untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

- e. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tetap dengan berpedoman pada pemerataan pembangunan mengingat ruas jalan yang membutuhkan anggaran masih begitu banyak sementara anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan jalan sangat terbatas. Ketika menggunakan ruas tuntas maka jumlah ruas jalan yang mendapat anggaran lebih sedikit sehingga bagi ruas jalan yang belum mendapatkan anggaran akan sangat lama menunggu giliran dibangun hal tersebut dapat memunculkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.
 - f. Pembangunan Infrastruktur di daerah pinggiran atau perbatasan dengan kabupaten lain perlu mendapat perhatian khusus, baik itu Pembangunan jalan maupun infrastruktur pendukung lainnya sehingga terjadi pemerataan Pembangunan di Kabupaten Cilacap yang efeknya akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah pinggiran.
 - g. Pada bidang Infrastruktur agar terus ada upaya peningkatan anggaran pembangunan khususnya jalan dan jembatan yang diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur yang dibangun untuk mendukung pengembangan wilayah disertai dengan meningkatkan pengawasan terhadap pengerjaan pembangunan tersebut. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi agar konektivitas antar wilayah kabupaten hingga kecamatan tercapai serta pemerataan anggaran pembangunan di setiap wilayah.
 - h. Pemerintah Daerah harus terus menerus mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Daerah perlu merencanakan dan melaksanakan program pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan, mengalokasikan anggaran dengan bijak, melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam proses pengembangan, serta memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tersebut sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- a. Pajak PJU adalah Sumber Pemasukan Pajak Daerah nomor 2 setelah PBB, tetapi pemerintah daerah Kabupaten Cilacap setiap tahun hanya

mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (PJU) sebesar 500 juta. Faktanya di lapangan banyak PJU yang rusak dan tidak terawat, untuk itu kami menyarankan alokasi anggaran pemeliharaan PJU di APBD Tahun 2025 ditingkatkan sesuai kebutuhan;

- b. Pemasangan PJU harus mencakup juga jalan-jalan desa, mengingat pajak penerangan jalan dibayarkan oleh seluruh konsumen PLN. Dengan demikian perlu dilakukan alokasi yang adil dan merata untuk memastikan bahwa masyarakat desa merasakan manfaat dari layanan penerangan jalan yang sesuai dengan kontribusi pajak yang telah disumbangkan melalui tagihan yang dibayarkan melalui PLN.

3. Bidang Pendidikan dan Olahraga

- a. Pesantren adalah bagian dari SISDIKNAS, begitu tingginya animo publik ke pesantren di Kabupaten Cilacap dan begitu besarnya jasa-jasa pesantren terhadap bangsa dan negara, saya berharap Pemkab segera membuat perda pesantren.
- b. Agar Sekolah Maarif berhak mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana sekolah-sekolah dibawah yayasan lain.
- c. Intensif guru ngaji agar lebih diperhatikan.
- d. Fasilitasi yang lebih terhadap bakat minat dunia olahraga.
- e. Dibidang pendidikan, agar ada sekolah-sekolah unggulan di masing masing Kecamatan yang nantinya akan dijadikan sebagai barometer atau miniatur target sumber daya manusia, sehingga anak-anak para generasi penerus akan menjadi generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah.
- f. Menekankan akan pentingnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kualitas pemberlajaran, profesionalisme guru, serta peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini.

4. Bidang Kesehatan

- a. Kartu Indonesia Sehat masih kurang efektif dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi seperti sosialisasi program yang belum merata, terkait teknisnya untuk bisa diprioritaskan agar keberpihakan masyarakat lebih maksimal.
- b. Perlu adanya anggaran yang diperuntukan untuk membantu pembiayaan kesehatan di rumah sakit atau faskes lainya bagi keluarga miskin yang tidak memiliki BPJS.

- c. Pada sektor Kesehatan, Pemerintah Daerah harus menekankan untuk UHC (Universal Health Coverage) yang merupakan standar kesehatan agar mendekati angka yang diharapkan oleh nasional yaitu minimal 95%. Kami juga mendorong agar Pemerintah Daerah juga meningkatkan anggaran untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) bagi masyarakat yang mengidap penyakit, tergolong dalam masyarakat miskin, dan tidak memiliki BPJS. Diharapkan Pemerintah Daerah lebih cermat lagi dalam menyusun data dan angka terhadap masyarakat yang semestinya mendapatkan alokasi BPJS namun belum mendapatkan BPJS, sehingga APBD berperan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk dilayani kesehatan secara gratis;
 - d. Permasalahan stunting masih menjadi target yang utama, oleh sebab itu untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2025, perlu penekanan pentingnya bantuan pangan khususnya kepada ibu hamil dan masyarakat yang masih masuk digaris kemiskinan ekstrem.
5. Bidang Sosial
- a. Anggaran BPJS non mandiri perlu ditambah agar masyarakat miskin merasakan manfaatnya.
 - b. Verifikasi faktual, untuk dilakukan kembali terkait bantuan BLT dikarenakan banyak yang tidak tepat sasaran dan harus dibenahi.
 - c. DPRD Kabupaten Cilacap mendorong terus secara berkelanjutan agar kemiskinan di Kabupaten Cilacap semakin ditekan menuju angka dibawah 10% dan kemiskinan ekstrim bisa menjadi Zero Miskin Ekstrem di Tahun 2025.
6. Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian
- a. Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian yang serius dalam pemberdayaan UMKM dari hulu ke hilir.
 - b. UMKM berperan membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di daerah. UMKM memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk pada masa pandemi Covid 19. Untuk itu, UMKM perlu ditingkatkan kapabilitasnya dengan kemampuan terhadap manajemen persediaan dan akuntansi sederhana, supaya dapat mengendalikan atau mengevaluasi kegiatan usahanya.
 - c. Kabupaten Cilacap menjadi salah satu daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Tengah, untuk itu kami berharap ada perhatian khusus dan kebijakan yang konkrit dan solutif dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi tingkat pengangguran, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan alat produksi kepada masyarakat,

- sehingga pencari kerja dapat memiliki skill yang dibutuhkan untuk bekerja dan juga mendorong masyarakat untuk berwirausaha.
- d. Pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan perekonomian yang berbasis UMKM dengan memberikan pelatihan pengembangan kapasitas sumber daya manusia para pelaku UMKM dan akses permodalan yang mudah, sehingga pelaku UMKM bisa berkembang dan bisa mengikuti perkembangan pasar yang serba digital dan berbasis teknologi informasi
 - e. Popularitas koperasi sedang mengalami tren penurunan, sedangkan UKM pada umumnya belum bisa diandalkan sebagai ujung tombak perekonomian. Oleh sebab itu, perlu diambil langkah-langkah: revitalisasi koperasi, akses permodalan yang mudah dan tidak berbelit bagi pelaku koperasi dan UKM, kemudian para pelaku UKM juga perlu dilatih, didampingi dan dibukakan akses pasar yang seluas luasnya.
 - f. Pemerintah Daerah diharapkan mampu mendorong investasi dalam sektor sektor ekonomi lokal untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta untuk mendorong masuknya investasi di Kabupaten Cilacap.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Persoalan tanah bengkok desa di Kecamatan Kedungreja dan Sidareja, yang berada di Kecamatan Patimuan telah berpuluh-puluh tahun, hendaknya Pemerintah Kabupaten menyelesaikan dengan serius sehingga tidak menjadi masalah turun-temurun.
 - b. Dalam rangka penertiban aset-aset desa, Pemerintah Kabupaten agar membuat program sertifikasi tanah-tanah bengkok dan tanah-tanah milik desa secara masal dan murah, seperti PTSL.
 - c. Agar PILKADES serentak tahun 2025 dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap tanpa kontribusi dari APBDES, sehingga APBDES bisa fokus untuk kepentingan pembangunan desa.
 - d. Pada bidang pemberdayaan masyarakat dan perluasan lapangan pekerjaan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan kami berpendapat bahwa upaya tersebut dapat dilakukan melalui revitalisasi/peremajaan balai latihan kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan life skill, Pemberian peralatan berusaha/industri untuk kemandirian masyarakat, serta mendorong pemerintah untuk dapat mengeluarkan kebijakan terkait kemudahan investasi bagi para investor untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
 - e. Generasi muda merupakan penerus keberlangsungan pembangunan daerah kedepan, oleh karena itu kami mendorong percepatan

peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan.

- f. Pemerintah Daerah diharapkan untuk lebih melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi lokal terwakili. Partisipasi masyarakat yang kami maksud bukan hanya sebatas informasi atau konsultasi, tetapi melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan secara aktif. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
 - g. Pemerintah Daerah harus fokus dalam memperkuat sistem pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing daerah. Mengintegrasikan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memajukan sektor bisnis lokal.
 - h. Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Dengan menjalankan peran ini secara efektif, Pemerintah Daerah dapat menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta perkembangan sosial masyarakatnya.
8. Bidang Administrasi Keuangan
- a. Hendaknya Cilacap tetap menggunakan satu aplikasi dalam menyusun perencanaan APBD yaitu aplikasi SIPD sesuai aturan mendagri, sebagaimana kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia.
 - b. Bantuan Keuangan Daerah untuk bisa membantu sekolah swasta, karena banyaknya sekolah swasta yang jumlahnya sama dengan sekolah negeri dan sekolah swasta juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - c. Berkaitan dengan insentif guru honorer dan guru ngaji, kami harap terdapat peningkatan jumlah insentif yang mampu memberikan kesejahteraan.
 - d. Pemberian insentif untuk RT dan RW agar ditingkatkan.
 - e. Berdasarkan Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penelaahan Pokir merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Mengingat tahun 2025 adalah masa transisi dan dipayungi melalui Rencana pembangunan daerah (RPD) 2024- 2026, maka program dan kegiatan yang akan disusun agar memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

- f. Percepatan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) salah satunya berupa rekam data dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Program kedepan dirancang agar masyarakat bisa dilayani ditingkat kecamatan dan tidak perlu sampai kabupaten untuk menghindari proses panjang dan antrean. Persiapan dilakukan dengan pemenuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana, diharapkan adanya evaluasi dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan pelayanan yang dibutuhkan untuk memenuhi harapan masyarakat.
 - g. Untuk membantu meningkatkan peluang dalam mengakses DID. meningkatkan kemampuan untuk memprediksi nilai DID yang akan diterima, dan mendukung kualitas belanja daerah yang bersumber dari dana transfer, KOMPAK membantu sejumlah kabupaten meningkatkan peluangnya dengan cara yang lebih terarah, strategis, dan terkoordinasi melalui Tim Dana Insentif Daerah.
 - h. Pelayanan publik supaya ditingkatkan untuk menuju smart city, sehingga masyarakat Kabupaten Cilacap dapat merasa dimudahkan dalam akses untuk pelayanan-pelayanan kebutuhan hidup manusia, baik perekonomian, industri, dan sebagainya agar pelayanan-pelayanan publik tersebut menjadi lebih maksimal.
 - i. Mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi kecamatan dan kelurahan yang merupakan unsur kewilayahan dan sebagai ujung tombak pelaksanaan program kegiatan, termasuk para RW dan RT agar mendapatkan peningkatan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9. Bidang Pertanian
- a. Untuk meningkatkan ketersediaan pupuk untuk para petani. Hal ini lantaran penyaluran pupuk subsidi seringkali mengalami kendala dalam pendistribusiannya dan terjadi permainan harga di lapangan. Untuk itu, program tersebut serta meminta agar penyaluran pupuk subsidi harus tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
 - b. Penyelesaian kesulitan yang dihadapi oleh para petani seperti kelangkaan pupuk, kurang tersedianya bibit unggul, kestabilan harga jual hasil pertanian. Mengingat selama ini para petani sering mengalami kerugian yang diakibatkan karena kurang stabilnya harga.
 - c. Optimalkan bantuan modal dan perlindungan ke petani
 - d. Untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa kunci dari kemandirian pangan adalah reformasi agraria. Lahan pertanian harus terus diperluas dan yang sudah ada tidak boleh dialihfungsikan menjadi peruntukan lain. Produktivitas pertanian wajib didukung oleh sarana

dan prasarana yang memadai, seperti: saluran irigasi, embung, bendungan, jalan usaha tani, bibit/benih, serta pupuk dan obat-obatan yang memadai.

10. Bidang Peternakan

- a. Optimalkan hibah bibit ternak ke petani dan hapus pengadaan sistem lelang pengadaan bibit ternak.
- b. Optimalkan anggaran untuk penanganan hama dan penyakit hewan.

11. Pendapatan Daerah

- a. Optimalkan anggaran untuk pembangunan wisata daerah sebagai penunjang PAD.
- b. Perlu penyusunan kebijakan pengoptimalan retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) sebagai PAD.
- c. Pendapatan daerah agar semakin meningkat sehingga di tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah sukses menuju satu trilyun yang merupakan angka yang signifikan ketika pemerintah daerah inovatif dan kreatif dengan menginventarisir potensipotensi sumber pendapatan daerah.

12. Bidang Kepegawaian

Percepatan penyelesaian persoalan pegawai non ASN harus terus dilakukan demi menutup kekurangan Pegawai ASN yang banyak mengalami pensiun.

13. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Dengan semakin meningkatnya emisi karbon rumah kaca yang mengakibatkan suhu udara semakin panas, oleh karenanya Pemerintah Daerah melalui dinas terkait agar membuat planning yang berkelanjutan melalui berbagai konservasi di area-area yang berpotensi menghasilkan oksigen, sehingga mampu menyerap emisi karbon yang kemudian akan terjadi keseimbangan alam antara pembuangan residu gas dengan oksigen yang dihasilkan dari bentuk konservasi tersebut.
- b. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan, efisiensi energi, dan pengurangan limbah. Menerapkan prinsip-prinsip ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dengan memperhatikan lingkungan, efisiensi energi, dan pengurangan limbah, pembangunan dapat menjadi lebih berkelanjutan dan mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.

14. Bidang Ketahanan Pangan

Pemerintah Daerah harus mendorong sektor-sektor ketahanan pangan yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan. Dari tujuh komoditas Kabupaten Cilacap ini harus didorong agar sektor hulu dan

hilir ini menjadi prioritas dan ada kebijakan anggaran yang cukup bagi para pelaku pertanian, perkebunan, dan peternakan.

(Dasar : Surat Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Nomor: 000.7/1667/13 tanggal 18 Desember 2023 perihal Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD).

Selanjutnya secara khusus substansi pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cilacap menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 maupun Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 dan diselaraskan serta disinergikan dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Cilacap.

4.7 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025 diprioritaskan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan dari kondisi gambaran umum dan dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya. Di samping itu, prioritas tahun 2025 disusun melalui pendekatan holistik, tematik, spasial, dan integratif dengan memperhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023, perkiraan capaian kinerja di tahun 2024, dan isu-isu strategis tahun 2025.

Pedoman arah kebijakan pembangunan tahun 2025 memperhatikan tujuan, sasaran, serta isu-isu strategis pembangunan dalam RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026, RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai pedoman transisi sebelum terpilihnya presiden baru. Kebijakan pembangunan Kabupaten Cilacap tahun 2025 diarahkan pada ***“Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Didukung Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Daya Saing SDM”*** dengan 6 (enam) prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan kualitas produktivitas pertanian dititikberatkan pada peningkatan lahan pertanian berkelanjutan, pengembangan agro industri;
 - b. Penguatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi,

pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/perdagangan dan kolaborasi dengan e-commerce;

- c. Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen;
- d. Penguatan industri kecil menengah melalui pengembangan diversifikasi produk sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;
- e. Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal;
- f. Optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui penguatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta;
- g. Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan lumbung pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;
- h. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar industri.

Prioritas ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah, meliputi :

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 8) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- 9) Program Penyuluhan Pertanian;
- 10) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- 11) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- 12) Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi
- 13) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

- 14)Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
- 15)Program Pengembangan UMKM;
- 16)Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 17)Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 18)Program Pengembangan Ekspor;
- 19)Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- 20)Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- 21)Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- 22)Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- 23)Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
- 24)Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- 25)Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 26)Program Promosi Penanaman Modal;
- 27)Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 28)Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 29)Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- 30)Program Pemberdayaan Sosial;
- 31)Program Rehabilitasi Sosial;
- 32)Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 33)Program Penanganan Bencana;
- 34)Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- 35)Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- 36)Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 37)Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- 38)Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- 39)Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 40)Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 41)Program Hubungan Industrial;
- 42)Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 43)Program Pemasaran Pariwisata;
- 44)Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada :
 - a. Pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan, kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah;
 - b. Pemerataan pembangunan PSU permukiman, penanganan kawasan kumuh dan penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu, korban bencana dan korban program pembangunan;
 - c. Perluasan akses air minum pada masyarakat dan pemerataan akses sanitasi layak untuk mencapai SPM;
 - d. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan sistem irigasi berkualitas dan penanganan banjir.

Prioritas ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah, meliputi :

- 1) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 2) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 4) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 5) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 6) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 7) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 8) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- 9) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- 10) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- 11) Program Pengembangan Perumahan;
- 12) Program Kawasan Permukiman;
- 13) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- 14) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 15) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- 16) Program Pengelolaan Pelayaran.

3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kualitas SDA, difokuskan pada:
 - a. Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca;
 - b. Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri;
 - c. Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST;
 - d. Pengurangan risiko bencana melalui upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana.

Prioritas ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah, meliputi :

- 1) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
 - 2) Program Penanggulangan Bencana;
 - 3) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - 4) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 5) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
 - 6) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - 7) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - 8) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - 9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - 10) Program Pengelolaan Persampahan.
-
4. Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing, difokuskan pada:
 - a. Pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penguatan kampung sehat;

- b. Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat ber KB dan kualitas keluarga sejahtera;
- c. Pemantapan kualitas pengelolaan pendidikan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan meminimalkan anak usia sekolah yang tidak sekolah serta pengembangan sekolah inklusi;
- d. Penguatan budaya literasi masyarakat di era digital;
- e. Peningkatan peran wirausaha muda mandiri dalam menumbuhkan perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran;
- f. Peningkatan capaian prestasi olahraga prestasi dan olahraga rekreasi ditingkat regional, nasional dan internasional;
- g. Peningkatan peran SDM dalam pengembangan dan pemasaran budaya serta pelestarian cagar budaya;
- h. Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak.

Prioritas ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah, meliputi :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 5) Program Pengendalian Penduduk;
- 6) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- 7) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- 8) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 9) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 10) Program Pembinaan Perpustakaan;
- 11) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
- 12) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 13) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- 14) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
- 15) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 16) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- 17) Program Pembinaan Sejarah;
- 18) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

- 19) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 20) Program Perlindungan Perempuan;
 - 21) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - 22) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
 - 23) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
 - 24) Program Perlindungan Khusus Anak;
5. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah, difokuskan pada:
- a. Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan kabupaten pintar;
 - b. Optimalisasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah;
 - c. Pengembangan pengelolaan arsip digital;
 - d. Penguatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
 - e. Penguatan dan perluasan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;
 - f. Optimalisasi upaya peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan pendidikan politik masyarakat;
 - g. Pengembangan iklim inovasi dan Penguatan implementasi inovasi daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Prioritas ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah, meliputi :

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 4) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 6) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

- 7) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- 8) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
- 9) Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee;
- 10) Program Penatagunaan Tanah;
- 11) Program Kepegawaian Daerah;
- 12) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 13) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 14) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- 15) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- 16) Program Pengelolaan Arsip;
- 17) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip;
- 18) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 19) Program Perekonomian dan Pembangunan;
- 20) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
- 21) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 22) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 23) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 24) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- 25) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 26) Program Pendaftaran Penduduk;
- 27) Program Pencatatan Sipil;
- 28) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 29) Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
- 30) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 31) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- 32) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 33) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 34) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 35) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- 36) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
- 37) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor;

- 38) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 39) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- 6. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM);
 - b. Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah;
 - c. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan;
 - d. Pengembangan kerjasama antar desa.

Prioritas ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah, meliputi :

- 1) Program Penataan Desa;
- 2) Program Peningkatan Kerja Sama Desa;
- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat;
- 5) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keterkaitan antara prioritas pembangunan tahun 2025 dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Cilacap dalam RPD Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 7
Keterkaitan Tujuan Sasaran RPD Tahun 2023-2026 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Tujuan/Sasaran RPD Tahun 2023-2026
1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, difokuskan pada : a. Peningkatan kualitas produktivitas pertanian dititikberatkan pada peningkatan lahan pertanian berkelanjutan, pengembangan agro industri; b. Penguatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan	Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal, dengan sasaran : a. Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi; b. Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi; c. Meningkatnya investasi dalam penanaman modal; d. Meningkatnya kualitas pertumbuhan perdagangan, dan Usaha mikro Kecil; e. Meningkatnya pengembangan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif.

Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Tujuan/Sasaran RPD Tahun 2023-2026
sarpras pemasaran/ perdagangan dan kolaborasi dengan <i>e commerce</i>; c. Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen; d. Penguatan industri kecil menengah melalui pengembangan diversifikasi produk sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital; e. Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal; f. Optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui penguatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta; g. Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan lumbung pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan; h. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar industri.	
2. Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada : a. Pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan, kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah; b. Pemerataan pembangunan PSU permukiman, penanganan kawasan kumuh dan penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu, korban bencana dan korban program pembangunan;	Meningkatkan Kualitas Infra- struktur, dengan sasaran : a. Meningkatnya kualitas kebinamargaan; b. Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang wilayah; c. Terwujudnya pemenuhan universal akses; d. Meningkatnya capaian reforma agraria; e. Meningkatnya pengelolaan irigasi kewenangan Kabupaten; f. Meningkatnya kinerja perhubungan.

Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Tujuan/Sasaran RPD Tahun 2023-2026
c. Perluasan akses air minum pada masyarakat dan pemerataan akses sanitasi layak untuk mencapai SPM; d. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan sistem irigasi berkualitas dan penanganan banjir.	
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kualitas Sumber Daya Alam (SDA), difokuskan pada: a. Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca;; b. Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri; a. Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran : - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatkan Pengelolaan Bencana, dengan sasaran: Meningkatnya kesiapsiagaan bencana di setiap desa/kelurahan
4. Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing, difokuskan pada: a. Pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penguatan kampung sehat; b. Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat ber KB dan kualitas keluarga sejahtera; c. Pemantapan kualitas pengelolaan pendidikan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan meminimalkan anak usia sekolah yang tidak sekolah serta pengembangan sekolah inklusi;	Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat, dengan sasaran : a. Meningkatnya kualitas Pendidikan; b. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan; c. Meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak; d. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat

Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Tujuan/Sasaran RPD Tahun 2023-2026
d. Penguatan budaya literasi masyarakat di era digital; e. Peningkatan peran wirausaha muda mandiri dalam menumbuhkan perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran; f. Peningkatan capaian prestasi olahraga prestasi dan olahraga rekreasi ditingkat regional, nasional dan internasional; g. Peningkatan peran SDM dalam pengembangan dan pemasaran budaya serta pelestarian cagar budaya; h. Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak.	
5. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah, difokuskan pada : b. Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan kabupaten pintar; c. Optimalisasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah; d. Pengembangan pengelolaan arsip digital; e. Penguatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan; f. Penguatan dan perluasan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan; g. Optimalisasi upaya peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan pendidikan politik masyarakat;	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif, dengan sasaran : a. meningkatnya birokrasi yang akuntabel; b. meningkatnya birokrasi yang kapabel; c. meningkatnya kualitas pelayanan publik; d. meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam pembangunan. Meningkatkan stabilitas keamanan ketentraman wilayah, dengan sasaran : - Menurunnya gangguan keamanan di wilayah

Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Tujuan/Sasaran RPD Tahun 2023-2026
i. Pengembangan iklim inovasi dan Penguatan implementasi inovasi daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.	
6. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan, difokuskan pada: a. Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM); b. Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah; c. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan; d. Pengembangan kerjasama antar desa.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan dengan sasaran : - Meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah pedesaan

Prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap pada perubahan RKPD Tahun 2025 juga dalam rangka mendukung program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Cilacap terpilih periode 2025-2030 yang selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dan menjawab permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 8
Keselarasan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cilacap dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025

Indikator Sasaran Pembangunan	Target Sasaran Cilacap	Target Sasaran Jawa Tengah	Target Sasaran Nasional
a. Pertumbuhan ekonomi	5,40% - 6,10 %	4,9-5,6 %	5,1% – 5,5%
b. Tingkat Pengangguran Terbuka	7,82-7,73 %	4,81% – 4,42 %	4,5% - 5,0%
c. Angka kemiskinan	10,14 %	9,66 % – 9%	8,0% - 7,0%
d. Indeks Pembangunan Manusia	72,91	73,99	0,56*)
e. Inflasi	2,5 % – 4,5 %	2,5 % ± 1%	2,5 % ± 1%

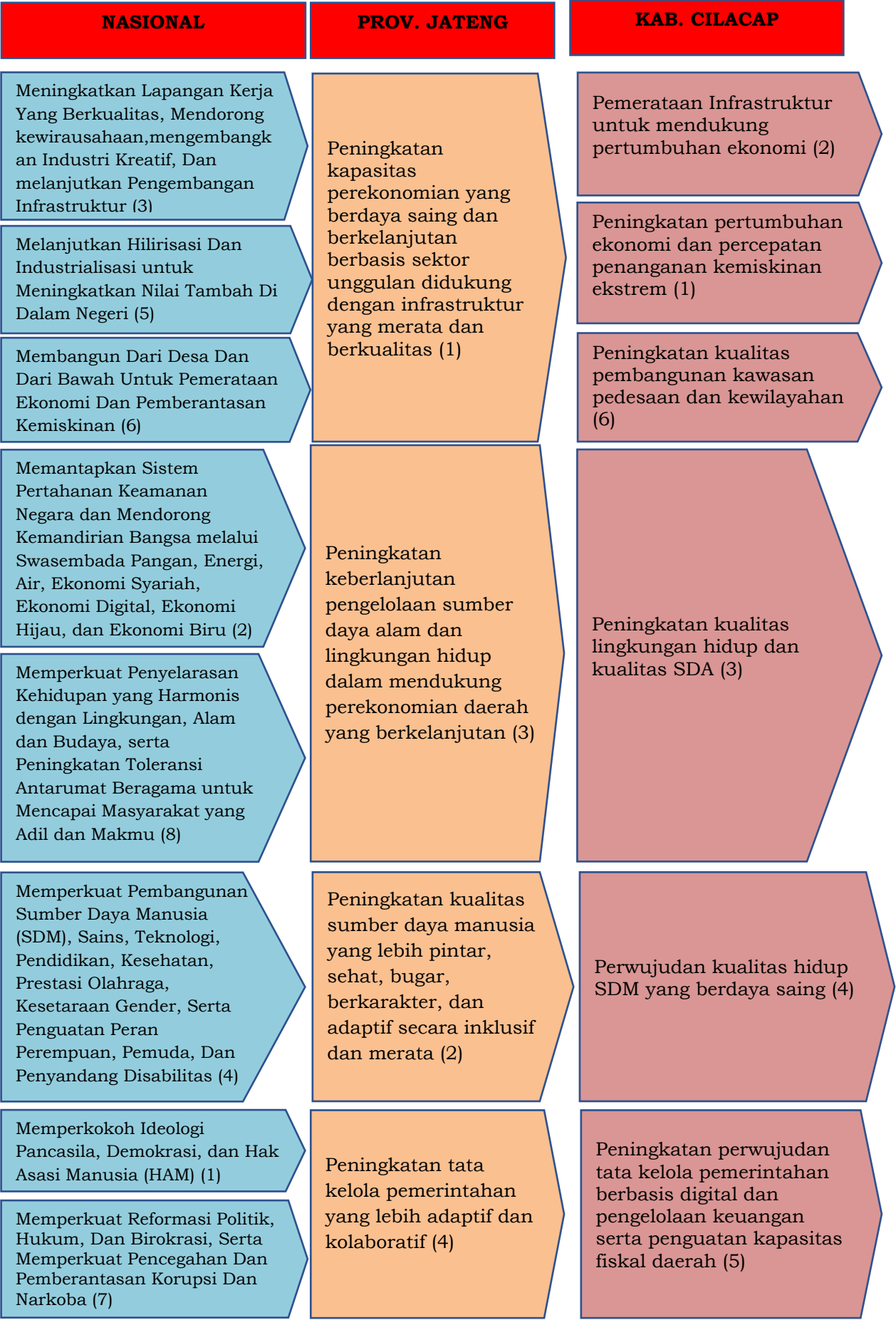
*) Indeks Modal Manusia

Tabel 4. 9
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis (RPD) dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
1.	Belum optimalnya nilai akuntabilitas pelayanan pemerintahan dan reformasi birokrasi	Perwujudan tata kelola pemerintahan (<i>governance</i>): bersih, transparan, kolaboratif, demokratis, dan akuntabel.	Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah (5)
2.	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan sesuai SPBE		
3.	Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kesehatan	Kualitas SDM yang berdaya saing dan berinovasi.	Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing (4)
4.	Meningkatnya penyakit menular dan tidak menular		
5.	Belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pendidikan		
6.	Belum optimalnya pembinaan wirausaha muda		
7.	Masih rendahnya daya saing dan pemanfaatan Iptek serta hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah	Tingkat kesejahteraan masyarakat.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan
8.	Belum optimalnya penurunan kemiskinan		
9.	Masih tingginya angka pengangguran		

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
			penanganan kemiskinan ekstrem (1)
10.	Belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro		Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan (6)
11.	Masih rendahnya tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah		
12.	Belum optimalnya minat investasi dan peningkatan nilai ekspor non migas	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap.	Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (2)
13.	Belum optimalnya capaian Indeks Kualitas Infrastruktur	Infrastruktur yang memadai; Pengembangan kawasan strategis dan kualitas lingkungan hidup.	
14.	Belum optimalnya penanganan sanitasi dan permukiman kumuh		
15.	Belum optimalnya pemenuhan Ruang Terbuka Publik		
16.	Belum optimalnya kinerja pengelolaan persampahan	Pengelolaan dan Penanganan Bencana.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kualitas SDA (3)
17.	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam perwujudan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025 dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dan prioritas Pembangunan Nasional tahun 2025 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 4. 1
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2025

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2025 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025, yaitu :

- a. Pertumbuhan Ekonomi (tanpa migas) sebesar 2,7-3 persen dan (dengan migas) sebesar 5,40-6,10 persen;
- b. Angka Kemiskinan sebesar 10,66-10,14 persen;
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,82-7,73 persen;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,91;
- e. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 87,82; dan
- f. Penurunan Gas Rumah Kaca 739.415 TonCO₂eq.

4.8 Pembangunan Kewilayahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, pada Lampiran IV terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Cilacap masuk ke dalam 3 pembagian kawasan, yaitu:

1. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan perkotaan Cilacap dan kawasan pengembangan industri Cilacap terbagi dalam:

- a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Cilacap, antara lain melalui:
 - 1) Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.
 - 2) Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau.
 - 3) Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.
 - 4) Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.
- b. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Cilacap (PHTC).
- c. Pengembangan SPAM Perkotaan Cilacap.
- d. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanekr, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kabupaten, khususnya pada RSUD Cilacap (PHTC).
- e. Preservasi jalan ruas Cilacap-Kebumen-Purworejo (Lintas Selatan Jawa Tengah).

- f. Pengembangan Kota Agropolitan Cilacap.
 - g. Pengembangan Pelabuhan Cilacap.
 - h. Pembangunan Kilang Minyak Bumi Cilacap.
 - i. Pengembangan koridor industri Cilacap (sektor industri prioritas: industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, industri semen dan bahan konstruksi, industri makanan dan minuman).
 - j. Penguatan Pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.
2. Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Cilacap
- a. Pengembangan pelabuhan perikanan PPS Cilacap.
 - b. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap.
 - c. Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya.
 - d. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat.
 - e. Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan.
 - f. Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan.
 - g. Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan.
 - h. Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Cilacap.
3. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi (Dieng-Serayu-Bogowonto)
- a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Banjarcayana, D.I. Singomerto, D.I. Serayu, D.I. Wadaslintang D.I. Sempor, dan D.I. Tajum.
 - b. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah.
 - c. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
 - d. Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
 - e. Pengembangan dan peningkatan produktivitas holtikultura.
 - f. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan holtikultura.

- g. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area WS Serayu-Bogowonto.
- h. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau.
- i. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- j. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- k. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- l. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.

Kemudian dalam rangka implementasi pengembangan wilayah pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Cilacap ke depan akan mengembangkan ekonomi maritim terintegrasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) maritim dan optimalisasi kawasan industri dan energi.

Arah pengembangan wilayah di Kabupaten Cilacap dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa

Tengah yang ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri pengolahan dan perdagangan jasa dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah. Dalam upaya mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang lebih menekankan pada karakter dan potensi wilayah serta memperlihatkan keberagaman, maka dikembangkan menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP) dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta system permukiman, meliputi: WP Kedungsepur, WP Jekuti, WP Banglor, WP Gelangmanggung, WP Wonobanjar, WP Keburejo, WP Cibalingmas, WP Subosukawonosraten, WP Bregasmalang, dan WP Petanglong. WP Cibalingmas merupakan gabungan dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banyumas. Arah pengembangan WP Cibalingmas diarahkan pengembangannya antara lain untuk peningkatan pengelolaan Pacangsanak sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup. Kawasan perkotaan diarahkan pengembangannya secara terpadu pada koridor kawasan perkotaan Cilacap – Purwokerto - Purbalingga sebagai koridor pertumbuhan ekonomi serta menyelaraskan pengembangan industri Cilacap-Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Bregasmalang), disebutkan bahwa Kawasan Cibalingmas memiliki peran pendukung Kawasan Bregasmalang terutama pada aspek ekonomi, industri, perdagangan/jasa, penyuplai bahan baku pertanian dan migas. Kawasan ini memiliki keunggulan pada sektor: (i). Primer dibidang perikanan, perkebunan, pasir besi, minyak dan gas; (ii). Sekunder dibidang industri batik, logam dan furnitur; serta (iii). Tersier dibidang perdagangan dan pariwisata. Berdasarkan fakta tersebut, maka pengembangan kawasan Cibalingmas difokuskan pada bidang perkebunan, pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan.

Dalam rangka mendukung arah pembangunan kawasan Cibalingmas dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, Kabupaten Cilacap memiliki strategi pengembangan wilayah sebagai berikut:

1. Penguatan kawasan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di perkotaan Cilacap menjadi pusat pertumbuhan dengan skala internasional, nasional dan regional dengan mengoptimalkan kawasan industri pengolahan minyak

dan industri petrokimia, melalui upaya penyiapan kawasan industri untuk mengantisipasi pengembangan kilang pengolah minyak baru melalui RDMP di Kabupaten Cilacap, pengembangan kawasan pelabuhan Tanjung Intan dengan mendukung pembuatan Rencana Induk Pengembangan Pelabuhan Baru, pengembangan Bandara Tunggul Wulung, optimalisasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dan pinggiran melalui penetapan prioritas pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan, penanganan persampahan melalui pendekatan pengolahan sampah untuk bahan bakar pengganti fosil bagi industri yang ada di Kabupaten Cilacap, pengembangan pusat pemerintahan melalui pembangunan sarana terpusat, pengembangan ruang publik dan penataan kawasan yang berorientasi pada penataan kawasan pemukiman dan perumahan.

2. Pengembangan kawasan Majenang dan sekitarnya dengan berorientasi pada penetapan perkotaan Majenang sebagai pusat pertumbuhan yang mampu menjadi pusat pelayanan dari beberapa kecamatan sekitar untuk wilayah Cilacap Barat, yang didukung oleh pengembangan kawasan sekitar dengan berorientasi pada peningkatan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan peningkatan konektivitas antar kawasan, optimalisasi industri skala menengah dan kecil, pengembangan area publik di pusat kecamatan, optimalisasi kawasan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan lahan pertanian pangan dan jaringan sumber daya air, penataan kawasan pemukiman, serta pengendalian ancaman bencana alam.
3. Pengembangan kawasan perkotaan Kroya dan sekitarnya, dengan berorientasi pada penetapan perkotaan Kroya sebagai pusat pertumbuhan yang mampu menjadi pusat pelayanan kecamatan di sekitarnya untuk wilayah Cilacap Timur, dengan didukung oleh peningkatan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan peningkatan konektivitas antar kawasan, pengembangan kawasan industri kecil dan UMKM, pengembangan kawasan pertanian sebagai lumbung pangan, pengembangan sarana prasarana sumber daya air, penataan kawasan pemukiman dan penanganan bencana alam.
4. Peningkatan kawasan Sidareja sebagai pusat pertumbuhan wilayah di selatan wilayah Kabupaten Cilacap yang didukung dengan pengembangan infrastruktur yang terkoneksi dengan jaringan jalan utama (JJLS dan Jalan Tol), pengembangan wilayah perbatasan, peningkatan sistem

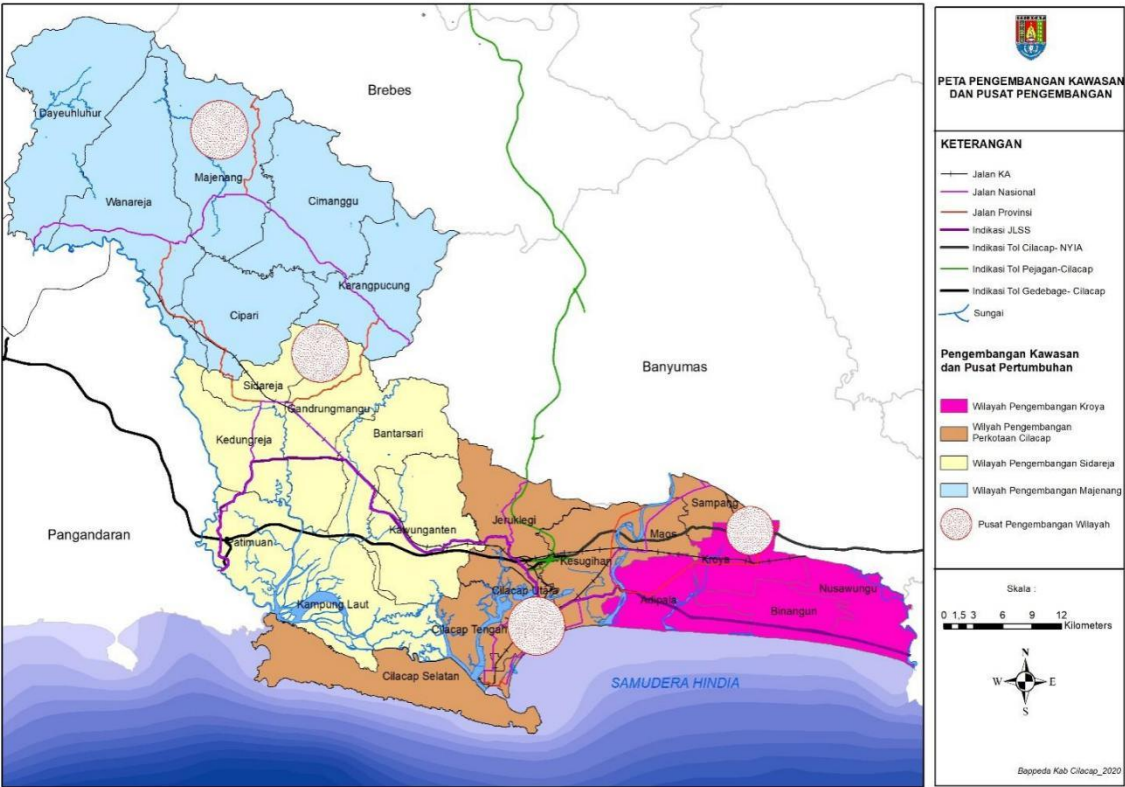
jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pengembangan teknologi budidaya perikanan sebagai basis pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri padat karya, serta mitigasi dan penanganan bencana.

5. Pengembangan kawasan perdesaan yang berorientasi pada peningkatan fungsi kawasan perdesaan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah kawasan pertanian dalam skala luas, peningkatan sarpras pertanian, peningkatan konektivitas antar kawasan, optimalisasi industri kecil dan UMKM, serta mitigasi dan penanganan bencana alam.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah, sektor dan sistem pembangunan kewilayahan di Kabupaten Cilacap diprioritaskan pada:

1. Pembangunan kewilayahan berbasis potensi unggulan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat menjadi penggerak bagi kawasan disekitarnya yang didukung dengan kebijakan penataan kawasan, pengembangan pertanian, pariwisata, industri kecil dan UMKM, sinergitas agropolitan-minapolitan, serta dukungan infrastruktur.
2. Pembangunan berbasis pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan melalui peningkatan konektivitas antar kawasan, pemerataan pusat pusat produksi dan distribusi, pengembangan kawasan pemukiman, jasa dan perdagangan, pemerataan pelayanan infrastruktur dasar serta mitigasi dan penanganan bencana.

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4.2
Peta Pengembangan Kawasan dan Pusat Pengembangan Wilayah Kabupaten Cilacap

Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan kearifan lokal dan keberagaman hasil produk serta menciptakan pemerataan pembangunan melalui sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota setiap tahunnya.

Terkait dengan *progress* pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memberikan dukungan kebijakan melalui :

2. Persetujuan Bupati Cilacap terhadap *Masterplan* Pelabuhan Indonesia Tanjung Intan Cilacap;
3. Keterlibatan dalam inisiasi pembebasan lahan RDMP Pertamina RU IV Cilacap;
4. Penyiapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, dengan luas kurang lebih 5.286 ha, terdiri dari :
 - a. KPI Cilacap di Kecamatan Cilacap Tengah, Kecamatan Cilacap Utara, dan Kecamatan Cilacap Selatan;

- b. KPI Karangandri di Kecamatan Kesugihan, dan Kecamatan Cilacap Selatan;
 - c. KPI Bunton di Kecamatan Adipala;
 - d. KPI Warung Batok di Kecamatan Dayeuhluhur;
 - e. KPI Tinggarjaya di Kecamatan Sidareja;
 - f. KPI Cilacap Timur di Kecamatan Adipala, Kecamatan Binangun, dan Kecamatan Nusawungu;
 - g. KPI Bengawan Donan di Kecamatan Cilacap Tengah, dan Kecamatan Kawunganten; dan
 - h. KPI Provinsi Jawa Tengah di Kecamatan Kesugihan.
5. Surat Bupati Cilacap kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 523/03710/35 tanggal 6 Juli 2020 perihal Permohonan Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambakan dan Pertanian Ketahanan Pangan dalam rangka dukungan terhadap implementasi Kegiatan Perpres 79 Tahun 2021 yaitu: Pembangunan Sarana Prasarana bagi Budidaya Udang Vaname, Kab. Cilacap
 6. Penyusunan *Masterplan* Agrowisata Bantarsari
Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki hamparan lahan seluas $\pm$ 84 Hektar, yang saat ini belum termanfaatkan secara optimal di wilayah Kecamatan Bantarsari. Lahan tersebut dilihat dari aspek lokasi memiliki potensi yang strategis, serta dapat dioptimalkan untuk fungsi pelayanan agrowisata dan penyediaan ruang public.
 7. Penyusunan DED Kawasan Agrowisata Bantarsari
Luas Kawasan Agrowisata dalam DED ini sebesar 8,025 Ha, sebagai dokumen perencanaan teknis untuk pembangunan sarana prasarana kawasan agrowisata berbasis eduwisata dan sebagai acuan bagi pelaksanaan konstruksi;
 8. Penyusunan *Masterplan* Pembangunan Perikanan
Kawasan prioritas pembangunan perikanan untuk perikanan budidaya di Kabupaten Cilacap difokuskan pada 5 wilayah Kecamatan dengan total luasan wilayah 560,79 Ha. Wilayah tersebut terdistribusi di Kecamatan Adipala, Gandrungmangu, Binangun, Kawunganten dan Kampunglaut. Jenis komoditas utama yang dapat dibudidayakan pada kawasan tersebut adalah udang vaname dengan metode tambak biokret di Kecamatan Adipala dan Binangun serta tambak tanah di Kecamatan Kawunganten dan Kampunglaut.

Adapun dukungan program kegiatan yang dialokasikan di Tahun 2025 untuk percepatan implementasi Perpres 79 Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap secara khusus tidak dialokasikan mengingat proyek strategis yang masuk kriteria P1 adalah Pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap yang merupakan kewenangan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

4.9 Invensi dan Inovasi

Inovasi merupakan pengungkit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu alat dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Daerah khususnya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi yang ditujukan untuk solusi permasalahan nasional, memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika, dan menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat. Invensi dan inovasi dihasilkan dari penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan, alih teknologi, rekayasa balik, intermediasi teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau komersialisasi teknologi. Adapun aktifitas terkait inovasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 di Kabupaten Cilacap adalah : Pendampingan Desa Inovasi; Lomba Krenova; Fasilitasi Penilaian Mandiri Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Inovation Government Award (IGA); Fasilitasi HAKI; Pameran Produk Inovasi (PPI); Diseminasi Hasil Penelitian Perguruan Tinggi; Diseminasi Hasil Krenova; dan Diseminasi Lomba Inovasi Daerah (LINDA).

Pemerintah Kabupaten Cilacap mendorong optimalisasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan inovasi Perangkat Daerah. Beberapa inovasi yang akan dikembangkan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana tertuang dalam dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4. 10
Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
1	DINAS P DAN K	Forum Konsultasi Akreditasi Sekolah Dasar	Forum yang bertujuan untuk menjembatani dinas dan sekolah yang akan melaksanakan akreditasi, untuk meningkatkan jumlah dan hasil dalam akreditasi. Peran forum ini untuk mengkomunikasikan sekolah yang akan diakreditasi dengan badan akreditasi/asessor, mengkoordinir sekolah yang akan dikreditasi, dan memfasilitasi sekolah yang akan diakreditasi untuk meningkatkan sekolah yang akan diakreditasi dan presentase hasil akreditasi.	1. Jumlah sekolah yg terakreditasi bertambah 2. Meningkatnya score atau nilai akreditasi sekolah	1. Meningkatkan mutu/kualitas sekolah 2. Meningkatnya kualitas Pendidikan jenjang SD di kab Cilacap	1. Terakreditasinya SD di kab. Cilacap 2. Sekolah lebih siap saat diakreditasi
		SIMONAS (Sistem Monitoring Siswa)	Merupakan sistem layanan yang digunakan untuk menyimpan, mengolah dan mengakomodir kebutuhan dalam proses mutasi siswa termasuk di dalamnya kenaikan jenjang tingkat siswa secara regular, perubahan biodata siswa dan perpindahan siswa ke satuan sekolah yang berbeda.	Terbentuknya inovasi SIMONAS,	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Target tahun 2026 yaitu 100 %	Rata-Rata Lama Sekolah target tahun 2026 : 7,82 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Tari Gotik EsTePe (Pendataan Mandiri Guru dan Tenaga Kependidikan berSPT)	Yaitu aplikasi yang digunakan untuk mendata secara mandiri GTT/PTT yang masih aktif khususnya yang telah memiliki SPT yang berada di sekolah-sekolah negeri (TK, SD, SMP) di Kabupaten Cilacap agar tersedia data pendidikn dan kependidikan Non ASN yang akurat. Dengan data yang akurat akan mempercepat dalam penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) pada setiap tahunnya.	Terwujudnya aplikasi Gotik EsPeTe	Database Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada satuan pendidikan negeri (TK, SD, SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cilacap	Akurasi data Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non ASN yang telah memiliki Surat Perintah Tugas
		Virtual Cagar Budaya	Museum virtual untuk menampilkan informasi terkait sejarah budaya Cilacap, peninggalan pra sejarah dan cagar budaya yang ada di Cilacap berbasis media interaktif.	Terwujudnya inovasi Virtual Cagar Budaya	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan target tahun 2026 : 31,25 %	Persentase obyek pemajuan kebudayaa yang target diimplementasikan tahun 2026 : 40 %
		SiKAP SMES	Merupakan layanan SKPP sementara yang berbasis sistem informasi dengan harapan bisa mempermudah dan mempercepat mendapatkan SKPP sementara.	Terwujudnya inovasi pelayanan publik untuk layanan SKPP Sementara	Persentase pelayanan PNS yang membutuhkan SKPP sementara pada tahun 2026 : 100 %	Peningkatan waktu pelayanan lebih singkat 1 hari
		Aplikasi LAKON PDK (Layanan Kontrak Online) di Lingkungan Dinas	Merupakan layanan Kontrak Online dengan adanya LAKON PDK diharapkan mampu menghemat biaya dan waktu (tidak perlu datang langsung ke tempat pelayanan), akses cepat dan tepat, adanya peringkasan prosedur konvensional karena sudah berbasis online dan mampu mengembalikan <i>trust society</i> .	Terwujudnya aplikasi Layanan Kontrak Online	Implementasi Pengelolaan dokumen kontrak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cilacap	Optimalisasi pengelolaan dokumen kontrak terutama pada proses penerbitan dokumen kontrak

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			Layanan LAKON PDK dapat diakses di https://lakon.pdk.cilacapkab.go.id			
		Aplikasi SI KEBUD (Ensiklopedia Kebudayaan) Cilacap	Merupakan katalog virtual yang menampilkan berbagai objek kebudayaan meliputi kesenian, cagar budaya, upacara adat, dan makanan tradisional yang ada di Kabupaten Cilacap. Aplikasi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang potensi kebudayaan di Kabupaten Cilacap dan menjadi media pembelajaran seni budaya pada instansi pendidikan.	Terciptanya inovasi dalam bentuk aplikasi android yang merupakan literasi digital tentang ensiklopedia Objek Pemajuan Kebudayaan Cilacap	Persentase literasi tentang pengetahuan kebudayaan lokal baik berupa buku ataupun literasi digital pada instansi pendidikan.	Meningkatnya minat baca anak dan efektifitas pembelajaran seni budaya melalui literasi digital berbasis aplikasi android. Hasil survei pada guru seni budaya menyatakan bahwa 50% guru menyatakan aplikasi SIKEBUD SANGAT EFEKTIF sebagai media pembelajaran, sementara 45% menyatakan EFEKTIF, dan 5% menyatakan CUKUP EFEKTIF.
2	DINKES					
	- UPT Puskesmas Cilacap Tengah I	BAWA GUNTING (PMBA Dua Tahun Guna Cegah Stunting) dan PMT NUGET TIGA BINTANG				
	- UPT Puskesmas Cilacap Tengah II	SENI SEHAT (Septik-tank Mini Sederhana Ekonomis Hygienis Aman Tertib)	Teknologi pembuatan mini septic tank anti kuras bertujuan untuk meningkatkan capaian ODF di kabupaten Cilacap. Keunggulan teknologi ini adalah tidak perlu menguras (karena diberi anti bakteri),	Tersedianya septik tank yang Mini Sederhana Ekonomis Hygienis Aman Tertib	Persentase Rumah Tangga perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS target tahun 2026 : 86 %	Indeks Keluarga Sehat target tahun 2026 : 0,3

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			murah (karena dari bahan bekas dream plastik / kaleng cat ukuran 25 kg), mudah pembuatannya karena tidak memerlukan instalasi, serta tidak memerlukan lahan yang luas. Limbah dari Closet akan ditampung ke tanki pertama, lalu masuk ke tanki utama (terjadi proses dekomposisi) lalu ke tanki ketiga sudah berbentuk cair, di titrasi dengan kaporit dan di buang ke kolam/peresapan. Seni Sehat merupakan salah satu inovasi yang bertujuan untuk percepatan capaian Desa ODF. Dimana Capaian Desa SBS (ODF) Berdasarkan Data STBM SMART Kabupaten Cilacap baru mencapai 11,27 %. Perkembangan Desa ODF per tahun sangat lambat (peningkatan 1%), sehingga diharapkan seni sehat dapat memberikan kontribusi dalam percepatan Desa ODF. Seni Sehat merupakan Inovasi Septictank yang terbuat dari Drum bekas cat yang memiliki beberapa keunggulan yaitu mudah pembuatannya, murah biayanya karena memakai barang bekas (Rp. 500.000,- per unit), bahannya tahan lama dan bentuknya bisa menyesuaikan lokasi dan jenis tanah. Kabupaten Cilacap telah			

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			menerapkan Seni Sehat sebanyak 70 unit tersebar di 9 wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Cilacap. Dalam kejuaraan Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah Seni Sehat mendapatkan Juara I dan Juara Favorit, dan salah satu reward nya adalah pada tahun anggaran 2022 Seni Sehat dialokasikan sebanyak 1000 unit yang akan disebar di seluruh Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah.			
	- Sie Jamkes dan Mutu Pelayanan Kesehatan	PKP “award”	Merupakan suatu bentuk penghargaan kepada Puskesmas yang memperoleh nilai terbaik yang dinilai dari indikator Penilaian Kinerja Puskesmas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja puskesmas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.	Penghargaan puskesmas	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai target tahun 2026 : 91,07 %	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar target tahun 2026 : 100 %
	- UPT Puskesmas Majenang II	“GJOS 121” Gerakan Jamban Orang Sehat 1 Bulan 2 Jamban 1 RT	GJOS 121 merupakan kegiatan inovasi puskesmas dalam pengadaan jamban sehat dengan strategi setiap 1 bulan membuat 2 jamban sehat dalam 1 RT. Jamban sehat yang dievaluasi adalah Jamban Sehat Permanen (JSP), Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP), dan Jamban Sharing (1 jamban untuk banyak KK) melalui aplikasi STBM SMART yang di download di Play Store. Dengan	Tersedianya Jamban Sehat Orang Sehat (1 Bulan 2 Jamban 1 RT)	Persentase Rumah Tangga perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS target tahun 2026 : 86 %	Indeks Keluarga Sehat target tahun 2026 : 0,3

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			adanya inovasi GJOS diharapkan ada penekanan pada promotif dan preventif untuk memutus siklus penyebaran penyakit yang terkait dengan sanitasi.			
		AJAK AKU (Aksi Jemput Paket Dahak Ke Rumah)	AJAK AKU merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan petugas TB & Kader Kesehatan dalam memperoleh suspek / sampel dahak (baru) yang ada dilingkungan msyarakat dengan cara melakukan kunjungan rumah dan menjaring semua suspek secara aktif (Aktif Case Finding)	Tercapainya target SPM TB (Standar Pelayanan Minimal) di Puskesmas	Tercapainya target kinerja atau SPM puskesmas terhadap angka penemuan suspek TB (baru), Persentase penemuan terduga TB target tahun 2026 : 100%	Tercapainya temuan terduga TBC di setiap bulan dan ada kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan khususnya dalam pelayanan program TBC, Capaian SPM setiap bulan : 100%
		RAJA GUNTING (Gerakan Remaja Cegah Stunting)				
		PIONIR (Pelayanan Informasi Obat Rasional dan Informatif)				
	- RSUD Cilacap	SISANi (Sistem Informasi Semua ada Disini)	SISANi (Sistem Informasi Semua ada Disini) Adalah aplikasi berbasis web dan android yang terdiri dari fitur pendaftaran rawat jalan secara online, informasi ketersediaan tempat tidur rawat inap, Jadwal [praktik dokter, Tracking resep obat pasien mendapat kepastian waktu kapan	Pelayanan rawat jalan semakin cepat dengan adanya pendaftaran online, pasien dapat mengetahui jadwal praktek dokter, pasien dapat mengetahui	Inovasi ini berhasil memangkas waktu pelayanan rawat jalan yang disesuaikan dengan Indikator mutu nasional rata - rata waktu tunggu rawat jalan 85,62 menit / pasien (2020),menjadi	Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan target tahun 2026 : 100

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			obatnya sehingga dapat menunggu di rumah atau pun di tempat lain dengan nyaman tanpa harus antri di ruang tunggu pelayanan Farmasi Rawat Jalan.	ketersediaan tempat tidur rawat inap, Terselenggaranya sistem antrian obat pasien rawat jalan.	83,84 menit / pasien (2022). Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rawat jalan, Peningkatan kepuasan terhadap Instalasi farmasi dari 71,50 kurang baik (2021) menjadi 81 sangat baik (2022).	
		LANTAS SANTAP TB RO	Layanan Tuntas Satu Atap TBC Resistensi Obat (LANTAS SANTAP TB RO) Mempercepat dan mempermudah pelayanan bagi penderita TB-RO hanya di satu tempat pelayanan PARU CENTER. Disamping untuk mengantisipasi resiko penularan kepada pasien lain juga dapat meningkatkan pemahaman bagi pasien TB- RO melalui pendampingan dan konseling secara berkesinambungan. Inovasi ini masuk dalam Top 20 KIPP Provinsi Jawa Tengah.	Terselenggaranya layanan TBC Resistensi Obat secara lebih cepat dalam satu atap	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan target tahun 2026 : 100 %	Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan target tahun 2026 : 100
		LENTERA HATI	Layanan Lanjut Usia Sejahtera Sehat Idaman (LENTERA HATI) Pasien Geriatri adalah pasien Lanjut Usia dengan multi penyakit dan/atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan	Tersedianya layanan lanjut usia (Geriatri) dengan multi penyakit dan/atau gangguan akibat penurunan fungsi	Jumlah warga yang mendapatkan pelayanan Lanjut Usia Syarat target tahun 2026 : 100 %	Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan target tahun 2026 : 100

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan Multidisiplin yang bekerja secara Interdisiplin. Pelayanan geriatri diberikan untuk para lansia yang berumur lebih dari 60 tahun keatas	organ, psikologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin.		
		SIGAP STROKE	Siap Identifikasi Kegawatan Pasien Stroke (SIGAP STROKE) program/metode deteksi dini untuk mengenali tanda dan gejala stroke.	Terwujudnya keterampilan untuk mengidentifikasi Kegawatan Pasien Stroke secara dini	Persentase menurunnya angka kesakitan dan kecacatan akibat penyakit target tahun 2026 : 23%	Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan target tahun 2026 : 100
		SINAR SENJA CILACAP	“SINAR SENJA CILACAP” (<i>SharINg gambar EKG SErangaN JAntung di Kabupaten CILACAP</i>) merupakan suatu program aplikasi dengan menggunakan “platform digital” yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi keterlambatan sistem (<i>system delay</i>) yang terjadi pada saat penanganan pasien dengan kasus Sindrom Koroner Akut yang terjadi di daerah Kabupaten Cilacap. Sehingga pasien dengan kasus Sindrom Koroner Akut dapat langsung tertangani dan mendapatkan advis	Terwujudnya percepatan penanganan pasien dengan kasus Sindrom Koroner Akut yang terjadi di daerah Kabupaten Cilacap, sehingga dapat lebih meningkatkan angka harapan hidup pasien dan dapat meminimalisir kerusakan atau	Dari semua kasus yang dikonsultasikan via aplikasi “SINAR SENJA CILACAP”, sebanyak 53,85% dirujuk ke RSUD Cilacap. Rata-rata kecepatan respon dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dalam menjawab konsultasi via aplikasi	Lama rawat inap pasien yang dirawat di RSUD Cilacap paling banyak adalah 5 hari.

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			terapi secara langsung dari dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah.	komplikasi yang terjadi pada jantung.	“SINAR SENJA CILACAP” adalah 8.7 menit.	
		Program RENALIS (Ruang Edukasi Pasien Gagal Ginjal Kronis)	RENALIS atau Ruang Edukasi Pasien Gagal Ginjal Kronis adalah program edukasi bagi pasien Gagal Ginjal Kronis dan keluarga di Unit Dialisis RSUD Cilacap serta pengunjung dan masyarakat luar Rumah Sakit.	Tersedianya program promosi Kesehatan yang disusun secara teratur dan berkesinambungan dengan edukator dari beragam profesi yang ditentukan melalui SK Direktur, tersedianya materi yang menarik serta mudah dipahami sesuai dengan pedoman PERNEFRI, serta pemanfaatan media sosial dan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) untuk menyebarluaskan informasi sehingga bermanfaat pula untuk banyak	Peningkatan pengetahuan, kepatuhan dalam terapi, terbentuknya sikap mental positif dan meningkatnya motivasi serta semangat hidup berdampak baik terhadap kondisi klinis pasien. Kondisi klinis ini dapat dilihat dari perbaikan kadar hemoglobin dan Tekanan Darah Pasien serta angka rawat inap yang terus menurun.	Kualitas Kesehatan dan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronis yang meningkat

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
				Masyarakat luar Rumah Sakit.		
		GOTUBALL (Goyang Inpartu Dengan Gymball)	Gerakan menggoyangkan panggul ke beberapa sisi sesuai arahan menggunakan bola besar yang terbuat dari lateks (Gymball) yang bertujuan memperlancar persalinan.	Tercapainya proses persalinan yang lancar dan minim komplikasi pada pasien.	Meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat untuk bersalin di RSUD Cilacap.	Pada Periode persalinan di Bulan Januari-Mei 2023 menunjukkan angka keberhasilan 68 % partus spontan yang menggunakan exercise dengan Gymball.
		SURFACE 124 (Surveilans Faktual Dan Cepat 1 x 24 Jam Pada Penyakit Potensial Wabah Di RSUD Cilacap)	SURFACE 124 (Surveilans Faktual Dan Cepat 1 x 24 Jam Pada Penyakit Potensial Wabah Di RSUD Cilacap) adalah upaya deteksi dini kejadian luar biasa. Surface 124 merupakan sistem pelaporan penyakit potensial wabah yang mengintegrasikan surveilans aktif RS dan surveilans berbasis laboratorium yang memanfaatkan fitur dari SIMRS dan terhubung dengan WhatsApp Gateway sehingga penyampaian informasi menjadi lebih cepat.	Terselenggaranya kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya KLB.	1. Penggunaan paperless pada pelaporan penyakit 2. Ketepatan pelaporan pada website SKDR meningkat, pada tahun 2022 capaiannya adalah 96,15% sedangkan pada tahun 2023 sampai minggu ke-45 adalah 97,78%. 3. Jumlah partisipasi ruangan yang melaporkan penyakit	Meningkatnya kecepatan respon oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
					potensial wabah meningkat. 4. Ketepatan pelaporan pada 1x24 jam sejak penegakkan diagnosis atau selama pasien dirawat di RS meningkat. 5. Jenis penyakit yang dilaporkan dalam aplikasi SKDR semakin banyak, 6. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran petugas dalam mengenali dan merespon jenis penyakit yang berpotensi wabah.	
	Kega-Gizi	Ceting di Meja (Cegah Stunting Dari Mulai Remaja)	Merupakan kegiatan dalam upaya penurunan stunting yang diawali dari remaja putri baik di sekolah maupun di masyarakat, yang bertujuan menurunkan prevalensi anemia bagi WUS khususnya remaja putri dan peningkatan cakupan konsumsi	Terselenggaranya kegiatan dalam upaya penurunan stunting yang diawali dari remaja putri baik di sekolah	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan target tahun 2026 : 100 %	Indeks Keluarga Sehat target tahun 2026 : 0,3

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri (target RAD-PG sampai tahun 2024, 40%). Remaja Putri yang mengalami anemia, KEK (Kurang Energi Kronik) menjadi penyebab dasar calon ibu bayi yang tidak berkualitas, dimana dapat melahirkan bayi yang kurang gizi antara lain BB rendah, PB < 47 Cm bagi perempuan, PB < 48 Cm bagi laki-laki) yang beresiko stunting. Sehingga perlunya pencegahan sejak mulai remaja putri. Adapun sasaran kegiatan ini, meliputi : 1. Masyarakat, yang melibatkan kader, karang taruna, dinas terkait baik di desa, posyandu remaja, maupun melalui wadah karng taruna dan PKK 2. Di Institusi Sekolah Siswa putri (SMP/SLTA) mendapat sosialisasi / workshop tentang penanggulangan anemia dan pentingnya konsumsi Tablet Tambah darah secara rutin setiap seminggu sekali, serta pencaanangan minum Tablet tambah Darah (TTD) bersama dimasing-masing institusi sekolah yang dipandu oleh petugas kesehatan (Puskesmas /	maupun di masyarakat.		

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			Dinas Kesehatan), yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan HB dan pengdan ukuran LILA (Lingar Lengan Atas) Uraian Kegiatan Ceting Di Meja, sbb: 1. Advokasi tingkat Desa, Kecamatan & Kabupaten 2. Workshop, sosilasisi, KIE dan penyediaan leaflet 3. Penyediaan Tablet Fe (Tambah Darah) 4. Pemeriksaan Hb dan Lila 5. Distribusi Tablet Fe dan Minum Bersama			
	Promosi Kesehatan, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kampung Sehat	Kampung Sehat adalah Kampung yang penduduknya memiliki sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari serta masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Target RPJMD 2017-2024 terbentuk 24 Kampung se-Kabupaten Cilacap (masing-masing kecamatan 1 kampung)	Terselenggaranya kampung yang penduduknya memiliki sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri	Persentase Rumah Tangga PHBS target tahun 2026 : 86 %	Indeks Keluarga Sehat target tahun 2026 : 0,3

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			Tahapan Kampung Sehat Tahun 2022 : 1. Pertemuan Teknis Tim Kampung Sehat 2. Sosialisasi Kampung Sehat Tingkat Kabupaten 3. Sosialisasi Kampung Sehat 4. Monitoring dan Pembinaan 5. Pelaksanaan Lomba Kampung Sehat Tingkat Kecamatan serta Penyerahan Piagam dan Piala 6. Penilaian Berkas Penentuan 10 Besar Tingkat Kabupaten 7. Penilaian Lapangan Lomba Kampung Sehat Tingkat Kabupaten 8. Pembinaan Kampung Sehat Kriteria kampung Sehat terdiri dari : 1. Kelembagaan kampung Sehat 2. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat 3. Pemberian ASI Eksklusif 4. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 5. Rumah terdapat jendela difungsikan/dibuka 6. Pelaksanaan desa Siaga 7. Peran Posyandu. Peningkatan gizi dan penurunan angka kematian ibu 8. Peningkatan germas			

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			9. Pencegahan penyakit DBD 10. Kriteria tambahan kampung sehat			
	RSUD Majenang	Dor to Door (Drug on The Road)	Sebuah proedur pengiriman obat ke rumah pasien (terutama lansia) wilayah Kecamatan Majenang.	Terlaksananya pengiriman obat bagi pasien (terutama lansia) di wilayah Kecamatan Majenang	Meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan RSUD Majenang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Sahabat Sehat	Sebuah Prosedur fasilitasi transportasi pasien dialisis dari rumah pasien menuju RSUD Majenang dan sebaliknya dengan tujuan memudahkan akses pelayanan.	Terlaksananya bantuan transportasi pasien dialisis wilayah Kecamatan Majenang, Cipari dan Sidareja ke layanan dialisis	Meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan RSUD Majenang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		SIAP MATA (Sistem Informasi Antrian Pendaftaran, Tempat Tidur dan Aduan Masyarakat)				
	Puskesmas Kedungreja	Poljitu				
	Puskesmas Majenang I	ANTAR CAREDOK PEUDES (Antenatal Care Bidan	Inovasi yang berhubungan dengan pemeriksaan ANC di Puskesmas Majenang I yang dilakukan tidak hanya oleh Bidan namun juga Dokter Umum yang telah diberikan pelatihan mengoperasikan alat Ultrasonografi (USG) pada pemeriksaan obsgyn dasar	Tidak ada kematian Ibu pada tahun 2022-2024 Pada Puskesmas Majenang I	Masalah pada ibu hamil lebih cepat terdektesi secara dini. Meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaanAntenatal	Meningkatkan derajat kesehatan pada Ibu hamil

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Kolaborasi Dokter Plus USG)	untuk menunjang penilaian klinis yang tepat dan akurat terhadap kehamilan.		Care (ANC) Terpadu dan pemeriksaan USG saat hamil.	
		SIPITALOKA (Sistem Pendaftaran Cepat Tiga Loker Antrian)	Inovasi SIPITALOKA (Sistem Pendaftaran Cepat Dengan 3 Loker Antrian) merupakan inovasi dibagian pendftaran dengan membuat sistem antrian menjadi 3 loket antrian.di mana sistem pelaksanaannya dengan metode pemanggilan 2 2 1, yaitu 2 Lansia, 2 balita, dan 1 umum.	Dengan SIPITALOKA selain pelayanan pendaftaran, pelayanan pemeriksaan umum hingga pengunjung pulang juga sudah sangat cepat dan tepat, hal ini dibuktikan pelanggan datang ke puskesmas hingga pasien pulang kurang lebih membutuhkan waktu 30 menit yang semula membutuhkan waktu 1 sampai 1,5 jam untuk menunggu dan dengan hasil survey kepuasan masyarakat mendapat kenaikan yang signifikan 14% menjadi 91.01 % dari 77,01%.	Tidak terjadi penumpukan antrian diruang pendaftaran, menurunkan waktu tunggu pengunjung menjadi lebih singkat, mengurangi adanya penularan kasus penyakit, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas.	Meningkatnya kepuasan pengunjung Puskesmas Majenang I
	Puskesmas Cimanggu II	GAYENG NING ATI (Gerakan Layanan Skrinning, Aktif Temukan Hipertensi)	Pelaksanaan gerakan layanan skrening PTM aktif berbasis masyarakat untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan pada usia 15 tahun lebih serta menemukan sedini mungkin kasus kasus PTM(Hipertensi) yang ada di seluruh wilayah puskesmas Cimanggu 2	Meningkatnya prosentase jumlah penderita hipertensi pada usia 15 tahun lebih yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Meningkatnya cakupan sasaran USPRO yang terscrening PTM	SPM Usia produktif tercapai

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
	Puskesmas Cilacap Utara I	LAPIS LEGIT (PELAYANAN PRIMA SECARA LENGKAP, DIGITAL, TERPADU)	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas dengan memberikan pelayanan melalui teknologi digital baik pelayanan di upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan administrasi dengan memanfaatkan media baik WA, Facebook, Ig dan tiktok yang dimiliki Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan perorangan maupun pelayanan kepada masyarakat, dengan terselenggaranya pelayanan promosi kesehatan yang menarik di puskesmas	Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan semakin luas baik masyarakat di wilayah kerja puskesmas cilacap utara 1, maupun di luar wilayah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		GERTAK TRITMIL (Gerakan Serentak Triple Eliminasi pada Ibu Hamil)	Merupakan suatu gerakan yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan triple eliminasi pada ibu hamil (sifilis, hiv dan hepatitis)	Tercapainya cakupan eliminasi hiv, sifilis dan hepatitis pada ibu hamil	meningkatnya capaian pemeriksaan triple eliminasi pada ibu hamil	Ibu hamil semakin sehat dengan diteksi sedini mungkin HIV, Sifilis dan Hepatitis
		GEMPITA (Gerakan sEdekah saMpah Puskesmas cilacap uTarA I)	Merupakan suatu gerakan untuk mengurangi pencemaran sampah rumah tangga dengan melakukan pemilahan sampah yang memiliki nilai ekonomis seperti botol plastik, gelas plastik, kardus, kertas atau sampah lainnya yang bernilai ekonomis. Dana yang terkumpulkan dari hasil sedekah sampah dapat membantu kaum dhuafa/masyarakat yang membutuhkan, dan dapat membantu mendanai program kesehatan masyarakat di wilayah Puskesmas Cilacap Utara I.	Masyarakat sadar akan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga, Masyarakat mengetahui bahwa sampah dapat dikelola secara sederhana melalui gerakan sedekah sampah yang berpotensi sebagai amal ibadah, Dana yang terkumpulkan dari hasil sedekah sampah dapat membantu kaum dhuafa/masyarakat yang membutuhkan,	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
				dan dapat membantu mendanai program kesehatan masyarakat di Puskesmas Cilacap Utara I.		
		HP BARU (Hasil Pemeriksaan aBnormAl di Rujuk ke poli pandU)	Hampir 40% pasien yang dilakukan deteksi dini didapatkan hasil pemeriksaan yang abnormal, dengan hasil pemeriksaan yang abnormal masih dianggap hal biasa, dan belum ada pendampingan. padahal dari skrining awal lah maka Penyakit Tidak Menular (PTM) bisa dikendalikan dengan cara edukasi menerapkan pola hidup sehat serta pemeriksaan-pemeriksaan lain yang bisa diprediksi melalui pemeriksaan di poli Pandu Penyakit Tidak Menular (PTM) yaitu dengan prediksi charta. Maka dari itu pentingnya gerakan dilakukan tindak lanjut dan pendampingan dengan pemeriksaan yang komprehensif dan prediksi charta di Poli Pandu akan meminimalkan terjadinya Penyakit Tidak Menular (PTM).	Mayarakat akan sadar pentingnya deteksi Penyakit Tidak Menular (PTM)sedini mungkin , masyarakat akan terkontrol kehatanya setelah dilakukan deteksi dini guna mencegah Penyakit Tidak Menular (PTM), serta mendapatkan edukasi terkait pola hidup sehat.	Meningkatkn kesaadar masyarakat pentingnya deteksi Penyakit Tidak Menular (PTM)sedini mungkin , serta pasien akan terkontrol kehatanya	menurunkan angka Penyakit Tidak Menular (PTM)
	Puskesmas Dayeuhluhur II	Giat selebritis (strategi cepat seleksi batuk terduga tuberkulosis)	Integrasi kegiatan dalam gedung dan luar gedung dalam mengidentifikasi dan memisahkan orang dengan keluhan/ gejala TBC melalui uji skrining dimasukkan dalam kriteria terduga TBC, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk menegakkan diagnosa, pengobatan, pemantauan, dan evaluasi. Uji skrining melibatkan lintas sektor	Tercapainya peningkatan cakupan penemuan dan deteksi dini penyakit TBC untuk mendapatkan tata laksana sesuai standar.	1. Meningkatnya penjarangan terduga TBC dan penemuan kasus TBC. 2. Terselenggaranya penatalaksanaan sesuai standar pada orang dengan penyakit TBC secara dini.	

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan format skrining, ataupun masyarakat melakukan skrining TBC secara mandiri melalui aplikasi mobile yang disediakan.		3. Meningkatnya target capaian Standar Pelayanan Minimal "Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis" 4. Meningkatnya pelayanan kesehatan berkualitas untuk masyarakat Dayeuhluhur yang sehat dan mandiri.	
		Photoshoot Artis Bergaya (Photoshoot dan akte gratis bersalin di puskesmas dayeuhluhur	Pelayanan Photoshoot dan Pembuatan Akta Kelahiran Gratis bagi semua Ibu yang bersalin di Puskesmas Dayeuhluhur II.	Tercapainya peningkatan capaian persalinan di Puskesmas Dayeuhluhur II	Meningkatkan capaian persalinan di Puskesmas Dayeuhluhur II	1. Meningkatkan capaian Persalinan di Puskesmas Dayeuhluhur II 2. Masyarakat mendapatkan foto bayi baru lahir dan Akta kelahiran secara gratis dan bersalin sehat di Puskesmas untuk mencegah terjadinya kematian ibu dan bayi
		Jebol pandu iva danis (jemput bola pemeriksaan terpadu iva dan payudara oleh tenaga klinis	Jebol Pandu IVA kegiatan jemput bola sasaran IVA ke semua wilayah kerja Puskesmas Dayeuhluhur II untuk dilakukan pemeriksaan IVA. kegiatan ini dilakukan diluar gedung	Tercapai peningkatan cakupan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara untuk mendapatkan tata laksana sesuai standar.	1. Memberikan pelayanan kepada Wanita Usia subur untuk deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara. 2. Terselenggaranya tata laksana sesuai standar pada wanita usia subur yang IVA Positif atau ada benjolan pada payudara. 3. Meningkatkan capaian cakupan deteksi dini kanker leher rahim	1. Cakupan DD kanker leher rahim dan kanker payudara meningkat. 2. Wanita usia subur yang rumahnya jauh dapat melakukan pemeriksaan lebih dekat

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
					dan kanker payudara. 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas untuk masyarakat Dayeuhluhur yang sehat dan mandiri.	
	Puskesmas Adipala I	BILANG MAS ADJI (Bincang Pelanggan Puskesmas Adipala Siji)				
3	DPUPR	SIMBAJA	Merupakan inovasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap untuk menginformasikan kondisi jalan Kabupaten Cilacap terkini.	Terselenggaranya model pelaporan kondisi jalan Kabupaten terkini secara cepat dan <i>up to date</i> berbasis website	Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik target tahun 2026 : 77 %	Tingkat kemantapan jalan target tahun 2026 : 77 %
4	DINAS PSDA	KEKASIH: Kegiatan Kali Bersih	Kegiatan Kali Bersih (KEKASIH) merupakan kegiatan berbasis masyarakat sungai dengan fasilitator dari sektor government dan didukung peran swasta dengan mengoptimalkan CSR sehingga didapat sibiose yang saling mendukung antar sektor sehingga kegiatan KEKASIH dapat dilaksanakan secara terarah dan tepat sasaran.	Terjalinnya simbiosis mutualisme antar sector untuk membersihkan sungai	Persentase pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air target tahun 2026 : 11,00 %	Debit air yang tersedia target tahun 2026 : 0,61 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		RISDA : Ruang Informasi Sumber Daya Air	Risda (Ruang Informasi Sumber Daya Air) merupakan ruang digital media interaktif (<i>softmedia</i>) yang berisi kumpulan data <i>digital content</i> yang terdiri dari <i>data movie</i> , <i>digital vector</i> dan <i>digital form</i> . RISDA berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi dan perolehan data aktual terkait sumber daya air. RISDA dapat diintegrasikan menjadi <i>offline system</i> dan <i>online system</i> .	Terselenggaranya <i>softmedia</i> (movie, fector, form) untuk sarana penyebaran informasi dan perolehan data aktual terkait sumber daya air	Persentase ketersediaan penunjang data SDA target tahun 2026 : 67,69 %	Debit air yang tersedia target tahun 2026 : 0,61 %
		Pengoperasian Pintu Air Irigasi Sistem Portabel	Pengaturan debit merupakan aktivitas penting dalam operasi jaringan irigasi. Hal ini umum dilakukan menggunakan pintu bukaan bawah yang memiliki kelemahan terkait sifat hidrolis aliran dan benda hanyut. Untuk itu diperlukan pintu air irigasi sistem portable. Sistem ini dirancang untuk mempermudah dalam mengendalikan pintu air dan mempersingkat waktu dalam pengoperasiannya.	Tersedianya pintu air irigasi dengan system portable	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik target tahun 2026 : 50,09 %	Persentase Prasarana Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik : 50,86 %
		NgOPi Disit di warung jamu	NgOPi Disit di warung jamu (Pengelolaan Laporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dengan Sistem Digital) merupakan aplikasi pelaporan Operasi dan pemeliharaan irigasi yang memuat data masa tanam, petak tersier, luas tanam, kebutuhan air, ketersediaan air dan realisasi pembagian serta pemberian	Tersedianya pintu air irigasi dengan system portable	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik target tahun 2026 : 50,09 %	Persentase Prasarana Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik : 50,86 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			airnya. Aplikasi ini guna mempermudah dan mempercepat penyajian data yang diperlukan oleh <i>stakeholder</i> .			
5	SATPOL PP	LINTAS (Linmas Inti Kecamatan Tanpa BatAS)	Merupakan pemberdayaan linmas inti kecamatan yang terbentuk setiap kecamatan se-Kabupaten Cilacap dengan jumlah 30 personil per kecamatan dalam rangka upaya penanganan dan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penanggulangan bencana alam serta kebakaran. Dengan adanya pembentukan dan pemberdayaan Linmas Inti Kecamatan berdampak pada menurunnya potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penanganan bencana alam dan kebakaran yang semakin cepat.	Terbentuknya Linmas Inti Kecamatan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Cilacap sejumlah 30 orang x 24 kecamatan yaitu 720 orang tersebar di 269 desa dan 15 kelurahan.	Memudahkan dalam penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kebencanaan dan Kebakaran maupun kebencanaan yang setiap saat bisa terjadi.	Dengan adanya Linmas Inti Kecamatan, Linmas Inti Kabupaten dan Dinas Instansi terkait baik Satpol PP, BPBD, Dinas Sosial, Basarnas dan PMI akan dimudahkan dalam berkoordinasi dalam penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kebencanaan dan Kebakaran
		SATKAR TARU (Satuan Pemadam Kebakaran Terpadu)	Inovasi atau terobosan berupa “Stasiun Pemadam Kebakaran Terpadu (SATKAR TARU) di Kabupaten Cilacap” dalam rangka mewujudkan layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran. Operasional Stasiun Pemadam Kebakaran Terpadu telah mendukung terciptanya layanan respon cepat (Response Time) dalam	Output dalam proyek perubahan ini merupakan pencapaian tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang meliputi : 1. Peraturan Bupati Cilacap tentang	Dari proyek perubahan ini akan menghasilkan outcome jangka panjang meliputi : 1. Semakin optimal layanan respon cepat (response time) dalam bidang ketentraman masyarakat, ketertiban umum, perlindungan	Memudahkan masyarakat dalam hal layanan pengaduan dalam bidang ketentraman masyarakat, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran dan penyelamatan.

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			penanggulangan kejadian kebakaran dan pelayanan pemadaman kebakaran yang efektif akan mengurangi kerugian yang tidimbulkan akibat bencana kebakaran.	Standar Operasional Prosedur Layanan Pengaduan Masyarakat Kejadian Kebakaran di Kabupaten Cilacap berbasis digital/ android. 2. Aplikasi SATKARTARU SIAP merupakan sarana emergency response dua arah yang akan difungsikan pada saat terjadi kondisi darurat kebakaran oleh masyarakat yang membutuhkan pemadam. 3. Layanan respon cepat (responsif) dalam bidang ketentraman masyarakat, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran dan penyelamatan secara e-aplikasi berbasis android	masyarakat, kebakaran dan penyelamatan. 2. Semakin memantapkan program pro investasi Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan adanya peningkatan rasa aman.	

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		BALAKAR TO RESPON TIME (Barisan Suka ReLA KebaKARan menuju RESPONSE TIME)	Merupakan inovasi memberdayakan masyarakat dalam ikut berperan mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, utamanya di kawasan padat penduduk dan sulit dijangkau. Inovasi ini merupakan solusi atas keterbatasan sumber daya maupun sarana dan prasarana yang ada pada Pemerintah Kabupaten Cilacap.	Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran ditingkat RT/RW untuk peningkatan Respon Time (waktu tanggap) penanggulangan kebakaran	Indek Respon Time tahun 2018 yaitu 13,13 menit atau 97%, artinya faktor penghambat meliputi kondisi geografis, ketersediaan peralatan dan keterbatasan sumber daya petugas mampu ditekan melalui pemberdayaan relawan kebakaran	1. Tersedianya sumber daya petugas pemadam kebakaran suka rela yang tersebar di wilayah (tingkat RT/RW) 2. Tertanganinya kebakaran dilokasi padat penduduk dan sulit terjangkau secara cepat menggunakan peralatan yang sederhana (Mini Portable Pump & APAR) 3. Partisipasi masyarakat meningkat dan membantu pemadaman.
6	BAKESBANGPOL	LAYAR SUREKO MAWA RASTATIS (Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Rekomendasi Penelitian bagi Mahasiswa yang Ramah Berkualitas dan Gratis)	Adalah inovasi pelayanan berupa penerbitan surat ijin rekomendasi penelitian kepada masyarakat dengan menggunakan Aplikasi e-litbang, dengan adanya inovasi ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses aplikasi dan menyingkat waktu untuk pengajuan surat ijin rekomendasi penelitian yang semula harus datang ke kantor kesbangpol. Sehingga dengan adanya inovasi ini diharapkan memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat, diantaranya dapat diakses dimanapun dan kapanpun, memudahkan komunikasi dua arah tanpa harus bertatap muka langsung, meminimalisir	menjadi jawaban, agar kegiatan/program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mendapatkan akses layanan yang lebih luas untuk memperoleh pelayanan perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel yang dilaksanakan secara elektronik dan dapat diakses secara online. Dengan menduplikasi	1. Aplikasi Elitbang, Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang Cepat, Tepat dan Transparan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap dimulai dari penerimaan surat untuk syarat-syarat pembuatan Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus lengkap terdiri dari Surat Pengantar, KTP pemohon/peneliti dan Proposal Penelitian atau	1). Masyarakat/pemohon/peneliti mendapat kepastian tempat yang dituju atau digunakan sebagai tempat penelitian dan pengabdian, dengan prosedur yang mudah dan cepat. Dengan adanya aplikasi E-litbang ini mempermudah bagi Masyarakat/pemohon/peneliti dalam mengurus surat rekomendasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Masyarakat/pemohon/peneliti dapat mengakses halaman aplikasi tersebut dimana dan kapanpun selama perangkat

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			penularan Covid-19 dan mempercepat serta mempermudah pelayanan.	aplikasi berbasis website yakni https://elitbang.cilacapkab.go.id/, pemohon cukup mengakses secara online pada aplikasi tersebut, kemudian mendapatkan output berupa surat rekomendasi penelitian yang bertandatangan dan tersertifikasi sah secara elektronik. Surat Rekomendasi Penelitian selanjutnya dapat diunduh dan dicetak secara mandiri oleh Pemohon, sehingga pemohon akan menghemat waktu dan biaya serta meminimalisir resiko atas pengurusan Rekomendasi Penelitian Pelayanan Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Cepat, Tepat dan Transparan	Pengabdian kepada Masyarakat. Apabila sudah lengkap bisa langsung diunggah pada halaman aplikasi yakni https://elitbang.cilacapkab.go.id/, jika sudah diunggah maka selanjutnya untuk di proses oleh petugas/admin BAKESBANGPOL dan DPMPTSP. 2. Form Survey Lapangan, dengan adanya Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Cepat, Tepat dan Transparan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap, maka bagi Masyarakat yang sudah mengurus surat rekomendasi baik untuk penelitian maupun pengabdian wajib mengisi form survey kepuasan atas pelayanan melalui https://sisukma.cilacapkab.go.id/.	seperti laptop maupun smartphone terhubung ke internet. 2). Dalam mengurus Surat Rekomendasi Penelitian dari luar Provinsi Pelayanannya sama hanya syaratnya ditambah surat keterangan melaksanakan Izin Penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap atau dari lain Provinsi. Yang berbeda dari sebelumnya yakni dalam mengurus Rekomendasi Penelitian yang tadinya surat Rekomondasi Penelitian di agenda dahulu kemudian didisposisi Kepala Badan kemudian turun dan diselesaikan oleh petugas yang mengurus Surat Rekomendasi Penilitian. Contoh Konkret, Dosen yang akan mengurus Rekomendasi Penilitian apabila sudah lengkap di agenda dahulu baru didisposisikan Kepala Badan setelah turun baru diproses, beda dengan sekarang persyaratan sudah lengkap langsung mengisi formulir yang disediakan di aplikasi E-litbang kemudian upload berkas yang sudah dipersyaratkan. Proses ini dapat dilakukan dimana dan kapanpun oleh si pemohon. Setelah sudah selesai proses pengajuan

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
						permohonan penelitian atau pengabdian tinggal menunggu proses verifikasi dari BAKESBANGPOL dan DPMPTSP. Setelah terverifikasi dokumen surat rekomendasi dan surat keterangan penelitian atau pengabdian dapat diunduh dan dicetak secara mandiri oleh si pemohon. Hal ini sangat mempermudah pemohon karena proses yang dilalui sangat efektif dan efisien. 3). Cakupan pelayanan yang lebih banyak dan terarah, dimana sebelum adanya Inovasi Pelayanan Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap, Pemohon yang akan membuat Rekomendasi dari luar Provinsi merasa terlalu lama karena persyaratannya tadinya tidak lengkap dan menunggu surat sudah diproses apa belum. Setelah adanya Inovasi Pelayanan Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pemohon merasa terbantu karena dalam mengurus izin Rekomendasi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
7	BPBD	“SIAP MASBRO” (Mengatasi Abrasi Pantai Menggunakan Anyaman Sabut Kelapa/Bronjong)	yaitu penanggulangan abrasi pantai menggunakan Anyaman Sabut Kelapa berbentuk Bronjong, kemudian diisi dengan media pasir pantai yang ditempatkan pada bibir pantai sebagai tanggul. Kemudian dikombinasikan secara tumpangsari melalui penanaman pohon peneduh, sehingga kondisi pantai kembali seperti kondisi semula.	Terlaksananya penanggulangan abrasi pantai menggunakan Anyaman Sabut Kelapa	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana target tahun 2026 : 100 %	Indeks Pencapaian SPMtarget tahun 2026 : 100 %
8	DINSOS	MARI PERCAYA (Manajemen Informasi Pusat Kesejahteraan Sosial Cilacap Bercahaya)	Merupakan program layanan rujukan satu pintu (terintegrasi) atau <i>Single Windows Service</i> (SWS) dan bertujuan untuk memudahkan masyarakat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya secara mudah, murah, cepat, dan tepat. Dalam pelaksanaannya, Pusat Kesejahteraan Sosial – Sistem Layanan Rujukan Terpadu (Puskesos –SLRT) Cilacap Bercahaya didukung oleh aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Cilacap Bercahaya (SIKS-CB) yang akan digunakan sebagai <i>big data</i> dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Cilacap agar tepat sasaran.	Jumlah PPKS yang tertangani	Persentase PPKS yang tertangani tahun 2026: 57,25%	Persentase penurunan jumlah PPKS tahun 2026: 0,45%
9	DISKOMINFO	Impelementasi <i>Smart City</i> sesuai <i>Masterplan</i>	<i>Smart city</i> atau kota cerdas merupakan wilayah kota yang telah terintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi	

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.		yang mendukung smart city target tahun 2026 : 100%	
10	DISNAKERIN	(LTSA) Layanan Terpadu Satu Atap (SICERMAT) Selektif, Informatif, Cepat, Ramah, Murah, Aman, dan Terlindungi	Inovasi (LTSA) Layanan Terpadu Satu Atap (SICERMAT) Selektif, Informatif, Cepat, Ramah, Murah, Aman, dan Terlindungi merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menyederhanakan dan memudahkan keseluruhan proses pengurusan PMI dengan membentuk Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Cilacap (LTSA-PTKLN). Seluruh proses pengurusan dokumen PMI dilakukan dalam satu tempat secara Selektif, Inovatif, Cepat, Ramah, Murah, Aman, dan Terlindungi sehingga penempatan PMI Unprosedural khususnya di Kabupaten Cilacap dapat dikurangi.	Tersedianya mesin pengadaaan cetak paspor	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota target tahun 2026 : 49 %	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) target tahun 2026 : 63,77
		CEMANI ANGKER (Cetak Mandiri Angkatan Kerja 1 - AK1)				
		SIAP MIGAS (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan	Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk pelayanan Surat Rekomendasi sektor migas sebagai bentuk pelayanan publik yang Akuntabel, Transparan, dan Aksesibiliti. Dengan	Terciptanya aplikasi pelayanan Surat Rekomendasi sektor migas sebagai bentuk pelayanan public	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) target tahun 2026 : 63,77

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Surat Rekomendasi Sektor Minyak dan Gas Bumi)	adanya inovasi SIAP MIGAS diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap secara umum.	yang Akuntabel, Transparan, dan Aksesibiliti	melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota target tahun 2026 : 49 %	
		PEPES NILA (Pencatatan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berbasis Aplikasi)	Merupakan aplikasi Pencatatan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan aplikasi sehingga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dapat terselesaikan dengan Cepat, Efektif dan Efisien serta Akuntabel.	Terciptanya aplikasi Pencatatan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan hubungan industrial yang ditangani melalui mediasi dan Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan target tahun 2026 : 45 %	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) target tahun 2026 : 63,77
11	DPMPTSP	SIMPATIC (Sistem Informasi Penanaman Modal Cilacap)	Aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal Cilaca (SIMPATIC) adalah aplikasi yang memuat potensi-potensi investasi yang ada di Kabupaten Cilacap melalui <i>website</i> . Aplikasi ini berfungsi untuk mempromosikan dan mempermudah para investor untuk melihat potensi-potensi investasi yang ada di Kabupaten Cilacap	Terpromosikanya potensi – potensi investasi yang ada di Kabupaten Cilacap	Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang diikuti target tahun 2026 : 100 %	Persentase realisasi Investasi target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Aplikasi SIAPIC	Aplikasi Sistem Aplikasi Potensi Investasi Cilacap (SIAPIC) adalah aplikasi yang memuat potensi-potensi investasi yang ada di Kabupaten Cilacap melalui Android. Aplikasi ini berfungsi untuk mempromosikan dan mempermudah para investor untuk melihat potensi-potensi investasi yang ada di Kabupaten Cilacap.	Peta sebaran potensi investasi	Mempermudah pencarian titik koordinat suatu peluang investasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap	Tercapainya Persentase realisasi Investasi target tahun 2026 : 100 %
12	DISPARPORA	Forum Seller and Buyer Sebagai Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisata Ke Desa Wisata di Kabupaten Cilacap	Inovasi Forum Seller and Buyer adalah suatu inovasi dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap dalam upaya memajukan desa wisata. Dalam Forum Seller and Buyer mempertemukan desa wisata sebagai seller dan pelaku usaha wisata (biro perjalanan, perhotelan, pemandu wisata, pusat kuliner, oleh-oleh makanan) sebagai buyer. Forum Seller dan Buyer bertujuan untuk membangun koneksitas atau kemitraan dengan berbagai pelaku usaha lainnya sehingga memberikan manfaat untuk kemajuan pariwisata Cilacap.			
13	DINAS ARPUS	DEWI ASRAMA (Destinasi Wisata Arsip Ramah Anak)	Merupakan layanan kearsipan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti penting arsip.	Terciptanya tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti penting arsip.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai NSPK target tahun 2026 : 15,09%

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
					nasional target tahun 2026 : 75, 35 %	
		PENCIL	Merupakan aplikasi berbasis web isinya menyediakan bahan pustaka elektronik secara gratis, memuat berita seputar Cilacap, menjadi wadah dan sarana promosi hasil karya literasi warga Cilacap, dan alat untuk menghimpun serta menyediakan data yang digunakan untuk mengukur Indikator Kinerja Utama Bidang Perpustakaan yaitu IPLM dan TGM dengan aplikasi berbasis web/digital.	Tersedianya 1. Bahan bacaan elektronik yang tidak berbayar yang mudah diakses; 2. Media tayang informasi <i>up to date</i> ; 3. Memuat artikel / karya literasi warga Cilacap 4. Data IPLM serta TGM	Meningkatnya nilai IPLM dari 46,75 menjadi 64,41	Meningkatnya Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dari 56,75 menjadi 72,25
		Pelayanan Literasi Tuna Netra (PELITA)	Merupakan layanan peminjaman buku Braile kepada penyandang Tuna Netra anggota Perpustakaan, dengan cara datang langsung ke pertemuan rutin PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Kabupaten Cilacap dan datang langsung ke rumah-rumah penyandang Tuna Netra, serta layanan belajar membaca buku braile bagi penyandang Tuna Netra yang belum bisa membaca bulu braile	Terlayannya kebutuhan informasi penyandang Tuna Netra.	1. Meningkatkan jumlah kunjungan 2. Meningkatkan jumlah pemanfaatan koleksi braile 3. Meningkatkan jumlah keanggotaan perpustakaan 4. Meningkatkan jumlah penyandang tuna netra yang dapat membaca braile	Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
14	DISHANPAN	Toko Tani Indonesia (TTI)	Toko Tani Indonesia (TTI) merupakan toko/warung/kios milik pedagang komoditas pangan baik perorangan maupun lembaga yang ditetapkan untuk menjual komoditas pangan dan strategi dari Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (Gakpoktan) dan mitra industri pangan dengan harga sesuai ketentuan dalam kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). TTI bertujuan untuk membantu stabilisasi harga pangan utama (beras) dan lainnya yang berasal dari produksi petani/kelompok tani yang ada di Kabupaten Cilacap. TTI menerima beras dari gapoktan dan menjualnya dengan harga sesuai ketentuan (di bawah harga pasar). TTI berfungsi untuk membantu keterjangkauan akses pangan masyarakat. Hingga saat ini terdapat 38 TTI yang tersebar di Kabupaten Cilacap.	Terlaksananya program untuk membantu memasarkan produk pangan dan hasil perkebunan yang berasal dari produksi petani/kelompok tani yang ada di Kabupaten Cilacap.	Persentase ketersediaan Pangan target tahun 2026 : 182 %	1. Konsumsi energi per kapita per hari target tahun 2026 : 2100 Kkal/kapita/hari 2. Konsumsi protein per kapita per hari target tahun 2026 : 55 Gram/kapita/hari
		Beras untuk PNS	Program ini dimaksudkan agar beras yang dihasilkan oleh para petani/kelompok tani/gapoktan yang ada di Kabupaten Cilacap dapat dibeli dan dinikmati oleh masyarakat Cilacap. Pembelian beras Cilacap oleh aparat/PNS Cilacap merupakan bentuk semangat ikut membangun daerah. Sampai saat ini program	Peningkatan pendapatan petani	Persentase ketersediaan Pangan target tahun 2026 : 182 %	1. Konsumsi energi per kapita per hari target tahun 2026 : 2100 Kkal/kapita/hari 2. Konsumsi protein per kapita per hari target tahun 2026 : 55 Gram/kapita/hari

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			beras PNS telah berjalan dengan baik dengan rata-rata suplai beras untuk PNS mencapai 6 ton/bulan.			
15	DLH	Optimalisasi Pengelolaan Persampahan melalui RDF	Pengelolaan Persampahan Terpadu RDF merupakan pengelolaan sampah di TPST dengan mengubah sampah menjadi energi berupa bahan bakar pengganti batubara, yang bisa dijual kepada Pabrik Semen, PLTU, dsb.	Terciptanya energi berupa bahan bakar pengganti batubara dengan bahan baku sampah	Persentase Pengurangan Sampah target tahun 2026 : 14,5 %	Persentase Pengelolaan Sampah target tahun 2026 : 84,55%
		SICANTIK (Inovasi Cilacap Tanpa Kantong Plastik)				
16	DISDUKCAPIL	GAGIYAN METU (Tiga Strategi Pelayanan Melalui Satu Langkah) PAKET 3 In 1	pelayanan yang memberikan kemudahan kepada pemohon dimana satu permohonan misal untuk akte kelahiran tetapi juga mendapatkan Kartu Keluarga untuk penambahan anggota keluarga dan Kartu identitas Anak/KIA untuk yang dibuatkan akte kelahiran. Paket Tree in One Kelahiran (Akte Kelahiran, KK dan KIA). Paket Tree In One Perkawinan (KK, KTP dan Surat nikah yang terintegrasi dengan Dukcapil).	Memberikan kemudahan dan kepuasan kepada pemohon berupa pemberian 3 dokumen kependudukan dalam 1 kali permohonan berupa akta kelahiran,ktp,kk/akta kematian,ktp,dan kk	Presentase akta kelahiran Tahun 2026 : 89,61% dan Akta kematian Tahun 2026 : 35,03 %	Mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan hanya dengan 1 kali permohonan
		WA Sinkronisasi	Adalah pelayanan secara langsung kepada masyarakat melalui nomor WhatsApp untuk keperluan sinkronisasi data kependudukan untuk keperluan BPJS, SIM CARD,	Data kependudukan yang sudah tersinkronisasi/tervalidasi	Jumlah permintaan sinkronisasi (per bulan/tahun)	Mempermudah masyarakat dalam pengecekan/validasi data kependudukan yang sesuai dengan database kependudukan

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			DAPODIK, PAJAK, PERBANKAN, SAMSAT, dan lain-lain.			
		WA Pengaduan	Adalah pelayanan pengaduan masyarakat secara langsung melalui nomor WhatsApp yang ditindaklanjuti oleh petugas pengaduan selama hari dan jam kerja.	Terselesaikannya pengaduan dan konsultasi yang dilakukan oleh masyarakat terkait dokumen kependudukan	Jumlah pengaduan (perbulan/tahun)	Masyarakat lebih mudah dalam mengajukan keluhan serta kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan dokumen kependudukan
		Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM)	Dukcapil Menyapa Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat struktural Disdukcapil yang dilakukan setiap pagi yang bertugas menyapa masyarakat yang datang ke Disdukcapil dan bertanya keperluan warga tersebut).	Identifikasi jenis pelayanan dan permasalahan dokumen kependudukan yang dialami masyarakat/pemohon secara detail	Bahan monitoring dan evaluasi bulanan utk dasar pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan yang sesuai dengan permasalahan detail masyarakat/pemohon yang mengajukan pelayanan
		Dolan Teluk Penyul (Dokumen Online Tekan Telunjuk Permohonan Nyusul Metu)	jenis Inovasi Pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan secara Online, yaitu dapat diakses menggunakan smartphone/HP Android, juga melalui laptop/tab ataupun PC	Memberikan kemudahan dan kepuasan bagi para pemohon dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berupa Pendaftaran /pengajuannya dilakukan secara online dari mulai proses sampai dengan dokumen jadi.	Jumlah pemohon dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara online	Peningkatan Pelayanan Publik, memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, efisien dan responsive.

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
17	DISPERMADES	SIDA PEDES (Sistem Informasi Data Aparatur PEmerintahan DESa	Merupakan cara agar proses penganggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Desa sebagai salah satu unsur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat tersusun dengan baik tepat jumlah ataupun tepat waktu maka perlu adanya sebuah Sistem Informasi Data Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap.	Terbentuknya SIDA PEDES (Sistem Informasi Data Aparatur PEmerintahan DESa	Persentase Desa memiliki Dokumen RPJMDes, APBDDes dan RKPDes target tahun 2026 : 100 %	Persentase peningkatan status desa mandiri target tahun 2026: 33,70 %
18	DISHUB	SMART KIR BANG BADE (Sistem Manajemen Uji KIR Terintegrasi Bangsa Mbangun Desa)	Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan layanan Pengujian Kendaraan Bermotor sejak tahun 2018 sudah secara online menggunakan Aplikasi yang bernama SMART KIR BANG BADE. Aplikasi SMART KIR BANG BADE (Sistem Manajemen Uji KIR Terintegrasi Bangsa Mbangun Desa). Aplikasi ini merupakan aplikasi online untuk: a. Cek Jadwal Uji KIR, b. Pelayanan Informasi tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap, c. Informasi Pelayanan dan Persyaratan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, dan d. Epayment yaitu pembayaran retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap yang	Terciptanya pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor secara online	Persentase Kepemilikan KIR Kendaraan Bermotor Wajib Uji target tahun 2026 : 97,66 %	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan LLAJ target tahun 2026 : 65,54 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			dapat dilakukan secara online sehingga mempermudah pemilik kendaraan wajib uji dalam melakukan transaksi pembayaran, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Bank Jateng.			
		Peta Rambu lalu lintas Menggunakan Google MyMaps	Peta Rambu Lalu Lintas Menggunakan <i>Google MyMaps</i> merupakan salah satu upaya penyediaan sistem informasi terkait rambu lalu lintas berbasis geospasial. Hal ini perlu untuk dilakukan di era digital ini guna memudahkan aksesibilitas pengguna informasi, mengumpulkan hasil inventarisasi data rambu lalu lintas, serta data pengamatan dan pemantauan terhadap keberadaan dan kinerja rambu lalu lintas. Peta Rambu Lalu Lintas Menggunakan <i>Google MyMaps</i> menyediakan <i>database</i> lokasi, jenis rambu, dan kondisi rambu lalu lintas yang sudah terpasang untuk memudahkan Dinas Perhubungan dalam melakukan pemeliharaan rambu lalu lintas, serta menyediakan <i>database</i> kebutuhan pemasangan rambu lalu lintas untuk memudahkan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengadaan / penyediaan rambu lalu lintas baru.	Tersedianya peta digital Rambu Lalu Lintas menggunakan <i>Google MyMaps</i>	Target kinerja Rasio Perlengkapan Jalan Tahun 2026 : 0,58	Tersedia sistem informasi rambu lalu lintas yang lebih efisien dan mudah diakses untuk meningkatkan kinerja rasio perlengkapan jalan

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			Dengan demikian, akan meningkatkan kinerja penyediaan perlengkapan jalan sebagai bagian untuk mendukung RUNK LLAJ menuju Indonesia <i>Zero Accident</i> .			
19	Dinas Perikanan	Membuka Gerai Asuransi Mandiri Terpercaya (SIMANTAP)	Gerai Asuransi Mandiri Terpercaya (SIMANTAP) Inovasi Gerai Asuransi Mandiri Terpercaya didasari oleh Undang-Undang No 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada nelayan. Untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran asuransi mandiri nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap telah membuka gerai – gerai pelayanan pendaftaran asuransi mandiri di beberapa wilayah di Kabupaten Cilacap yang dekat dengan nelayan seperti: a. Kecamatan Adipala, b. Kecamatan Cilacap Tengah (Kelurahan Kutawaru), c. Kecamatan Cilacap Selatan (Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap), d. Kecamatan Nusawungu (Desa Jetis), e. Kecamatan Patimuan.	Terselenggaranya gerai – gerai pelayanan pendaftaran asuransi mandiri di beberapa wilayah di Kabupaten Cilacap	Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan target tahun 2026 : 100 %	Produksi Perikanan Tangkap target tahun 2026 : 27500 ton/tahun

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Respon Cepat penanganan Penyakit Ikan dengan Aplikasi Berbasis Android	Respon Cepat penanganan Penyakit Ikan dengan Aplikasi Berbasis Android Dalam rangka mempercepat penanganan penyakit ikan di Kabupaten Cilacap, maka upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan melakukan sosialisasi aplikasi berbasis android kepada para pembudidaya ikan di Kabupaten Cilacap	Terciptanya penanganan penyakit ikan yang cepat	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan target tahun 2026 : 100 %	Produksi perikanan budidaya target tahun 2026 : 16500 ton /tahun
		Lelang malam pada TPI Menganti Kecamatan Kesugihan dan TPI Jetis Kec. Nusawungu	Dalam rangka pemenuhan pencapaian target produksi perikanan tangkap, Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan pengurus TPI Menganti Kecamatan Kesugihan dan TPI Jetis Kecamatan Nusawungu mengadakan lelang malam agar nelayan dapat segera melakukan bongkar hasil tangkapan ikan segera setelah didaratkan.	Terlaksananya Lelang malam pada TPI agar hasil tangkapan ikan segera dai bongkar	Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan target tahun 2026 : 100 %	Produksi Perikanan Tangkap target tahun 2026 : 27500 ton/tahun
		Gervikan (Gerakan Vaksinasi Ikan) pada Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap	Merupakan gerakan agar ikan semakin sehat dan produktif dalam rangka peningkatan pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan.	Terciptanya ikan yang sehat dan produktif	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan target tahun 2026 : 100 %	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) target tahun 2026 : 44.000 ton / tahun

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		SIREKSOBUDI (Pelayanan Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi Dengan Sistem Rekomendasi Pembelian Solar Bersubsidi)				
20	Dinas Pertanian	"LAPAK PETANI"	Lapak Petani merupakan kegiatan jual beli langsung antara petani produsen selaku penjual dengan masyarakat selaku konsumen. Lapak Petani berbeda dengan toko tani dan pasar murah. Harga di Lapak Petani ditentukan sendiri oleh petani dan tentunya lebih murah dari harga pasar pada umumnya. Tujuan Lapak Petani adalah untuk memperpendek rantai distribusi hasil pertanian, meningkatkan aksesibilitas hasil pertanian oleh masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan peningkatan margin/selisih harga jual hasil pertanian. Dengan tag line “Panenane Dhewek, Adol Dhewek, Regane Murah, Kabeh Bungah, Tekani Tukoni, Petani Cilacap Teyeng”. Saat ini, inovasi ini sudah merambah ke Lapak Petani Online	Terwujudnya sarana untuk kegiatan jual beli langsung antara petani produsen selaku penjual dengan masyarakat selaku konsumen	Persentase peningkatan kelas kelompok tani target tahun 2026 : 8 %	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi) target tahun 2026 : 64,76 kw/ha

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			berbasis website atas kerjasama dengan Politeknik Cilacap.			
		Sistem Informasi Pertanian Tanaman Pangan Terkini (SIPETANI)	Merupakan aplikasi pelaporan data pertanian tanaman pangan yang dilaporkan atau diinput secara online yang memuat data-data pertanian tanaman pangan berupa data harian, bulanan, dan tahunan. Aplikasi ini mempermudah dan mempercepat penyajian data yang diperlukan oleh skateholder. Penyajian data tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar) sebagai pendukung dalam penyusunan kebijakan yang menunjang dalam peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan.	Terciptanya aplikasi memuat data-data pertanian tanaman pangan berupa data harian, bulanan, dan tahunan.	Produksi Tanaman Pangan target tahun 2026 : 4.037.934 ton	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi) target tahun 2026 : 64,76 kw/ha
21	DPKUKM	Aplikasi NEW PASARKU	Sistem <i>host to host</i> penerimaan retribusi pelayanan pasar yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan retribusi pelayanan pasar. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal target tahun 2026 : 0,45 %	Persentase pertumbuhan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting target tahun 2026 : 5,72 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Inovasi ini mampu menyederhanakan pelayanan publik.	bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.		

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
22	SETDA	Aplikasi CIBLON	Merupakan aplikasi promosi dan penjualan secara online.	Terciptanya aplikasi pemasaran produk UMKM yang mudah dipahami dan digunakan oleh para pelaku UMKM serta konsumen baik dari unsur pemerintah, swasta maupun umum dalam mendapatkan produk UMKM Cilacap	Meningkatnya pertumbuhan dan fasilitasi Usaha Mikro tahun 2026 : 2,75%	Meningkatnya promosi produk UMKM, memperluas jangkauan pemasaran pelaku UMKM di Kabupaten Cilacap dan mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk UMKM. Target jumlah UMKM difasilitasi pemasaran tahun 2026 : 1.858 UMKM
		SISUKMA	Pelayanan publik oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pendekatan yang dipergunakan selama ini dalam upaya perbaikan pelayanan hanya	Terciptanya aplikasi yang melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah target tahun 2026 : 100 %	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik target tahun 2026 : 98,54 (Zona Hijau)

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			berdasarkan perintah sebagai penyedia layanan belum dipadukan dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan. Melalui Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat (SISUKMA) melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diharapkan menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit pelayanan publik.			
		E- SAKIP terintegrasi dg e-planning dan e-budgeting	Melalui e Sakip Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Daerah dapat memantau kinerja bawahan setiap saat jika diperlukan karena bisa dimonitor secara langsung melalui laptop, tablet maupun smartphone. Dengan demikian pengendalian dan pengawasan terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan mudah dan sesuai target yang ditetapkan.	Terciptanya aplikasi yang membantu pengendalian dan pengawasan terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah secara mudah dan sesuai target.	Persentase koordinasi bidang Pemerintahan target tahun 2026 : 100 %	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik target tahun 2026 : 98,54 (zona Hijau)
		E-tendering	Merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara online, terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam sistem pengadaan elektronik. E-tendering dilakukan untuk semua cara pengadaan barang/jasa baik pengadaan langsung maupun tender.	Merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara online, terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam	Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.	Tahun 2023 prosentase Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 100% secara elektronik. Target Tahun 2026: 100%

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
				sistem pengadaan elektronik. E-tendering dilakukan untuk semua cara pengadaan barang/jasa baik pengadaan langsung maupun tender.		
		E-katalog lokal	Merupakan aplikasi belanja online untuk mendukung pengadaan barang/jasa yang menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemda dalam hal ini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam e-katalog lokal menampilkan produk UMKM dan penyedia lokal.	Terciptanya aplikasi yang membantu meningkatkan peran serta usaha UMKM serta meningkatkan penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)	Pada 2023, persentase target belanja e-Purchasing 30% dari pagu anggaran. Target Tahun 2026:100%	Persentase Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Target tahun 2026 : 100 %
		SI PEKA (Sistem Informasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas)	Merupakan inovasi yang bertujuan memudahkan monitoring data teknis, data pemeliharaan (jenis dan biaya), penggunaan bbm dan pajak kendaraan dinas di Lingkungan Sekrtetariat Daerah kabupaten Cilacap.			
		SIMPOKAPBD	Merupakan inovasi yang bertujuan menyediakan informasi tentang perkembangan pelaksanaan operasional kegiatan APBD baik secara fisik maupun keuangan berdasarkan laporan rutin bulanan	Terciptanya aplikasi yang menyediakan informasi tentang perkembangan pelaksanaan operasional kegiatan	Persentase koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan target tahun 2026 : 100 %	Persentase penyerapan APBD target tahun 2026 : 95 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			OPD/Unit Kerja melalui sebuah sistem informasi dan sebagai penunjang terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan Belanja APBD Kabupaten Cilacap.	APBD baik secara fisik maupun keuangan berdasarkan laporan rutin bulanan OPD/Unit Kerja.		
23	SETWAN	E-risalah	Adalah aplikasi pencatat hasil rapat secara otomatis yang mengubah suara menjadi dalam bentuk tulisan sehingga laporan risalah rapat-rapat dapat tertulis lengkap.			
24	Inspektorat Daerah	Aplikasi E-Kontak	Yaitu Konsultasi dan Tanya Kami-secara elektronik berbasis <i>smarthphone</i> , yang isinya tentang Konsultasi Pengawasan. Inovasi ini dicetuskan sebagai solusi karena selama ini upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan masih minim, karena lebih banyak kegiatan audit yang dilakukan oleh APIP sifatnya pos audit. Pejabat fungsional Auditor maupun pengawas Pemerintah (P2) pada Inspektorat Kabupaten Cilacap akan menyumbangkan keahlian dan kompetensi secara insentif dengan memberikan layanan konsultasi pengawasan dengan maksud untuk memberikan keyakinan, peringatan dini dan konsultasi dalam membangun Pemerintahan yang baik dan bersih	Terciptanya aplikasi yang dapat memberikan layanan konsultasi pengawasan dengan maksud untuk memberikan keyakinan, peringatan dini dan konsultasi dalam membangun Pemerintahan yang baik dan bersih	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai kinerja baik target tahun 2026 : 100 %	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan penjaminan kualitas penerapan SPIP terintegrasi dengan level 3 target tahun 2026 : 90%

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Sistem Informasi Monitoring Bebas Temuan (SIMON BETE)	Berfungsi untuk mempercepat Pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Cilacap tanpa mengurangi kualitas data yang dihasilkan dan menjadi salah satu solusi untuk meringankan beban tugas yang diberikan ditengah berbagai tugas mandatori lain yang harus dilaksanakan.	Terciptanya aplikasi untuk mempercepat Pelayanan	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai kinerja baik target tahun 2026 : 100 %	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan penjaminan kualitas penerapan SPIP terintegrasi dengan level 3 target tahun 2026 : 90%
		Inspektorat Cilacap Mobile	Aplikasi ini dibuat dalam rangka menjawab permasalahan pada tata kelola pemerintahan yaitu terlalu banyak aplikasi milik pemerintah yang tidak beroperasi dan terbengkalai. Salah satu penyebab aplikasi pada Pemerintahan terbengkalai karena memang minimnya sosialisasi sehingga tidak diketahui oleh publik dan jarang diakses hingga pada akhirnya terlupakan. Solusinya? kenapa tidak kita buat sebuah sistem terpadu yang terintegrasi sehingga dalam satu aplikasi memuat banyak fitur di dalamnya? Terkesan lebih multifungsi, praktis dan powerful. Kesimpulannya dalam satu genggaman kita dapat mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Pemerintah.	Terciptanya ekosistem yang menghimpun aplikasi yang sudah ada kedalam satu genggaman	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai kinerja baik target tahun 2026 : 100 %	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan penjaminan kualitas penerapan SPIP terintegrasi dengan level 3 target tahun 2026 : 90%
25	BPKAD	"Simpel Pakde Olin" Sistem Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	Sebuah Inovasi Dalam Strategi untuk meningkatkan pelayanan daerah khususnya PBB-P2 di Kabupaten Cilacap yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan pajak	Terciptanya strategi meningkatkan objektifitas data bangunan untuk Pajak PBB-P2,	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD target tahun 2026 : 0,053 %	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD target tahun 2026 : 27,72%

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Perkotaan dan Pedesaan Online	daerah dari PBB-P2. Tujuan dari “Simpel Pakde Olin” adalah meningkatkan objektifitas data bangunan untuk Pajak PBB-P2; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pemutakhiran data demi tercapainya peningkatan potensi pendapatan daerah; meminimalisir objek pajak yang belum terdata; meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya update data demi terciptanya tertib administrasi; memudahkan penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) di daerah tertentu; dan memberikan rasa keadilan dalam penetapan pajak dengan mempertimbangkan akses jalan pada objek pajak PBB-P2. Data yang telah dimutakhirkan berdasarkan kondisi riil objek dan subjek pajak akan berpengaruh terhadap peningkatan ketetapan pajak terutang sehingga diharapkan bisa meningkatkan potensi pendapatan dari sektor PBB-P2. Satu mutasi yang diajukan mengakibatkan terupdatenya 5 data bangunan lainnya, sehingga target peningkatan pendapatan yang diharapkan akan tercapai secara optimal.	meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pemutakhiran data, meminimalisir objek pajak yang belum terdata, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya update data, memudahkan penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) di daerah tertentu		

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		<i>Si Pengsun</i>	Inovasi dalam Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap berbasis web serta terintegrasi dengan Aplikasi Simgaji dan Simpeg sehingga proses Penghentian dan Penerbitan SKPP di masing-masing SKPD semakin mudah dan lancar.			
26	BAPENDA	Dompot Pakde (Dashboard Pembayaran Elektronik Pajak Daerah)	Merupakan aplikasi Dompot Pakde (Dashboard Pembayaran Elektronik Pajak Daerah) yang difungsikan untuk mengatasi lambatnya penghitungan pembayaran pajak daerah per kanal pembayaran	Terciptanya Dabsboard Informasi Pembayaran Elektronik Pajak Daerah yang dapat menghitung dengan cepat data realisasi pajak per kanal pembayaran serta dapat menyajikan informasi tersebut melalui web Bapenda agar dapat diakses secara online oleh masyarakat	Tersajinya data realisasi pembayaran pajak daerah perkanal pembayaran	Optimalnya perencanaan pengolahan pajak daerah dari sisi pembayaran perkanal pembayaran
		EBPHTB (Elektonik Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan)	E-BPHTB merupakan sebuah sistem pengelolaan pemungutan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang meliputi administrasi pembayaran, pelaporan, pelayanan, dan pengawasan BPHTB secara elektronik yang terintegrasi dan akuntabel. Pada tahun 2024 dilakukan pengembangan terhadap aplikasi E-	Melalui eBPHTB berkas pelayanan wajib pajak dapat dilaksanakan oleh PPAT sebagai kuasa wajib pajak, Berkas yang telah dipindai dan diunggah ke sistem akan secara otomatis masuk ke	Meningkatkan transparansi pengelolaan pajak daerah khususnya BPHTB, memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan transaksi dan perhitungan pajak BPHTB secara online,	Pelayanan lebih efektif dan efisien, proses pengawasan dan verifikasi menjadi lebih mudah, serta memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak BPHTB.

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			BPHTB dengan menambahkan menu peta dan menu data transaksi sekitar objek, hal tersebut nantinya akan mempermudah dalam melakukan peninjauan letak objek dan melihat transaksi yang terjadi di wilayah sekitar objek guna menentukan harga pembandingnya.	pelayanan Bapenda untuk selanjutnya diproses dan disinkronisasi dengan data pada SISMIOP. Dengan begitu, akan lebih mempermudah dalam pelayanan bagi wajib pajak dan pengawasan serta verifikasi terhadap berkas pengajuan BPHTB, sehingga dapat meminimalisir terjadinya nilai transaksi yang tidak wajar atau nilai transaksi di bawah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).	memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya secara online, serta percepatan realisasi target penerimaan pajak daerah khususnya BPHTB.	
		SMART PBB	SMART PBB merupakan sistem aplikasi berbasis web bertujuan untuk mengelola pelayanan pajak bumi dan bangunan secara online dan terintegrasi dengan database PBB-P2 (SISMIOP), sehingga pelayanan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat/ wajib pajak dapat lebih efisien dan optimal.	Dengan adanya aplikasi pelayanan PBB-P2 secara online dapat mengurangi penumpukan berkas serta mempermudah masyarakat yang akan mengajukan berkas layanan PBB-P2 serta sebagai upaya pendekatan pelayanan BAPENDA kepada masyarakat/wajib pajak.	Meningkatnya pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cilacap.	Optimalnya pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cilacap.

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
27	BAPPEDA	Jurnal Inovasi Daerah (JID)	Merupakan terobosan yang diselenggarakan BAPPEDA Kabupaten Cilacap guna memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam publikasi berbagai kajian ilmiah, diutamakan hasil kajian yang mendukung isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Cilacap. Untuk mendukung pengelolaan JID didukung dengan aplikasi <i>Open Journal System</i> (OJS). Jurnal Inovasi Daerah diagendakan terbit secara berkala 2 kali dalam setahun. Jurnal Inovasi Daerah diterbitkan secara online melalui Open Journal System (OJS) dan secara cetak. Artikel ilmiah yang terkumpul dan terpublish dalam Jurnal Inovasi Daerah selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh OPD, perguruan tinggi dan Sektor Bisnis se-Kabupaten Cilacap, secara cetak dan online untuk dapat dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Terbit 2 (dua) kali setahun	Persentase kesesuaian tema artikel JID dengan isu strategis daerah Target 2026 : 30%	Persentase pemanfaatan artikel JID sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan daerah Target 2026 : 30%
		GUNTING BAJAK SUTRA (Pemberdayaan Perguruan Tinggi Dalam Penyediaan	GUNTING BAJAK SUTRA (Pemberdayaan Perguruan Tinggi Dalam Penyediaan Bahan Kajian Kebijakan Penangan Isu Strategis Daerah)	Merupakan inovasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis riset (Reasearch Based	1. Database hasil riset perguruan tinggi di Kabupaten Cilacap 2. Data inventarisasi kebutuhan riset	Presentasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti : 61 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Bahan Kajian Kebijakan Penangan Isu Strategis Daerah)		Planning) dengan menyinkronkan kebutuhan riset OPD dengan Riset yang dilakukan Oleh Perguruan Tinggi untuk membantu mengani isu strategis daerah	dari perangkat daerah	
		E-Dalev	E-Dalev adalah sebuah sistem informasi pelaporan realisasi rencana kerja (renja) berbasis laporan triwulan yang telah beroperasi sejak tahun 2022, monitoring pelaksanaan kinerja, program dan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Aplikasi E-Dalev sudah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Operasional Kegiatan APBD (SIMPOK) sehingga realisasi anggaran sudah otomatis terisi. E-Dalev bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengumpulan data dan menyimpan data secara elektronik. E-Dalev sebagai media monitoring dan evaluasi mengganti dan mengintegrasikan sistem pelaporan konvensional sebelumnya yang berbasis Microsoft Excel. Keunggulan sistem ini antara lain otomatisasi data pelaporan hingga tak perlu membuat rekap, rangkuman dan ringkasan secara manual; status dan grafik pelaporan data yang dapat diakses publik di website; batas akhir laporan bulanan dan triwulan			

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			yang tertib; serta cepat dan mudah karena hanya perlu mengisi form dan tabel yang sudah tersedia. Perangkat Daerah memiliki akun untuk mengunggah dan mengelola laporannya.			
28	BKPSDM	CISA (Cilacap Smart ASN)	Merupakan inovasi untuk up to date data dan unggah dokumen kepegawaian secara mandiri oleh ASN melalui media <i>Smartphone</i> . Modul ini terintegrasi dengan SIASN BKN sehingga secara otomatis akan memutakhirkan data pada SIASN BKN.			
29	Kecamatan Cilacap Selatan	Program mba “LILA SMS” (Lima Langkah Satu Menit Selesai)	Memberikan kemudahan kepada warga masyarakat di Wilayah Kecamatan Cilacap Selatan untuk mengurus legalisasi surat-surat dan surat keterangan lainnya dengan mudah, murah lebih cepat dan hemat biaya karena layanan ini menjadi lebih singkat. Pihak-pihak yang terlibat dalam program ini adalah Koramil 01 Cilacap Selatan, Polsek Cilacap Selatan, Semua Seksi, Subbag dan karyawan- karyawan di Kecamatan Cilacap Selatan, Lurah dan perangkatnya yang dibantu oleh perangkat RW, RT dan Kelompok PKK RT dan RW.	Terciptanya pelayanan legalisasi surat-surat dan surat keterangan lainnya yang mudah, murah lebih cepat dan hemat biaya	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %
		KLINTUNG ASMARA (Keliling	Upaya Pemerintah Kecamatan Cilacap Selatan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang ada	1. Terbukanya komunikasi dua arah yang diharapkan dalam	Berkurangnya angka stunting yang ada	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Langsung Atasi Stunting Sekaligus Serap Aspirasi dan Pelayan Masyarakat)	dilingkungan. Seperti STUNTING serta permasalahan sosial lainnya yang sedang terjadi. Sehingga terobosan tersebut menjadi salah satu usaha untuk mengidentifikasi permasalahan dimaksud.	mengatasi permasalahan stunting 2. Meningkatkan pemahaman bagi warga untuk menerapkan pola hidup sehat 3. Terlaksananya Program Pelaksanaan STUNTING	diwilayah kecamatan cilacap selatan	perekonomian keluarga 3. Mewujudkan keluarga yang sehat dan bahagia
30	Kecamatan Cilacap Tengah	<i>Pelayanan Paten Tanpa Coca Cola (Covid-19, Calo, Coin, Lama)</i>	Dalam hal ini Kecamatan Cilacap Tengah inovasi mengemukakan inovasi dengan judul <i>Pelayanan Paten Tanpa CoCa CoLa (Covid-19, Calo, Coin, Lama)</i> . Maksud dari judul ini yaitu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Cilacap Tengah diharapkan terhindar dari wabah Covid-19, tidak menggunakan jasa calo, tidak mengeluarkan coin atau uang, dan waktu pelayanan tidak lama.	Hasil kegiatan pelayanan yang dirasakan langsung yaitu masyarakat memiliki kesadaran untuk datang sendiri tanpa perantara alias calo, karena dengan menggunakan jasa calo masyarakat akan ditarik biaya. Bagi masyarakat yang mengurus dokumen dengan persyaratan yang lengkap pasti pelayanan akan lebih cepat. Sebagai apresiasi kepada masyarakat yang datang sendiri akan diberikan souvenir masker.	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Jogo Tonggo Stunting (JOTOS) di Kecamatan Cilacap Tengah				
31	Kecamatan Cilacap Utara	Inovasi Budaya Kerja "SMART PRO"	Dalam upaya meningkatkan motivasi dan semangat kerja, Kecamatan Cilacap Utara mempunyai inovasi budaya kerja “SMART PRO” yaitu Semangat, Melayani, Aktif, Responsif, Terpercaya, dan Profesional. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan semangat kerja untuk peningkatan kinerja.	Terciptanya Semangat kerja pegawai kecamatan Aktif, Responsif, Terpercaya, dan Profesional	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %
		Resolusi UMKM Berdaya Kecamatan Cilacap Utara	Menghimpun pelaku usaha mikro di wilayah Kecamatan Cilacap Utara, sehingga memiliki suatu wadah untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan produktivitas dan memasarkan produk lokal.			
		SITI MAKNYUS (Sistem Manajemen Kombinasi untuk Pelayanan Mudah dan Bagus)	inovasi dalam menggunakan perangkat teknologi yang dipunyai yaitu aplikasi data base penomoran berbasis desktop dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	Terciptanya pelayanan yang mudah dan cepat, penomoran dan data base yang aman dan tersimpan rapi	Tertib	

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
32	Kecamatan Jeruklegi	Pelayanan Legalisasi Cepat (NANSIPAT)	Percepatan durasi pelayanan sesuai dengan situasi dan kondisi di era pandemi Covid-19.	Terciptanya pelayanan cepat dan tanggap	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %
		Klinik BUMDES Kecamatan Jeruklegi	Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Jeruklegi yang terdiri dari 13 Desa utamanya di BUMDesa yang mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat yaitu sebagai sarana meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi masyarakat.	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam rangka perekonomian masyarakat.	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban target tahun 2026 : 100 %	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan target tahun 2026 : 100 %
		DISAJI KEMAS (Digitalisasi Sistem Pelayanan Perijinan Kegiatan Masyarakat) Di Kecamatan Jeruklegi				
33	Kecamatan Kawunganten	PENDAPAT (Pesan-Datang-Dapat)	Memberikan kemudahan dan kecepatan waktu, kepastian layanan khusus bagi pemohon Perijinan SIUP tertentu, IUMK dan Pemohon kepesertaan listrik bersubsidi.	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat, dan pasti pemohon Perijinan SIUP tertentu, IUMK dan Pemohon kepesertaan listrik bersubsidi	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
34	Kecamatan Bantarsari	SITINGGIL BANGSARI (Sistem Informasi Terpadu Penanganan Kemiskinan dan Ketertinggalan dengan Bangga mBangun Desa ala Bantarsari)	Tujuan utama dari inovasi ini adalah untuk mengawal penyaluran bantuan bantuan sosial agar tepat sasaran dan memberi masukan dalam sinkronisasi penyusunan Basis Data Terpadu Keluarga Sasaran penerima manfaat bantuan sosial. Bentuk inovasi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan intensitas koordinasi antar dinas instansi dan pemerintah desa untuk menggali data ataupun informasi adanya masyarakat miskin yang belum terjangkau oleh program pengentasan kemiskinan atau masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan tertentu. Dari data yang ada dirumuskan kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan setiap Jum'at pertama dan keempat setiap bulan secara berkeliling dari satu desa ke desa lainya. Kegiatan diawali dengan senam bersama masyarakat setempat dan dilanjutkan dengan pengumpulan dana. Dari dana yang terkumpul disalurkan bantuan kepada keluarga sasaran yang diwakili oleh Forkompimca.	Tumbuh kembalinya budaya gotong royong, solidaritas dan rasa empati dimasyarakat secara umum, dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, bahwa pemerintah hadir disetiap lini kehidupan masyarakat.	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
35	Kecamatan Kesugihan	Gema Kesuma (Gerakan Menyapa Masyarakat Kesugihan Untuk Melayani)	Gema Kesuma adalah upaya Inovasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kesugihan, yaitu Gerakan Menyapa Masyarakat Kesugihan Untuk Melayani. Tujuan dari gerakan ini yaitu meningkatkan kinerja pelayanan menuju Kesugihan yang sejahtera, Unggul dan Mandiri. Inovasi ini berupa Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan publik melalui aplikasi <i>Whatsapp</i> (nomor telah dipublikasikan). Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui nomor <i>Whatsapp</i> tanpa datang langsung ke kantor kecamatan sehingga operator dapat menjawab pertanyaan dan menyelesaikan permasalahan melalui media sosial. Selain lebih efektif dan efisien, pelayananpun menjadi lebih mudah dan cepat sehingga kepuasan masyarakat meningkat.	Terciptanya Gerakan Menyapa Masyarakat Kesugihan Untuk Melayani nasyarakat	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %
		Gerakan Mewujudkan "SaTeADe" Sadar Tertib Arsip Desa Melalui Video Tutorial Pengelolaan ArsipDi				

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Kecamatan Kesugihan				
36	Kecamatan Maos	Pembinaan Terintegrasi dan Pengawasan Terhadap Penyelenggara n Pemerintahan dan Hasil Pembangunan di Desa (PETERPAN TERBANG)	Merupakan kegiatan pembinaan kepada seluruh aparatur desa mulai dari perangkat desa, bidan desa, linmas dan seluruh perangkat yang diberikan insentif oleh pemerintah desa maupun oleh pemerintah kabupaten. Maksud dan tujuan dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat <i>entrepreneur</i> dan dinamis dengan mengedepankan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Goverment</i> . Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan manajemen apatur pemerintah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan fasilitas pemberdayaan masyarakat.	Terlaksananya pembinaan kepada seluruh aparatur desa mulai dari perangkat desa, bidan desa, linmas dan seluruh perangkat	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban target tahun 2026 : 100 %	Persentase penurunan gangguan keamanan skala Kecamatan target tahun 2026 : 100 %
		MAS SEBAKUL (Maos Bersinergi Untuk Pemberdayaan	Merupakan forum Pemberdayaan Ekonomi Kreatif melalui sinergi stakeholder Kecamatan Maos bersama UMKM Lokal			

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		Ekonomi Kreatif Melalui UMKM Lokal)				
37	Kecamatan Sampang	SDTK (Sistem Data Terpadu Kecamatan Sampang)	Merupakan inovasi berupa portal informasi dan data terbuka mengenai pemerintahan/organisasi/instansi/ desa yang ada di wilayah Kecamatan Sampang, yang tersedia secara bebas untuk dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Data terbuka dalam kaitannya dengan pemerintahan dalam salah satu upaya untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat. Maksud dan tujuan SDTK adalah sebagai komitmen konkret Kecamatan Sampang, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.	Terciptanya pelayanan yang cepat dan tepat	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %
38	Kecamatan Kroya	Lapis Kupas	Merupakan layanan penjemputan warga disabilitas yang hendak melakukan perekaman E-KTP di Kecamatan Kroya.	Terciptanya layanan penjemputan warga disabilitas	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %
39	Kecamatan Binangun	Jumat berkah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat	Kegiatan "JUM'AT BERKAH" di Kecamatan Binangun merupakan Kegiatan Bantuan Sosial yang diberikan kepada Masyarakat miskin tidak mampu yang belum masuk ke dalam Daftar Data Terpadu	Terlaksananya Kegiatan Bantuan Sosial yang diberikan kepada Masyarakat miskin	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		yang kurang mampu	Kesejahteraan Sosial (DTKS)/ Basis Data Terpadu (BDT) dengan menginventarisir keluarga yang tidak mampu dengan memberikan Paket sembako, santunan anak yatim dan lasia serta bedah rumah, bantuan peralatan sekolah, seragam, dan sarana transportasi ke sekolah, serta bantuan biaya pengobatan, iuran asuransi kesehatan dan operasional ambulance.			
40	Kecamatan Nusawungu	Integritas Tim Kerja “Pelunasan PBB”	Merupakan salah satu cara yang diterapkan untuk mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.	Terciptanya Tim Kerja “Pelunasan PBB”	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %
41	Kecamatan Sidareja	PANSER PBB (Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan secara Serempak)	Kegiatan ini dilaksanakan agar masyarakat sadar kewajibannya sebagai wajib pajak dan pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai dari tingkat RT yang kemudian berjenjang sampai tingkat desa. Masing – masing desa punya inovasi sendiri, ada yang menggunakan cara menabung setiap bulan di RT masing – masing sehingga pada saat SPPT pajak sudah ada Masyarakat tinggal menghitung jumlah pajak yang harus dibayar.	Tersedianya pelayanan Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan secara Serempak	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		KELORISASI (Gerakan Menanam dan Mengolah Tanaman Kelor Untuk Mencegah Stunting di Kecamatan Sidareja)	KELORISASI (Gerakan Menanam dan Mengolah Tanaman Kelor Untuk Mencegah Stunting di Kecamatan Sidareja)	Pelaksanaan program Kelorisasi untuk pencegahan Stunting dilakukan oleh Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kecamatan Sidareja yang terdiri dari Camat Sidareja, Forkopimcam Sidareja, Puskesmas Sidareja, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Sidareja, Ketua TP PKK Kecamatan Sidareja, Kepala Desa se Kecamatan Sidareja, Ketua TP PKK Desa se Kecamatan Sidareja beserta anggota, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sidareja, Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sidareja, Koordinator PKH Kecamatan Sidareja. Kader KPM se Kecamatan Sidareja	Program Kelorisasi untuk mencegah Stunting di Kecamatan Sidareja memberikan hasil yang cukup baik. Pasalnya, dari evaluasi data hasil penimbangan serentak dapat diketahui bahwa ada peningkatan tinggi badan untuk beberapa balita di setiap pelaksanaan penimbangan.	Meningkatnya pemenuhan gizi bagi bayi/balita berpotensi stunting

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
				dan Kader Posyandu se Kecamatan Sidareja serta masyarakat di Kecamatan Sidareja. Adapun pelaksanaan kegiatan program Kelorisasi diantaranya sebagai berikut : Rembug Stunting, Gerakan Menanam Pohon Kelor Di Halaman Rumah, Mengolah Tanaman Kelor Menjadi Salah Satu Menu Makanan Pada Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Bayi dan Balita Berpotensi Stunting		
42	Kecamatan Kedungreja	PATEN ONLINE	Yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu dengan memanfaatkan media online secara online. Inovasi pelayanan yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan fasilitas media sosial seperti website, whatsapp, instagram, facebook, twitter dan sarana media sosial yang lain untuk mempermudah warga masyarakat			

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			dalam mendapatkan informasi maupun pelayanan pada Kecamatan Kedungreja. Ketersediaan fasilitas ini diharapkan mampu menambah nilai lebih bagi pelayanan PATEN Kecamatan Kedungreja dan berpengaruh positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat.			
43	Kecamatan Gandrungmangu	“Gertak Paksanen” (Gerakan Serentak Pembayaran PBB P2 Pasca Panen)	Untuk mempercepat pelunasan pajak PBB P2 di Kecamatan Gandrungmangu, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Pembayaran Pajak PBB P2. Inovasi kreatif dan inovatif ini ditujukan untuk mengatasi situasi kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak dan bagaimana petugas pemungut pajak melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien dalam rangka percepatan pelunasan pajak PBB P2. Gertak paksanen dilaksanakan pada saat paca panen raya dengan pemikiran bahwa mayarakat Gandrungmangu mayoritas bermata pencaharian bertani dan buruh tani sehingga ini tidak memberatkan kepada masyarakat karena proses pembayaran dapat di lakukan dengan memberikan padi kering.	Terwujudnya pelunasan pajak PBB P2 di Kecamatan Gandrungmangu yang tepat waktu	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		PAKDE MUNCER (Peningkatan Kualitas Desa Menuju Desa Cerdas Melalui Basis Data Desa)				
44	Kecamatan Patimuan	Gertak Palu Mesra (Gerakan Serentak Pajak Lunas Masyarakat Sejahtera)	Inovasi Gertak Palu Mesra (Gerakan Serentak Pajak Lunas Masyarakat Sejahtera) merupakan suatu inovasi yang bertujuan untuk mempercepat pelunasan pajak PBB-P2 di kecamatan Patimuan dan juga meningkatkan antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi melunasi Pajak PBB-P2 dengan cara melakukan pembayaran secara serentak dilakukan di tiap-tiap Desa dan pelaksanaanya dilaksanakan dengan dibarengi acara2 besar yang diadakan oleh Desa seperti hari jadi Desa dll.	Terwujudnya pelunasan pajak PBB-P2 diKecamatan Patimuan di awal waktu.	Terciptanya budaya taat membayar pajak PBB-P2 di awal waktu.	Peningkatan Prestasi di bidang Pajak PBB-P2 meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.
45	Kecamatan Cipari	Simpel Umik (Sistem Informasi Pendataan Pelaku Usaha Mikro Kecil)	Dengan inovasi ini diharapkan pendataan UMK bisa menjadi lebih cepat, mudah , efektif dan data yang dihasilkan valid. Hal ini dilatarbelakangi oleh kekacauan data pada saat pendataan pelaku usaha mikro kecil untuk pemberian bantuan sosial oleh pemerintah dalam rangka meringankan beban pelaku usaha			

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			mikro kecil yang terdampak pandemi Covid-19.			
		SIPUSPA (Sistem Informasi Pengelolaan Unit Bank Sampah)	SIPUSPA (Sistem Informasi Pengelolaan Unit Bank Sampah). Dengan SIPUSPA diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk membuat sampah menjadi bermanfaat. Sampah yang selama ini menjadi penyebab pencemaran lingkungan dapat diantisipasi bahkan menjadi pemasukan tambahan bagi masyarakat. SIPUSPA hadir untuk mengembangkan kewirausahaan melalui pengelolaan bank sampah yang lebih optimal. Inovasi ini bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan bank sampah. Manfaat aksi ini antara lain menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak sehingga dapat menjadikan lingkungan yang bersih dan juga menjadi penghasilan tambahan.	Tersedia Bank Sampah di Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari	Peningkatan pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah	
46	Kecamatan Karangpucung	LANPU RANKA BISO (Pelayanan Publik Karangpucung Berbasis ISO)	Kecamatan Karangpucung menjadi pilot project pertama pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menerakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada tahun 2012. Inovasi Kecamatan Karangpucung untuk menerapkan sistem Manajemen Mutu	Terciptanya pelayanan yang prima kepada masyarakat dan tidak ada pungutan liar dalam pelayanan.	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			ISO 9001 ini menurut kami sangat inovatif karena Kecamatan Karangpucung adalah satu-satunya kecamatan yang melaksanakan inovasi ini pada tahun 2012. Dengan menerapkan SMM ISO 9001, pengelolaan sistem manajemen organisasi di Kecamatan Karangpucung mempunyai perbedaan dengan kecamatan lain, yaitu arsip aktif dan inaktif tertata dengan baik, setiap seksi/subbag memiliki sasaran mutu/target kinerja yang harus dicapai setiap tahun, Ada pemeriksaan intern/audit internal antar seksi/subbag yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. ada Forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk mengevaluasi kinerja dalam kurun waktu satu tahun berjalan, dan ada pemeriksaan ekstern/audit eksternal yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu badan sertifikasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.			
47	Kecamatan Cimanggu	Sistem Informasi Rencana Kerja (SiRenja)	Merupakan inovasi yang dilakukan untuk memudahkan dan mempercepat para Kasi dan Subbag dalam mengusulkan kegiatan dalam Penyusunan Rencana Kerja.	Sosialisasi Aplikasi Sirenja.	Terkumpulnya usulan program kegiatan dari masing-masing seksi dan subag.	Terlaksananya koordinasi antar seksi dan subag

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		PULIK MANG OLEN SISWA (Pelayanan Publik Cimanggu Online Berbasis WA Web)				
48	Kecamatan Majenang	Gerakan Bangun Potensi Desa Unggulan (GERBANG SI SANGGUL)	Merupakan media untuk memberikan informasi dan pelayanan publik serta sebagai media promosi potensi-potensi unggulan yang ada di desa-desa pada wilayah Kecamatan Majenang sehingga bisa meningkatkan di sektor UMKM, kesenian, budaya, maupun pariwisata di Kecamatan Majenang	Terciptanya katalog/media promosi digital atas produk unggulan di sektor UMKM, Kesenian, Budaya dan Pariwisata yang dapat di akses secara mudah oleh masyarakat.	Terciptanya partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menggunakan produk unggulan daerah meningkat.	Persentase pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM, kesenian, budaya dan pariwisata meningkat.
		BIMAKU DESA (Buku Instrumen Monitoring Administrasi Dan Keuangan Desa)	BIMAKU DESA adalah buku elektronik yang berisi Panduan Instrumen Monitoring Administrasi dan Keuangan Desa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas administrasi dan Keuangan Desa-desa di Kecamatan Majenang	BIMAKU DESA adalah buku elektronik yang berisi Panduan Instrumen Monitoring Administrasi dan Keuangan Desa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas administrasi dan Keuangan Desa-desa di Kecamatan Majenang	1. E-book BIMAKU DESA; 2. Adanya Instrumen Penilaian dan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Administrasi dan Keuangan Desa	1.Meningkatnya “Kategori Nilai” hasil Monitoring dan Evaluasi Administrasi dan Keuangan Desa-desa di Kecamatan Majenang; 2.Kegiatan Administrasi dan Keuangan Desa yang dulunya parsial menjadi lebih Sistematis mengikuti instrumen yang ada.
49	Kecamatan Wanareja	KK Online	KK Online merupakan upaya inovasi dengan sistem pendekatan pelayanan secara online, dimana pertugas PATEN akan memferivikasi berkas			

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
			ajuan dokumen kependudukan pemohon melalui Nomor Whatsapp yang telah diberikan setelah data sesuai dengan ketentuan. Berkas akan diproses dan diajukan melalui sistem TTE dan bukti fisik penerbitan KK (Kartu Keluarga) dapat kembali dikirim kepada pemohon melalui PDF atau dapat diambil secara langsung ke kecamatan, selain perekaman KTP, Izin Hajat, dispensasi nikah, legalisasi tertentu, merupakan upaya Kecamatan Wanareja dalam mengoptimalkan sistem pelayanan terhadap kepuasan masyarakat.			
		“SI MAS WARIS “ INOVASI PELAYANAN MASYARAKAT MELALUI WA SECARA GRATIS	SI MAS WARIS merupakan upaya inovasi dengan sistem pendekatan pelayanan secara online, dimana petugas Pelayanan akan memverifikasi berkas ajuan dokumen kependudukan pemohon melalui Nomor Whatsapp yang telah diberikan setelah data sesuai dengan ketentuan. Berkas akan diproses dan diajukan melalui sistem TTE dan bukti fisik penerbitan KK (Kartu Keluarga) dapat kembali dikirim kepada pemohon melalui PDF atau dapat diambil secara langsung ke kecamatan.	Terciptanya pelayanan pembuatan Kartu Keluarga yang mudah dan hemat biaya		
50	Kecamatan Dayeuhluhur	JEMPOL GESIT (Jemput bola cepat dengan menggunakan sarana	Adalah inovasi pelayanan dimana masyarakat dapat langsung telpon ke nomor yang telah disediakan untuk meminta pelayanan yang dibutuhkan, dan bisa jemput bola langsung ke	1. Jumlah Administrasi Kependudukan masyarakat yang terlayani	Kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi kependudukan, tanpa	Meningkatnya nilai kepuasan masyarakat yang ditunjukkan oleh nilai survey kepuasan masyarakat yang optimal

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	INOVASI	DESKRIPSI	OUTPUT	OUTCOME	DAMPAK
		komunikasi nomor Telpon)	desa/rumah masyarakat yang membutuhkan pelayanan.		harus datang langsung ke kantor Kecamatan	
51	Kecamatan Kampung Laut	Program Sistem Pelayanan Ora Ngresula (SIPON)	SIPON memanfaatkan media sosial <i>WhatsApp</i> dimana prosesnya saat masyarakat datang ke kantor desa untuk mengurus persyaratan maka perangkat desa akan mengambil gambar persyaratan dokumen masyarakat, untuk selanjutnya gambar tersebut dikirim melalui <i>WhatsApp</i> ke petugas operator di kecamatan. Berdasarkan gambar yang dikirimkan operator di kecamatan melakukan pemeriksaan apakah persyaratan sudah lengkap atau belum, jika belum kekurangan persyaratan akan diinformasikan ke operator di desa. Jika sudah lengkap maka operator kecamatan akan memproses pengurusan dokumen dimaksud. Estimasi penyelesaian dokumen jika persyaratan sudah lengkap sekitar 10 - 30 menit. Sehingga nantinya saat masyarakat datang ke kecamatan hanya mengirimkan persyaratan dan mengambil dengan dokumen kependudukan yang sudah diproses tadi.	Terciptanya pelayanan administrasi kependudukan khususnya membuat KK yang mudah dan hemat biaya	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan target tahun 2026 : 100 %	Persentase Desa Yang Berkembang target tahun 2026 : 100 %

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025**

Kebijakan pendanaan daerah tahun 2025 masih dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Selain itu, kebijakan pendanaan juga diarahkan sebagai upaya pencapaian target tujuan sasaran RPD 2023-2026 serta kegiatan strategis untuk penyelesaian permasalahan pembangunan.

Kerangka pendanaan tahun 2025 mengalami perubahan pada semua komponen yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan substansi pokok perubahan sebagai berikut :

1. Proyeksi pendapatan daerah dalam RKPD Tahun 2025 sebesar 3,110 trilyun rupiah, pada APBD Tahun 2025 menjadi sebesar 3,827 trilyun rupiah, dan perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar 3,784 trilyun rupiah;
2. Proyeksi belanja daerah dalam RKPD Tahun 2025 adalah sebesar 3,491 trilyun rupiah, APBD Tahun 2025 menjadi sebesar 3,926 trilyun rupiah dan proyeksi belanja pada rencana perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi sebesar 3,912 trilyun rupiah;
3. Proyeksi pembiayaan netto daerah dalam RKPD Tahun 2025 sebesar 380,735 milyar rupiah, APBD Tahun 2025 menjadi sebesar 99 milyar rupiah, sedangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi sebesar 128,425 milyar rupiah.

Rencana kerangka pendanaan perubahan RKPD Tahun 2025 selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 5. 1
Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025

NO	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	3.110.388.764.542	3.827.886.125.032	3.784.401.342.190
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.031.189.898.742	1.029.147.158.032	1.059.021.128.634
1.1.1	Pajak Daerah	504.117.000.000	490.419.979.000	490.672.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	372.555.738.138	378.852.875.570	390.569.270.908
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	61.650.000.000	61.650.000.000	60.207.808.888
1.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	92.867.160.604	98.224.303.462	117.572.048.838
1.2	Pendapatan Transfer	2.075.766.865.800	2.798.738.967.000	2.716.845.872.135
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.906.563.390.800	2.629.535.492.000	2.541.678.397.135
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	169.203.475.000	169.203.475.000	175.167.475.000
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	3.432.000.000	-	8.534.341.421
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.432.000.000		
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8.534.341.421
2	BELANJA DAERAH	3.491.124.031.100	3.926.886.125.032	3.912.826.863.999
2.1	Belanja Operasi	2.328.412.087.203	2.925.096.599.391	2.921.347.774.720
2.2	Belanja Modal	529.964.885.100	384.200.323.730	357.395.248.582
2.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	19.000.000.000	3.727.950.000
2.4	Belanja Transfer	622.747.058.797	598.589.201.911	630.355.890.697
Surplus/Defisit		(380.735.266.558)	(99.000.000.000)	(128.425.521.809)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	385.735.266.558	99.000.000.000	128.425.521.809
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaranannya	385.735.266.558	99.000.000.000	128.425.521.809
3.2	Pengeluaran pembiayaan	5.000.000.000	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	-	-
Pembiayaan Netto		380.735.266.558	99.000.000.000	128.425.521.809

Tabel 5. 2

Pagu Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	RKPD 2025 Rp	APBD 2025 Rp	Perubahan RKPD 2025 Rp
1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem				
Peningkatan kualitas produktivitas pertanian dititikberatkan pada peningkatan lahan pertanian berkelanjutan, pengembangan agro industri	- Program pengelolaan perikanan tangkap	1.858.499.470	1.858.499.470	2.127.227.570
	- Program pengelolaan perikanan budidaya	2.709.239.030	2.709.239.030	2.648.956.390
	- Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	30.000.000	30.000.000	14.450.370
	- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	451.800.000	451.800.000	276.810.620
	- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	13.382.968.670	15.780.557.600	12.958.563.660
	- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	17.729.951.090	29.543.365.690	24.932.131.595
	- Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	349.999.920	963.600.000	925.194.780
	- Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	79.999.860	60.000.000	47.499.810
	- Program penyuluhan pertanian	545.000.000	4.797.890.000	5.430.991.000

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	RKPD 2025 Rp	APBD 2025 Rp	Perubahan RKPD 2025 Rp
Penguatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/perdagangan dan kolaborasi dengan <i>e-commerce</i>	- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	32.500.000	32.500.000	18.349.700
	- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	75.000.000	35.000.000	35.000.000
	- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	45.000.000	35.821.650	178.139.120
	- Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	90.000.000	40.000.000	20.000.000
	- Program pengembangan UMKM	445.346.500	406.926.500	410.863.250
Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	2.477.925.000	2.106.821.500	2.248.116.690
	- Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	637.000.000	618.500.000	608.846.820
	- Program pengembangan ekspor	170.100.000	120.100.000	115.947.760
	- Program standarisasi dan perlindungan konsumen	65.670.980	65.670.980	61.893.570
	- Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	210.850.000	161.271.700	437.025.900
Penguatan industri kecil menengah melalui pengembangan diversifikasi	- Program perencanaan dan pembangunan industri	2.224.141.600	3.254.141.600	3.132.765.760

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	RKPD 2025 Rp	APBD 2025 Rp	Perubahan RKPD 2025 Rp
produk sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital	- Program Pengendalian Izin Usaha Industri	5.000.000	5.000.000	2.100.000
	- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	45.000.000	45.000.000	23.203.430
	- Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	803.999.610	703.999.610	602.056.635
	- Program pemasaran pariwisata	1.010.000.000	985.000.000	901.482.400
	- Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	296.200.160	221.200.160	181.544.880
Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal	- Program pengembangan iklim penanaman modal	167.779.700	146.067.980	73.033.990
	- Program promosi penanaman modal	238.296.260	116.538.860	58.269.260
	- Program pelayanan penanaman modal	328.475.110	98.568.260	80.681.520
	- Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	26.900.000	26.900.000	13.450.000
	- Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	32.350.000	32.350.000	16.174.400
Optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui penguatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan	- Program pemberdayaan sosial	1.102.155.060	1.012.155.060	823.690.435
	- Program rehabilitasi sosial	923.977.500	883.086.200	879.781.170

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	RKPD 2025 Rp	APBD 2025 Rp	Perubahan RKPD 2025 Rp
ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta	- Program perlindungan dan jaminan sosial	364.243.450	1.501.901.150	2.114.586.603
	- Program penanganan bencana	708.916.150	688.647.530	823.488.965
	- Program pengelolaan taman makam pahlawan	40.949.840	40.949.840	40.849.920
Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan lumbung pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan	- Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	4.526.026.950	4.363.600.730	4.341.143.730
	- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.739.559.770	4.706.743.610	4.611.130.240
	- Program penanganan kerawanan pangan	407.267.560	407.267.560	369.540.600
	- Program pengawasan keamanan pangan	194.358.900	181.804.900	113.401.500
Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar industri	- Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	3.729.714.900	4.461.714.900	4.561.714.900
	- Program penempatan tenaga kerja	277.000.000	277.000.000	182.429.910
	- Program hubungan industrial	334.499.520	898.979.520	834.451.100
2. Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi				

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	RKPD 2025 Rp	APBD 2025 Rp	Perubahan RKPD 2025 Rp
Pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan, kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah	- Program Penyelenggaraan Jalan	262.713.428.500	185.452.510.000	159.011.100.324
	- Program Penataan Bangunan Gedung	32.473.500.000	33.473.500.000	18.985.686.642
	- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	885.000.000	885.000.000	640.849.100
	- Program pengembangan jasa konstruksi	700.000.000	700.000.000	296.838.550
	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	8.697.475.621	30.577.610.843	32.689.404.763
	- Program pengelolaan pelayaran	130.000.000	70.000.000	63.335.940
Pemerataan pembangunan PSU permukiman, penanganan kawasan kumuh dan penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu, korban bencana dan korban program pembangunan	- Program Kawasan Permukiman	10.298.286.447	4.838.286.447	4.579.142.910
	- Program Pengembangan Perumahan	5.724.674.687	5.293.174.937	4.936.462.500
	- Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	100.000.000	99.599.680
	- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	- Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	57.685.000.000	21.892.532.000	24.322.476.450

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	RKPD 2025 Rp	APBD 2025 Rp	Perubahan RKPD 2025 Rp
Perluasan akses air minum pada masyarakat dan pemerataan akses sanitasi layak untuk mencapai SPM	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	7.000.000.000	2.400.000.000	2.361.862.250
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	5.144.346.354	13.389.350.354	13.350.724.174
Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan sistem irigasi berkualitas dan penanganan banjir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	7.656.500.000	2.550.000.000	2.550.000.000
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	20.952.192.512	9.515.000.000	9.903.584.940
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kualitas SDA				
Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca	- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	471.500.000	471.500.000	562.828.235
Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	18.608.001.833	1.205.979.740	1.353.979.430
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	30.000.000	20.000.000	20.000.000

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	RKPD 2025 Rp	APBD 2025 Rp	Perubahan RKPD 2025 Rp
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50.000.000	50.000.000	24.999.800
Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST	- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	77.499.650	77.499.650	38.261.280
	- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	15.000.000	15.000.000	7.500.000
	- Program Pengelolaan Persampahan	8.339.985.812	7.556.989.167	8.612.407.462
Pengurangan risiko bencana melalui upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana	- Program Penanggulangan Bencana	1.243.814.010	1.117.768.970	1.197.693.785
	- Program Perencanaan Lingkungan Hidup	375.000.000	125.000.000	62.500.000
	- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.182.359.340	2.195.453.400	2.519.023.450
4. Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing				

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	RKPD 2025 Rp	APBD 2025 Rp	Perubahan RKPD 2025 Rp
Pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Program Pemenuhan Upaya - Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	91.424.332.850	117.831.251.090	119.320.042.010
	Program Peningkatan Kapasitas - Sumber Daya Manusia Kesehatan	92.196.400	1.418.965.400	1.418.965.400
	Program Sediaan Farmasi, Alat - Kesehatan dan Makanan Minuman	79.999.700	503.965.700	463.323.890
	Program Pemberdayaan - Masyarakat Bidang Kesehatan	115.667.200	576.463.600	573.955.000
Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat ber KB dan kualitas keluarga sejahtera	Program Pengendalian - Penduduk	28.000.200	706.000.200	692.000.100
	Program Pembinaan Keluarga - Berencana (KB)	1.223.301.640	7.041.691.640	7.004.276.920
	Program Pemberdayaan dan - Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	288.877.450	9.734.877.550	9.630.424.150
Pemantapan kualitas pengelolaan pendidikan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan	Program Pengelolaan - Pendidikan	36.391.435.310	262.324.047.410	290.773.269.005

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	RKPD 2025 Rp	APBD 2025 Rp	Perubahan RKPD 2025 Rp
meminimalkan anak usia sekolah yang tidak sekolah, pemenuhan wajib belajar 13 Tahun dan pendidikan kesetaraan, serta pengembangan sekolah inklusi	- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.973.335.440	8.919.335.750	8.105.347.525
Penguatan budaya literasi masyarakat di era digital	- Program Pembinaan Perpustakaan	775.297.880	730.054.200	804.832.720
	- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	29.999.330	29.999.330	29.999.330
Peningkatan peran wirausaha muda mandiri dalam menumbuhkan perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	724.854.850	634.547.960	533.205.620
	- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	29.998.900	29.998.900	29.998.900
Peningkatan capaian prestasi olahraga prestasi dan olahraga rekreasi ditingkat regional, nasional dan internasional	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	8.611.431.860	8.361.431.860	8.394.951.840
		-	-	-
Peningkatan peran SDM dalam pengembangan dan pemasaran budaya serta pelestarian cagar budaya	- Program Pengembangan Kebudayaan	1.263.820.910	1.163.820.910	1.163.820.910
	- Program Pengembangan Kesenian Tradisional	289.590.000	289.590.000	289.590.000
	- Program Pembinaan Sejarah	30.000.000	30.000.000	30.000.000

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	RKPD 2025 Rp	APBD 2025 Rp	Perubahan RKPD 2025 Rp
	- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	120.000.000	108.000.000	108.000.000
Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak.	- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.461.675.000	1.361.675.000	2.344.949.400
	- Program Perlindungan Perempuan	85.210.100	85.210.100	24.837.800
	- Program Peningkatan Kualitas Keluarga	165.000.000	165.000.000	155.000.000
	- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	123.998.790	123.998.790	111.889.640
	- Program Perlindungan Khusus Anak	447.999.440	848.659.440	850.518.925
5. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah				
Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan kabupaten pintar	- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.269.668.400	1.832.768.400	1.714.844.880
	- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.016.000.000	3.016.000.000	1.845.096.150
	- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.174.542.360	2.174.542.360	1.458.903.260

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	RKPD 2025 Rp	APBD 2025 Rp	Perubahan RKPD 2025 Rp
	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	37.543.104.640	37.443.104.640	38.467.881.950
	- Program Perekonomian dan Pembangunan	16.514.531.530	14.458.639.530	14.352.135.530
	- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	45.265.060.860	38.782.750.210	31.160.030.210
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	18.760.233.490	18.760.233.490	18.230.711.140
	- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	194.976.670	194.976.670	161.971.210
	- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.073.658.500	1.073.658.500	904.537.890
	- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	579.219.048	579.219.048	365.013.068
	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	359.997.250	359.997.250	189.207.150
Optimalisasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	635.292.902.957	620.135.046.071	636.121.833.997
	- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.315.224.076	11.315.224.076	10.593.527.106
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.102.275.210	7.940.139.010	7.425.286.490

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	RKPD 2025 Rp	APBD 2025 Rp	Perubahan RKPD 2025 Rp
Pengembangan pengelolaan arsip digital	- Program Pengelolaan Arsip	773.954.200	699.974.750	558.649.960
	- Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	31.066.630	25.000.000	46.102.080
Penguatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan	- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.355.866.010	1.133.993.835	633.594.640
	- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.227.388.809	3.850.056.550	5.336.912.186
	- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	99.127.310	99.127.310	66.287.890
	- Program Pendaftaran Penduduk	1.588.319.840	1.460.519.840	1.721.038.580
	- Program Pencatatan Sipil	80.097.750	80.097.750	54.798.400
	- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	385.000.000	305.000.000	2.257.296.000
	- Program Pengelolaan Profil Kependudukan	20.000.000	20.000.000	10.400.000
	- Program Kepegawaian Daerah	3.269.637.200	4.118.476.780	4.344.623.900
	- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.235.981.820	2.083.362.240	1.935.180.040
Penguatan dan perluasan pengawasan pembangunan untuk mengurangi	- Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.413.329.210	3.295.097.330	2.647.097.330

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	RKPD 2025 Rp	APBD 2025 Rp	Perubahan RKPD 2025 Rp
kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan	- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.784.661.520	5.323.387.480	5.323.387.480
	- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	803.511.160	803.511.160	821.224.140
	- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.253.634.000	3.253.634.000	3.213.634.000
	- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	40.000.000	20.000.000	20.000.000
	- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	245.000.000	150.000.000	100.000.000
	- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	811.279.800	797.154.630	761.646.000
	- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	325.944.980	325.944.980	150.960.820
Optimalisasi upaya peningkatan toleransi, kerukunan antar umat	- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	300.000.000	300.000.000	215.261.830

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	RKPD 2025 Rp	APBD 2025 Rp	Perubahan RKPD 2025 Rp
beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan pendidikan politik masyarakat	Program Penyelesaian Ganti - Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	50.000.000	50.000.000	36.507.870
	Program Redistribusi Tanah, DAN Ganti Kerugian Program - Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100.000.000	100.000.000	297.005.980
	- Program Penatagunaan Tanah	50.000.000	50.000.000	24.990.155
Pengembangan iklim inovasi dan Penguatan implementasi inovasi daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah	- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.521.750.000	1.521.750.000	1.130.316.960
6. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan				
Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM)	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	635.292.902.957	620.135.046.071	636.121.833.997
Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah	- Program Administrasi Pemerintahan Desa	815.000.000	700.000.000	395.094.910
Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan	- Program Penataan Desa	6.264.934.852	5.698.212.852	6.282.073.227
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, - Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.385.000.000	1.240.000.000	1.340.849.880

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	RKPD 2025 Rp	APBD 2025 Rp	Perubahan RKPD 2025 Rp
Pengembangan kerjasama antar desa	- Program Peningkatan Kerja Sama Desa	220.000.000	150.000.000	93.519.230

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan Tahun 2025

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dijabarkan ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 6 bidang, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 18 bidang, urusan pilihan sebanyak 5 bidang, unsur pendukung urusan pemerintahan 2 bidang, unsur penunjang urusan pemerintahan sebanyak 5 bidang, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan masing-masing sebanyak 1 bidang sebagaimana diuraikan di bawah ini.

5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan dalam Program Pengelolaan Pendidikan diarahkan pada Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dengan fokus pada Penambahan Ruang Kelas Baru SD; Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD; Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD; Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD; Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Dasar; Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar; Pengadaan Mebel Sekolah Dasar; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar; Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar; Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama fokus pada Penambahan Ruang Kelas Baru SMP; Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP; Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah SMP; Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SMP; Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama; Pengadaan Mebel Sekolah Menengah Pertama; Penyediaan

Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SMP; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama fokus pada Pendampingan pencegahan perundungan kekerasan pada anak di SD dan SMP. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) fokus pada Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD; Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD; Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD; Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD; Pengadaan Mebel PAUD; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD; Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD; Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD dan Kesetaraan; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan berfokus pada Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan; Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan. Prioritas program ini adalah untuk kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah SD, SMP, PAUD dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan yang difasilitasi. Program ini diarahkan pada pencapaian Jumlah Warga Negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100%; Jumlah Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100%; Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 100%; Persentase PAUD yang memiliki sarpras sesuai SNP dan Kesetaraan yang dibina 71.48%; Persentase SD yang memiliki sarpras sesuai SNP 42,32%; Persentase SMP yang memiliki sarpras sesuai SNP 53.88%.

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan diarahkan pada Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang Pendidikan 92,32%.

2. Urusan Kesehatan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Kegiatan diarahkan untuk mendukung kebijakan transformasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah melalui: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Pembangunan Puskesmas; Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya; Pengembangan Puskesmas; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas; Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi; Pengadaan Obat dan Vaksin; Pengadaan Bahan Habis Pakai; Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi

Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya; Pengelolaan Surveilans Kesehatan; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA; Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus; Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional; Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat; Operasional Pelayanan Rumah Sakit; Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya; Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota; Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal); Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga; Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis; Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV); Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria; Pengelolaan Kawasan tanpa rokok. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi; Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya; Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan. Prioritas dari program ini difokuskan pada desa prioritas I dalam rangka penanggulangan kemiskinan ektrim. Program ini diarahkan pada pencapaian Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100%; Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100% termasuk prevalensi balita pendek dan sangat pendek (stunting) 10,77%; Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan

100%; Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%; Persentase desa/kelurahan STBM 40%; Persentase FKTP terakreditasi 100%; Persentase menurunnya angka kesakitan dan kecacatan akibat penyakit 22%; Persentase pemanfaatan SIK terintegrasi di Fasyankes 75%; Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai 90,17%; Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi 100%; Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan 87%.

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kegiatan dalam program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan; Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase tenaga kesehatan teregistrasi 93%.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Kegiatan dalam program ini diarahkan pada Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan

serta Tindak Lanjut Pengawasan; Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan 100%.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat; Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat; Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM); Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 85,9%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Penataan Bangunan Gedung

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG; Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota; Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota; Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase bangunan Pemerintah dalam kondisi baik 75,10%.

b. Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota; Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; Survey Kondisi Jalan/Jembatan; Pembangunan Jalan; Rekonstruksi Jalan; Rehabilitasi Jalan; Pemeliharaan Berkala Jalan; Pemeliharaan Rutin Jalan; Pembangunan Jembatan; Rehabilitasi

Jembatan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik 70%.

c. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi; Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi; Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi; Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 41,43%.

d. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota; Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang; Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian Presentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 91%.

e. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai; Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku; Pembangunan Unit Air Baku; Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing; Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing; Normalisasi/Restorasi Sungai; Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku; Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai; Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi

Irigasi dan Rawa; Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan; Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik 49,09%; Persentase ketersediaan penunjang data SDA 61,3%; dan Persentase pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air 10,50%.

f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan; Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari 94,24%.

g. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat; Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman; Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja; Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 100%; Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 94% dan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman sebesar 4,3%.

h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Kegiatan dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota; Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase; Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan; Pembangunan Sistem

Drainase Lingkungan; Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan; Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Drainase dalam keadaan baik 93,60%.

i. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota; Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS; Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase penanganan sampah 69,05%.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan diarahkan pada Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota; Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan; Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana; Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana; Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana; Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100%; Persentase penyediaan rumah layak huni sebagai tempat tinggal bagi korban bencana kab/kota yang mengalami kerusakan 100%.

b. Program Kawasan Permukiman

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase kawasan perumahan kumuh yang tertangani 90,31% dengan prioritas pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan diarahkan pada Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan; Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan; Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian; Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik 88%.
- d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan diarahkan pada Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil; Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 75%.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan diarahkan pada Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini termasuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan; Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa; Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum; Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam

Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota; Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota; Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum, perda dan perkara 100%; Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100%; Persentase Linmas yang Dibina 100%.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri; Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK). Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran; Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran; Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat; Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran; Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana. Program ini diarahkan pada pencapaian Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100%.

c. Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan diarahkan pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota; Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota; Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota; Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota; Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana; Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan; Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100%; Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100%; Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100%; dan Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi 100%.

6. Urusan Sosial

a. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase TKSK, PSM, Orsos dan LKS yang dibina 100%.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Program ini diarahkan pada pencapaian Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) tercapai 100%; dan indikator Persentase PPKS diluar sasaran SPM yang direhabilitasi 0,34%.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan sebesar 100%.

d. Program Penanganan Bencana

Kegiatan diarahkan pada Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota tercapai 100%.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan diarahkan pada Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sebesar 60,25%.

5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi; Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi; Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Program diarahkan untuk pencapaian Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 32%.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan diarahkan pada Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan; Perluasan Kesempatan Kerja. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan dan Pengendalian LPTKS.

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; Job Fair/Bursa Kerja. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran; Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan. Program

diarahkan untuk pencapaian Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota 50,65%.

c. Program Hubungan Industrial

Kegiatan diarahkan pada Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan; Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota; Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota. Program diarahkan untuk pencapaian Persentase Perselisihan hubungan industrial yang ditangani melalui mediasi 100%; dan Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 35%.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Kegiatan diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG; Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota; Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Rasio Program dan kegiatan responsif gender di Perangkat Daerah 96%. Persentase Perempuan yang menjadi Calon Legislatif 25%; Persentase Organisasi Wanita yang Aktif 97%; Rasio korban kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 0,00006;

b. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha 57%;

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota; Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Cakupan Keluarga yang terlayani PUSPAGA 0,00015%; dan persentase Kecamatan desa / kelurahan yang memiliki puspaga 76%.

d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program diarahkan untuk pencapaian Prosentase pencapaian Desa / kelurahan Layak Anak 47%;

e. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program diarahkan untuk pencapaian persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standar 0,000205%.

3. Urusan Pangan

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Kegiatan diarahkan pada Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan; Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita 179%; Persentase ketersediaan pangan 179%.

- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan; Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan; Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan; Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi; Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun; Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Program ini diarahkan pada pencapaian Ketersediaan energi dan protein per kapita 100%; Persentase kelompok yang dibina dalam rangka pengembangan konsumsi pangan 7,2%; Produksi Komoditas Perkebunan (Bidang Perkebunan) 62.495,8 ton.

- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan; Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase daerah rentan rawan pangan 7,75%.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota; Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota; Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 81,42%.

4. Urusan Pertanahan

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Kegiatan diarahkan pada Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota; Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini diarahkan pada Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 100%.

b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Kegiatan diarahkan pada Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 100%.

c. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Kegiatan diarahkan pada Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah. Program ini diarahkan pada Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah 100%.

d. Program Penatagunaan Tanah

Kegiatan diarahkan pada Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah. Program ini diarahkan pada Persentase Pembinaan Tertib Administrasi Pertanahan 44%.

5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan dalam Program Perencanaan Lingkungan Hidup diarahkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota; Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota; Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup 100% dan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup 100%.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi. Program ini diarahkan pada pencapaian Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air 39,68%.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota; Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Program ini diarahkan pada pencapaian Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 0,44.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Kegiatan diarahkan pada Penyimpanan Sementara Limbah B3; Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Kegiatan/Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 100%.

- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Kegiatan diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase penataan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan atau persetujuan pemerintah yang ditindaklanjuti 100%.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan; Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. Program diarahkan pada pencapaian Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan 62 kelompok; Persentase Sekolah Adiwiyata 71,07%.
- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Kegiatan diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota. Program diarahkan pada pencapaian Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran / Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti 100%.

- h. Program Pengelolaan Persampahan
- Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Sampah; Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota; Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota; Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta; Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah. Program diarahkan pada pencapaian Persentase Pengurangan Sampah 14,3%.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Program Pendaftaran Penduduk
- Kegiatan diarahkan pada Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan; Penataan Pendaftaran Penduduk; Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan; Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk; Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk; Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk. Program diarahkan pada pencapaian Cakupan penerbitan Kartu Keluarga 96%; Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama 28,3%; Perekaman KTP elektronik 99,49%; Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 30,35%.
- b. Program Pencatatan Sipil
- Kegiatan diarahkan pada Pelayanan Pencatatan Sipil; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting; Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil; Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil; Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil. Program diarahkan pada pencapaian Kepemilikan akta kelahiran 94,4%; dan Persentase

cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan 35,02%.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan diarahkan pada Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan; Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Program diarahkan pada pencapaian Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara 100%.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Profil Kependudukan; Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain. Program diarahkan pada pencapaian Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun 100%.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Penataan Desa

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Penataan Desa; Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa; Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa; Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa; Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Pengentasan Desa tertinggal 100%.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Kerja Sama antar Desa; Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota; Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota; Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga 100%.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; Fasilitasi

Penyusunan Produk Hukum Desa; Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa; Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa; Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa; Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Fasilitasi Penyusunan Profil Desa; Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa; Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD; Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Desa memiliki Dokumen RPJMDes, APBDes dan RKPDDes 100%.

- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan diarahkan pada Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina 12,96%.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan diarahkan pada Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK); enyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota; Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal; Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal; Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan; Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga; Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; Perumusan Parameter Kependudukan; Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan; Penyediaan Data dan Informasi Keluarga; Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB; Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Usia Kawin Pertama yang isterinya dibawah usia 20 tahun 16,1%.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal; Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja; Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal; Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK; Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang; Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK; Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok); Pengendalian Program KKBPK. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB; Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB; Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga

Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB); Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota; Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya; Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB; Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP; Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB; Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya; Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan; Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak; Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB; Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB; Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB; Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Jumlah Peserta KB/CPR 68,65%; dan Persentase Un Meed Need 12,04%.

- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga); Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,

PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase kelompok masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina (UPPKS, PIK KRR, BKL, BKR, BKB) 70%; dan Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif 85%.

9. Urusan Perhubungan

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan diarahkan pada Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan

Jalan dalam rangka peningkatan keselamatan, konektivitas dan kualitas pelayanan transportasi (ketepatan waktu dan kepuasan masyarakat). Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan; Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Rasio Ijin Trayek 0,62; Rasio Perlengkapan jalan 0,54; Persentase Kepemilikan KIR Kendaraan Bermotor Wajib Uji 97,65%.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Kegiatan diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha; Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Rasio Ketersediaan Rambu Angkutan Sungai dan Penyeberangan 0,5.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; Monitoring Opini dan Aspirasi Publik; Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik; Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Pelayanan Informasi Publik; Layanan Hubungan Media; Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan; Manajemen Komunikasi Krisis; Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah; Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas; Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota 73%.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota; Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah; Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi; Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik; Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas; Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE. Program ini diarahkan pada

pencapaian Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan/replikasi inovasi yang mendukung Smart City sesuai masterplan 75%.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan; Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro; Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro; Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro; Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro; Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. Program ini diarahkan pada persentase meningkatnya usaha mikro menjadi wirausaha 12,23%.

- b. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil; Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase Pertumbuhan UMKM 3,3%.

- c. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota; pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota 72%.

- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Kegiatan diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota; Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan

Kompetensi SDM Koperasi. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Pengelola Koperasi yang memiliki kompetensi 71,84%.

e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan diarahkan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Meningkatnya koperasi yang berkualitas 37,28%.

12. Urusan Penanaman Modal

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan dalam Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal diarahkan pada:

1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota.

Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase kebijakan Penanaman Modal yang diterbitkan dengan target 100%.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang diikuti 100%.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.
- 2) Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan dengan target 100%.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- 1) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.
- 2) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
- 3) Pengawasan Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Kepatuhan LKPM dengan target 75%.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Ketersediaan Profil Investasi Sektor Perizinan Berusaha 100%.

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Kegiatan diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Peningkatan Kapasitas Pemuda dan

Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Organisasi pemuda yang aktif 100%; Persentase Wirausaha Muda 25%.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota; Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga; Pengembangan Organisasi Keolahragaan. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi. Program ini diarahkan pada pencapaian Cakupan Pembinaan Olahraga 100 Cabor.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah. Pembinaan ini diarahkan pada pencapaian persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina 100%.

14. Urusan Statistik

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, kegiatan yang akan diarahkan pada Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral; Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 100%.

15. Urusan Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengaman Informasi, kegiatan yang diarahkan pada Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Tingkat keamanan informasi pemerintah 1,02 indeks.

16. Urusan Kebudayaan

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan diarahkan pada Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya; Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional; Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan 31,25%.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase kesenian tradisional yang dibina 50%.

c. Program Pembinaan Sejarah

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase sejarah lokal yang dibina 12,22%.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan diarahkan pada Penetapan Cagar Budaya Kabupaten/Kota; Pengelolaan Cagar Budaya Kabupaten/Kota yang berfokus pada Pemanfaatan Cagar Budaya. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase cagar budaya yang terintegrasi 27%.

17. Urusan Perpustakaan

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik; Pembinaan Perpustakaan pada Satuan

Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan; Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota; Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka; Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Subkegiatan: Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat; Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca; Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial; Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Rasio pengunjung perpustakaan per tahun persatuan penduduk 9,98%.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Kegiatan diarahkan pada Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota; terdiri dari Subkegiatan : Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan 25%.

18. Urusan Kearsipan

a. Program Pengelolaan Arsip

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota; Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis; Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota; Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan 75,34%.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Kegiatan ini diarahkan pada Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota; Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan; Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan untuk pencapaian Indikator Persentase Jumlah Arsip yang dilindungi dan diselamatkan 50%.

5.2.3 Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota; Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan; Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT. Program ini diarahkan pada pencapaian Presentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan 80%.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan diarahkan pada Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil; Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil; Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha; Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan fokus pada Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan 80%.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan diarahkan pada Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota; Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Cakupan Kelompok Masyarakat Pengawas Aktif 80,65%.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan diarahkan pada Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil; Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil; Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota; Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Cakupan Bina Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan 77,78% serta untuk ketercapaian angka konsumsi ikan sebesar 30,448 kg/kapita/th.

2. Urusan Pariwisata

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota; Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota 10%.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan diarahkan pada Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan fokus Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri; Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Obyek Wisata yang dipromosikan 24%.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif (semua 17 Subsektor yang dikembangkan) 33,33%.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan fokus Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar; Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata; Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase (%) pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan 25%.

3. Urusan Pertanian

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatan dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian diarahkan pada Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota fokus pada Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman; Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota fokus pada Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota fokus pada Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak. Program ini diarahkan pada pencapaian Populasi ternak 9.075.397 ekor; Produksi Tanaman Hortikultura 71.967 Ton; Produksi Tanaman Pangan 1.010.489 ton.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Prasarana Pertanian; Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya yang meliputi pengadaan alat dan mesin pertanian, pengawasan pupuk dan pestisida, Pembangunan Prasarana Pertanian fokus pada Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani; Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit; Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Luas pelayanan Jaringan Irigasi 9,8%.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan diarahkan pada Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus

penyakit hewan menular 24,9% sebagai upaya untuk mengatasi angka kesakitan ternak.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Kegiatan diarahkan pada Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota; Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Bencana Pertanian yang Tertangani 100%.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa; Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase peningkatan kelas kelompok tani 7,8%.

4. Urusan Perdagangan

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan diarahkan pada Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan; Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya; Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase sarana distribusi perdagangan yang direhabilitasi 75%; Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina 14,24%.

b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan diarahkan pada Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan fokus Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan fokus pada Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan; Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang

Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota fokus pada Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Ketersediaan Data Harga Kebutuhan Pokok 100%; Persentase Kinerja realisasi pupuk 54%.

c. Program Pengembangan Ekspor

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota; Pameran Dagang Nasional; Pameran Dagang Lokal; Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan; Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor. Program ini diarahkan pada Cakupan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor 4%.

d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan; Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang; Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/ tera ulang dalam tahun berjalan 100%.

e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan diarahkan pada pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota; Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan. Program ini diarahkan pada pencapaian cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal 0,43%.

5. Urusan Perindustrian

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase sentra industri terbina sebesar 100%.

- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- Kegiatan diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota; Fasilitasi Pemenuhan Komitmen PErolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 2,64%.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- Kegiatan diarahkan pada Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota; Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas; Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas. Program ini diarahkan pada pencapaian Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini 95%.

5.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Kegiatan diarahkan pada Administrasi Tata Pemerintahan; Penataan Administrasi Pemerintahan; Pengelolaan Administrasi Kewilayahan; Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat fokus pada Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual; Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial; Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum fokus pada Fasilitasi

Penyusunan Produk Hukum Daerah; Fasilitasi Bantuan Hukum; Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum. Fasilitasi Kerjasama Daerah fokus pada Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri. Program ini diarahkan pada pencapaian Jumlah naskah kerjasama yang diterbitkan 15 dokumen; Persentase Ketersediaan Koordinasi Bidang Hukum Sesuai Kebutuhan 100%; Persentase koordinasi bidang Kesra 100%; Persentase koordinasi bidang Pemerintahan 100%.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD; Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan fokus pada Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan; Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan; Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa fokus pada Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik; Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Cakupan tingkat keberhasilan e-Tendering 100%; Pelaksanaan kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal di kabupaten Cilacap 24 kecamatan; Pengawasan peredaran barang dan jasa di bidang pupuk dan LPG bersubsidi 6 kegiatan; Persentase koordinasi bidang Perekonomian dan SDA 100%; Persentase Penyerapan APBD 94,75%.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Kegiatan diarahkan pada Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Peningkatan Kapasitas DPRD fokus pada Pendalaman Tugas DPRD; Publikasi dan Dokumentasi Dewan; Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli; Penyediaan Tenaga Ahli

Fraksi. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat fokus pada Kunjungan Kerja dalam Daerah; Pelaksanaan Reses. Fasilitasi Tugas DPRD fokus pada Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase fasilitasi rapat-rapat tepat jadwal 100%.

5.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- a. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan; Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota; Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah fokus pada Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah fokus pada Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota; Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dengan fokus pada Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase pencapaian realisasi target Program tahunan 93%.

- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) fokus pada Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan fokus pada Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase realisasi indikator OPD dibawah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 93%; Persentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun Perekonomian 82%; dan Persentase Realisasi Indiktor OPD dibawah Rumpun Infrastruktur dan Kewilayahan 82%.

2. Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD; Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran; Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah fokus pada Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah; Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD; Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya; Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama, dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah fokus pada Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban; Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD -0.087%; Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah 100%; Rasio

Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure) 64,05%; Persentase Penyaluran Dana Transfer ke Desa 100%.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah; Penyusunan Standar Harga; Penatausahaan Barang Milik Daerah; Inventarisasi Barang Milik Daerah; Pengamanan Barang Milik Daerah; Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah; Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah; Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian Manajemen Aset yang optimal dengan kelengkapan dokumen daftar aset, manual untuk menyusun daftar aset tetap, proses inventarisasi aset tahunan dan nilai aset tercantum dalam laporan anggaran.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan pendapatan Daerah; Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; Penagihan Pajak Daerah; Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD 0.053%; Persentase Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah 11,4%.

3. Kepegawaian

Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan diarahkan pada Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN fokus pada Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN; Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK; Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian; Fasilitasi Lembaga Profesi ASN; Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; Pengelolaan Data Kepegawaian; Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi

Kepegawaian. Mutasi dan Promosi ASN fokus pada Pengelolaan Mutasi ASN; Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN; Pengelolaan Promosi ASN. Pengembangan Kompetensi ASN fokus pada Peningkatan Kapasitas kinerja ASN, Pengelolaan Assessment Center, Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN; Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN; Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN; Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur fokus pada Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai; Pembinaan Disiplin ASN; Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase kepatuhan ASN terhadap peraturan perundangan dibidang kepegawaian 99,92%; Persentase Penempatan ASN sesuai Kompetensi 99,32%; Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN 63,38%; Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 24,27%.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Kompetensi Teknis fokus pada Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional fokus pada Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase kesesuaian kompetensi ASN dengan persyaratan/standar jabatan 56,55%.

5. Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan diarahkan pada Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian, dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian, dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan fokus pada Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial; Penelitian dan Pengembangan Pariwisata; Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat. Pengembangan Inovasi dan Teknologi fokus pada Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi; Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; Diseminasi Jenis, Prosedur, dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif; Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan; Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase jumlah inovasi daerah yang ditindaklanjuti 90%; Persentase riset Daerah yang ditindaklanjuti 40%.

5.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Daerah

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Pengawasan Internal; Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; Reviu Laporan Kinerja; Reviu Laporan Keuangan; Pengawasan Desa; Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu fokus pada Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai kinerja baik 80%; dan Persentase Perangkat Desa dengan Nilai kinerja baik 80%.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

Kegiatan diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; Perumusan Kebijakan

Teknis di Bidang Pengawasan. Pendampingan dan Asistensi; Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi; Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 100%; Persentase kumulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi 88%.

5.2.7 Unsur Kewilayahan

Kecamatan

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan sub kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan sebagai keikutsertaan dalam mendukung Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan; Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan; Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif 100%; Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif 100%.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban 100%.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah; Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Persentase Fasilitasi Forkompincam 100%.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa; Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa 100%.

5.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

Kegiatan diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Program ini diarahkan pada pencapaian cakupan kecamatan yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara 24 Kecamatan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Kegiatan diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak tahun 2024, serta Pemantauan Situasi Politik; Pelaksanaan Kebijakan di Bidang

Pendidikan Politik; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian persentase pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu 70%.

- c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Kegiatan diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase LSM/Ormas yang dibina 80%.

- d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Kegiatan diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 24 Kecamatan.

- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian cakupan kecamatan yang terfasilitasi

dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial 24 Kecamatan.

5.2.9 Program Rutin di semua Perangkat Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah fokus pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah fokus pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN termasuk rencana Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasi tahun 2024 yang dilantik pada tahun 2025; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah fokus pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Administrasi Umum Perangkat Daerah fokus pada Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah fokus pada Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah fokus pada Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah fokus pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Peningkatan Pelayanan BLUD fokus pada Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah fokus pada Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah; Penyediaan Kebutuhan

Rumah Tangga Sekretariat Daerah. Penataan Organisasi fokus pada Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan; Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana; Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan fokus pada Fasilitas Keprotokolan; Fasilitas Komunikasi Pimpinan; Pendokumentasian Tugas Pimpinan. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD fokus pada Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD; Pelaksanaan Medical Check Up DPRD. Layanan Administrasi DPRD fokus pada Fasilitas Fraksi DPRD; Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD. Program ini diarahkan pada pencapaian persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah 100% dan persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah 100%; Persentase cakupan pelayanan BLUD 100%; Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang terlayani sesuai standar 100%; Persentase pemenuhan dokumen penataan organisasi 100%. Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan daerah dan pejabat sesuai kebutuhan 97%; Persentase implementasi tugas dan kewajiban fasilitas terhadap DPRD yang terselesaikan sesuai SOP 100%.

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2025. Uraian rumusan rencana program dan pagu indikatif secara rinci tertuang pada tabel 5.3. di bawah ini.

Tabel 5.3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				748.465.540.741	1.328.876.238.171	1.346.923.151.619	18.046.913.448				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				746.762.129.831	1.327.284.827.261	1.345.331.740.709	18.046.913.448				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				746.762.129.831	1.327.284.827.261	1.345.331.740.709	18.046.913.448				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SD yang memiliki Sarpras sesuai SNP Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase SMP yang memiliki sarpras sesuai SNP Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Persentase PAUD yang memiliki sarpras sesuai SNP dan Kesetaraan yang dibina Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	42,32 % 100 % 53,88% 100% 71,48% 100%	42,32 % 100 % 53,88% 100% 71,48% 100%	36.391.435.310	262.324.047.410	290.773.269.005	28.449.221.595				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang difasilitasi	100 %	100 %	18.296.283.130	145.972.989.230	165.347.900.090	19.374.910.860				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	5 Ruang	740.000.000	590.000.000	590.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang	-	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	0 Ruang	460.000.000	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	23 Unit	2.666.000.000	2.366.000.000	2.366.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5 Ruang	576.944.600	276.944.600	276.944.600	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2659 Paket	2659 Paket	1.690.000.000	710.000.000	710.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	482 PesertaDidik	482 Peserta Didik	116.750.000	116.750.000	116.750.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1033 SatuanPendidika	1036 Satuan Pendidika	2.868.589.530	2.332.683.370	15.274.948.970	12.942.265.600	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1033 SatuanPendidika	1036 Satuan Pendidika	-	132.808.275.000	132.852.829.060	44.554.060	Kab. Cilacap	DAK	Kas Dana BOS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		171 Orang	-	150.000.000	150.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		80 Orang	-	30.000.000	30.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	3 Ruang	760.000.000	200.000.000	200.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Unit	16 Unit	1.185.000.000	1.125.000.000	1.525.000.000	400.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		200 Orang	-	44.626.260	44.626.260	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	1033 Satuan Pendidikan	1036 Satuan Pendidikan	271.999.000	119.999.000	84.440.200	(35.558.800)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	38 Ruang	43 Ruang	6.081.000.000	3.391.000.000	4.116.000.000	725.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	8 Paket	8 Paket	400.000.000	1.231.711.000	6.530.361.000	5.298.650.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang difasilitasi	100 %	100 %	7.662.343.340	79.863.998.340	89.067.599.135	9.203.600.795				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang	-	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang	-	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	7 Unit	1.165.000.000	740.000.000	1.740.000.000	1.000.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	4 Ruang	560.000.000	300.000.000	850.000.000	550.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	200.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	605.000.000	125.000.000	125.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	130.000.000	130.000.000	130.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	90 Peserta Didik	90 Peserta Didik	1.395.000.000	1.395.000.000	1.395.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	702 Peserta Didik	702 Peserta Didik	103.560.000	103.560.000	103.560.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	84 Satuan Pendidikan	84 Satuan Pendidikan	2.306.138.340	2.000.418.740	9.072.618.740	7.072.200.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	197 Satuan Pendidikan	197 Satuan Pendidikan	-	73.464.375.000	73.681.422.195	217.047.195	Kab. Cilacap	DAK	Kas Dana BOS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	270 Orang	270 Orang	-	222.645.000	222.645.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100 Orang	-	19.999.600	19.999.600	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	84 Satuan Pendidikan	84 Satuan Pendidikan	297.645.000	75.000.000	39.353.600	(35.646.400)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	2 Ruang	200.000.000	200.000.000	600.000.000	400.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	15 Orang	15 Orang	-	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	8 Paket	8 Paket	400.000.000	685.000.000	685.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD yang difasilitasi	100 %	100 %	9.866.029.840	31.123.180.840	31.104.363.240	(18.817.600)				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	23 Unit	23 Unit	1.140.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	17 Paket	17 Paket	595.000.000	565.000.000	565.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	896 Orang	896 Orang	2.151.029.840	2.151.029.840	2.151.029.840	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	977 SatuanPendidikan	989 Satuan Pendidikan	275.000.000	184.000.000	164.948.000	(19.052.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		989 Satuan Pendidikan	-	21.712.200.000	21.712.500.000	300.000	Kab. Cilacap	DAK		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		110 Orang	-	40.000.000	40.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		50 Komunitas	-	24.000.000	24.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Ruang	7 Ruang	870.000.000	330.000.000	330.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		45 Orang	-	32.000.000	32.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	7 Unit	895.000.000	595.000.000	595.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	108 Paket	108 Paket	2.595.000.000	3.134.951.000	3.134.951.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	977 SatuanPendidikan	989 Satuan Pendidikan	260.000.000	130.000.000	129.934.400	(65.600)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	14 Ruang	1.035.000.000	1.035.000.000	1.035.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Penyelenggara Pendidikan non formal/kesetaraan yang difasilitasi	100 %	100 %	566.779.000	5.363.879.000	5.253.406.540	(110.472.460)				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	64 Orang	64 Orang	81.200.000	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	32 SatuanPendidikan	35 Satuan Pendidikan	245.379.000	215.379.000	192.676.950	(22.702.050)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		35 Satuan Pendidikan	-	4.827.100.000	4.827.100.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		240 Orang	-	40.000.000	40.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		140 Orang	-	30.000.000	30.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		315 Orang	-	51.200.000	51.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2163 PesertaDidik	2163 Peserta Didik	215.200.000	175.200.000	87.429.590	(87.770.410)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	92.32 %	92.32 %	8.973.335.440	8.919.335.750	8.105.347.525	(813.988.225)				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Guru yang terfasilitasi	100 %	100 %	8.973.335.440	8.919.335.750	8.105.347.525	(813.988.225)				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.999.900	20.999.900	10.496.950	(10.502.950)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Laporan	7 Laporan	8.952.335.540	8.898.335.850	8.094.850.575	(803.485.275)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	701.397.359.081	1.056.041.444.101	1.046.453.124.179	(9.588.319.922)		DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000	40.000.000	26.900.000	(13.100.000)				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000	25.000.000	16.750.000	(8.250.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	15.000.000	10.150.000	(4.850.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	691.026.822.219	1.045.670.907.239	1.037.106.043.432	(8.564.863.807)				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12Orang/bulan	12 Orang/bulan	691.026.822.219	1.045.670.907.239	1.037.106.043.432	(8.564.863.807)	Kab. Cilacap	DAK	SiLPA DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150 Orang	150 Orang	225.000.000	225.000.000	105.000.000	(120.000.000)				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	150 Paket	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	150 Orang	150.000.000	150.000.000	30.000.000	(120.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	2.576.737.703	2.576.737.703	2.004.662.588	(572.075.115)				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	553.638.678	553.638.678	508.884.167	(44.754.511)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	991.499.065	991.499.065	991.499.065	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	281.599.960	281.599.960	129.279.359	(152.320.601)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	750.000.000	750.000.000	374.999.997	(375.000.003)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	72 Unit	72 Unit	169.913.430	169.913.430	169.880.610	(32.820)				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	29 Unit	94.997.790	94.997.790	94.964.970	(32.820)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	43 Unit	43 Unit	74.915.640	74.915.640	74.915.640	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	5.937.773.409	5.937.773.409	5.619.525.229	(318.248.180)				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	555.000.000	555.000.000	552.000.000	(3.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.382.773.409	5.382.773.409	5.067.525.229	(315.248.180)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	1.421.112.320	1.421.112.320	1.421.112.320	-				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	420.816.000	420.816.000	420.816.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	180.000.000	180.000.000	180.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	795.306.320	795.306.320	795.306.320	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 Unit	63 Unit	24.990.000	24.990.000	24.990.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.703.410.910	1.591.410.910	1.591.410.910	-				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.703.410.910	1.591.410.910	1.591.410.910	-				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	31.25 %	31.25 %	1.263.820.910	1.163.820.910	1.163.820.910	-				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan	2 Jenis	2 Jenis	1.263.820.910	1.163.820.910	1.163.820.910	-				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	7 Objek	1.037.000.910	1.037.000.910	1.037.000.910	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	3 Laporan	200.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	5 Sertifikat	5 Sertifikat	26.820.000	26.820.000	26.820.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dibina	50 %	50 %	289.590.000	289.590.000	289.590.000	-				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok kesenian yang dibina	2 Kelompok	2 Kelompok	289.590.000	289.590.000	289.590.000	-				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	100 Orang	289.590.000	289.590.000	289.590.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dibina	12.22 %	12.22 %	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan sejarah lokal	1 kegiatan	1 kegiatan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang Teregistrasi	0,272	272	120.000.000	108.000.000	108.000.000	-				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang di registrasi	2 Objek	2 Objek	72.000.000	60.000.000	60.000.000	-				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	5 Objek	72.000.000	60.000.000	60.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah objek cagar budaya yang dikelola	1 Objek	1 Objek	48.000.000	48.000.000	48.000.000	-				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	3 Objek	3 Objek	48.000.000	48.000.000	48.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SMP Negeri 1 Cilacap				60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 1 Cilacap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 1 Cilacap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 1 Cilacap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-		DAU		SMP Negeri 1 Cilacap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-				SMP Negeri 1 Cilacap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Cilacap
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	42.000.000	42.000.000	42.000.000	-				SMP Negeri 1 Cilacap
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42.000.000	42.000.000	42.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Cilacap
	SMP Negeri 2 Cilacap				60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 2 Cilacap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 2 Cilacap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 2 Cilacap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-		DAU		SMP Negeri 2 Cilacap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 2 Cilacap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Cilacap
	SMP Negeri 3 Cilacap				60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 3 Cilacap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 3 Cilacap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 3 Cilacap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-		DAU		SMP Negeri 3 Cilacap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 3 Cilacap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Cilacap
	SMP Negeri 4 Cilacap				60.000.000	60.000.000	52.571.400	(7.428.600)				SMP Negeri 4 Cilacap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	52.571.400	(7.428.600)				SMP Negeri 4 Cilacap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	52.571.400	(7.428.600)				SMP Negeri 4 Cilacap

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	52.571.400	(7.428.600)		DAU		SMP Negeri 4 Cilacap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	40.180.000	40.180.000	32.751.400	(7.428.600)				SMP Negeri 4 Cilacap
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.692.000	8.692.000	8.692.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Cilacap
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	28.488.000	28.488.000	21.059.400	(7.428.600)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Cilacap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Cilacap
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	19.820.000	19.820.000	19.820.000	-				SMP Negeri 4 Cilacap
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	19.820.000	19.820.000	19.820.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Cilacap
	SMP Negeri 5 Cilacap				60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 5 Cilacap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 5 Cilacap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 5 Cilacap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-		DAU		SMP Negeri 5 Cilacap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	20.262.000	20.262.000	20.262.000	-				SMP Negeri 5 Cilacap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.262.000	20.262.000	20.262.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 5 Cilacap
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	39.738.000	39.738.000	39.738.000	-				SMP Negeri 5 Cilacap
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	39.738.000	39.738.000	39.738.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 5 Cilacap
	SMP Negeri 6 Cilacap				86.000.000	86.000.000	82.075.000	(3.925.000)				SMP Negeri 6 Cilacap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				86.000.000	86.000.000	82.075.000	(3.925.000)				SMP Negeri 6 Cilacap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				86.000.000	86.000.000	82.075.000	(3.925.000)				SMP Negeri 6 Cilacap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	86.000.000	86.000.000	82.075.000	(3.925.000)		DAU		SMP Negeri 6 Cilacap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	7.850.000	7.850.000	3.925.000	(3.925.000)				SMP Negeri 6 Cilacap
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.850.000	7.850.000	3.925.000	(3.925.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 6 Cilacap
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	78.150.000	78.150.000	78.150.000	-				SMP Negeri 6 Cilacap
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	78.150.000	78.150.000	78.150.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 6 Cilacap
	SMP Negeri 7 Cilacap				69.967.400	69.967.400	67.553.700	(2.413.700)				SMP Negeri 7 Cilacap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				69.967.400	69.967.400	67.553.700	(2.413.700)				SMP Negeri 7 Cilacap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				69.967.400	69.967.400	67.553.700	(2.413.700)				SMP Negeri 7 Cilacap

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	69.967.400	69.967.400	67.553.700	(2.413.700)		DAU		SMP Negeri 7 Cilacap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	13.827.400	13.827.400	11.413.700	(2.413.700)				SMP Negeri 7 Cilacap
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.827.400	4.827.400	2.413.700	(2.413.700)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 7 Cilacap
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 7 Cilacap
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	36.660.000	36.660.000	36.660.000	-				SMP Negeri 7 Cilacap
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36.660.000	36.660.000	36.660.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 7 Cilacap
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	19.480.000	19.480.000	19.480.000	-				SMP Negeri 7 Cilacap
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	19.480.000	19.480.000	19.480.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 7 Cilacap
	SMP Negeri 8 Cilacap				70.000.000	70.000.000	65.024.500	(4.975.500)				SMP Negeri 8 Cilacap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				70.000.000	70.000.000	65.024.500	(4.975.500)				SMP Negeri 8 Cilacap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				70.000.000	70.000.000	65.024.500	(4.975.500)				SMP Negeri 8 Cilacap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	65.024.500	(4.975.500)		DAU		SMP Negeri 8 Cilacap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	10.005.000	10.005.000	5.029.500	(4.975.500)				SMP Negeri 8 Cilacap
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.005.000	10.005.000	5.029.500	(4.975.500)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 8 Cilacap
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	59.995.000	59.995.000	59.995.000	-				SMP Negeri 8 Cilacap
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	59.995.000	59.995.000	59.995.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 8 Cilacap
	SMP Negeri 9 Cilacap				78.000.000	78.000.000	78.000.000	-				SMP Negeri 9 Cilacap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				78.000.000	78.000.000	78.000.000	-				SMP Negeri 9 Cilacap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				78.000.000	78.000.000	78.000.000	-				SMP Negeri 9 Cilacap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	78.000.000	78.000.000	78.000.000	-		DAU		SMP Negeri 9 Cilacap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	11.268.000	11.268.000	11.268.000	-				SMP Negeri 9 Cilacap
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 9 Cilacap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.268.000	2.268.000	2.268.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 9 Cilacap
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	23.800.000	23.800.000	23.800.000	-				SMP Negeri 9 Cilacap
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	23.800.000	23.800.000	23.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 9 Cilacap
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	42.932.000	42.932.000	42.932.000	-				SMP Negeri 9 Cilacap
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	25.872.000	25.872.000	25.872.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 9 Cilacap

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 9 Cilacap
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	10.060.000	10.060.000	10.060.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 9 Cilacap
	SMP Negeri 1 Kawunganten				39.999.900	39.999.900	39.999.600	(300)				SMP Negeri 1 Kawunganten
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				39.999.900	39.999.900	39.999.600	(300)				SMP Negeri 1 Kawunganten
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				39.999.900	39.999.900	39.999.600	(300)				SMP Negeri 1 Kawunganten
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	39.999.900	39.999.900	39.999.600	(300)		DAU		SMP Negeri 1 Kawunganten
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	39.999.900	39.999.900	39.999.600	(300)				SMP Negeri 1 Kawunganten
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	39.999.900	39.999.900	39.999.600	(300)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kawunganten
	SMP Negeri 2 Kawunganten				60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 2 Kawunganten
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 2 Kawunganten
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 2 Kawunganten
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-		DAU		SMP Negeri 2 Kawunganten
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 2 Kawunganten
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Kawunganten
	SMP Negeri 3 Kawunganten				64.696.000	64.696.000	53.958.000	(10.738.000)				SMP Negeri 3 Kawunganten
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				64.696.000	64.696.000	53.958.000	(10.738.000)				SMP Negeri 3 Kawunganten
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				64.696.000	64.696.000	53.958.000	(10.738.000)				SMP Negeri 3 Kawunganten
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	64.696.000	64.696.000	53.958.000	(10.738.000)		DAU		SMP Negeri 3 Kawunganten
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	47.396.000	47.396.000	36.658.000	(10.738.000)				SMP Negeri 3 Kawunganten
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	21.476.000	21.476.000	10.738.000	(10.738.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Kawunganten
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	13.440.000	13.440.000	13.440.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Kawunganten
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.480.000	12.480.000	12.480.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Kawunganten
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	9.600.000	9.600.000	9.600.000	-				SMP Negeri 3 Kawunganten
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.600.000	9.600.000	9.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Kawunganten
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	7.700.000	7.700.000	7.700.000	-				SMP Negeri 3 Kawunganten
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	7.700.000	7.700.000	7.700.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Kawunganten
	SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap				39.990.898	39.990.898	34.196.933	(5.793.965)				SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				39.990.898	39.990.898	34.196.933	(5.793.965)				SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				39.990.898	39.990.898	34.196.933	(5.793.965)				SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	39.990.898	39.990.898	34.196.933	(5.793.965)		DAU		SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	24.990.898	24.990.898	19.196.933	(5.793.965)				SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.634.368	2.634.368	2.634.368	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	11.587.930	11.587.930	5.793.965	(5.793.965)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.988.600	3.988.600	3.988.600	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.780.000	6.780.000	6.780.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-				SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-				SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap
	SMP Negeri 1 Cimanggu				60.000.000	60.000.000	51.153.000	(8.847.000)				SMP Negeri 1 Cimanggu
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	51.153.000	(8.847.000)				SMP Negeri 1 Cimanggu
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	51.153.000	(8.847.000)				SMP Negeri 1 Cimanggu
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	51.153.000	(8.847.000)		DAU		SMP Negeri 1 Cimanggu
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	43.800.000	43.800.000	34.953.000	(8.847.000)				SMP Negeri 1 Cimanggu
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	31.200.000	31.200.000	22.353.000	(8.847.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Cimanggu
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.600.000	12.600.000	12.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Cimanggu
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	16.200.000	16.200.000	16.200.000	-				SMP Negeri 1 Cimanggu
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	16.200.000	16.200.000	16.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Cimanggu
	SMP Negeri 2 Cimanggu				60.000.000	60.000.000	51.890.550	(8.109.450)				SMP Negeri 2 Cimanggu
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	51.890.550	(8.109.450)				SMP Negeri 2 Cimanggu
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	51.890.550	(8.109.450)				SMP Negeri 2 Cimanggu
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	51.890.550	(8.109.450)		DAU		SMP Negeri 2 Cimanggu
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	47.040.000	47.040.000	38.930.550	(8.109.450)				SMP Negeri 2 Cimanggu

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	17.107.200	17.107.200	17.107.200	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Cimanggu
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	24.096.600	24.096.600	15.987.150	(8.109.450)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Cimanggu
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.836.200	5.836.200	5.836.200	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Cimanggu
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12.960.000	12.960.000	12.960.000	-				SMP Negeri 2 Cimanggu
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.960.000	12.960.000	12.960.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Cimanggu
	SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap				40.000.000	40.000.000	31.300.255	(8.699.745)				SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	31.300.255	(8.699.745)				SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	31.300.255	(8.699.745)				SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	31.300.255	(8.699.745)		DAU		SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	34.000.000	34.000.000	25.300.255	(8.699.745)				SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	23.400.000	23.400.000	14.700.255	(8.699.745)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.600.000	10.600.000	10.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-				SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap
	SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap				40.000.000	40.000.000	33.950.000	(6.050.000)				SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	33.950.000	(6.050.000)				SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	33.950.000	(6.050.000)				SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	33.950.000	(6.050.000)		DAU		SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	29.200.000	29.200.000	23.150.000	(6.050.000)				SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	26.500.000	26.500.000	20.450.000	(6.050.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.700.000	2.700.000	2.700.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	10.800.000	10.800.000	10.800.000	-				SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10.800.000	10.800.000	10.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap
	SMP Negeri 1 Gandrungmangu				60.000.000	60.000.000	52.392.000	(7.608.000)				SMP Negeri 1 Gandrungmangu
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	52.392.000	(7.608.000)				SMP Negeri 1 Gandrungmangu

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	52.392.000	(7.608.000)				SMP Negeri 1 Gandrungmangu
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	52.392.000	(7.608.000)		DAU		SMP Negeri 1 Gandrungmangu
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	52.392.000	(7.608.000)				SMP Negeri 1 Gandrungmangu
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.216.000	15.216.000	7.608.000	(7.608.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Gandrungmangu
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	44.784.000	44.784.000	44.784.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Gandrungmangu
	SMP Negeri 2 Gandrungmangu				50.000.000	50.000.000	42.553.100	(7.446.900)				SMP Negeri 2 Gandrungmangu
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				50.000.000	50.000.000	42.553.100	(7.446.900)				SMP Negeri 2 Gandrungmangu
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				50.000.000	50.000.000	42.553.100	(7.446.900)				SMP Negeri 2 Gandrungmangu
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	42.553.100	(7.446.900)		DAU		SMP Negeri 2 Gandrungmangu
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	40.400.000	40.400.000	32.953.100	(7.446.900)				SMP Negeri 2 Gandrungmangu
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.399.600	20.399.600	12.952.700	(7.446.900)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Gandrungmangu
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.000.400	20.000.400	20.000.400	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Gandrungmangu
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	9.600.000	9.600.000	9.600.000	-				SMP Negeri 2 Gandrungmangu
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.600.000	9.600.000	9.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Gandrungmangu
	SMP Negeri 3 Gandrungmangu				52.400.000	52.400.000	50.130.965	(2.269.035)				SMP Negeri 3 Gandrungmangu
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				52.400.000	52.400.000	50.130.965	(2.269.035)				SMP Negeri 3 Gandrungmangu
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				52.400.000	52.400.000	50.130.965	(2.269.035)				SMP Negeri 3 Gandrungmangu
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	52.400.000	52.400.000	50.130.965	(2.269.035)		DAU		SMP Negeri 3 Gandrungmangu
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	52.400.000	52.400.000	50.130.965	(2.269.035)				SMP Negeri 3 Gandrungmangu
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.000.000	8.000.000	5.730.965	(2.269.035)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Gandrungmangu
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	44.400.000	44.400.000	44.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Gandrungmangu
	SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap				40.000.000	40.000.000	37.130.000	(2.870.000)				SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	37.130.000	(2.870.000)				SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	37.130.000	(2.870.000)				SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	37.130.000	(2.870.000)		DAU		SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	34.000.000	34.000.000	31.130.000	(2.870.000)				SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.740.000	5.740.000	2.870.000	(2.870.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	28.260.000	28.260.000	28.260.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-				SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap
	SMP Negeri 1 Jeruklegi				59.999.650	59.999.650	57.539.800	(2.459.850)				SMP Negeri 1 Jeruklegi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				59.999.650	59.999.650	57.539.800	(2.459.850)				SMP Negeri 1 Jeruklegi
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				59.999.650	59.999.650	57.539.800	(2.459.850)				SMP Negeri 1 Jeruklegi
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	59.999.650	59.999.650	57.539.800	(2.459.850)		DAU		SMP Negeri 1 Jeruklegi
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	31.799.650	31.799.650	29.339.800	(2.459.850)				SMP Negeri 1 Jeruklegi
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.919.650	4.919.650	2.459.800	(2.459.850)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Jeruklegi
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	26.880.000	26.880.000	26.880.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Jeruklegi
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	28.200.000	28.200.000	28.200.000	-				SMP Negeri 1 Jeruklegi
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	28.200.000	28.200.000	28.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Jeruklegi
	SMP Negeri 2 Jeruklegi				70.000.000	70.000.000	70.000.000	-				SMP Negeri 2 Jeruklegi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				70.000.000	70.000.000	70.000.000	-				SMP Negeri 2 Jeruklegi
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				70.000.000	70.000.000	70.000.000	-				SMP Negeri 2 Jeruklegi
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	70.000.000	70.000.000	70.000.000	-		DAU		SMP Negeri 2 Jeruklegi
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	42.400.000	42.400.000	42.400.000	-				SMP Negeri 2 Jeruklegi
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.608.000	8.608.000	8.608.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Jeruklegi
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	33.792.000	33.792.000	33.792.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Jeruklegi
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	27.600.000	27.600.000	27.600.000	-				SMP Negeri 2 Jeruklegi
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	27.600.000	27.600.000	27.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Jeruklegi
	SMP Negeri 3 Jeruklegi				47.999.730	47.999.730	31.499.865	(16.499.865)				SMP Negeri 3 Jeruklegi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				47.999.730	47.999.730	31.499.865	(16.499.865)				SMP Negeri 3 Jeruklegi

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				47.999.730	47.999.730	31.499.865	(16.499.865)				SMP Negeri 3 Jeruklegi
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	47.999.730	47.999.730	31.499.865	(16.499.865)		DAU		SMP Negeri 3 Jeruklegi
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	32.999.730	32.999.730	16.499.865	(16.499.865)				SMP Negeri 3 Jeruklegi
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	32.999.730	32.999.730	16.499.865	(16.499.865)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Jeruklegi
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-				SMP Negeri 3 Jeruklegi
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Jeruklegi
	SMP Negeri 1 Dayeuhluhur				60.000.000	60.000.000	54.919.960	(5.080.040)				SMP Negeri 1 Dayeuhluhur
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	54.919.960	(5.080.040)				SMP Negeri 1 Dayeuhluhur
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	54.919.960	(5.080.040)				SMP Negeri 1 Dayeuhluhur
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	54.919.960	(5.080.040)		DAU		SMP Negeri 1 Dayeuhluhur
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	21.000.000	21.000.000	15.919.960	(5.080.040)				SMP Negeri 1 Dayeuhluhur
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.000.000	15.000.000	9.919.960	(5.080.040)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Dayeuhluhur
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Dayeuhluhur
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	13.386.000	13.386.000	13.386.000	-				SMP Negeri 1 Dayeuhluhur
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13.386.000	13.386.000	13.386.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Dayeuhluhur
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	25.614.000	25.614.000	25.614.000	-				SMP Negeri 1 Dayeuhluhur
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Dayeuhluhur
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	17.214.000	17.214.000	17.214.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Dayeuhluhur
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 Unit	63 Unit	3.400.000	3.400.000	3.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Dayeuhluhur
	SMP Negeri 2 Dayeuhluhur				60.000.000	60.000.000	50.644.210	(9.355.790)				SMP Negeri 2 Dayeuhluhur
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	50.644.210	(9.355.790)				SMP Negeri 2 Dayeuhluhur
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	50.644.210	(9.355.790)				SMP Negeri 2 Dayeuhluhur
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	50.644.210	(9.355.790)		DAU		SMP Negeri 2 Dayeuhluhur
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	37.200.000	37.200.000	27.844.210	(9.355.790)				SMP Negeri 2 Dayeuhluhur
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.062.400	5.062.400	5.062.400	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Dayeuhluhur
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	27.537.600	27.537.600	18.181.810	(9.355.790)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Dayeuhluhur

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.600.000	4.600.000	4.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Dayeuhluhur
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	22.800.000	22.800.000	22.800.000	-				SMP Negeri 2 Dayeuhluhur
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	22.800.000	22.800.000	22.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Dayeuhluhur
	SMP Negeri 1 Majenang				60.000.000	60.000.000	53.618.040	(6.381.960)				SMP Negeri 1 Majenang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	53.618.040	(6.381.960)				SMP Negeri 1 Majenang
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	53.618.040	(6.381.960)				SMP Negeri 1 Majenang
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	53.618.040	(6.381.960)		DAU		SMP Negeri 1 Majenang
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	31.590.000	31.590.000	25.208.040	(6.381.960)				SMP Negeri 1 Majenang
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	31.590.000	31.590.000	25.208.040	(6.381.960)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Majenang
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	23.200.000	23.200.000	23.200.000	-				SMP Negeri 1 Majenang
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	23.200.000	23.200.000	23.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Majenang
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	5.210.000	5.210.000	5.210.000	-				SMP Negeri 1 Majenang
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	5.210.000	5.210.000	5.210.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Majenang
	SMP Negeri 2 Majenang				60.000.000	60.000.000	54.443.950	(5.556.050)				SMP Negeri 2 Majenang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	54.443.950	(5.556.050)				SMP Negeri 2 Majenang
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	54.443.950	(5.556.050)				SMP Negeri 2 Majenang
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	54.443.950	34.443.950		DAU		SMP Negeri 2 Majenang
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-				SMP Negeri 2 Majenang
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Majenang
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	-	(40.000.000)		DAU		SMP Negeri 2 Majenang
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	34.443.950	(5.556.050)				SMP Negeri 2 Majenang
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.000.000	20.000.000	14.443.950	(5.556.050)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Majenang
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Majenang
	SMP Negeri 3 Majenang				60.000.000	60.000.000	52.500.000	(7.500.000)				SMP Negeri 3 Majenang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	52.500.000	(7.500.000)				SMP Negeri 3 Majenang
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	52.500.000	(7.500.000)				SMP Negeri 3 Majenang

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	52.500.000	(7.500.000)		DAU		SMP Negeri 3 Majenang
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	42.000.000	42.000.000	34.500.000	(7.500.000)				SMP Negeri 3 Majenang
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.000.000	30.000.000	22.500.000	(7.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Majenang
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Majenang
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-				SMP Negeri 3 Majenang
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Majenang
	SMP Negeri 4 Majenang				49.997.000	49.997.000	40.598.500	(9.398.500)				SMP Negeri 4 Majenang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				49.997.000	49.997.000	40.598.500	(9.398.500)				SMP Negeri 4 Majenang
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				49.997.000	49.997.000	40.598.500	(9.398.500)				SMP Negeri 4 Majenang
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	49.997.000	49.997.000	40.598.500	(9.398.500)		DAU		SMP Negeri 4 Majenang
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	18.797.000	18.797.000	9.398.500	(9.398.500)				SMP Negeri 4 Majenang
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	18.797.000	18.797.000	9.398.500	(9.398.500)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Majenang
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	31.200.000	31.200.000	31.200.000	-				SMP Negeri 4 Majenang
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	31.200.000	31.200.000	31.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Majenang
	SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap				39.999.380	39.999.380	29.357.475	(10.641.905)				SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				39.999.380	39.999.380	29.357.475	(10.641.905)				SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				39.999.380	39.999.380	29.357.475	(10.641.905)				SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	39.999.380	39.999.380	29.357.475	(10.641.905)		DAU		SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	39.999.380	39.999.380	29.357.475	(10.641.905)				SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.421.780	2.421.780	2.421.780	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.961.900	30.961.900	20.319.995	(10.641.905)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.615.700	6.615.700	6.615.700	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap
	SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap				50.000.000	50.000.000	41.151.250	(8.848.750)				SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				50.000.000	50.000.000	41.151.250	(8.848.750)				SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				50.000.000	50.000.000	41.151.250	(8.848.750)				SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	41.151.250	(8.848.750)		DAU		SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	26.393.500	26.393.500	17.544.750	(8.848.750)				SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	17.697.500	17.697.500	8.848.750	(8.848.750)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.696.000	8.696.000	8.696.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	9.600.000	9.600.000	9.600.000	-				SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.600.000	9.600.000	9.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	14.006.500	14.006.500	14.006.500	-				SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	9.300.000	9.300.000	9.300.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 Unit	63 Unit	4.706.500	4.706.500	4.706.500	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap
	SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap				40.000.000	40.000.000	36.699.920	(3.300.080)				SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	36.699.920	(3.300.080)				SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	36.699.920	(3.300.080)				SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	36.699.920	(3.300.080)		DAU		SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	30.400.000	30.400.000	27.099.920	(3.300.080)				SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.600.000	2.600.000	2.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	18.800.000	18.800.000	15.499.920	(3.300.080)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	9.600.000	9.600.000	9.600.000	-				SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.600.000	9.600.000	9.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap
	SMP Negeri 1 Cipari				43.400.000	43.400.000	41.541.650	(1.858.350)				SMP Negeri 1 Cipari
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				43.400.000	43.400.000	41.541.650	(1.858.350)				SMP Negeri 1 Cipari
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				43.400.000	43.400.000	41.541.650	(1.858.350)				SMP Negeri 1 Cipari
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	43.400.000	43.400.000	41.541.650	(1.858.350)		DAU		SMP Negeri 1 Cipari
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	17.290.000	17.290.000	15.431.650	(1.858.350)				SMP Negeri 1 Cipari
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.716.700	3.716.700	1.858.350	(1.858.350)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Cipari
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.821.300	2.821.300	2.821.300	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Cipari
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.752.000	10.752.000	10.752.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Cipari

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	21.000.000	21.000.000	21.000.000	-				SMP Negeri 1 Cipari
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	21.000.000	21.000.000	21.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Cipari
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	5.110.000	5.110.000	5.110.000	-				SMP Negeri 1 Cipari
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	5.110.000	5.110.000	5.110.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Cipari
	SMP Negeri 2 Cipari				40.000.000	40.000.000	39.815.000	(185.000)				SMP Negeri 2 Cipari
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	39.815.000	(185.000)				SMP Negeri 2 Cipari
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	39.815.000	(185.000)				SMP Negeri 2 Cipari
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	39.815.000	(185.000)		DAU		SMP Negeri 2 Cipari
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	39.815.000	(185.000)				SMP Negeri 2 Cipari
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	310.000	310.000	125.000	(185.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Cipari
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	39.690.000	39.690.000	39.690.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Cipari
	SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap				40.000.000	40.000.000	33.368.150	(6.631.850)				SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	33.368.150	(6.631.850)				SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	33.368.150	(6.631.850)				SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	33.368.150	(6.631.850)		DAU		SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	29.320.000	29.320.000	22.688.150	(6.631.850)				SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	13.264.000	13.264.000	6.632.150	(6.631.850)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16.056.000	16.056.000	16.056.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	10.680.000	10.680.000	10.680.000	-				SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10.680.000	10.680.000	10.680.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap
	SMP Negeri 4 Cipari				40.000.000	40.000.000	36.400.000	(3.600.000)				SMP Negeri 4 Cipari
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	36.400.000	(3.600.000)				SMP Negeri 4 Cipari
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	36.400.000	(3.600.000)				SMP Negeri 4 Cipari
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	36.400.000	(3.600.000)		DAU		SMP Negeri 4 Cipari
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	29.200.000	29.200.000	25.600.000	(3.600.000)				SMP Negeri 4 Cipari
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.200.000	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Cipari

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	22.000.000	22.000.000	22.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Cipari
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	10.800.000	10.800.000	10.800.000	-				SMP Negeri 4 Cipari
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10.800.000	10.800.000	10.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Cipari
	SMP Negeri 1 Sampang				60.000.000	60.000.000	49.224.550	(10.775.450)				SMP Negeri 1 Sampang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	49.224.550	(10.775.450)				SMP Negeri 1 Sampang
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	49.224.550	(10.775.450)				SMP Negeri 1 Sampang
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	49.224.550	(10.775.450)		DAU		SMP Negeri 1 Sampang
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	30.730.000	30.730.000	19.954.550	(10.775.450)				SMP Negeri 1 Sampang
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.787.100	1.787.100	1.787.100	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Sampang
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	28.942.900	28.942.900	18.167.450	(10.775.450)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Sampang
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	29.270.000	29.270.000	29.270.000	-				SMP Negeri 1 Sampang
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Sampang
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	21.270.000	21.270.000	21.270.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Sampang
	SMP Negeri 2 Sampang				40.000.000	40.000.000	33.700.000	(6.300.000)				SMP Negeri 2 Sampang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	33.700.000	(6.300.000)				SMP Negeri 2 Sampang
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	33.700.000	(6.300.000)				SMP Negeri 2 Sampang
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	33.700.000	(6.300.000)		DAU		SMP Negeri 2 Sampang
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	33.700.000	(6.300.000)				SMP Negeri 2 Sampang
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Sampang
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.600.000	12.600.000	6.300.000	(6.300.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Sampang
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	23.400.000	23.400.000	23.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Sampang
	SMP Negeri 1 Adipala				40.000.000	40.000.000	37.078.000	(2.922.000)				SMP Negeri 1 Adipala
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	37.078.000	(2.922.000)				SMP Negeri 1 Adipala
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	37.078.000	(2.922.000)				SMP Negeri 1 Adipala
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	37.078.000	(2.922.000)		DAU		SMP Negeri 1 Adipala

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	37.078.000	(2.922.000)				SMP Negeri 1 Adipala
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Adipala
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.844.000	5.844.000	2.922.000	(2.922.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Adipala
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.156.000	30.156.000	30.156.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Adipala
	SMP Negeri 2 Adipala				40.000.000	40.000.000	26.078.285	(13.921.715)				SMP Negeri 2 Adipala
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	26.078.285	(13.921.715)				SMP Negeri 2 Adipala
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	26.078.285	(13.921.715)				SMP Negeri 2 Adipala
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	26.078.285	(13.921.715)		DAU		SMP Negeri 2 Adipala
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	26.078.285	(13.921.715)				SMP Negeri 2 Adipala
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.000.000	40.000.000	26.078.285	(13.921.715)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Adipala
	SMP Negeri 1 Binangun				60.000.000	60.000.000	58.277.540	(1.722.460)				SMP Negeri 1 Binangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	58.277.540	(1.722.460)				SMP Negeri 1 Binangun
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	58.277.540	(1.722.460)				SMP Negeri 1 Binangun
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	58.277.540	(1.722.460)		DAU		SMP Negeri 1 Binangun
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	16.196.000	16.196.000	14.473.540	(1.722.460)				SMP Negeri 1 Binangun
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16.196.000	16.196.000	14.473.540	(1.722.460)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Binangun
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	39.804.000	39.804.000	39.804.000	-				SMP Negeri 1 Binangun
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	39.804.000	39.804.000	39.804.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Binangun
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-				SMP Negeri 1 Binangun
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Binangun
	SMP Negeri 2 Binangun				60.000.000	60.000.000	54.841.200	(5.158.800)				SMP Negeri 2 Binangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	54.841.200	(5.158.800)				SMP Negeri 2 Binangun
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	54.841.200	(5.158.800)				SMP Negeri 2 Binangun
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	54.841.200	(5.158.800)		DAU		SMP Negeri 2 Binangun
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	45.000.000	45.000.000	39.841.200	(5.158.800)				SMP Negeri 2 Binangun
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.612.000	6.612.000	6.612.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Binangun

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	13.188.000	13.188.000	8.029.200	(5.158.800)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Binangun
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	25.200.000	25.200.000	25.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Binangun
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-				SMP Negeri 2 Binangun
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Binangun
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-				SMP Negeri 2 Binangun
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Binangun
	SMP Negeri 3 Binangun				60.000.000	60.000.000	49.166.830	(10.833.170)				SMP Negeri 3 Binangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	49.166.830	(10.833.170)				SMP Negeri 3 Binangun
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	49.166.830	(10.833.170)				SMP Negeri 3 Binangun
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	49.166.830	(10.833.170)		DAU		SMP Negeri 3 Binangun
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	32.100.000	32.100.000	21.266.830	(10.833.170)				SMP Negeri 3 Binangun
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	32.100.000	32.100.000	21.266.830	(10.833.170)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Binangun
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	27.900.000	27.900.000	27.900.000	-				SMP Negeri 3 Binangun
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	27.900.000	27.900.000	27.900.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Binangun
	SMP Negeri 1 Bantarsari				60.000.000	60.000.000	59.515.500	(484.500)				SMP Negeri 1 Bantarsari
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	59.515.500	(484.500)				SMP Negeri 1 Bantarsari
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	59.515.500	(484.500)				SMP Negeri 1 Bantarsari
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	59.515.500	(484.500)		DAU		SMP Negeri 1 Bantarsari
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	44.430.000	44.430.000	43.945.500	(484.500)				SMP Negeri 1 Bantarsari
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	960.400	960.400	475.900	(484.500)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Bantarsari
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	43.469.600	43.469.600	43.469.600	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Bantarsari
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	10.050.000	10.050.000	10.050.000	-				SMP Negeri 1 Bantarsari
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10.050.000	10.050.000	10.050.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Bantarsari
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	5.520.000	5.520.000	5.520.000	-				SMP Negeri 1 Bantarsari
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	5.520.000	5.520.000	5.520.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Bantarsari
	SMP Negeri 2 Bantarsari				60.000.000	60.000.000	58.600.000	(1.400.000)				SMP Negeri 2 Bantarsari

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	58.600.000	(1.400.000)				SMP Negeri 2 Bantarsari
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	58.600.000	(1.400.000)				SMP Negeri 2 Bantarsari
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	58.600.000	(1.400.000)		DAU		SMP Negeri 2 Bantarsari
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	58.600.000	(1.400.000)				SMP Negeri 2 Bantarsari
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.800.000	2.800.000	1.400.000	(1.400.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Bantarsari
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9.460.000	9.460.000	9.460.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Bantarsari
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	47.740.000	47.740.000	47.740.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Bantarsari
	SMP Negeri 3 Bantarsari				40.000.000	40.000.000	35.216.420	(4.783.580)				SMP Negeri 3 Bantarsari
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	35.216.420	(4.783.580)				SMP Negeri 3 Bantarsari
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	35.216.420	(4.783.580)				SMP Negeri 3 Bantarsari
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	35.216.420	(4.783.580)		DAU		SMP Negeri 3 Bantarsari
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	35.200.000	35.200.000	30.416.420	(4.783.580)				SMP Negeri 3 Bantarsari
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	18.971.200	18.971.200	14.187.620	(4.783.580)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Bantarsari
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16.228.800	16.228.800	16.228.800	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Bantarsari
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-				SMP Negeri 3 Bantarsari
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Bantarsari
	SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap				40.000.000	40.000.000	38.110.250	(1.889.750)				SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	38.110.250	(1.889.750)				SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	38.110.250	(1.889.750)				SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	38.110.250	(1.889.750)		DAU		SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	35.200.000	35.200.000	33.310.250	(1.889.750)				SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	14.522.500	14.522.500	12.633.050	(1.889.450)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.677.500	20.677.500	20.677.200	(300)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-				SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap
	SMP Negeri 1 Kedungreja				60.000.000	60.000.000	56.976.800	(3.023.200)				SMP Negeri 1 Kedungreja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	56.976.800	(3.023.200)				SMP Negeri 1 Kedungreja
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	56.976.800	(3.023.200)				SMP Negeri 1 Kedungreja
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	56.976.800	(3.023.200)		DAU		SMP Negeri 1 Kedungreja
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	56.976.800	(3.023.200)				SMP Negeri 1 Kedungreja
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.391.800	15.391.800	12.368.600	(3.023.200)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kedungreja
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	44.608.200	44.608.200	44.608.200	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kedungreja
	SMP Negeri 2 Kedungreja				60.000.000	60.000.000	58.708.000	(1.292.000)				SMP Negeri 2 Kedungreja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	58.708.000	(1.292.000)				SMP Negeri 2 Kedungreja
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	58.708.000	(1.292.000)				SMP Negeri 2 Kedungreja
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	58.708.000	(1.292.000)		DAU		SMP Negeri 2 Kedungreja
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	39.300.000	39.300.000	38.008.000	(1.292.000)				SMP Negeri 2 Kedungreja
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.580.000	2.580.000	1.288.000	(1.292.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Kedungreja
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	36.720.000	36.720.000	36.720.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Kedungreja
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	7.200.000	7.200.000	7.200.000	-				SMP Negeri 2 Kedungreja
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.200.000	7.200.000	7.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Kedungreja
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	13.500.000	13.500.000	13.500.000	-				SMP Negeri 2 Kedungreja
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	8.500.000	8.500.000	8.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Kedungreja
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Kedungreja
	SMP Negeri 3 Kedungreja				59.981.000	59.981.000	57.362.680	(2.618.320)				SMP Negeri 3 Kedungreja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				59.981.000	59.981.000	57.362.680	(2.618.320)				SMP Negeri 3 Kedungreja
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				59.981.000	59.981.000	57.362.680	(2.618.320)				SMP Negeri 3 Kedungreja
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	59.981.000	59.981.000	57.362.680	(2.618.320)		DAU		SMP Negeri 3 Kedungreja
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	29.461.000	29.461.000	26.842.680	(2.618.320)				SMP Negeri 3 Kedungreja
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.800.000	7.800.000	7.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Kedungreja
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	21.661.000	21.661.000	19.042.680	(2.618.320)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Kedungreja
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	30.520.000	30.520.000	30.520.000	-				SMP Negeri 3 Kedungreja
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Kedungreja
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	23.520.000	23.520.000	23.520.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Kedungreja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap				39.990.990	39.990.990	37.158.570	(2.832.420)				SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				39.990.990	39.990.990	37.158.570	(2.832.420)				SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				39.990.990	39.990.990	37.158.570	(2.832.420)				SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	39.990.990	39.990.990	37.158.570	(2.832.420)		DAU		SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	36.945.990	36.945.990	34.113.570	(2.832.420)				SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16.155.990	16.155.990	13.323.570	(2.832.420)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.790.000	20.790.000	20.790.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	3.045.000	3.045.000	3.045.000	-				SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	3.045.000	3.045.000	3.045.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap
	SMP Negeri 1 Kroya				60.000.000	60.000.000	55.300.000	(4.700.000)				SMP Negeri 1 Kroya
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	55.300.000	(4.700.000)				SMP Negeri 1 Kroya
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	55.300.000	(4.700.000)				SMP Negeri 1 Kroya
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	55.300.000	(4.700.000)		DAU		SMP Negeri 1 Kroya
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	55.300.000	(4.700.000)				SMP Negeri 1 Kroya
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.200.000	5.200.000	5.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kroya
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	14.480.000	14.480.000	9.780.000	(4.700.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kroya
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.320.000	40.320.000	40.320.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kroya
	SMP Negeri 2 Kroya				60.000.000	60.000.000	55.300.000	(4.700.000)				SMP Negeri 2 Kroya
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	55.300.000	(4.700.000)				SMP Negeri 2 Kroya
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	55.300.000	(4.700.000)				SMP Negeri 2 Kroya
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	55.300.000	(4.700.000)		DAU		SMP Negeri 2 Kroya
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	55.300.000	(4.700.000)				SMP Negeri 2 Kroya
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.200.000	5.200.000	5.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Kroya
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	14.480.000	14.480.000	9.780.000	(4.700.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Kroya
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.320.000	40.320.000	40.320.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Kroya
	SMP Negeri 3 Kroya				60.000.000	60.000.000	51.500.000	(8.500.000)				SMP Negeri 3 Kroya

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	51.500.000	(8.500.000)				SMP Negeri 3 Kroya
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	51.500.000	(8.500.000)				SMP Negeri 3 Kroya
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	51.500.000	(8.500.000)		DAU		SMP Negeri 3 Kroya
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	51.500.000	(8.500.000)				SMP Negeri 3 Kroya
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.940.000	7.940.000	7.940.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Kroya
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	22.660.000	22.660.000	14.160.000	(8.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Kroya
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	29.400.000	29.400.000	29.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Kroya
	SMP Negeri 4 Kroya				60.000.000	60.000.000	55.300.000	(4.700.000)				SMP Negeri 4 Kroya
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	55.300.000	(4.700.000)				SMP Negeri 4 Kroya
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	55.300.000	(4.700.000)				SMP Negeri 4 Kroya
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	55.300.000	(4.700.000)		DAU		SMP Negeri 4 Kroya
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	55.300.000	(4.700.000)				SMP Negeri 4 Kroya
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.200.000	5.200.000	5.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Kroya
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	14.480.000	14.480.000	9.780.000	(4.700.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Kroya
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.320.000	40.320.000	40.320.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Kroya
	SMP Negeri 5 Kroya				60.000.000	60.000.000	50.239.080	(9.760.920)				SMP Negeri 5 Kroya
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	50.239.080	(9.760.920)				SMP Negeri 5 Kroya
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	50.239.080	(9.760.920)				SMP Negeri 5 Kroya
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	50.239.080	(9.760.920)		DAU		SMP Negeri 5 Kroya
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	23.100.000	23.100.000	13.339.080	(9.760.920)				SMP Negeri 5 Kroya
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	23.100.000	23.100.000	13.339.080	(9.760.920)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 5 Kroya
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	36.900.000	36.900.000	36.900.000	-				SMP Negeri 5 Kroya
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	36.900.000	36.900.000	36.900.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 5 Kroya
	SMP Negeri 6 Kroya				60.000.000	60.000.000	56.220.000	(3.780.000)				SMP Negeri 6 Kroya
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	56.220.000	(3.780.000)				SMP Negeri 6 Kroya
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	56.220.000	(3.780.000)				SMP Negeri 6 Kroya
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	56.220.000	(3.780.000)		DAU		SMP Negeri 6 Kroya

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	48.300.000	48.300.000	44.520.000	(3.780.000)				SMP Negeri 6 Kroya
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.560.000	7.560.000	3.780.000	(3.780.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 6 Kroya
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.740.000	40.740.000	40.740.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 6 Kroya
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	11.700.000	11.700.000	11.700.000	-				SMP Negeri 6 Kroya
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	11.700.000	11.700.000	11.700.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 6 Kroya
	SMP Negeri 1 Kesugihan				60.000.000	60.000.000	54.900.000	(5.100.000)				SMP Negeri 1 Kesugihan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	54.900.000	(5.100.000)				SMP Negeri 1 Kesugihan
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	54.900.000	(5.100.000)				SMP Negeri 1 Kesugihan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	54.900.000	(5.100.000)		DAU		SMP Negeri 1 Kesugihan
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	52.200.000	52.200.000	47.100.000	(5.100.000)				SMP Negeri 1 Kesugihan
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kesugihan
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.200.000	10.200.000	5.100.000	(5.100.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kesugihan
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kesugihan
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	36.000.000	36.000.000	36.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kesugihan
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	7.800.000	7.800.000	7.800.000	-				SMP Negeri 1 Kesugihan
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.800.000	7.800.000	7.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kesugihan
	SMP Negeri 2 Kesugihan				60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 2 Kesugihan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 2 Kesugihan
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	60.000.000	-				SMP Negeri 2 Kesugihan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-		DAU		SMP Negeri 2 Kesugihan
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	55.200.000	55.200.000	55.200.000	-				SMP Negeri 2 Kesugihan
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	55.200.000	55.200.000	55.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Kesugihan
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-				SMP Negeri 2 Kesugihan
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Kesugihan
	SMP Negeri 3 Kesugihan				60.000.000	60.000.000	54.961.800	(5.038.200)				SMP Negeri 3 Kesugihan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	54.961.800	(5.038.200)				SMP Negeri 3 Kesugihan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	54.961.800	(5.038.200)				SMP Negeri 3 Kesugihan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	54.961.800	(5.038.200)		DAU		SMP Negeri 3 Kesugihan
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	54.961.800	(5.038.200)				SMP Negeri 3 Kesugihan
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	26.516.000	26.516.000	21.477.800	(5.038.200)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Kesugihan
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	33.484.000	33.484.000	33.484.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Kesugihan
	SMP Negeri 1 Karangpucung				60.000.000	60.000.000	52.497.220	(7.502.780)				SMP Negeri 1 Karangpucung
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	52.497.220	(7.502.780)				SMP Negeri 1 Karangpucung
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	52.497.220	(7.502.780)				SMP Negeri 1 Karangpucung
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	52.497.220	(7.502.780)		DAU		SMP Negeri 1 Karangpucung
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000	7.497.220	(7.502.780)				SMP Negeri 1 Karangpucung
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.000.000	15.000.000	7.497.220	(7.502.780)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Karangpucung
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-				SMP Negeri 1 Karangpucung
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Karangpucung
	SMP Negeri 2 Karangpucung				40.000.000	40.000.000	36.827.000	(3.173.000)				SMP Negeri 2 Karangpucung
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	36.827.000	(3.173.000)				SMP Negeri 2 Karangpucung
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	36.827.000	(3.173.000)				SMP Negeri 2 Karangpucung
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	36.827.000	(3.173.000)		DAU		SMP Negeri 2 Karangpucung
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	36.346.000	36.346.000	33.173.000	(3.173.000)				SMP Negeri 2 Karangpucung
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.346.000	6.346.000	3.173.000	(3.173.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Karangpucung
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Karangpucung
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	3.654.000	3.654.000	3.654.000	-				SMP Negeri 2 Karangpucung
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.654.000	3.654.000	3.654.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Karangpucung
	SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap				40.000.000	40.000.000	35.513.900	(4.486.100)				SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	35.513.900	(4.486.100)				SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	35.513.900	(4.486.100)				SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	35.513.900	(4.486.100)		DAU		SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	33.410.000	33.410.000	28.923.900	(4.486.100)				SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	410.000	410.000	410.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9.000.000	9.000.000	4.513.900	(4.486.100)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	21.000.000	21.000.000	21.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	4.590.000	4.590.000	4.590.000	-				SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.590.000	4.590.000	4.590.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-				SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap
	SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap				40.000.000	40.000.000	26.990.000	(13.010.000)				SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	26.990.000	(13.010.000)				SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	26.990.000	(13.010.000)				SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	26.990.000	(13.010.000)		DAU		SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	37.000.000	37.000.000	23.990.000	(13.010.000)				SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	26.020.000	26.020.000	13.010.000	(13.010.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.980.000	10.980.000	10.980.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-				SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap
	SMP Negeri 1 Sidareja				60.000.000	60.000.000	57.781.190	(2.218.810)				SMP Negeri 1 Sidareja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	57.781.190	(2.218.810)				SMP Negeri 1 Sidareja
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	57.781.190	(2.218.810)				SMP Negeri 1 Sidareja
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	57.781.190	(2.218.810)		DAU		SMP Negeri 1 Sidareja
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	38.010.000	38.010.000	35.791.190	(2.218.810)				SMP Negeri 1 Sidareja
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.438.000	4.438.000	2.219.190	(2.218.810)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Sidareja
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	33.572.000	33.572.000	33.572.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Sidareja
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	21.990.000	21.990.000	21.990.000	-				SMP Negeri 1 Sidareja
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	21.990.000	21.990.000	21.990.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Sidareja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SMP Negeri 2 Sidareja				60.000.000	60.000.000	59.568.000	(432.000)				SMP Negeri 2 Sidareja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	59.568.000	(432.000)				SMP Negeri 2 Sidareja
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	59.568.000	(432.000)				SMP Negeri 2 Sidareja
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	59.568.000	(432.000)		DAU		SMP Negeri 2 Sidareja
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	59.568.000	(432.000)				SMP Negeri 2 Sidareja
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	864.000	864.000	432.000	(432.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Sidareja
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	59.136.000	59.136.000	59.136.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Sidareja
	SMP Negeri 3 Sidareja				44.999.951	44.999.951	41.532.741	(3.467.210)				SMP Negeri 3 Sidareja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				44.999.951	44.999.951	41.532.741	(3.467.210)				SMP Negeri 3 Sidareja
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				44.999.951	44.999.951	41.532.741	(3.467.210)				SMP Negeri 3 Sidareja
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	44.999.951	44.999.951	41.532.741	(3.467.210)		DAU		SMP Negeri 3 Sidareja
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	44.999.951	44.999.951	41.532.741	(3.467.210)				SMP Negeri 3 Sidareja
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.999.991	2.999.991	2.999.991	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Sidareja
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.785.560	7.785.560	4.318.350	(3.467.210)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Sidareja
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	34.214.400	34.214.400	34.214.400	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Sidareja
	SMP Negeri 1 Wanareja				59.955.100	59.955.100	53.975.700	(5.979.400)				SMP Negeri 1 Wanareja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				59.955.100	59.955.100	53.975.700	(5.979.400)				SMP Negeri 1 Wanareja
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				59.955.100	59.955.100	53.975.700	(5.979.400)				SMP Negeri 1 Wanareja
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	59.955.100	59.955.100	53.975.700	(5.979.400)		DAU		SMP Negeri 1 Wanareja
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	11.955.100	11.955.100	5.975.700	(5.979.400)				SMP Negeri 1 Wanareja
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	11.955.100	11.955.100	5.975.700	(5.979.400)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Wanareja
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	48.000.000	48.000.000	48.000.000	-				SMP Negeri 1 Wanareja
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000	48.000.000	48.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Wanareja
	SMP Negeri 2 Wanareja				40.000.000	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)				SMP Negeri 2 Wanareja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)				SMP Negeri 2 Wanareja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)				SMP Negeri 2 Wanareja
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)		DAU		SMP Negeri 2 Wanareja
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)				SMP Negeri 2 Wanareja
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.000.000	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Wanareja
	SMP Negeri 3 Wanareja				44.435.000	44.435.000	37.721.920	(6.713.080)				SMP Negeri 3 Wanareja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				44.435.000	44.435.000	37.721.920	(6.713.080)				SMP Negeri 3 Wanareja
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				44.435.000	44.435.000	37.721.920	(6.713.080)				SMP Negeri 3 Wanareja
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	44.435.000	44.435.000	37.721.920	(6.713.080)		DAU		SMP Negeri 3 Wanareja
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	22.715.000	22.715.000	16.001.920	(6.713.080)				SMP Negeri 3 Wanareja
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16.715.000	16.715.000	10.001.920	(6.713.080)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Wanareja
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Wanareja
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	21.720.000	21.720.000	21.720.000	-				SMP Negeri 3 Wanareja
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	21.720.000	21.720.000	21.720.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Wanareja
	SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap				40.000.000	40.000.000	25.013.000	(14.987.000)				SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	25.013.000	(14.987.000)				SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	25.013.000	(14.987.000)				SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	25.013.000	(14.987.000)		DAU		SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	30.750.000	30.750.000	15.763.000	(14.987.000)				SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.750.000	30.750.000	15.763.000	(14.987.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	9.250.000	9.250.000	9.250.000	-				SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.250.000	9.250.000	9.250.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap
	SMP Negeri 1 Nusawungu				60.000.000	60.000.000	52.224.000	(7.776.000)				SMP Negeri 1 Nusawungu
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	52.224.000	(7.776.000)				SMP Negeri 1 Nusawungu
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	52.224.000	(7.776.000)				SMP Negeri 1 Nusawungu
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	52.224.000	(7.776.000)		DAU		SMP Negeri 1 Nusawungu
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	29.892.000	29.892.000	22.116.000	(7.776.000)				SMP Negeri 1 Nusawungu

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.123.200	7.123.200	7.123.200	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Nusawungu
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.552.000	15.552.000	7.776.000	(7.776.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Nusawungu
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.216.800	7.216.800	7.216.800	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Nusawungu
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	24.108.000	24.108.000	24.108.000	-				SMP Negeri 1 Nusawungu
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.108.000	24.108.000	24.108.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Nusawungu
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-				SMP Negeri 1 Nusawungu
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Nusawungu
	SMP Negeri 2 Nusawungu				60.000.000	60.000.000	55.254.000	(4.746.000)				SMP Negeri 2 Nusawungu
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	55.254.000	(4.746.000)				SMP Negeri 2 Nusawungu
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	55.254.000	(4.746.000)				SMP Negeri 2 Nusawungu
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	55.254.000	(4.746.000)		DAU		SMP Negeri 2 Nusawungu
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	45.528.000	45.528.000	40.782.000	(4.746.000)				SMP Negeri 2 Nusawungu
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9.492.000	9.492.000	4.746.000	(4.746.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Nusawungu
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	36.036.000	36.036.000	36.036.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Nusawungu
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	14.472.000	14.472.000	14.472.000	-				SMP Negeri 2 Nusawungu
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.472.000	14.472.000	14.472.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Nusawungu
	SMP Negeri 3 Nusawungu				60.000.000	60.000.000	53.935.500	(6.064.500)				SMP Negeri 3 Nusawungu
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	53.935.500	(6.064.500)				SMP Negeri 3 Nusawungu
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	53.935.500	(6.064.500)				SMP Negeri 3 Nusawungu
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	53.935.500	(6.064.500)		DAU		SMP Negeri 3 Nusawungu
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	45.480.000	45.480.000	39.415.500	(6.064.500)				SMP Negeri 3 Nusawungu
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.487.000	5.487.000	5.487.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Nusawungu
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.129.000	12.129.000	6.064.500	(6.064.500)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Nusawungu
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	27.864.000	27.864.000	27.864.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Nusawungu
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	14.520.000	14.520.000	14.520.000	-				SMP Negeri 3 Nusawungu
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.520.000	14.520.000	14.520.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Nusawungu

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SMP Negeri 1 Patimuan				60.000.000	60.000.000	44.811.750	(15.188.250)				SMP Negeri 1 Patimuan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	44.811.750	(15.188.250)				SMP Negeri 1 Patimuan
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	44.811.750	(15.188.250)				SMP Negeri 1 Patimuan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	44.811.750	(15.188.250)		DAU		SMP Negeri 1 Patimuan
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	44.811.750	(15.188.250)				SMP Negeri 1 Patimuan
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	23.000.000	23.000.000	7.811.750	(15.188.250)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Patimuan
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	37.000.000	37.000.000	37.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Patimuan
	SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap				40.000.000	40.000.000	35.498.000	(4.502.000)				SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	35.498.000	(4.502.000)				SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	35.498.000	(4.502.000)				SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	35.498.000	(4.502.000)		DAU		SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	21.514.000	21.514.000	17.012.000	(4.502.000)				SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9.004.000	9.004.000	4.502.000	(4.502.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.510.000	12.510.000	12.510.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12.036.000	12.036.000	12.036.000	-				SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.036.000	12.036.000	12.036.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	6.450.000	6.450.000	6.450.000	-				SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	6.450.000	6.450.000	6.450.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap
	SMP Negeri 2 Patimuan				40.000.000	40.000.000	37.260.000	(2.740.000)				SMP Negeri 2 Patimuan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	37.260.000	(2.740.000)				SMP Negeri 2 Patimuan
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	37.260.000	(2.740.000)				SMP Negeri 2 Patimuan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	37.260.000	(2.740.000)		DAU		SMP Negeri 2 Patimuan
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	33.200.000	33.200.000	30.460.000	(2.740.000)				SMP Negeri 2 Patimuan
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.580.000	4.580.000	2.290.000	(2.290.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Patimuan
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	27.720.000	27.720.000	27.720.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Patimuan
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	900.000	900.000	450.000	(450.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Patimuan
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	6.800.000	6.800.000	6.800.000	-				SMP Negeri 2 Patimuan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Patimuan
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	4.300.000	4.300.000	4.300.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Patimuan
	SMP Negeri 1 Maos				40.000.000	40.000.000	30.870.585	(9.129.415)				SMP Negeri 1 Maos
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.000.000	40.000.000	30.870.585	(9.129.415)				SMP Negeri 1 Maos
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				40.000.000	40.000.000	30.870.585	(9.129.415)				SMP Negeri 1 Maos
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	30.870.585	(9.129.415)		DAU		SMP Negeri 1 Maos
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	31.000.000	31.000.000	21.870.585	(9.129.415)				SMP Negeri 1 Maos
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	23.050.000	23.050.000	13.920.585	(9.129.415)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Maos
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.950.000	7.950.000	7.950.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Maos
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-				SMP Negeri 1 Maos
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Maos
	SMP Negeri 2 Maos				55.999.270	55.999.270	52.499.270	(3.500.000)				SMP Negeri 2 Maos
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				55.999.270	55.999.270	52.499.270	(3.500.000)				SMP Negeri 2 Maos
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				55.999.270	55.999.270	52.499.270	(3.500.000)				SMP Negeri 2 Maos
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	55.999.270	55.999.270	52.499.270	(3.500.000)		DAU		SMP Negeri 2 Maos
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	43.999.270	43.999.270	40.499.270	(3.500.000)				SMP Negeri 2 Maos
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.799.270	1.799.270	1.799.270	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Maos
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.000.000	7.000.000	3.500.000	(3.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Maos
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	35.200.000	35.200.000	35.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Maos
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-				SMP Negeri 2 Maos
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Maos
	SMP Negeri 3 Maos				60.000.000	60.000.000	48.263.230	(11.736.770)				SMP Negeri 3 Maos
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				60.000.000	60.000.000	48.263.230	(11.736.770)				SMP Negeri 3 Maos
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.000.000	60.000.000	48.263.230	(11.736.770)				SMP Negeri 3 Maos
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	60.000.000	60.000.000	48.263.230	(11.736.770)		DAU		SMP Negeri 3 Maos
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	48.263.230	(11.736.770)				SMP Negeri 3 Maos

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	11.673.400	11.673.400	11.673.400	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Maos
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	48.326.600	48.326.600	36.589.830	(11.736.770)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 3 Maos
	SMP Negeri 1 Kampunglaut				106.492.000	106.492.000	106.492.000	-				SMP Negeri 1 Kampunglaut
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				106.492.000	106.492.000	106.492.000	-				SMP Negeri 1 Kampunglaut
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				106.492.000	106.492.000	106.492.000	-				SMP Negeri 1 Kampunglaut
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	106.492.000	106.492.000	106.492.000	-		DAU		SMP Negeri 1 Kampunglaut
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	32.662.000	32.662.000	32.662.000	-				SMP Negeri 1 Kampunglaut
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.400.000	12.400.000	12.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kampunglaut
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.262.000	20.262.000	20.262.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kampunglaut
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-				SMP Negeri 1 Kampunglaut
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kampunglaut
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	67.830.000	67.830.000	67.830.000	-				SMP Negeri 1 Kampunglaut
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	67.830.000	67.830.000	67.830.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kampunglaut
	SMP Negeri 2 Kampunglaut				90.000.000	90.000.000	87.849.400	(2.150.600)				SMP Negeri 2 Kampunglaut
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				90.000.000	90.000.000	87.849.400	(2.150.600)				SMP Negeri 2 Kampunglaut
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				90.000.000	90.000.000	87.849.400	(2.150.600)				SMP Negeri 2 Kampunglaut
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	90.000.000	90.000.000	87.849.400	(2.150.600)		DAU		SMP Negeri 2 Kampunglaut
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	37.849.400	(2.150.600)				SMP Negeri 2 Kampunglaut
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.301.200	4.301.200	2.150.600	(2.150.600)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Kampunglaut
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.311.400	6.311.400	6.311.400	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Kampunglaut
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	29.387.400	29.387.400	29.387.400	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Kampunglaut
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-				SMP Negeri 2 Kampunglaut
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 2 Kampunglaut
	SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap				58.000.000	58.000.000	42.000.000	(16.000.000)				SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				58.000.000	58.000.000	42.000.000	(16.000.000)				SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				58.000.000	58.000.000	42.000.000	(16.000.000)				SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	58.000.000	58.000.000	42.000.000	(16.000.000)		DAU		SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	39.200.000	39.200.000	23.200.000	(16.000.000)				SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	32.000.000	32.000.000	16.000.000	(16.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.200.000	7.200.000	7.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	18.800.000	18.800.000	18.800.000	-				SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	7.800.000	7.800.000	7.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap
	UPT Satuan Pendidikan Non Formal				154.995.250	154.995.250	147.795.250	(7.200.000)				UPT Satuan Pendidikan Non Formal
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				154.995.250	154.995.250	147.795.250	(7.200.000)				UPT Satuan Pendidikan Non Formal
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				154.995.250	154.995.250	147.795.250	(7.200.000)				UPT Satuan Pendidikan Non Formal
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	154.995.250	154.995.250	147.795.250	(7.200.000)		DAU		UPT Satuan Pendidikan Non Formal
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150 Orang	150 Orang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-				UPT Satuan Pendidikan Non Formal
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	150 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		UPT Satuan Pendidikan Non Formal
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	30.099.000	30.099.000	22.899.000	(7.200.000)				UPT Satuan Pendidikan Non Formal
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.553.000	3.553.000	3.553.000	-	Kab. Cilacap	DAU		UPT Satuan Pendidikan Non Formal
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	13.248.000	13.248.000	8.498.000	(4.750.000)	Kab. Cilacap	DAU		UPT Satuan Pendidikan Non Formal
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.398.000	8.398.000	8.398.000	-	Kab. Cilacap	DAU		UPT Satuan Pendidikan Non Formal
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.200.000	1.200.000	600.000	(600.000)	Kab. Cilacap	DAU		UPT Satuan Pendidikan Non Formal
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.700.000	3.700.000	1.850.000	(1.850.000)	Kab. Cilacap	DAU		UPT Satuan Pendidikan Non Formal
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	89.232.250	89.232.250	89.232.250	-				UPT Satuan Pendidikan Non Formal
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	30.672.250	30.672.250	33.522.250	2.850.000	Kab. Cilacap	DAU		UPT Satuan Pendidikan Non Formal
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	58.560.000	58.560.000	58.560.000	-	Kab. Cilacap	DAU		UPT Satuan Pendidikan Non Formal
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	414 Unit	414 Unit	25.664.000	25.664.000	25.664.000	-				UPT Satuan Pendidikan Non Formal
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	6.850.000	6.850.000	4.000.000	(2.850.000)	Kab. Cilacap	DAU		UPT Satuan Pendidikan Non Formal
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit	6.100.000	6.100.000	6.100.000	-	Kab. Cilacap	DAU		UPT Satuan Pendidikan Non Formal
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 Unit	63 Unit	12.714.000	12.714.000	12.714.000	-	Kab. Cilacap	DAU		UPT Satuan Pendidikan Non Formal
	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				296.471.974.204	327.597.288.767	320.624.315.018	(6.972.973.749)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				294.931.794.914	310.114.719.377	303.297.613.848	(6.817.105.529)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk <u>dan Keluarga Berencana</u>
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				294.931.794.914	310.114.719.377	303.297.613.848	(6.817.105.529)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk <u>dan Keluarga Berencana</u>
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	80.571.316.850	82.839.110.890	84.279.822.210	1.440.711.320				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41 Unit	41 Unit	34.219.419.290	35.440.650.180	37.185.650.180	1.745.000.000				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	6 Unit	8 Unit	25.268.821.800	17.470.676.800	19.215.676.800	1.745.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk <u>dan Keluarga Berencana</u>
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	0 Unit	199.673.800	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk <u>dan Keluarga Berencana</u>
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	10 Unit	9 Unit	5.400.020.000	2.700.020.000	2.700.020.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit	31 Unit	350.903.540	244.246.340	244.246.340	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk <u>dan Keluarga Berencana</u>
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	38 Paket	10 Paket	3.000.000.150	15.025.707.040	15.025.707.040	-	Kab. Cilacap	DAK	SiLPA DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	39 Upaya layanan	46.232.430.300	47.311.993.000	47.007.704.320	(304.288.680)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	25219 Orang	30.000.000	30.000.000	15.110.000	(14.890.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	25219 Orang	35.000.000	35.000.000	19.599.750	(15.400.250)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24948 Orang	24948 Orang	1.529.150.800	929.150.800	929.150.800	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	98638 Orang	98638 Orang	37.250.000	37.250.000	18.953.160	(18.296.840)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	266639Orang	50.000.000	50.000.000	39.512.850	(10.487.150)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1107968Orang	1107968Orang	41.152.180	36.012.270	36.012.270	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256454Orang	256454Orang	10.000.000	35.428.200	30.378.200	(5.050.000)	Kab. Cilacap	DAK	Kas di Bendahara BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	370654Orang	370654Orang	45.889.670	45.889.670	21.060.100	(24.829.570)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36.136Orang	36.136Orang	45.627.190	45.627.190	45.627.190	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	4552 Orang	50.000.000	35.461.090	35.461.090	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	17704 Orang	99.171.600	63.695.700	63.695.700	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	26680 Orang	26680 Orang	264.599.810	264.599.810	264.599.810	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	2 Dokumen	23.149.970	23.149.970	11.555.700	(11.594.270)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	121.000.000	121.000.000	121.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 dokumen	-	40.898.120	39.874.000	(1.024.120)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	50 Dokumen	195.678.660	195.678.660	97.717.530	(97.961.130)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 dokumen	-	381.891.880	337.345.000	(44.546.880)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 dokumen	-	158.834.000	158.910.276	76.276	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen	75.542.600	70.897.200	70.897.200	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	42.513.456.280	42.609.062.780	42.594.500.700	(14.562.080)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	2 Paket	27.500.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	99.549.560	99.549.560	99.549.560	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	474.822.860	618.632.860	618.632.860	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	2 Laporan	16.499.880	15.000.000	7.496.280	(7.503.720)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen	2 Dokumen	32.674.100	27.674.100	27.674.100	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	42 Unit	42 Unit	285.999.130	285.999.130	285.999.130	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3667 Orang	3667 Orang	6.503.890	6.503.890	3.315.080	(3.188.810)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1080 Orang	1080 Orang	9.946.000	9.946.000	9.946.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	20 Orang	20 Orang	15.295.320	15.295.320	15.295.320	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1 Tatanan	1 Tatanan	15.699.790	15.699.790	7.579.560	(8.120.230)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	31.857.470	31.857.470	16.398.270	(15.459.200)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 dokumen	-	913.894.000	913.817.724	(76.276)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	14.999.750	14.999.750	6.539.110	(8.460.640)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	1 Dokumen	33.013.790	31.013.790	28.100.000	(2.913.790)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	3 Laporan	3 Laporan	52.045.580	52.045.580	52.045.580	-				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	52.045.580	52.045.580	52.045.580	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140 Dokumen	140 Dokumen	67.421.680	34.422.130	34.422.130	-				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	2 Unit	32.999.550	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	148 Unit	148 Unit	34.422.130	34.422.130	34.422.130	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan teregistrasi	93 %	93 %	92.196.400	1.418.965.400	1.418.965.400	-				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	15.362.000	15.362.000	15.362.000	-				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.362.000	15.362.000	15.362.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		1 Dokumen	-	118.055.000	118.055.000	-				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		1 dokumen	-	118.055.000	118.055.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	76.834.400	1.285.548.400	1.285.548.400	-				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	200 Orang	76.834.400	1.285.548.400	1.285.548.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	100 %	100 %	79.999.700	503.965.700	463.323.890	(40.641.810)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Laporan kegiatan Pemberian Izin Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan Optikal UMOT	3 Laporan	3 Laporan	29.999.700	94.324.700	78.713.990	(15.610.710)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	29.999.700	94.324.700	78.713.990	(15.610.710)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Laporan Hasil Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	180.527.000	170.507.000	(10.020.000)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	180.527.000	170.507.000	(10.020.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	7.488.900	(7.511.100)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	7.488.900	(7.511.100)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	214.114.000	206.614.000	(7.500.000)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	165 Unit	165 Unit	15.000.000	214.114.000	206.614.000	(7.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85.9 %	85.9 %	115.667.200	187.128.000	232.699.000	45.571.000				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	59.767.200	59.767.200	59.767.200	-				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen	44.767.200	44.767.200	44.767.200	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	2 Keluarga	2 Keluarga	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	40.900.000	112.360.800	157.931.800	45.571.000				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	40.900.000	112.360.800	157.931.800	45.571.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	214.072.614.764	225.165.549.387	216.902.803.348	(8.262.746.039)		DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	55.000.410	55.000.410	41.000.410	(14.000.000)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.200	30.000.200	23.900.200	(6.100.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	25.000.210	25.000.210	17.100.210	(7.900.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	207.324.952.634	218.417.887.257	210.782.233.868	(7.635.653.389)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2816Orang/bulan	2816Orang/bulan	207.324.952.634	218.417.887.257	210.782.233.868	(7.635.653.389)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang terfasilitasi Administrasi Kepegawaian	180 orang	180 orang	187.500.000	187.500.000	177.400.000	(10.100.000)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	250 Paket	250 Paket	167.500.000	167.500.000	167.400.000	(100.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	20.000.000	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.744.833.670	1.744.833.670	1.299.564.310	(445.269.360)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	121.028.110	121.028.110	110.712.600	(10.315.510)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	76.702.260	76.702.260	75.291.460	(1.410.800)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	672.843.200	672.843.200	672.843.200	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	91.454.800	91.454.800	51.959.400	(39.495.400)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	782.805.300	782.805.300	388.757.650	(394.047.650)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	4 Laporan	4 Laporan	98.225.220	98.225.220	98.153.930	(71.290)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	98.225.220	98.225.220	98.153.930	(71.290)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39 Unit	39 Unit	3.357.650.000	3.357.650.000	3.270.218.000	(87.432.000)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	884.556.000	884.556.000	884.556.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.473.094.000	2.473.094.000	2.385.662.000	(87.432.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang rusan Pemerintahan Daerah	5 Paket	5 Paket	1.304.452.830	1.304.452.830	1.234.232.830	(70.220.000)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	209 Unit	209 Unit	871.717.830	871.717.830	806.547.830	(65.170.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	359 Unit	359 Unit	30.040.000	30.040.000	25.040.000	(5.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	164 Unit	164 Unit	74.835.000	74.835.000	74.785.000	(50.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	27 Unit	327.860.000	327.860.000	527.860.000	200.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.540.179.290	17.482.569.390	17.326.701.170	(155.868.220)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1.540.179.290	17.482.569.390	17.326.701.170	(155.868.220)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Usia Kawin Pertama yang isterinya di bawah usia 20 tahun	16.1 %	16.1 %	28.000.200	706.000.200	692.000.100	(14.000.100)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang tersusun	12 Dokumen	12 Dokumen	28.000.200	28.000.200	14.000.100	(14.000.100)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.200	13.000.200	6.500.100	(6.500.100)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	15.000.000	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		1 Laporan	-	678.000.000	678.000.000	-				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		1 Laporan	-	148.800.000	148.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		1 Laporan	-	241.200.000	241.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		1 dokumen	-	288.000.000	288.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR	69,09 %	69,09 %	1.223.301.640	7.041.691.640	7.004.276.920	(37.414.720)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana	60 layanan	60 layanan	367.802.990	1.786.581.990	1.765.232.070	(21.349.920)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan	34.996.230	34.996.230	34.996.230	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)		1 Laporan	-	800.676.000	800.676.000	-	Kab. Cilacap	DAK	SILPA DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan	24.996.690	387.396.690	387.396.690	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	238.800.000	233.800.000	(5.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	93.610.270	85.610.270	84.815.150	(795.120)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	7 Organisasi	7 Organisasi	154.199.800	239.102.800	223.548.000	(15.554.800)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB / Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) yang terfasilitasi	295 orang	295 orang	814.999.300	1.666.999.300	1.666.999.300	-				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	10 orang	10 orang	814.999.300	1.666.999.300	1.666.999.300	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) yang terfasilitasi	59 kkb	59 kkb	40.499.350	2.552.110.350	2.536.045.550	(16.064.800)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan		1 laporan	-	53.100.000	53.100.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		10 orang	-	2.311.071.000	2.311.071.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	1 Laporan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	1 unit	5.000.000	112.390.000	112.390.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		1 Laporan	-	40.050.000	40.050.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	10 orang	10 orang	24.999.350	24.999.350	8.934.550	(16.064.800)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan		Desa	-	1.036.000.000	1.036.000.000	-				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		1 Dokumen	-	1.036.000.000	1.036.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok masyarakat dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina (UPPKS, PIK KRR, BKL, BKR, BKB)	70 %	70 %	288.877.450	9.734.877.550	9.630.424.150	(104.453.400)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta pembinaan dan Pelatihan Tribina (BKB,BKR,BKL)	1264 Orang	1264 Orang	89.999.850	309.199.950	300.516.500	(8.683.450)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		1 Laporan	-	49.200.000	49.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1 Unit	1 Unit	49.999.950	244.999.950	244.989.000	(10.950)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	240 Orang	240 Orang	39.999.900	15.000.000	6.327.500	(8.672.500)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta pengembangan PIK R, UPPKS, saka Kencana dan Genre	372 Orang	372 Orang	198.877.600	9.425.677.600	9.329.907.650	(95.769.950)				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	28.877.700	28.877.700	11.997.480	(16.880.220)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	72Organisasi	72Organisasi	169.999.900	169.999.900	91.110.170	(78.889.730)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)		1 Laporan	-	4.194.000.000	4.194.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)		1 Laporan	-	5.032.800.000	5.032.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Puskesmas Adipala I				3.572.562.000	4.572.268.400	5.530.756.624	958.488.224				Puskesmas Adipala I
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.572.562.000	4.572.268.400	5.530.756.624	958.488.224				Puskesmas Adipala I
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.572.562.000	4.572.268.400	5.530.756.624	958.488.224				Puskesmas Adipala I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	9.000.000	12.000.000	3.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala I
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	141.450.000	135.650.000	(5.800.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala I
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	-	162.500.000	182.300.000	19.800.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala I
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	3.900.000	3.900.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala I
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	1.600.000	1.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala I
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	16.200.000	16.800.000	600.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala I
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	24.930.000	5.130.000	(19.800.000)				Puskesmas Adipala I
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	24.930.000	5.130.000	(19.800.000)				Puskesmas Adipala I
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	24.930.000	5.130.000	(19.800.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala I
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.572.562.000	3.572.562.000	4.531.008.324	958.446.324		DAU		Puskesmas Adipala I
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	130.872.000	130.872.000	108.372.000	(22.500.000)				Puskesmas Adipala I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	130.872.000	130.872.000	108.372.000	(22.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	3.441.690.000	3.441.690.000	4.422.636.324	980.946.324				Puskesmas Adipala I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.441.690.000	3.441.690.000	4.422.636.324	980.946.324	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Adipala I
	Puskesmas Adipala II				2.106.073.000	2.828.041.250	2.967.470.010	139.428.760				Puskesmas Adipala II
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.106.073.000	2.828.041.250	2.967.470.010	139.428.760				Puskesmas Adipala II
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.106.073.000	2.828.041.250	2.967.470.010	139.428.760				Puskesmas Adipala II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	705.630.250	705.630.250	-				Puskesmas Adipala II
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	13 Upaya	-	705.630.250	705.630.250	-				Puskesmas Adipala II
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	520 orang	-	159.600.000	159.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala II
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	4730 orang	-	32.400.000	32.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala II
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	30 orang	-	20.800.000	20.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala II
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	60 orang	-	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala II
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	167.213.000	167.213.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala II
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	15.200.000	15.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala II
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	12.400.000	12.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala II
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	11.917.250	11.917.250	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	96.800.000	96.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala II
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	5 Dokumen	-	160.700.000	160.700.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala II
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	3.200.000	3.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala II
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala II
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		1 Dokumen	-	8.400.000	8.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala II
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	16.338.000	16.338.000	-				Puskesmas Adipala II
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	16.338.000	16.338.000	-				Puskesmas Adipala II
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	16.338.000	16.338.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala II
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.106.073.000	2.106.073.000	2.245.501.760	139.428.760		DAU		Puskesmas Adipala II
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	176.808.000	176.808.000	167.808.000	(9.000.000)				Puskesmas Adipala II
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000	48.000.000	48.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	128.808.000	128.808.000	119.808.000	(9.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Adipala II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	1.929.265.000	1.929.265.000	2.077.693.760	148.428.760				Puskesmas Adipala II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.929.265.000	1.929.265.000	2.077.693.760	148.428.760	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Adipala II
	Puskesmas Bantarsari				4.599.327.600	5.308.897.600	6.759.135.985	1.450.238.385				Puskesmas Bantarsari
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.599.327.600	5.308.897.600	6.759.135.985	1.450.238.385				Puskesmas Bantarsari
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.599.327.600	5.308.897.600	6.759.135.985	1.450.238.385				Puskesmas Bantarsari

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	7.600.000	7.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Bantarsari
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	90.900.000	90.900.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Bantarsari
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	5 Dokumen	-	138.350.000	151.150.000	12.800.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Bantarsari
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	6.400.000	8.400.000	2.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Bantarsari
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	400.000	400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Bantarsari
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	12.800.000	12.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Bantarsari
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	18.400.000	5.600.000	(12.800.000)				Puskesmas Bantarsari
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	18.400.000	5.600.000	(12.800.000)				Puskesmas Bantarsari
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	18.400.000	5.600.000	(12.800.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Bantarsari
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.599.327.600	4.599.327.600	6.049.565.985	1.450.238.385		DAU		Puskesmas Bantarsari
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	129.744.000	129.744.000	116.244.000	(13.500.000)				Puskesmas Bantarsari
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	129.744.000	129.744.000	116.244.000	(13.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Bantarsari
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	4.469.583.600	4.469.583.600	5.933.321.985	1.463.738.385				Puskesmas Bantarsari
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.469.583.600	4.469.583.600	5.933.321.985	1.463.738.385	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Bantarsari
	Puskesmas Binangun				4.439.484.000	5.438.472.300	6.113.678.446	675.206.146				Puskesmas Binangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.439.484.000	5.438.472.300	6.113.678.446	675.206.146				Puskesmas Binangun
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.439.484.000	5.438.472.300	6.113.678.446	675.206.146				Puskesmas Binangun

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	6.400.000	5.600.000	(800.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Binangun
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	4 Dokumen	-	112.600.000	113.600.000	1.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Binangun
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	5 Dokumen	-	154.380.000	159.820.000	5.440.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Binangun
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	1.000.000	1.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Binangun
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	1.000.000	800.000	(200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Binangun
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	9.600.000	9.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Binangun
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	16.660.000	11.220.000	(5.440.000)				Puskesmas Binangun
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	16.660.000	11.220.000	(5.440.000)				Puskesmas Binangun
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	16.660.000	11.220.000	(5.440.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Binangun
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.439.484.000	4.439.484.000	5.114.690.146	675.206.146		DAU		Puskesmas Binangun
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	38.496.000	38.496.000	38.496.000	-				Puskesmas Binangun
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	38.496.000	38.496.000	38.496.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Binangun
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	4.400.988.000	4.400.988.000	5.076.194.146	675.206.146				Puskesmas Binangun
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.400.988.000	4.400.988.000	5.076.194.146	675.206.146	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Binangun
	Puskesmas Cilacap Selatan I				1.742.022.400	2.389.432.400	2.935.148.875	545.716.475				Puskesmas Cilacap Selatan I
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.742.022.400	2.389.432.400	2.935.148.875	545.716.475				Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.742.022.400	2.389.432.400	2.935.148.875	545.716.475				Puskesmas Cilacap Selatan I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	640.022.000	640.021.800	(200)				Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	15 Upaya	-	640.022.000	640.021.800	(200)				Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	480 orang	-	68.910.000	68.910.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	9987 orang	-	24.700.000	20.200.000	(4.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	15 orang	-	18.000.000	18.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	80 orang	-	16.000.000	14.000.000	(2.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	171.722.000	176.922.000	5.200.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	5.900.000	5.400.000	(500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	22.800.000	24.000.000	1.200.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	20.690.000	20.067.000	(623.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	2.400.000	2.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	97.050.000	98.472.800	1.422.800	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	7 Dokumen	-	174.440.000	174.440.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	-	8.550.000	8.550.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	1.060.000	1.060.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	600.000	400.000	(200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutanusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutanusiaan		1 Dokumen	-	7.200.000	7.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembang dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	7.388.000	7.388.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.742.022.400	1.742.022.400	2.287.739.075	545.716.675		DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	142.022.400	142.022.400	142.022.400	-				Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	103.560.000	103.560.000	103.560.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	38.462.400	38.462.400	38.462.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	1.600.000.000	1.600.000.000	2.145.716.675	545.716.675				Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.600.000.000	1.600.000.000	2.145.716.675	545.716.675	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Cilacap Selatan I
	Puskesmas Cilacap Selatan II				1.649.940.000	2.376.176.400	2.636.276.998	260.100.598				Puskesmas Cilacap Selatan II
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.649.940.000	2.376.176.400	2.636.276.998	260.100.598				Puskesmas Cilacap Selatan II
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.649.940.000	2.376.176.400	2.636.276.998	260.100.598				Puskesmas Cilacap Selatan II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	21.650.000	23.647.000	1.997.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan II
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan II
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	126.600.000	124.600.000	(2.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan II
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	7 Dokumen	-	189.660.000	189.660.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan II
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	-	4.950.000	4.950.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan II
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3667 Orang	0 Orang	-	40.000.000	-	(40.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan II
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	1.150.000	1.150.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan II
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	1.600.000	1.000.000	(600.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan II
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		1 Dokumen	-		7.200.000	7.200.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan II
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	85,9 %	85,9 %	-	8.988.000	8.988.000	-				Puskesmas Cilacap Selatan II
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	8.988.000	8.988.000	-				Puskesmas Cilacap Selatan II
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	-	8.988.000	8.988.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan II
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.649.940.000	1.649.940.000	1.910.043.598	260.103.598		DAU		Puskesmas Cilacap Selatan II
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	143.940.000	143.940.000	143.940.000	-				Puskesmas Cilacap Selatan II
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	119.729.940	119.729.940	119.729.940	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.210.060	24.210.060	24.210.060	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Selatan II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	1.506.000.000	1.506.000.000	1.766.103.598	260.103.598				Puskesmas Cilacap Selatan II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.506.000.000	1.506.000.000	1.766.103.598	260.103.598	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Cilacap Selatan II
	Puskesmas Cilacap Tengah I				1.935.288.000	2.844.905.000	2.924.173.268	79.268.268				Puskesmas Cilacap Tengah I
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.935.288.000	2.844.905.000	2.924.173.268	79.268.268				Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.935.288.000	2.844.905.000	2.924.173.268	79.268.268				Puskesmas Cilacap Tengah I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	902.379.000	901.978.800	(400.200)				Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	-	902.379.000	901.978.800	(400.200)				Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	300 orang	-	31.620.000	31.620.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	2575 orang	-	75.500.000	75.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	39 orang	-	54.000.000	46.800.000	(7.200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	250 orang	-	19.300.000	19.250.000	(50.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	366.439.000	366.439.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	27.500.000	27.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	11.800.000	11.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	20.380.000	18.867.000	(1.513.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	14.000.000	14.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	89.500.000	91.062.800	1.562.800	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	7 Dokumen	-	176.240.000	175.840.000	(400.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	2 Dokumen	-	6.150.000	6.150.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	1.150.000	1.150.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	1.600.000	1.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutanusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutanusiaan		1 Dokumen	-	7.200.000	14.400.000	7.200.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	7.238.000	7.638.000	400.000				Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	7.238.000	7.638.000	400.000				Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	-	7.238.000	7.638.000	400.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.935.288.000	1.935.288.000	2.014.556.468	79.268.468		DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	201.954.000	201.954.000	188.454.000	(13.500.000)				Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	91.146.000	91.146.000	91.146.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	110.808.000	110.808.000	97.308.000	(13.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	1.733.334.000	1.733.334.000	1.826.102.468	92.768.468				Puskesmas Cilacap Tengah I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.733.334.000	1.733.334.000	1.826.102.468	92.768.468	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Cilacap Tengah I
	Puskesmas Cilacap Tengah II				2.128.272.000	2.734.675.000	2.742.306.800	7.631.800				Puskesmas Cilacap Tengah II
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.128.272.000	2.734.675.000	2.742.306.800	7.631.800				Puskesmas Cilacap Tengah II
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.128.272.000	2.734.675.000	2.742.306.800	7.631.800				Puskesmas Cilacap Tengah II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	2.800.000	2.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah II
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	86.600.000	101.900.000	15.300.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah II
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	6 Dokumen	-	174.320.000	161.370.000	(12.950.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah II
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	-	4.350.000	4.350.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah II
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	1.060.000	1.060.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah II
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	1.200.000	1.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah II
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutanusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutanusiaan		1 Dokumen	-	7.200.000	14.400.000	7.200.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah II
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Cilacap Tengah II
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaa Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Cilacap Tengah II
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	7.388.000	7.388.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah II
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.128.272.000	2.128.272.000	2.135.903.800	7.631.800		DAU		Puskesmas Cilacap Tengah II
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	162.184.000	162.184.000	148.684.000	(13.500.000)				Puskesmas Cilacap Tengah II
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	70.000.000	70.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	92.184.000	92.184.000	78.684.000	(13.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Tengah II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	1.966.088.000	1.966.088.000	1.987.219.800	21.131.800				Puskesmas Cilacap Tengah II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.966.088.000	1.966.088.000	1.987.219.800	21.131.800	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Cilacap Tengah II
	Puskesmas Cilacap Utara I				2.243.399.800	2.963.725.150	3.159.853.264	196.128.114				Puskesmas Cilacap Utara I
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.243.399.800	2.963.725.150	3.159.853.264	196.128.114				Puskesmas Cilacap Utara I
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.243.399.800	2.963.725.150	3.159.853.264	196.128.114				Puskesmas Cilacap Utara I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	712.937.350	712.937.300	(50)				Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	15 Upaya	-	712.937.350	712.937.300	(50)				Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	802 orang	-	137.700.000	137.700.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	5720 orang	-	30.200.000	23.000.000	(7.200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	10 orang	-	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	720 orang	-	9.000.000	11.100.000	2.100.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	203.848.500	210.848.500	7.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	3.800.000	4.400.000	600.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	10.200.000	10.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	7.999.450	7.149.400	(850.050)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	5.200.000	4.800.000	(400.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	79.150.000	77.900.000	(1.250.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	7 Dokumen	-	185.839.400	185.839.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	-	9.000.000	9.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	3.600.000	3.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	1.000.000	1.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		1 Dokumen	-	14.400.000	14.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	85,9 %	85,9 %	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembang dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	7.388.000	7.388.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.243.399.800	2.243.399.800	2.439.527.964	196.128.164		DAU		Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	158.256.000	158.256.000	149.256.000	(9.000.000)				Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	83.400.000	83.400.000	83.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	74.856.000	74.856.000	65.856.000	(9.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	2.085.143.800	2.085.143.800	2.290.271.964	205.128.164				Puskesmas Cilacap Utara I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.085.143.800	2.085.143.800	2.290.271.964	205.128.164	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Cilacap Utara I
	Puskesmas Cilacap Utara II				1.476.204.800	2.101.570.600	2.107.053.703	5.483.103				Puskesmas Cilacap Utara II
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.476.204.800	2.101.570.600	2.107.053.703	5.483.103				Puskesmas Cilacap Utara II
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.476.204.800	2.101.570.600	2.107.053.703	5.483.103				Puskesmas Cilacap Utara II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	3.200.000	3.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara II
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	103.430.800	109.185.600	5.754.800	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara II
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	7 Dokumen	-	183.926.600	187.676.600	3.750.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara II
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	-	2.718.000	2.718.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara II
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	1.090.000	1.090.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara II
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	2.200.000	2.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara II
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutanusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutanusiaan		1 Dokumen	-	4.800.000	4.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara II
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	7.388.000	3.638.000	(3.750.000)				Puskesmas Cilacap Utara II
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	7.388.000	3.638.000	(3.750.000)				Puskesmas Cilacap Utara II
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	7.388.000	3.638.000	(3.750.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara II
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.476.204.800	1.476.204.800	1.481.688.103	5.483.303		DAU		Puskesmas Cilacap Utara II
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	96.804.800	96.804.800	92.304.800	(4.500.000)				Puskesmas Cilacap Utara II
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	59.850.000	59.850.000	59.850.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36.954.800	36.954.800	32.454.800	(4.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cilacap Utara II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	1.379.400.000	1.379.400.000	1.389.383.303	9.983.303				Puskesmas Cilacap Utara II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.379.400.000	1.379.400.000	1.389.383.303	9.983.303	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Cilacap Utara II
	Puskesmas Cimanggu I				3.108.651.600	3.807.309.600	4.650.091.092	842.781.492				Puskesmas Cimanggu I
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.108.651.600	3.807.309.600	4.650.091.092	842.781.492				Puskesmas Cimanggu I
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.108.651.600	3.807.309.600	4.650.091.092	842.781.492				Puskesmas Cimanggu I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	676.572.400	682.058.000	5.485.600				Puskesmas Cimanggu I
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	-	676.572.400	682.058.000	5.485.600				Puskesmas Cimanggu I
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	192 orang	-	115.200.000	72.960.000	(42.240.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu I
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	7162 orang	-	23.100.000	23.100.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu I
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	143 orang	-	26.400.000	26.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu I
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	70 orang	-	11.100.000	11.100.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu I
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	193.532.000	167.132.000	(26.400.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu I
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	11.100.000	11.100.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu I
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	10.000.000	11.100.000	1.100.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu I
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	20.290.000	20.890.400	600.400	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	1.600.000	1.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu I
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	75.800.000	59.200.000	(16.600.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu I
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	5 Dokumen	-	163.950.000	186.035.600	22.085.600	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu I
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	3.600.000	3.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu I
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	1.700.400	68.640.000	66.939.600	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu I
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	19.200.000	19.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu I
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	22.085.600	16.600.000	(5.485.600)				Puskesmas Cimanggu I
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	22.085.600	16.600.000	(5.485.600)				Puskesmas Cimanggu I
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	22.085.600	16.600.000	(5.485.600)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu I
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.108.651.600	3.108.651.600	3.951.433.092	842.781.492		DAU		Puskesmas Cimanggu I
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	91.512.000	91.512.000	69.012.000	(22.500.000)				Puskesmas Cimanggu I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	91.512.000	91.512.000	69.012.000	(22.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	3.017.139.600	3.017.139.600	3.882.421.092	865.281.492				Puskesmas Cimanggu I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.017.139.600	3.017.139.600	3.882.421.092	865.281.492	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Cimanggu I
	Puskesmas Cimanggu II				2.855.327.500	3.508.418.150	4.018.561.744	510.143.594				Puskesmas Cimanggu II
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.855.327.500	3.508.418.150	4.018.561.744	510.143.594				Puskesmas Cimanggu II
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.855.327.500	3.508.418.150	4.018.561.744	510.143.594				Puskesmas Cimanggu II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	645.702.650	645.702.400	(250)				Puskesmas Cimanggu II
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	-	645.702.650	645.702.400	(250)				Puskesmas Cimanggu II
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	574 orang	-	88.200.000	88.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu II
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	3959 orang	-	31.000.000	30.400.000	(600.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu II
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	116 orang	-	9.000.000	9.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu II
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	769 .orang	-	18.200.000	18.600.000	400.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu II
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	183.596.900	184.196.900	600.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu II
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	8.400.000	8.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu II
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	8.400.000	8.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu II
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	17.705.750	17.133.500	(572.250)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	3.200.000	3.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu II
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	98.800.000	98.972.000	172.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu II
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	5 Dokumen	-	167.100.000	167.100.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu II
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	1.500.000	1.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu II
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	800.000	800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu II
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	9.800.000	9.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu II
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Cimanggu II
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Cimanggu II
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	7.388.000	7.388.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu II
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.855.327.500	2.855.327.500	3.365.471.344	510.143.844		DAU		Puskesmas Cimanggu II
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	38.926.000	38.926.000	29.926.000	(9.000.000)				Puskesmas Cimanggu II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	38.926.000	38.926.000	29.926.000	(9.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cimanggu II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	2.816.401.500	2.816.401.500	3.335.545.344	519.143.844				Puskesmas Cimanggu II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.816.401.500	2.816.401.500	3.335.545.344	519.143.844	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Cimanggu II
	Puskesmas Cipari				4.512.478.000	5.472.552.550	7.093.923.437	1.621.370.887				Puskesmas Cipari
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.512.478.000	5.472.552.550	7.093.923.437	1.621.370.887				Puskesmas Cipari
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.512.478.000	5.472.552.550	7.093.923.437	1.621.370.887				Puskesmas Cipari

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	952.686.550	952.686.350	(200)				Puskesmas Cipari
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	-	952.686.550	952.686.350	(200)				Puskesmas Cipari
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	807 orang	-	149.600.000	149.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cipari
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	9570 orang	-	43.000.000	43.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cipari
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256454Orang	6329 orang	-	19.800.000	19.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cipari
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	90 orang	-	18.000.000	18.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cipari
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	872 orang	-	10.500.000	10.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cipari
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	360.004.550	360.004.550	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cipari
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	6.500.000	6.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cipari
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Linekungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	15.600.000	15.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cipari

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	25.182.000	27.731.800	2.549.800	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cipari
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	6.800.000	6.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cipari
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	105.900.000	103.350.000	(2.550.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cipari
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	6 Dokumen	-	188.200.000	188.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cipari
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	2.600.000	2.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cipari
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	1.000.000	1.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cipari
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	0 Dokumen	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Cipari
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	85,9 %	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Cipari
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	7.388.000	7.388.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cipari
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.512.478.000	4.512.478.000	6.133.849.087	1.621.371.087		DAU		Puskesmas Cipari
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	93.120.000	93.120.000	84.120.000	(9.000.000)				Puskesmas Cipari
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	93.120.000	93.120.000	84.120.000	(9.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Cipari
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	4.419.358.000	4.419.358.000	6.049.729.087	1.630.371.087				Puskesmas Cipari
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.419.358.000	4.419.358.000	6.049.729.087	1.630.371.087	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Cipari
	Puskesmas Dayeuhluhur I				3.048.830.000	3.756.654.825	4.521.710.165	765.055.340				Puskesmas Dayeuhluhur I
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.048.830.000	3.756.654.825	4.521.710.165	765.055.340				Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.048.830.000	3.756.654.825	4.521.710.165	765.055.340				Puskesmas Dayeuhluhur I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	700.436.825	700.386.825	(50.000)				Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	-	700.436.825	700.386.825	(50.000)				Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	360 orang	-	172.800.000	172.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	3264 orang	-	20.800.000	20.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	14 orang	-	16.800.000	16.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	402 orang	-	18.000.000	18.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	148.561.825	148.561.825	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	4.200.000	4.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	12.200.000	12.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	19.325.000	19.467.000	142.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	3.200.000	3.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	86.700.000	86.558.000	(142.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	6 Dokumen	-	162.850.000	162.800.000	(50.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	5.600.000	5.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	600.000	600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	28.800.000	28.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	7.388.000	7.438.000	50.000				Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	7.388.000	7.438.000	50.000				Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	7.388.000	7.438.000	50.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.048.830.000	3.048.830.000	3.813.885.340	765.055.340		DAU		Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	94.617.000	94.617.000	76.617.000	(18.000.000)				Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	94.617.000	94.617.000	76.617.000	(18.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	2.954.213.000	2.954.213.000	3.737.268.340	783.055.340				Puskesmas Dayeuhluhur I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.954.213.000	2.954.213.000	3.737.268.340	783.055.340	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Dayeuhluhur I
	Puskesmas Dayeuhluhur II				1.505.746.000	2.133.128.025	2.945.806.963	812.678.938				Puskesmas Dayeuhluhur II
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.505.746.000	2.133.128.025	2.945.806.963	812.678.938				Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.505.746.000	2.133.128.025	2.945.806.963	812.678.938				Puskesmas Dayeuhluhur II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	619.994.025	620.394.025	400.000				Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	-	619.994.025	620.394.025	400.000				Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	720 orang	-	96.000.000	96.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	258 orang	-	14.800.000	25.800.000	11.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	252 orang	-	36.000.000	25.200.000	(10.800.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	100 orang	-	7.200.000	10.000.000	2.800.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	11 Dokumen	-	92.588.525	93.588.525	1.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	4.800.000	3.300.000	(1.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	75 Dokumen	-	13.200.000	15.000.000	1.800.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	26.425.500	25.033.500	(1.392.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	8.800.000	8.000.000	(800.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	63 Dokumen	-	148.880.000	145.672.000	(3.208.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	60 Dokumen	-	155.500.000	155.900.000	400.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	6.000.000	4.700.000	(1.300.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	200.000	200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutanusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutanusiaan		1 Dokumen	-	9.600.000	12.000.000	2.400.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	7.388.000	6.988.000	(400.000)				Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	7.388.000	6.988.000	(400.000)				Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	-	7.388.000	6.988.000	(400.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.505.746.000	1.505.746.000	2.318.424.938	812.678.938		DAU		Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	85.872.000	85.872.000	81.372.000	(4.500.000)				Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000	48.000.000	48.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	37.872.000	37.872.000	33.372.000	(4.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	1.419.874.000	1.419.874.000	2.237.052.938	817.178.938				Puskesmas Dayeuhluhur II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.419.874.000	1.419.874.000	2.237.052.938	817.178.938	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Dayeuhluhur II
	Puskesmas Gandrungmangu I				4.550.308.500	5.522.038.600	5.849.833.142	327.794.542				Puskesmas Gandrungmangu I
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.550.308.500	5.522.038.600	5.849.833.142	327.794.542				Puskesmas Gandrungmangu I
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.550.308.500	5.522.038.600	5.849.833.142	327.794.542				Puskesmas Gandrungmangu I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	964.342.100	964.342.100	-				Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	-	964.342.100	964.342.100	-				Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	1632 orang	-	201.600.000	201.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	3264 orang	-	55.700.000	55.700.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	14 orang	-	24.000.000	24.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	402 orang	-	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	320.252.100	320.252.100	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	5.200.000	5.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	8.800.000	12.000.000	3.200.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	9.290.000	7.290.000	(2.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	104.500.000	103.300.000	(1.200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	5 Dokumen	-	197.000.000	197.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	3.600.000	3.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	1.200.000	1.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	19.200.000	19.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	7.388.000	7.388.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.550.308.500	4.550.308.500	4.878.103.042	327.794.542		DAU		Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	164.308.500	164.308.500	150.808.500	(13.500.000)				Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	164.308.500	164.308.500	150.808.500	(13.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	4.386.000.000	4.386.000.000	4.727.294.542	341.294.542				Puskesmas Gandrungmangu I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.386.000.000	4.386.000.000	4.727.294.542	341.294.542	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Gandrungmangu I
	Puskesmas Gandrungmangu II				2.321.682.642	3.269.858.842	3.424.849.166	154.990.324				Puskesmas Gandrungmangu II
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.321.682.642	3.269.858.842	3.424.849.166	154.990.324				Puskesmas Gandrungmangu II
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.321.682.642	3.269.858.842	3.424.849.166	154.990.324				Puskesmas Gandrungmangu II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	23.600.000	26.400.000	2.800.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu II
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	162.750.000	144.500.000	(18.250.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu II
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1 Dokumen	-	172.000.000	174.400.000	2.400.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu II
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	4.500.000	4.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu II
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu II
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	14.400.000	14.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu II
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	13.688.000	22.694.000	9.006.000				Puskesmas Gandrungmangu II
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	13.688.000	22.694.000	9.006.000				Puskesmas Gandrungmangu II
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	13.688.000	22.694.000	9.006.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu II
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.321.682.642	2.321.682.642	2.476.672.966	154.990.324		DAU		Puskesmas Gandrungmangu II
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	110.332.800	110.332.800	101.332.800	(9.000.000)				Puskesmas Gandrungmangu II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	110.332.800	110.332.800	101.332.800	(9.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Gandrungmangu II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	2.211.349.842	2.211.349.842	2.375.340.166	163.990.324				Puskesmas Gandrungmangu II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.211.349.842	2.211.349.842	2.375.340.166	163.990.324	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Gandrungmangu II
	Puskesmas Jeruklegi I				2.990.796.000	3.894.408.000	4.579.358.336	684.950.336				Puskesmas Jeruklegi I
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.990.796.000	3.894.408.000	4.579.358.336	684.950.336				Puskesmas Jeruklegi I
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.990.796.000	3.894.408.000	4.579.358.336	684.950.336				Puskesmas Jeruklegi I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	4.400.000	4.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi I
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	133.800.000	140.800.000	7.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi I
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	5 Dokumen	-	170.000.000	170.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi I
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	2.800.000	2.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi I
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	1.400.000	1.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi I
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	16.800.000	16.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi I
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Jeruklegi I
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Jeruklegi I
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	7.388.000	7.388.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi I
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.990.796.000	2.990.796.000	3.675.746.336	684.950.336		DAU		Puskesmas Jeruklegi I
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	38.496.000	38.496.000	33.996.000	(4.500.000)				Puskesmas Jeruklegi I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	38.496.000	38.496.000	33.996.000	(4.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	2.952.300.000	2.952.300.000	3.641.750.336	689.450.336				Puskesmas Jeruklegi I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.952.300.000	2.952.300.000	3.641.750.336	689.450.336	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Jeruklegi I
	Puskesmas Jeruklegi II				2.110.060.000	2.729.891.600	2.862.608.329	132.716.729				Puskesmas Jeruklegi II
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.110.060.000	2.729.891.600	2.862.608.329	132.716.729				Puskesmas Jeruklegi II
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.110.060.000	2.729.891.600	2.862.608.329	132.716.729				Puskesmas Jeruklegi II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	612.443.600	612.303.600	(140.000)				Puskesmas Jeruklegi II
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	-	612.443.600	612.303.600	(140.000)				Puskesmas Jeruklegi II
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	1428 orang	-	65.340.000	65.340.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi II
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	3480 orang	-	36.200.000	36.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi II
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	60 orang	-	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi II
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	72 orang	-	3.900.000	4.800.000	900.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi II
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	32 Dokumen	-	207.834.400	207.834.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi II
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	6.100.000	6.100.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi II
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	92 Dokumen	-	5.200.000	9.200.000	4.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi II
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	10.540.000	11.099.600	559.600	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi II
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	290 .Dokumen	-	80.749.200	75.289.600	(5.459.600)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi II
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	70 Dokumen	-	174.580.000	174.440.000	(140.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi II
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	2.600.000	2.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi II
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	1.000.000	1.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi II
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	2.400.000	2.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi II
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	7.388.000	7.528.000	140.000				Puskesmas Jeruklegi II
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	7.388.000	7.528.000	140.000				Puskesmas Jeruklegi II
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	-	7.388.000	7.528.000	140.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi II
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.110.060.000	2.110.060.000	2.242.776.729	132.716.729		DAU		Puskesmas Jeruklegi II
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	95.976.000	95.976.000	86.976.000	(9.000.000)				Puskesmas Jeruklegi II
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	58.128.000	58.128.000	58.128.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	37.848.000	37.848.000	28.848.000	(9.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Jeruklegi II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	2.014.084.000	2.014.084.000	2.155.800.729	141.716.729				Puskesmas Jeruklegi II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.014.084.000	2.014.084.000	2.155.800.729	141.716.729	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Jeruklegi II
	Puskesmas Kumpulglaut				1.500.415.400	2.137.809.750	2.127.489.255	(10.320.495)				Puskesmas Kumpulglaut
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.500.415.400	2.137.809.750	2.127.489.255	(10.320.495)				Puskesmas Kumpulglaut
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.500.415.400	2.137.809.750	2.127.489.255	(10.320.495)				Puskesmas Kumpulglaut

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	150.000.000	775.206.350	775.106.000	(100.350)				Puskesmas Kampunglaut
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	150.000.000	775.206.350	775.106.000	(100.350)				Puskesmas Kampunglaut
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	212 orang	-	89.600.000	89.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	1595 orang	-	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256454Orang	0 orang	-	14.400.000	-	(14.400.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	37 orang	-	4.800.000	4.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	204 orang	-	8.000.000	8.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	7 Dokumen	-	130.075.000	130.075.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	12.600.000	12.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Linekungan	50 Dokumen	5 Dokumen	-	12.300.000	15.600.000	3.300.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	17.905.750	13.267.000	(4.638.750)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	6.400.000	6.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	10 Dokumen	-	131.800.000	134.338.400	2.538.400	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000	326.700.000	326.600.000	(100.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	20 Orang	40 orang	-	3.600.000	2.400.000	(1.200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	2.600.000	2.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	2.425.600	2.425.600	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-		14.400.000	14.400.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	12.188.000	12.288.000	100.000				Puskesmas Kampunglaut
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	12.188.000	12.288.000	100.000				Puskesmas Kampunglaut
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	-	12.188.000	12.288.000	100.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.350.415.400	1.350.415.400	1.340.095.255	(10.320.145)		DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	364.215.400	364.215.400	336.315.400	(27.900.000)				Puskesmas Kampunglaut
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	73.791.400	73.791.400	73.791.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	290.424.000	290.424.000	262.524.000	(27.900.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kampunglaut
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	986.200.000	986.200.000	1.003.779.855	17.579.855				Puskesmas Kampunglaut
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	986.200.000	986.200.000	1.003.779.855	17.579.855	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Kampunglaut
	Puskesmas Karangpucung I				3.664.224.000	4.529.149.000	5.097.384.008	568.235.008				Puskesmas Karangpucung I
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.664.224.000	4.529.149.000	5.097.384.008	568.235.008				Puskesmas Karangpucung I
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.664.224.000	4.529.149.000	5.097.384.008	568.235.008				Puskesmas Karangpucung I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	8.400.000	8.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung I
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	38 Dokumen	-	145.400.000	145.100.000	(300.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung I
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	30 Dokumen	-	146.150.000	146.150.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung I
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	1.060.000	8.260.000	7.200.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung I
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	1.200.000	1.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung I
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung I
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	11.388.000	11.788.000	400.000				Puskesmas Karangpucung I
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	11.388.000	11.788.000	400.000				Puskesmas Karangpucung I
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	4 Dokumen	-	11.388.000	11.788.000	400.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung I
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.664.224.000	3.664.224.000	4.232.459.008	568.235.008		DAU		Puskesmas Karangpucung I
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	57.024.000	57.024.000	52.524.000	(4.500.000)				Puskesmas Karangpucung I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	57.024.000	57.024.000	52.524.000	(4.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	3.607.200.000	3.607.200.000	4.179.935.008	572.735.008				Puskesmas Karangpucung I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.607.200.000	3.607.200.000	4.179.935.008	572.735.008	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Karangpucung I
	Puskesmas Karangpucung II				1.464.312.000	2.162.343.500	2.410.504.689	248.161.189				Puskesmas Karangpucung II
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.464.312.000	2.162.343.500	2.410.504.689	248.161.189				Puskesmas Karangpucung II
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.464.312.000	2.162.343.500	2.410.504.689	248.161.189				Puskesmas Karangpucung II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	686.323.500	685.679.000	(644.500)				Puskesmas Karangpucung II
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	-	686.323.500	685.679.000	(644.500)				Puskesmas Karangpucung II
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	1088 orang	-	104.160.000	104.160.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung II
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	293 orang	-	29.300.000	29.300.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung II
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	12 orang	-	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung II
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	12 orang	-	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung II
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	156.636.000	156.636.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung II
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	6.800.000	6.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung II
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	12.700.000	12.700.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung II
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	22.211.500	22.067.000	(144.500)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	2.800.000	2.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung II
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	124.800.000	124.900.000	100.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung II
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	6 Dokumen	-	183.316.000	182.716.000	(600.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung II
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	1.600.000	1.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung II
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	1.200.000	1.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung II
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	16.800.000	16.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung II
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	11.708.000	12.308.000	600.000				Puskesmas Karangpucung II
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	11.708.000	12.308.000	600.000				Puskesmas Karangpucung II
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	-	11.708.000	12.308.000	600.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung II
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.464.312.000	1.464.312.000	1.712.517.689	248.205.689		DAU		Puskesmas Karangpucung II
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	98.652.000	98.652.000	89.652.000	(9.000.000)				Puskesmas Karangpucung II
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000	24.000.000	24.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	74.652.000	74.652.000	65.652.000	(9.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Karangpucung II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	1.365.660.000	1.365.660.000	1.622.865.689	257.205.689				Puskesmas Karangpucung II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.365.660.000	1.365.660.000	1.622.865.689	257.205.689	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Karangpucung II
	Puskesmas Kawunganten				4.819.680.000	5.819.140.900	7.811.304.313	1.992.163.413				Puskesmas Kawunganten
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.819.680.000	5.819.140.900	7.811.304.313	1.992.163.413				Puskesmas Kawunganten
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.819.680.000	5.819.140.900	7.811.304.313	1.992.163.413				Puskesmas Kawunganten

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	8.000.000	8.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kawunganten
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	246.100.000	246.100.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kawunganten
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	5 Dokumen	-	189.400.000	189.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kawunganten
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	1.300.000	1.300.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kawunganten
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kawunganten
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	28.800.000	28.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kawunganten
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	7.788.000	7.788.000	-				Puskesmas Kawunganten
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	7.788.000	7.788.000	-				Puskesmas Kawunganten
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	-	7.788.000	7.788.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kawunganten
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.819.680.000	4.819.680.000	6.811.823.963	1.992.143.963		DAU		Puskesmas Kawunganten
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	72.000.000	72.000.000	67.500.000	(4.500.000)				Puskesmas Kawunganten
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	72.000.000	67.500.000	(4.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kawunganten
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	4.747.680.000	4.747.680.000	6.744.323.963	1.996.643.963				Puskesmas Kawunganten
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.747.680.000	4.747.680.000	6.744.323.963	1.996.643.963	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Kawunganten
	Puskesmas Kedungreja				5.216.524.000	6.134.680.750	7.122.256.817	987.576.067				Puskesmas Kedungreja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.216.524.000	6.134.680.750	7.122.256.817	987.576.067				Puskesmas Kedungreja
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				5.216.524.000	6.134.680.750	7.122.256.817	987.576.067				Puskesmas Kedungreja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	902.668.750	900.868.800	(1.799.950)				Puskesmas Kedungreja
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	-	902.668.750	900.868.800	(1.799.950)				Puskesmas Kedungreja
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	1100 orang	-	132.000.000	132.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kedungreja
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	12040 orang	-	45.000.000	45.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kedungreja
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	208 orang	-	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kedungreja
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	80 orang	-	8.000.000	8.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kedungreja
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	270.363.000	267.563.000	(2.800.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kedungreja
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	5.600.000	5.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kedungreja
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	11.300.000	17.500.000	6.200.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kedungreja
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	15.705.750	15.667.000	(38.750)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kedungreja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kedungreja
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	168.100.000	161.938.800	(6.161.200)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kedungreja
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	5 Dokumen	-	207.700.000	207.700.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kedungreja
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	2.900.000	2.900.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kedungreja
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	1.000.000	1.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kedungreja
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	11.000.000	12.000.000	1.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kedungreja
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	15.488.000	17.288.000	1.800.000				Puskesmas Kedungreja
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	15.488.000	17.288.000	1.800.000				Puskesmas Kedungreja
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	-	15.488.000	17.288.000	1.800.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kedungreja
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.216.524.000	5.216.524.000	6.204.100.017	987.576.017		DAU		Puskesmas Kedungreja
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	166.524.000	166.524.000	153.024.000	(13.500.000)				Puskesmas Kedungreja
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	166.524.000	166.524.000	153.024.000	(13.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kedungreja
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	5.050.000.000	5.050.000.000	6.051.076.017	1.001.076.017				Puskesmas Kedungreja
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	5.050.000.000	5.050.000.000	6.051.076.017	1.001.076.017	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Kedungreja
	Puskesmas Kesugihan I				3.701.564.000	4.482.711.600	4.883.836.953	401.125.353				Puskesmas Kesugihan I
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.701.564.000	4.482.711.600	4.883.836.953	401.125.353				Puskesmas Kesugihan I
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.701.564.000	4.482.711.600	4.883.836.953	401.125.353				Puskesmas Kesugihan I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	773.359.600	773.359.300	(300)				Puskesmas Kesugihan I
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	-	773.359.600	773.359.300	(300)				Puskesmas Kesugihan I
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	823 orang	-	137.700.000	137.700.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan I
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	13131 orang	-	27.200.000	23.000.000	(4.200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan I
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	154 orang	-	18.000.000	18.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan I
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	940 orang	-	19.250.000	18.000.000	(1.250.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan I
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	209.632.100	211.432.100	1.800.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan I
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	7.600.000	10.000.000	2.400.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan I
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	10.000.000	16.400.000	6.400.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan I
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	26.211.500	26.561.200	349.700	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	6.000.000	6.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan I
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	137.700.000	132.200.000	(5.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan I
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	5 Dokumen	-	155.620.000	155.620.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan I
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	5.400.000	5.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan I
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	1.046.000	1.046.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan I
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan I
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	7.788.000	7.788.000	-				Puskesmas Kesugihan I
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	7.788.000	7.788.000	-				Puskesmas Kesugihan I
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	-	7.788.000	7.788.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan I
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.701.564.000	3.701.564.000	4.102.689.653	401.125.653		DAU		Puskesmas Kesugihan I
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	74.964.000	74.964.000	65.964.000	(9.000.000)				Puskesmas Kesugihan I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	74.964.000	74.964.000	65.964.000	(9.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	3.626.600.000	3.626.600.000	4.036.725.653	410.125.653				Puskesmas Kesugihan I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.626.600.000	3.626.600.000	4.036.725.653	410.125.653	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Kesugihan I
	Puskesmas Kesugihan II				2.499.908.000	3.340.448.250	3.667.381.523	326.933.273				Puskesmas Kesugihan II
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.499.908.000	3.340.448.250	3.667.381.523	326.933.273				Puskesmas Kesugihan II
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.499.908.000	3.340.448.250	3.667.381.523	326.933.273				Puskesmas Kesugihan II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	167.800.000	165.516.000	(2.284.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan II
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	6 Dokumen	-	171.200.000	171.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan II
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3667 Orang	150 Orang	-	17.500.000	17.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan II
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	3.300.000	3.300.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan II
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	2.400.000	2.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan II
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	16.800.000	16.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan II
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85.9 %	85.9 %	-	6.788.000	6.788.000	-				Puskesmas Kesugihan II
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	6.788.000	6.788.000	-				Puskesmas Kesugihan II
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	6.788.000	6.788.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan II
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.499.908.000	2.499.908.000	2.826.841.523	326.933.523		DAU		Puskesmas Kesugihan II
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	110.808.000	110.808.000	101.808.000	(9.000.000)				Puskesmas Kesugihan II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	110.808.000	110.808.000	101.808.000	(9.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kesugihan II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	2.389.100.000	2.389.100.000	2.725.033.523	335.933.523				Puskesmas Kesugihan II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.389.100.000	2.389.100.000	2.725.033.523	335.933.523	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Kesugihan II
	Puskesmas Kroya I				5.635.432.000	6.563.466.000	6.828.640.993	265.174.993				Puskesmas Kroya I
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.635.432.000	6.563.466.000	6.828.640.993	265.174.993				Puskesmas Kroya I
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				5.635.432.000	6.563.466.000	6.828.640.993	265.174.993				Puskesmas Kroya I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	920.646.000	920.646.000	-				Puskesmas Kroya I
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	-	920.646.000	920.646.000	-				Puskesmas Kroya I
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	1001 orang	-	250.800.000	250.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya I
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	11802 orang	-	40.800.000	40.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya I
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	60 orang	-	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya I
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	913 orang	-	24.800.000	24.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya I
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	206.946.000	206.946.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya I
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	8.300.000	8.300.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya I
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	14.000.000	14.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya I
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	24.000.000	24.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	5.600.000	5.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya I
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	114.000.000	114.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya I
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	5 Dokumen	-	187.400.000	187.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya I
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	3.600.000	3.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya I
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya I
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	26.400.000	26.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya I
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Kroya I
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Kroya I
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	7.388.000	7.388.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya I
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.635.432.000	5.635.432.000	5.900.606.993	265.174.993		DAU		Puskesmas Kroya I
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	76.032.000	76.032.000	62.532.000	(13.500.000)				Puskesmas Kroya I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	76.032.000	76.032.000	62.532.000	(13.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	5.559.400.000	5.559.400.000	5.838.074.993	278.674.993				Puskesmas Kroya I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	5.559.400.000	5.559.400.000	5.838.074.993	278.674.993	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Kroya I
	Puskesmas Kroya II				2.599.524.000	3.269.876.000	3.310.993.779	41.117.779				Puskesmas Kroya II
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.599.524.000	3.269.876.000	3.310.993.779	41.117.779				Puskesmas Kroya II
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.599.524.000	3.269.876.000	3.310.993.779	41.117.779				Puskesmas Kroya II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40% 100% 22% 75% 100%	14 Upaya	-	660.720.000	660.720.000	-				Puskesmas Kroya II
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	840 orang	-	660.720.000	660.720.000	-				Puskesmas Kroya II
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	41.900 orang	-	67.200.000	67.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya II
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	107 orang	-	54.000.000	54.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya II
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	70 orang	-	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya II
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	5 Dokumen	-	13.800.000	13.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya II
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	1 Dokumen	-	196.820.000	196.820.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya II
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya II
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	12.800.000	12.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya II
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	15.200.000	15.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	2.400.000	2.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya II
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	88.600.000	88.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya II
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1 Dokumen	-	168.600.000	168.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya II
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	2.900.000	2.900.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya II
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya II
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	14.400.000	14.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya II
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85.9 %	1 Laporan	-	9.632.000	9.632.000	-				Puskesmas Kroya II
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dokumen	-	9.632.000	9.632.000	-				Puskesmas Kroya II
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	-	9.632.000	9.632.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya II
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.599.524.000	2.599.524.000	2.640.641.779	41.117.779		DAU		Puskesmas Kroya II
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	39.024.000	39.024.000	34.524.000	(4.500.000)				Puskesmas Kroya II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	39.024.000	39.024.000	34.524.000	(4.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Kroya II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	2.560.500.000	2.560.500.000	2.606.117.779	45.617.779				Puskesmas Kroya II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.560.500.000	2.560.500.000	2.606.117.779	45.617.779	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Kroya II
	Puskesmas Majenang I				3.903.852.000	4.697.714.750	5.313.858.339	616.143.589				Puskesmas Majenang I
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.903.852.000	4.697.714.750	5.313.858.339	616.143.589				Puskesmas Majenang I
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.903.852.000	4.697.714.750	5.313.858.339	616.143.589				Puskesmas Majenang I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40% 100% 22% 75% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40% 100% 22% 75% 100%	-	784.674.750	784.674.750	-				Puskesmas Majenang I
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	-	784.674.750	784.674.750	-				Puskesmas Majenang I
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	80 orang	-	122.400.000	122.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang I
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	12.097 orang	-	31.000.000	31.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang I
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	9 orang	-	7.200.000	7.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang I
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	69 orang	-	18.500.000	18.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang I
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	255.569.750	255.569.750	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang I
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	11.100.000	11.100.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang I
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	11.200.000	11.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang I
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	16.945.000	16.945.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	3.600.000	3.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang I
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	140.700.000	140.700.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang I
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	7 Dokumen	-	145.860.000	145.860.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang I
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	2.400.000	2.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang I
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	200.000	200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang I
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	18.000.000	18.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang I
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	9.188.000	9.188.000	-				Puskesmas Majenang I
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	9.188.000	9.188.000	-				Puskesmas Majenang I
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	9.188.000	9.188.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang I
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.903.852.000	3.903.852.000	4.519.995.589	616.143.589		DAU		Puskesmas Majenang I
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	74.352.000	74.352.000	65.352.000	(9.000.000)				Puskesmas Majenang I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	74.352.000	74.352.000	65.352.000	(9.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	3.829.500.000	3.829.500.000	4.454.643.589	625.143.589				Puskesmas Majenang I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.829.500.000	3.829.500.000	4.454.643.589	625.143.589	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Majenang I
	Puskesmas Majenang II				3.387.872.000	4.316.712.000	4.381.160.393	64.448.393				Puskesmas Majenang II
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.387.872.000	4.316.712.000	4.381.160.393	64.448.393				Puskesmas Majenang II
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.387.872.000	4.316.712.000	4.381.160.393	64.448.393				Puskesmas Majenang II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	908.752.000	922.652.000	13.900.000				Puskesmas Majenang II
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	-	908.752.000	922.652.000	13.900.000				Puskesmas Majenang II
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	1920 orang	-	182.400.000	182.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang II
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	9974 orang	-	57.800.000	57.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang II
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	12 orang	-	14.400.000	14.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang II
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	1103 orang	-	29.200.000	29.290.000	90.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang II
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	187.562.000	187.562.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang II
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	4.500.000	4.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang II
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	15.400.000	31.600.000	16.200.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang II
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	17.190.000	18.800.000	1.610.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang II
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	220.200.000	202.300.000	(17.900.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang II
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	5 Dokumen	-	154.700.000	168.600.000	13.900.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang II
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	3.600.000	3.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang II
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	1.800.000	1.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang II
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	16.000.000	16.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang II
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	20.088.000	6.188.000	(13.900.000)				Puskesmas Majenang II
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	20.088.000	6.188.000	(13.900.000)				Puskesmas Majenang II
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	20.088.000	6.188.000	(13.900.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang II
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.387.872.000	3.387.872.000	3.452.320.393	64.448.393		DAU		Puskesmas Majenang II
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	37.848.000	37.848.000	28.848.000	(9.000.000)				Puskesmas Majenang II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	37.848.000	37.848.000	28.848.000	(9.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Majenang II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	3.350.024.000	3.350.024.000	3.423.472.393	73.448.393				Puskesmas Majenang II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.350.024.000	3.350.024.000	3.423.472.393	73.448.393	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Majenang II
	Puskesmas Maos				3.755.940.000	4.694.144.600	4.997.968.129	303.823.529				Puskesmas Maos
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.755.940.000	4.694.144.600	4.997.968.129	303.823.529				Puskesmas Maos
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.755.940.000	4.694.144.600	4.997.968.129	303.823.529				Puskesmas Maos

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	930.016.600	930.016.600	-				Puskesmas Maos
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	-	930.016.600	930.016.600	-				Puskesmas Maos
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	3120 orang	-	204.000.000	204.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Maos
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	8756 orang	-	43.800.000	43.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Maos
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	50 orang	-	30.000.000	30.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Maos
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	300 orang	-	30.000.000	30.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Maos
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	229.426.600	229.426.600	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Maos
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	9.900.000	9.900.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Maos
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	16.200.000	16.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Maos
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	20.800.000	20.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Maos

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	7.200.000	7.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Maos
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	110.590.000	110.590.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Maos
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	5 Dokumen	-	198.800.000	198.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Maos
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	3.900.000	3.900.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Maos
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	1.400.000	1.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Maos
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	24.000.000	24.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Maos
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	8.188.000	8.188.000	-				Puskesmas Maos
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	8.188.000	8.188.000	-				Puskesmas Maos
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	-	8.188.000	8.188.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Maos
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.755.940.000	3.755.940.000	4.059.763.529	303.823.529		DAU		Puskesmas Maos
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	218.340.000	218.340.000	195.840.000	(22.500.000)				Puskesmas Maos
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	218.340.000	218.340.000	195.840.000	(22.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Maos
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	3.537.600.000	3.537.600.000	3.863.923.529	326.323.529				Puskesmas Maos
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.537.600.000	3.537.600.000	3.863.923.529	326.323.529	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Maos
	Puskesmas Nusawungu I				2.880.760.000	3.652.401.000	4.573.783.772	921.382.772				Puskesmas Nusawungu I
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.880.760.000	3.652.401.000	4.573.783.772	921.382.772				Puskesmas Nusawungu I
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.880.760.000	3.652.401.000	4.573.783.772	921.382.772				Puskesmas Nusawungu I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	764.253.000	764.253.000	-				Puskesmas Nusawungu I
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	-	764.253.000	764.253.000	-				Puskesmas Nusawungu I
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	1620 orang	-	205.200.000	205.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu I
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	5592 orang	-	22.200.000	22.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu I
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	18 orang	-	3.600.000	3.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu I
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	639 orang	-	11.400.000	11.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu I
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	187.113.000	187.113.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu I
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu I
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	8.600.000	8.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu I
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	13.690.000	13.590.000	(100.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	1.600.000	1.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu I
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	125.800.000	125.900.000	100.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu I
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	5 Dokumen	-	162.250.000	162.250.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu I
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	2.800.000	2.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu I
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu I
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	8.000.000	8.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu I
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Nusawungu I
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Nusawungu I
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	7.388.000	7.388.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu I
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.880.760.000	2.880.760.000	3.802.142.772	921.382.772		DAU		Puskesmas Nusawungu I
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	39.360.000	39.360.000	30.360.000	(9.000.000)				Puskesmas Nusawungu I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	39.360.000	39.360.000	30.360.000	(9.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	2.841.400.000	2.841.400.000	3.771.782.772	930.382.772				Puskesmas Nusawungu I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.841.400.000	2.841.400.000	3.771.782.772	930.382.772	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Nusawungu I
	Puskesmas Nusawungu II				2.732.926.800	3.610.551.600	4.554.448.076	943.896.476				Puskesmas Nusawungu II
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.732.926.800	3.610.551.600	4.554.448.076	943.896.476				Puskesmas Nusawungu II
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.732.926.800	3.610.551.600	4.554.448.076	943.896.476				Puskesmas Nusawungu II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	869.836.800	869.836.800	-				Puskesmas Nusawungu II
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	15 Upaya	-	869.836.800	869.836.800	-				Puskesmas Nusawungu II
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	256 orang	-	84.320.000	84.320.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu II
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	700 orang	-	26.800.000	26.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu II
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	25 orang	-	30.000.000	30.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu II
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	350 orang	-	70.000.000	70.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu II
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	181.904.600	181.904.600	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu II
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu II
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	20.800.000	21.200.000	400.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu II
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	49.512.200	49.512.200	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	7.200.000	7.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu II
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	216.300.000	215.900.000	(400.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu II
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	-	153.600.000	153.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu II
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	20 Orang	20 orang	-	1.600.000	1.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu II
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	4.800.000	4.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu II
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu II
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	16.000.000	16.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu II
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	7.788.000	7.788.000	-				Puskesmas Nusawungu II
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	7.788.000	7.788.000	-				Puskesmas Nusawungu II
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	7.788.000	7.788.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu II
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.732.926.800	2.732.926.800	3.676.823.276	943.896.476		DAU		Puskesmas Nusawungu II
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	110.926.000	110.926.000	92.926.000	(18.000.000)				Puskesmas Nusawungu II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	110.926.000	110.926.000	92.926.000	(18.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Nusawungu II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	2.622.000.800	2.622.000.800	3.583.897.276	961.896.476				Puskesmas Nusawungu II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.622.000.800	2.622.000.800	3.583.897.276	961.896.476	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Nusawungu II
	Puskesmas Patimuan				3.224.184.000	3.990.041.050	4.355.040.950	364.999.900				Puskesmas Patimuan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.224.184.000	3.990.041.050	4.355.040.950	364.999.900				Puskesmas Patimuan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.224.184.000	3.990.041.050	4.355.040.950	364.999.900				Puskesmas Patimuan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	8.400.000	8.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Patimuan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	6 Dokumen	-	127.450.000	128.794.400	1.344.400	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Patimuan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	5 Dokumen	-	182.300.000	181.300.000	(1.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Patimuan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	2.600.000	2.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Patimuan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	2.000.000	60.900.000	58.900.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Patimuan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	16.800.000	16.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Patimuan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	4.080.000	5.080.000	1.000.000				Puskesmas Patimuan
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	4.080.000	5.080.000	1.000.000				Puskesmas Patimuan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	4.080.000	5.080.000	1.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Patimuan
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.224.184.000	3.224.184.000	3.589.184.000	365.000.000		DAU		Puskesmas Patimuan
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	74.184.000	74.184.000	74.184.000	-				Puskesmas Patimuan
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	74.184.000	74.184.000	74.184.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Patimuan
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	3.150.000.000	3.150.000.000	3.515.000.000	365.000.000				Puskesmas Patimuan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.150.000.000	3.150.000.000	3.515.000.000	365.000.000	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Patimuan
	Puskesmas Sampang				2.995.894.600	3.926.619.700	4.067.240.027	140.620.327				Puskesmas Sampang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.995.894.600	3.926.619.700	4.067.240.027	140.620.327				Puskesmas Sampang
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.995.894.600	3.926.619.700	4.067.240.027	140.620.327				Puskesmas Sampang

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	4.800.000	4.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sampang
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	1 Dokumen	-	172.500.000	165.300.000	(7.200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sampang
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1 Dokumen	-	139.970.000	139.970.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sampang
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	2.700.000	2.700.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sampang
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	2.000.000	1.800.000	(200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sampang
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	24.000.000	24.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sampang
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	7.100.000	7.100.000	-				Puskesmas Sampang
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	7.100.000	7.100.000	-				Puskesmas Sampang
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	7.100.000	7.100.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sampang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.995.894.600	2.995.894.600	3.136.526.427	140.631.827		DAU		Puskesmas Sampang
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	57.120.000	57.120.000	48.120.000	(9.000.000)				Puskesmas Sampang
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	57.120.000	57.120.000	48.120.000	(9.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sampang
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	2.938.774.600	2.938.774.600	3.088.406.427	149.631.827				Puskesmas Sampang
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.938.774.600	2.938.774.600	3.088.406.427	149.631.827	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Sampang
	Puskesmas Sidareja				5.641.022.000	6.430.617.000	8.104.292.836	1.673.675.836				Puskesmas Sidareja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.641.022.000	6.430.617.000	8.104.292.836	1.673.675.836				Puskesmas Sidareja
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				5.641.022.000	6.430.617.000	8.104.292.836	1.673.675.836				Puskesmas Sidareja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	778.207.000	778.207.000	-				Puskesmas Sidareja
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	-	778.207.000	778.207.000	-				Puskesmas Sidareja
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	1.320 orang	-	157.200.000	157.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sidareja
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	12.824 orang	-	72.200.000	72.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sidareja
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	60 orang	-	6.000.000	6.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sidareja
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	160 orang	-	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sidareja
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	165.002.000	165.002.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sidareja
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	12.300.000	12.300.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sidareja
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	16.000.000	16.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sidareja
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	13.200.000	13.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sidareja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	16.800.000	16.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sidareja
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	88.655.000	88.655.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sidareja
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	5 Dokumen	-	196.940.000	196.940.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sidareja
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	2.710.000	2.710.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sidareja
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sidareja
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	7.200.000	7.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sidareja
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	11.388.000	11.388.000	-				Puskesmas Sidareja
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	11.388.000	11.388.000	-				Puskesmas Sidareja
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	11.388.000	11.388.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sidareja
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.641.022.000	5.641.022.000	7.314.697.836	1.673.675.836		DAU		Puskesmas Sidareja
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	186.048.000	186.048.000	168.048.000	(18.000.000)				Puskesmas Sidareja
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	186.048.000	186.048.000	168.048.000	(18.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Sidareja
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	5.454.974.000	5.454.974.000	7.146.649.836	1.691.675.836				Puskesmas Sidareja
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	5.454.974.000	5.454.974.000	7.146.649.836	1.691.675.836	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Sidareja
	Puskesmas Wanareja I				3.693.164.000	4.609.151.900	5.876.351.600	1.267.199.700				Puskesmas Wanareja I
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.693.164.000	4.609.151.900	5.876.351.600	1.267.199.700				Puskesmas Wanareja I
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.693.164.000	4.609.151.900	5.876.351.600	1.267.199.700				Puskesmas Wanareja I

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	1.600.000	1.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja I
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 dokumen	-	179.800.000	191.100.000	11.300.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja I
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	5 dokumen	-	221.823.400	221.823.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja I
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	3.900.000	3.900.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja I
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	800.000	400.000	(400.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja I
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	24.000.000	24.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja I
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	6.988.000	6.988.000	-				Puskesmas Wanareja I
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	6.988.000	6.988.000	-				Puskesmas Wanareja I
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 dokumen	-	6.988.000	6.988.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja I
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.693.164.000	3.693.164.000	4.960.364.000	1.267.200.000		DAU		Puskesmas Wanareja I
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	39.864.000	39.864.000	35.364.000	(4.500.000)				Puskesmas Wanareja I
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	39.864.000	39.864.000	35.364.000	(4.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja I
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	3.653.300.000	3.653.300.000	4.925.000.000	1.271.700.000				Puskesmas Wanareja I
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.653.300.000	3.653.300.000	4.925.000.000	1.271.700.000	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Wanareja I
	Puskesmas Wanareja II				1.616.652.000	2.543.636.000	3.686.453.946	1.142.817.946				Puskesmas Wanareja II
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.616.652.000	2.543.636.000	3.686.453.946	1.142.817.946				Puskesmas Wanareja II
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.616.652.000	2.543.636.000	3.686.453.946	1.142.817.946				Puskesmas Wanareja II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	-	919.596.000	919.596.000	-				Puskesmas Wanareja II
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39 Upaya layanan	14 Upaya	-	919.596.000	919.596.000	-				Puskesmas Wanareja II
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25219 Orang	630 orang	-	151.200.000	151.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja II
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266639Orang	5285 orang	-	48.000.000	48.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja II
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4552 Orang	112 orang	-	28.800.000	28.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja II
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17704 Orang	659 orang	-	28.800.000	28.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja II
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	6 Dokumen	-	217.606.000	219.006.000	1.400.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja II
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	-	8.200.000	7.400.000	(800.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja II
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	2 Dokumen	-	18.000.000	21.400.000	3.400.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja II
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	-	33.890.000	33.790.000	(100.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja II

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 Dokumen	-	8.000.000	7.200.000	(800.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja II
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	5 Dokumen	-	167.900.000	164.600.000	(3.300.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja II
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	6 Dokumen	-	185.800.000	185.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja II
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	7.800.000	7.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja II
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 Dokumen	-	1.200.000	1.400.000	200.000	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja II
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 Dokumen	-	14.400.000	14.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja II
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	85,9 %	85,9 %	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Wanareja II
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	7.388.000	7.388.000	-				Puskesmas Wanareja II
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	-	7.388.000	7.388.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja II
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.616.652.000	1.616.652.000	2.759.469.946	1.142.817.946		DAU		Puskesmas Wanareja II
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	116.184.000	116.184.000	111.684.000	(4.500.000)				Puskesmas Wanareja II
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja II
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	56.184.000	56.184.000	51.684.000	(4.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Puskesmas Wanareja II
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	1.500.468.000	1.500.468.000	2.647.785.946	1.147.317.946				Puskesmas Wanareja II
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.500.468.000	1.500.468.000	2.647.785.946	1.147.317.946	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD PUSKESMAS	Puskesmas Wanareja II
	RSUD Cilacap				222.000.000.000	217.500.000.000	245.765.997.446	28.265.997.446				RSUD Cilacap
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				222.000.000.000	217.500.000.000	245.765.997.446	28.265.997.446				RSUD Cilacap
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				222.000.000.000	217.500.000.000	245.765.997.446	28.265.997.446				RSUD Cilacap

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, Puskesmas pembantu dan pusing dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	7.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	-				RSUD Cilacap
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41 Unit	41 Unit	7.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	-				RSUD Cilacap
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	5.000.000.000	2.500.000.000	-	(2.500.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		RSUD Cilacap
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	2.000.000.000	-	2.500.000.000	2.500.000.000	Kab. Cilacap	DAU		RSUD Cilacap
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	215.000.000.000	215.000.000.000	243.265.997.446	28.265.997.446		DAU		RSUD Cilacap
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan			7.560.089.000	7.560.089.000				RSUD Cilacap
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2816Orang/bulan	2816Orang/bulan			7.560.089.000	7.560.089.000	Kab. Cilacap	DAU		RSUD Cilacap
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	215.000.000.000	215.000.000.000	235.705.908.446	20.705.908.446				RSUD Cilacap
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	215.000.000.000	215.000.000.000	235.705.908.446	20.705.908.446	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD RSUD	RSUD Cilacap
	RSUD Majenang				103.703.016.000	101.998.140.800	111.070.159.472	9.072.018.672				RSUD Majenang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				103.703.016.000	101.998.140.800	111.070.159.472	9.072.018.672				RSUD Majenang

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				103.703.016.000	101.998.140.800	111.070.159.472	9.072.018.672				RSUD Majenang
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB/Potensi KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase desa/kelurahan STBM Jumlah Warga Negara usia produktif	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	90.17 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	3.703.016.000	1.998.140.800	1.998.140.800	-				RSUD Majenang
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41 Unit	41 Unit	3.703.016.000	1.998.140.800	1.998.140.800	-				RSUD Majenang
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	3.703.016.000	1.998.140.800	1.998.140.800	-	Kab. Cilacap	DAU		RSUD Majenang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100.000.000.000	100.000.000.000	109.072.018.672	9.072.018.672		DAU		RSUD Majenang
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan			3.339.911.000	3.339.911.000				RSUD Majenang
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2816Orang/bulan	2816Orang/bulan			3.339.911.000	3.339.911.000	Kab. Cilacap	DAU		RSUD Majenang
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melaksanakan Peningkatan pelayanan BLUD	1 UPTD	1 UPTD	100.000.000.000	100.000.000.000	105.732.107.672	5.732.107.672				RSUD Majenang
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100.000.000.000	100.000.000.000	105.732.107.672	5.732.107.672	Kab. Cilacap	PAD	Silpa BLUD RSUD	RSUD Majenang
	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air				89.988.227.272	44.441.883.174	46.147.079.028	1.705.195.854				Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				89.988.227.272	44.441.883.174	46.147.079.028	1.705.195.854				Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				89.988.227.272	44.441.883.174	46.147.079.028	1.705.195.854				Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan penunjang data SDA Persentase pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air	61.3 % 10.50 %	61.3 % 10.50 %	57.685.000.000	21.892.532.000	24.322.476.450	2.429.944.450				Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusun dan terlaksananya paket pekerjaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada tahun n	100 %	100 %	41.485.000.000	12.105.000.000	11.942.476.450	(162.523.550)				Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	5 Lembaga	5 Lembaga	125.000.000	125.000.000	62.483.400	(62.516.600)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	5 Lembaga	5 Lembaga	200.000.000	200.000.000	99.993.050	(100.006.950)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1,6 KM	1,06 KM	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	5,59 KM	0,12 KM	4.600.000.000	150.000.000	150.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Titik	1 Titik	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	15,48 KM	3,26 KM	19.775.000.000	4.225.000.000	4.225.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,79 KM	0,59 KM	4.600.000.000	860.000.000	860.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	7,43 KM	3,14 KM	9.560.000.000	4.070.000.000	4.070.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	4 Titik	5 TITIK	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusun dan terlaksananya paket pekerjaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada tahun n	100 %	100 %	16.200.000.000	9.787.532.000	12.380.000.000	2.592.468.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	3,16 KM	2,85 km	3.950.000.000	3.707.532.000	2.650.000.000	(1.057.532.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	8 KM	3,69 km	10.950.000.000	4.780.000.000	8.530.000.000	3.750.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,6 KM	1,01 km	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	3 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000	300.000.000	200.000.000	(100.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	94,24 %	94,24 %	7.000.000.000	2.400.000.000	2.361.862.250	(38.137.750)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola dan dikembangkan	3862 Sistem	351 sistem	7.000.000.000	2.400.000.000	2.361.862.250	(38.137.750)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	150.000.000	111.862.250	(38.137.750)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2,5Liter/Detik	2,5Liter/Detik	4.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit	100.000.000	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	890 SR	156 sr	2.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam keadaan baik	93,6 %	93,6 %	7.656.500.000	2.550.000.000	2.550.000.000	-	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Drainase dalam keadaan Baik	93,6 %	93,6 %	7.656.500.000	2.550.000.000	2.550.000.000	-	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2500 M	1423 m	1.662.500.000	880.000.000	880.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.06.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	9700 M	2074 m	5.344.000.000	1.170.000.000	1.170.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	2 Sistem Drainase Lingkungan	-	150.000.000	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	15 Sistem Drainase Perkotaan	15 sistem	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	17.646.727.272	17.599.351.174	16.912.740.328	(686.610.846)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Dinas PSDA Kab. Cilacap	12 Bulan	12 Bulan	10.542.542.294	10.995.166.196	10.989.361.140	(5.805.056)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101Orang/bulan	101 orang/ bulan	10.542.542.294	10.995.166.196	10.989.361.140	(5.805.056)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Dinas PSDA Kab. Cilacap	12 Bulan	12 Bulan	175.000.000	175.000.000	162.500.000	(12.500.000)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	250 Paket	250 paket	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	25.000.000	25.000.000	12.500.000	(12.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Dinas PSDA Kab. Cilacap	12 Bulan	12 Bulan	1.613.988.220	1.613.988.220	1.097.582.430	(516.405.790)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	159.999.620	159.999.620	128.903.780	(31.095.840)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	483.374.000	483.374.000	483.374.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	85.615.500	85.615.500	42.807.750	(42.807.750)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	12 Laporan	884.999.100	884.999.100	442.496.900	(442.502.200)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia	59 Unit	59 Unit	328.932.410	328.932.410	328.932.410	-	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	24 Unit	199.434.660	199.434.660	199.434.660	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit	35 Unit	129.497.750	129.497.750	129.497.750	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	4.065.101.500	3.565.101.500	3.422.601.500	(142.500.000)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	203.377.500	203.377.500	200.377.500	(3.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.861.724.000	3.361.724.000	3.222.224.000	(139.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	309 Unit	309 Unit	881.162.848	881.162.848	871.762.848	(9.400.000)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	69 Unit	498.437.500	498.437.500	498.437.500	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	101 Unit	101 Unit	25.250.000	25.250.000	25.250.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 Unit	134 Unit	77.475.900	77.475.900	77.475.900	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	279.999.448	279.999.448	270.599.448	(9.400.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				370.848.294.509	284.076.545.355	241.135.468.179	(42.941.077.176)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				370.348.294.509	283.576.545.355	240.561.702.344	(43.014.843.011)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				333.273.140.863	263.830.083.971	221.042.912.314	(42.787.171.657)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase penanganan sampah	69.05 %	69.05 %	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani oleh pembangunan dan peningkatan TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS	19000 Rumah Tangga	19000 Rumah Tangga	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	473 Ton/hari	473 Ton/hari	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	94 % 100 %	93,97 %	5.144.346.354	13.389.350.354	13.350.724.174	(38.626.180)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dikelola dan dikembangkan	931 sistem	1439 sistem	5.144.346.354	13.389.350.354	13.350.724.174	(38.626.180)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	36.999.650	(13.000.350)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	216 RumahTangga	216 RumahTangga	31.200.000	31.200.000	31.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	2 Unit	75.000.000	75.000.000	74.724.750	(275.250)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	931 RumahTangga	1439 RumahTangga	4.888.146.354	13.133.150.354	13.133.150.354	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	25 Orang	648 Orang	50.000.000	50.000.000	24.999.650	(25.000.350)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	49.649.770	(350.230)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik	75.10 %	75.10 %	32.473.500.000	33.473.500.000	18.985.686.642	(14.487.813.358)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung yang ditangani	20 Unit	23 Unit	32.473.500.000	33.473.500.000	18.985.686.642	(14.487.813.358)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	6 Bangunan Gedung C	6 Bangunan Gedung C	100.000.000	100.000.000	49.968.230	(50.031.770)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	18 Bangunan Gedung	20 Bangunan Gedung	12.223.500.000	12.223.500.000	11.973.500.000	(250.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	13 Dokumen	19.950.000.000	20.950.000.000	6.787.762.932	(14.162.237.068)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	60 Dokumen	60 Dokumen	200.000.000	200.000.000	174.455.480	(25.544.520)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	70 %	0,7	262.713.428.500	185.452.510.000	159.011.100.324	(26.441.409.676)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten yang ditangani	305.66 Km	332,916 Km	262.713.428.500	185.452.510.000	159.011.100.324	(26.441.409.676)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	525.000.000	525.000.000	512.492.060	(12.507.940)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0,707 Km	0,2 Km	4.726.800.000	4.300.000.000	1.606.409.000	(2.693.591.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	65.067 Km	58,878 Km	204.536.628.500	133.652.510.000	109.947.397.264	(23.705.112.736)	Kab. Cilacap	DAU	Sisa DBH Sawit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	8,013 Km	9,43 Km	15.000.000.000	10.000.000.000	11.639.842.000	1.639.842.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2 Jembatan	2 Jembatan	3.000.000.000	3.000.000.000	2.511.748.000	(488.252.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	2 Jembatan	12.000.000.000	12.000.000.000	10.568.212.000	(1.431.788.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1287.375 Km	1287.375 Km	200.000.000	200.000.000	100.000.000	(100.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4,129 Km	2,957 Km	7.725.000.000	6.775.000.000	5.625.000.000	(1.150.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	240,44 Km	264,444 Km	15.000.000.000	15.000.000.000	16.500.000.000	1.500.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	41.43 %	41.43 %	700.000.000	700.000.000	296.838.550	(403.161.450)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi	1 kali	1 kali	200.000.000	200.000.000	70.000.000	(130.000.000)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	250 Orang	70 Orang	200.000.000	200.000.000	70.000.000	(130.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	2 Dokumen	172.000.000	172.000.000	85.838.550	(86.161.450)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	72.000.000	72.000.000	35.846.000	(36.154.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	100.000.000	100.000.000	49.992.550	(50.007.450)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	250.000.000	100.000.000	(150.000.000)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	250.000.000	100.000.000	(150.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	4 Dokumen	2 Dokumen	78.000.000	78.000.000	41.000.000	(37.000.000)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	100 Lembaga	100 Lembaga	40.000.000	40.000.000	22.000.000	(18.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	38.000.000	38.000.000	19.000.000	(19.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	91 %	91 %	885.000.000	885.000.000	640.849.100	(244.150.900)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana Tata Ruang yang tersusun (RTRW dan RDTR)	5 Dokumen	3 Dokumen	690.000.000	690.000.000	359.914.940	(330.085.060)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Adminstrasi Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	650.000.000	650.000.000	339.938.520	(310.061.480)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	2 Laporan	2 Laporan	40.000.000	40.000.000	19.976.420	(20.023.580)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin rekomendasi teknis pemanfaatan ruang	40 Ijin	40 Ijin	195.000.000	195.000.000	280.934.160	85.934.160				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	195.000.000	195.000.000	280.934.160	85.934.160	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	31.156.866.009	29.729.723.617	28.557.713.524	(1.172.010.093)		DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000	40.000.000	30.900.000	(9.100.000)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	25.000.000	19.750.000	(5.250.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	15.000.000	11.150.000	(3.850.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Dinas PSDA Kab. Cilacap	12 Bulan	12 Bulan	22.645.318.009	21.218.175.617	20.767.633.824	(450.541.793)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101Orang/bulan	172Orang/bulan	22.645.318.009	21.218.175.617	20.767.633.824	(450.541.793)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Dinas PSDA Kab. Cilacap	12 Bulan	330 orang	259.000.000	259.000.000	210.500.000	(48.500.000)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	250 Paket	1 paket	234.000.000	234.000.000	198.000.000	(36.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	25.000.000	25.000.000	12.500.000	(12.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Dinas PSDA Kab. Cilacap	12 Bulan	12 Bulan	1.777.000.000	1.777.000.000	1.273.337.560	(503.662.440)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 paket	197.000.000	197.000.000	158.338.060	(38.661.940)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	1 paket	650.000.000	650.000.000	650.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 paket	130.000.000	130.000.000	64.999.900	(65.000.100)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	12 laporan	800.000.000	800.000.000	399.999.600	(400.000.400)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia	59 Unit	28 unit	300.000.000	300.000.000	299.950.530	(49.470)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	28 unit	300.000.000	300.000.000	299.950.530	(49.470)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	4.625.548.000	4.625.548.000	4.465.648.000	(159.900.000)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	558.000.000	558.000.000	558.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.067.548.000	4.067.548.000	3.907.648.000	(159.900.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	309 Unit	200 Unit	1.510.000.000	1.510.000.000	1.509.743.610	(256.390)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	81 Unit	735.000.000	735.000.000	734.843.100	(156.900)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 Unit	119 Unit	375.000.000	375.000.000	374.900.510	(99.490)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	8 Unit	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				37.075.153.646	19.746.461.384	19.518.790.030	(227.671.354)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Warga Negara Korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	100 %	5.724.674.687	5.293.174.937	4.936.462.500	(356.712.437)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	7 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000	40.000.000	38.650.160	(1.349.840)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000	10.000.000	9.675.140	(324.860)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000	10.000.000	9.649.940	(350.060)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000	10.000.000	9.675.140	(324.860)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000	10.000.000	9.649.940	(350.060)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terbangun atau terehabilitasi	135 unit	35 unit	5.675.949.750	5.244.450.000	4.889.450.000	(355.000.000)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	35 UnitRumah	35 UnitRumah	1.177.499.750	746.000.000	746.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	40 Unit Rumah	26 Unit Rumah	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	35 Unit Rumah	35 Unit Rumah	3.998.450.000	3.998.450.000	3.643.450.000	(355.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	8.724.937	8.724.937	8.362.340	(362.597)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	8.724.937	8.724.937	8.362.340	(362.597)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	90,31 %	90,31 %	10.298.286.447	4.838.286.447	4.579.142.910	(259.143.537)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	58 peningkatan	57,54 hektar	10.298.286.447	4.838.286.447	4.579.142.910	(259.143.537)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	500 UnitRumah	266 Unit RumahRuma	9.780.000.000	4.320.000.000	4.320.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Laporan	3 Laporan	518.286.447	518.286.447	259.142.910	(259.143.537)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	88 % 89 %	88 %	20.952.192.512	9.515.000.000	9.903.584.940	388.584.940				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi PSU Perumahan yang ditingkatkan	34 Kawasan	61 lokasi	20.952.192.512	9.515.000.000	9.903.584.940	388.584.940				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	4 Dokumen	1 Dokumen	37.500.000	37.500.000	36.335.160	(1.164.840)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	33 Lokasi	61 lokasi	20.892.192.512	9.455.000.000	9.845.000.000	390.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	22.500.000	22.500.000	22.249.780	(250.220)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	75 %	75 %	100.000.000	100.000.000	99.599.680	(400.320)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Meningkatnya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	75 sertifikasi	10 sertifikasi	100.000.000	100.000.000	99.599.680	(400.320)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	99.599.680	(400.320)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				500.000.000	500.000.000	573.765.835	73.765.835				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				500.000.000	500.000.000	573.765.835	73.765.835				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 %	100 %	300.000.000	300.000.000	215.261.830	(84.738.170)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 penyelesaian	5 penyelesaian	300.000.000	300.000.000	215.261.830	(84.738.170)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumrn	5 Dokumrn	200.000.000	200.000.000	165.261.870	(34.738.130)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumrn	5 Dokumrn	100.000.000	100.000.000	49.999.960	(50.000.040)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian maslah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	36.507.870	(13.492.130)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	36.507.870	(13.492.130)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	36.507.870	(13.492.130)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	297.005.980	197.005.980				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	2 Dokumen	100.000.000	100.000.000	297.005.980	197.005.980				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subjek Penerimaan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	50.000.000	248.502.990	198.502.990	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	48.502.990	(1.497.010)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Presentase Pembinaan Tertib Adminstrasi Pertanahan	44 %	44 %	50.000.000	50.000.000	24.990.155	(25.009.845)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	240 penggunaan	240 penggunaan	50.000.000	50.000.000	24.990.155	(25.009.845)				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	24.990.155	(25.009.845)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Satuan Polisi Pamong Praja				17.885.642.204	17.852.072.299	18.795.466.360	943.394.061				Satuan Polisi Pamong Praja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.885.642.204	17.852.072.299	18.795.466.360	943.394.061				Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				17.885.642.204	17.852.072.299	18.795.466.360	943.394.061				Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Jumlah Warga Negara Yang memperoleh Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Persentase Linmas yang Dibina	100% % 100 % 1003.5 %	100% % 100 % 1003.5 %	1.269.668.400	1.832.768.400	1.714.844.880	(117.923.520)				Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan aktifitas Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan aktifitas Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	950 Kasus 12 Laporan	950 Kasus 12 Laporan	1.209.668.400	1.097.768.400	1.005.144.880	(92.623.520)				Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000	35.000.000	-	(35.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	250 Orang	150 Orang	50.000.000	50.000.000	30.926.200	(19.073.800)	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1 laporan	1 laporan	779.768.400	695.768.400	671.598.400	(24.170.000)	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	600 Laporan	600 Laporan	37.000.000	37.000.000	22.620.280	(14.379.720)	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	307.900.000	280.000.000	280.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	735.000.000	709.700.000	(25.300.000)				Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000	720.000.000	698.750.000	(21.250.000)	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	10.950.000	(4.050.000)	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100%	100%	3.182.359.340	2.195.453.400	2.519.023.450	323.570.050				Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen	2.711.998.340	2.053.592.400	2.397.096.980	343.504.580				Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	20.000.000	8.000.000	(12.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000	350.000.000	335.808.400	(14.191.600)	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan, Layanan Call Center 112	2 Desa/Kelurahan, Layanan Call Center 112	25.000.000	25.000.000	275.000.000	250.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	8 Unit	8 Unit	2.251.998.340	1.608.592.400	1.728.288.580	119.696.180	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	28.861.000	28.861.000	16.800.000	(12.061.000)				Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	5 Dokumen	5 Dokumen	28.861.000	28.861.000	16.800.000	(12.061.000)	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	Orang	441.500.000	113.000.000	105.126.470	(7.873.530)				Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	70 Orang	70 Orang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa / Kelurahan	5 Desa / Kelurahan	25.000.000	25.000.000	17.126.470	(7.873.530)	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	12 Dokumen	12 Dokumen	401.500.000	73.000.000	73.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	13.433.614.464	13.823.850.499	14.561.598.030	737.747.531		DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	26.900.000	26.900.000	17.800.000	(9.100.000)				Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	16.750.000	16.750.000	11.500.000	(5.250.000)	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	10.150.000	10.150.000	6.300.000	(3.850.000)	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	8.359.675.584	8.749.911.619	9.325.564.870	575.653.251				Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62Orang/bulan	62Orang/bulan	8.359.675.584	8.749.911.619	9.325.564.870	575.653.251	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100% %	100% %	192.000.000	192.000.000	191.784.230	(215.770)				Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	192.000.000	192.000.000	191.784.230	(215.770)	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	653.215.000	653.215.000	419.008.850	(234.206.150)				Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	82.215.000	82.215.000	61.008.850	(21.206.150)	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	26.000.000	26.000.000	13.000.000	(13.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	500.000.000	500.000.000	300.000.000	(200.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100% %	100% %	3.721.823.880	3.721.823.880	4.127.470.080	405.646.200				Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	176.225.120	176.225.120	201.225.120	25.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.545.598.760	3.545.598.760	3.926.244.960	380.646.200	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	480.000.000	480.000.000	479.970.000	(30.000)				Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	29 Unit	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit	30.000.000	30.000.000	29.970.000	(30.000)	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Satuan Polisi Pamong Praja
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				9.598.720.649	10.063.900.289	10.065.053.387	1.153.098				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.598.720.649	10.063.900.289	10.065.053.387	1.153.098				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.598.720.649	10.063.900.289	10.065.053.387	1.153.098				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1.243.814.010	1.117.768.970	1.197.693.785	79.924.815				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan informasi rawan bencana	7 Kegiatan	7 Kegiatan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	375 Orang	375 Orang	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	7 Kegiatan	7 Kegiatan	412.296.130	351.296.130	211.425.985	(139.870.145)				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	109 Unit	21 Unit	99.827.290	99.827.290	82.154.050	(17.673.240)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	60 Orang	47.999.640	47.999.640	27.571.840	(20.427.800)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000	95.000.000	47.475.255	(47.524.745)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maktumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	5 laporan	5 laporan	61.000.000	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 Kawasan	1 Kawasan	108.469.200	108.469.200	54.224.840	(54.244.360)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	810 Kegiatan	810 Kegiatan	191.295.680	143.867.540	288.767.230	144.899.690				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	87460 Orang	87460 Orang	191.295.680	143.867.540	288.767.230	144.899.690	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya cakupan daerah yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi	17 Kegiatan	17 Kegiatan	565.222.200	547.605.300	622.500.570	74.895.270				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	12 Dokumen	12 Dokumen	87.219.000	87.219.000	162.114.270	74.895.270	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	478.003.200	460.386.300	460.386.300	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	8.354.906.639	8.946.131.319	8.867.359.602	(78.771.717)		DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	31.435.700	31.435.700	21.585.700	(9.850.000)				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	18.000.000	18.000.000	12.000.000	(6.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	13.435.700	13.435.700	9.585.700	(3.850.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.613.750.139	6.204.974.819	6.361.432.972	156.458.153				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62Orang/bulan	62Orang/bulan	5.613.750.139	6.204.974.819	6.361.432.972	156.458.153	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100% %	100% %	51.000.000	51.000.000	51.000.000	-				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	51.000.000	51.000.000	51.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	727.340.050	727.340.050	530.960.180	(196.379.870)				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	112.510.500	112.510.500	116.130.030	3.619.530	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	174.829.800	174.829.800	174.829.800	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	100 Laporan	399.999.750	399.999.750	200.000.350	(199.999.400)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100% %	100% %	1.393.376.500	1.393.376.500	1.330.376.500	(63.000.000)				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	201.049.500	201.049.500	201.049.500	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.192.327.000	1.192.327.000	1.129.327.000	(63.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	538.004.250	538.004.250	572.004.250	34.000.000				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	54 Unit	387.155.850	387.155.850	401.155.850	14.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	121 Unit	110.950.000	110.950.000	130.950.000	20.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5 Unit	39.898.400	39.898.400	39.898.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				13.784.193.482	15.347.187.740	16.971.411.316	1.624.223.576				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.500.310.152	12.762.644.410	13.484.215.551	721.571.141				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				11.500.310.152	12.762.644.410	13.484.215.551	721.571.141				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase TKSK, PSM, Orsos dan LKS yang dibina	100%	23.76%	1.102.155.060	1.012.155.060	823.690.435	(188.464.625)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS dan non PSKS yang terbina	776 orang	274 Orang	1.102.155.060	1.012.155.060	823.690.435	(188.464.625)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	24 Orang	448.447.000	448.447.000	390.723.500	(57.723.500)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Keluarga	90 Keluarga	267.828.650	227.828.650	135.089.325	(92.739.325)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	98 Lembaga	98 Lembaga	367.646.010	317.646.010	288.760.910	(28.885.100)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Sertifikat	70 Sertifikat	18.233.400	18.233.400	9.116.700	(9.116.700)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang direhabilitasi	100 % 0.34 %	100 % 0.34 %	923.977.500	883.086.200	879.781.170	(3.305.030)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS yang dibantu	1009 orang	934 orang	677.853.800	677.853.800	675.003.515	(2.850.285)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	330 Orang	330 Orang	178.151.300	178.151.300	177.698.650	(452.650)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	30.413.700	30.413.700	29.926.950	(486.750)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	117.578.100	117.578.100	117.357.335	(220.765)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	11.000.000	11.000.000	10.772.400	(227.600)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	92.384.300	92.384.300	92.384.300	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	144 Orang	144 Orang	30.000.000	30.000.000	29.762.600	(237.400)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	5.000.000	5.000.000	4.752.700	(247.300)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	25 Orang	176.468.700	176.468.700	176.468.700	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	12.998.400	12.998.400	12.764.530	(233.870)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	5.000.000	5.000.000	4.752.700	(247.300)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	10.999.700	10.999.700	10.750.750	(248.950)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang	7.859.600	7.859.600	7.611.900	(247.700)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS lainnya yang dibantu	326 orang	385 orang	246.123.700	205.232.400	204.777.655	(454.745)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	24 Orang	25.994.600	25.994.600	25.994.600	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	24 Orang	9.987.500	9.987.500	9.764.805	(222.695)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	8 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang	29 Orang	142.436.300	101.545.000	101.545.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	300 Orang	62.705.300	62.705.300	62.473.250	(232.050)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100 %	100%	364.243.450	1.501.901.150	2.114.586.603	612.685.453				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PPKS dan DTKS	2 dokumen	2 dokumen	364.243.450	1.501.901.150	2.114.586.603	612.685.453				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	50,000Orang	50,000 orang	306.357.450	306.357.450	266.778.725	(39.578.725)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Keluarga	990 Keluarga	22.886.000	1.168.189.100	1.821.047.758	652.858.658	Kab. Cilacap	DAK		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	8 Orang	35.000.000	27.354.600	26.760.120	(594.480)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	100%	708.916.150	688.647.530	823.488.965	134.841.435				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan	10000 orang	10000 Orang	491.040.100	470.771.480	714.550.940	243.779.460				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	10000 Orang	10000 Orang	351.517.500	351.517.500	601.517.500	250.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	24.723.000	24.723.000	24.723.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Unit	3 Unit	24.000.000	24.000.000	22.800.000	(1.200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Orang	150 Orang	80.799.600	60.530.980	60.510.440	(20.540)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang	11 Orang	10.000.000	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang terbina	6 kampung	2 Kampung	217.876.050	217.876.050	108.938.025	(108.938.025)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Kampung	2 Kampung	160.578.780	160.578.780	80.289.390	(80.289.390)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	4 Orang	57.297.270	57.297.270	28.648.635	(28.648.635)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	60.25 %	60.25%	40.949.840	40.949.840	40.849.920	(99.920)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang memenuhi standar	11 komponen	11 komponen	40.949.840	40.949.840	40.849.920	(99.920)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	77 Makam	77 Makam	40.949.840	40.949.840	40.849.920	(99.920)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	8.360.068.152	8.635.904.630	8.801.818.458	165.913.828		DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	34.999.750	34.999.750	34.999.750	-				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	19.999.910	19.999.910	19.999.910	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	14.999.840	14.999.840	14.999.840	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	5.602.796.005	5.878.632.483	6.239.805.936	361.173.453				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38Orang/bulan	38Orang/bulan	5.602.796.005	5.878.632.483	6.239.805.936	361.173.453	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang terfasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	141 orang	138 orang	111.000.000	111.000.000	96.000.000	(15.000.000)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	135 Paket	135 Paket	81.000.000	81.000.000	81.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	3 orang	30.000.000	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	1.053.071.540	1.053.071.540	768.851.915	(284.219.625)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	160.116.380	160.116.380	131.146.635	(28.969.745)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	282.455.400	282.455.400	332.455.400	50.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	55.499.760	55.499.760	27.749.880	(27.749.880)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	200 Laporan	555.000.000	555.000.000	277.500.000	(277.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6 unit	6 unit	55.139.950	55.139.950	55.139.950	-				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	55.139.950	55.139.950	55.139.950	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	1.061.205.241	1.061.205.241	1.003.705.241	(57.500.000)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	176.130.241	176.130.241	180.130.241	4.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	885.075.000	885.075.000	823.575.000	(61.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	108 unit	108 unit	441.855.666	441.855.666	603.315.666	161.460.000				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit	26 unit	259.999.670	259.999.670	259.999.670	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	79 unit	54.127.500	54.127.500	147.587.500	93.460.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 unit	127.728.496	127.728.496	195.728.496	68.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.283.883.330	2.584.543.330	3.487.195.765	902.652.435				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.283.883.330	2.584.543.330	3.487.195.765	902.652.435				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rasio Program dan Kegiatan Responsif Gender di Perangkat Daerah Persentase Organisasi Wanita Yang Aktif	96 % 99%	96 % 99%	1.461.675.000	1.361.675.000	2.344.949.400	983.274.400				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perencana Dalam Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	54 Orang	54 Orang	60.000.000	60.000.000	53.312.200	(6.687.800)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000	23.312.200	(6.687.800)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	60 Orang	60 Orang	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang dilakukan pembinaan di bidang politik, ekonomi dan organisasi	1160 orang	5960 orang	1.401.675.000	1.301.675.000	2.291.637.200	989.962.200				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	995.000.000	995.000.000	1.934.962.200	939.962.200	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Organisasi	35 Organisasi	406.675.000	306.675.000	356.675.000	50.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha	57 %	57 %	85.210.100	85.210.100	24.837.800	(60.372.300)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pencegahan dan penanggulangan Tindak Perdagangan orang (TPPO)	54 orang	54 orang	30.210.100	30.210.100	-	(30.210.100)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10.210.100	10.210.100	-	(10.210.100)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	-	(20.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang dibina dalam ketrampilan dan berwirausaha	54 Orang	54 Orang	55.000.000	55.000.000	24.837.800	(30.162.200)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	9.837.800	(10.162.200)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	35.000.000	15.000.000	(20.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kecamatan desa / kelurahan yang memiliki puspa	76 %	76 %	165.000.000	165.000.000	155.000.000	(10.000.000)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pembinaan dan sosialisasi dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan Hak anak	900 Orang	900 Orang	165.000.000	165.000.000	155.000.000	(10.000.000)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	4 Dokumen	110.000.000	110.000.000	100.000.000	(10.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian desa / kelurahan layak anak	47 %	47 %	123.998.790	123.998.790	111.889.640	(12.109.150)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak anak (PHA) yang terfasilitasi	3 Lembaga	3 Lembaga	77.998.970	77.998.970	92.041.940	14.042.970				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	65Organisasi	65Organisasi	52.999.990	52.999.990	72.999.990	20.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	24.998.980	24.998.980	19.041.950	(5.957.030)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	6 kegiatan	6 kegiatan	45.999.820	45.999.820	19.847.700	(26.152.120)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	25.999.940	25.999.940	13.093.700	(12.906.240)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	19.999.880	19.999.880	6.754.000	(13.245.880)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang di tangani terkait kabupaten	0,000205 %	0,000205 %	447.999.440	848.659.440	850.518.925	1.859.485				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pencegahan bagi anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten	100 orang	100 orang	19.999.840	121.499.840	187.200.575	65.700.735				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	100 Orang	100 Orang	19.999.840	121.499.840	187.200.575	65.700.735	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan dan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 Orang	100 Orang	124.999.930	194.019.930	179.613.450	(14.406.480)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	100 Orang	100 Orang	124.999.930	194.019.930	179.613.450	(14.406.480)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak dan gugus tugas perlindungan anak yang terbentuk	7 kelompok	7 kelompok	302.999.670	533.139.670	483.704.900	(49.434.770)				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	102.999.670	102.999.670	53.564.900	(49.434.770)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	15 Orang	15 Orang	200.000.000	430.140.000	430.140.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian				14.818.904.404	17.773.095.896	17.271.586.623	(501.509.273)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.544.762.804	14.468.954.296	14.113.517.433	(355.436.863)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				12.544.762.804	14.468.954.296	14.113.517.433	(355.436.863)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	32 %	32 %	3.729.714.900	4.461.714.900	4.561.714.900	100.000.000				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	140 Orang	160 Orang	3.709.714.900	4.441.714.900	4.541.714.900	100.000.000				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	140 Orang	160 Orang	3.679.859.110	4.411.859.110	4.511.859.110	100.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	17 Unit	17 Unit	29.855.790	29.855.790	29.855.790	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	80 LPK	80 LPK	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	80 Lembaga	80 Lembaga	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	50,65 %	50,65 %	277.000.000	277.000.000	182.429.910	(94.570.090)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan	10 Orang	10 Orang	45.000.000	45.000.000	44.769.810	(230.190)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	10 Orang	10 Orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	15 Orang	15 Orang	25.000.000	25.000.000	24.769.810	(230.190)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang berizin	70 Lembaga	70 Lembaga	15.000.000	15.000.000	7.253.450	(7.746.550)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	70 Lembaga	70 Lembaga	15.000.000	15.000.000	7.253.450	(7.746.550)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi lowongan kerja	8800 lowongan	8800 lowongan	25.000.000	25.000.000	20.660.180	(4.339.820)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	50 Orang	25.000.000	25.000.000	20.660.180	(4.339.820)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI terlindungi	6000 orang	6000 orang	192.000.000	192.000.000	109.746.470	(82.253.530)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	6000 Orang	6000 Orang	172.000.000	172.000.000	89.976.000	(82.024.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang	10 Orang	20.000.000	20.000.000	19.770.470	(229.530)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Persentase Perselisihan hubungan industrial yang ditangani melalui mediasi	40 % 100 %	40 % 100 %	334.499.520	898.979.520	834.451.100	(64.528.420)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	360 Perusahaan	360 Perusahaan	34.499.520	34.499.520	16.564.200	(17.935.320)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	60Perusahaan	60Perusahaan	7.999.520	7.999.520	3.301.200	(4.698.320)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	18 Laporan	18 Laporan	26.500.000	26.500.000	13.263.000	(13.237.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina	80 Perusahaan	80 Perusahaan	300.000.000	864.480.000	817.886.900	(46.593.100)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	14 Perkara	14 Perkara	150.000.000	150.000.000	174.716.400	24.716.400	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	150.000.000	150.000.000	78.690.500	(71.309.500)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5300 orang	5300 orang	-	564.480.000	564.480.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	8.203.548.384	8.831.259.876	8.534.921.523	(296.338.353)		DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen	38.787.410	38.787.410	38.787.410	-				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	24.999.910	24.999.910	24.999.910	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	13.787.500	13.787.500	13.787.500	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45/12 Orang/bulan	45/12 Orang/bulan	5.952.625.672	6.580.337.164	6.636.076.981	55.739.817				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45Orang/bulan	45Orang/bulan	5.952.625.672	6.580.337.164	6.636.076.981	55.739.817	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	49.800.000	49.800.000	42.300.000	(7.500.000)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	34.800.000	34.800.000	34.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	15.000.000	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi umum perangkat daerah	168 bulan	168 bulan	757.228.560	757.228.560	444.203.390	(313.025.170)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	27.999.320	27.999.320	15.210.570	(12.788.750)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	67.723.840	67.723.840	45.056.620	(22.667.220)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	106.455.400	106.455.400	106.455.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	55.050.000	55.050.000	27.480.800	(27.569.200)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	500.000.000	500.000.000	250.000.000	(250.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersedia	12 bulan	12 bulan	39.825.310	39.825.310	39.825.310	-				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	19.901.460	19.901.460	19.901.460	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	19.923.850	19.923.850	19.923.850	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi	36 bulan	36 bulan	824.611.656	824.611.656	793.058.656	(31.553.000)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	170.379.656	170.379.656	170.379.656	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	50.000.000	49.947.000	(53.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	604.232.000	604.232.000	572.732.000	(31.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara	38 bulan	38 bulan	540.669.776	540.669.776	540.669.776	-				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	141.678.250	141.678.250	141.678.250	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	48 Unit	32.000.000	32.000.000	32.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	344.991.526	344.991.526	344.991.526	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	385 Unit	385 Unit	22.000.000	22.000.000	22.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.274.141.600	3.304.141.600	3.158.069.190	(146.072.410)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.274.141.600	3.304.141.600	3.158.069.190	(146.072.410)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase sentra industri terbina	100 %	100 %	2.224.141.600	3.254.141.600	3.132.765.760	(121.375.840)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM/Pelaku Industri terbina	725 IKM	725 IKM	2.224.141.600	3.254.141.600	3.132.765.760	(121.375.840)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	2.224.141.600	3.254.141.600	3.132.765.760	(121.375.840)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	2.64 %	2.64 %	5.000.000	5.000.000	2.100.000	(2.900.000)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin usaha kawasan industri (IUKI), dan Izin perluasan kawasan industri (IPKI)	45 dokumen	45 dokumen	5.000.000	5.000.000	2.100.000	(2.900.000)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000	5.000.000	2.100.000	(2.900.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	95 %	95 %	45.000.000	45.000.000	23.203.430	(21.796.570)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI,IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	2 dokumen	2 dokumen	45.000.000	45.000.000	23.203.430	(21.796.570)				Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000	16.712.630	(13.287.370)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	6.490.800	(8.509.200)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
	Dinas Ketahanan Pangan				14.863.544.702	16.110.444.424	15.563.094.429	(547.349.995)				Dinas Ketahanan Pangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.863.544.702	16.110.444.424	15.563.094.429	(547.349.995)				Dinas Ketahanan Pangan
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				14.863.544.702	16.110.444.424	15.563.094.429	(547.349.995)				Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	179 %	1,79	4.526.026.950	4.363.600.730	4.341.143.730	(22.457.000)				Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan Jumlah Pengelola Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (kelompok)	6 kelompok 6 kelompok	6 kelompok 6 kelompok	4.526.026.950	4.363.600.730	4.341.143.730	(22.457.000)				Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	6 Unit	6 Unit	4.526.026.950	4.363.600.730	4.341.143.730	(22.457.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase kelompok yang dibina dalam rangka pengembangan konsumsi pangan Ketersediaan energi dan protein per kapita	7.2 % 100 %	7.2 % 100 %	2.739.559.770	4.706.743.610	4.611.130.240	(95.613.370)				Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kelompok Dibina dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	60 kelompok	60 kelompok	180.005.240	180.005.240	147.006.440	(32.998.800)				Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	6 Laporan	6 Laporan	80.633.500	80.633.500	70.316.600	(10.316.900)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0008	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2 laporan	2 laporan	29.999.800	29.999.800	14.999.600	(15.000.200)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	39.999.700	39.999.700	35.549.000	(4.450.700)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	2 Laporan	2 Laporan	29.372.240	29.372.240	26.141.240	(3.231.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kelompok dibina dalam rangka pengembangan konsumsi pangan	50 kelompok	50 kelompok	2.559.554.530	4.526.738.370	4.464.123.800	(62.614.570)				Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	8 Laporan	8 Laporan	2.549.554.530	4.516.738.370	4.459.123.800	(57.614.570)	Kab. Cilacap	DAK	SiLPA DAK Non Fisik	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	0,1162	0,1162	407.267.560	407.267.560	369.540.600	(37.726.960)				Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen penanganan rawan pangan	1 dokumen	1 dokumen	47.438.660	47.438.660	23.938.900	(23.499.760)				Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	47.438.660	47.438.660	23.938.900	(23.499.760)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok penerima penanganan rawan pangan	34 kelompok	34 kelompok	359.828.900	359.828.900	345.601.700	(14.227.200)				Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	359.828.900	359.828.900	345.601.700	(14.227.200)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	81.42 %	81.42 %	194.358.900	181.804.900	113.401.500	(68.403.400)				Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Beregistrasi Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Beregistrasi	145 PSAT 145 Produk PSAT	145 PSAT 145 Produk PSAT	194.358.900	181.804.900	113.401.500	(68.403.400)				Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	10 Dokumen	10 Dokumen	26.999.750	26.999.750	13.499.650	(13.500.100)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	44.998.650	44.998.650	44.998.650	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 Laporan	3 Laporan	122.360.500	109.806.500	54.903.200	(54.903.300)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	6.996.331.522	6.451.027.624	6.127.878.359	(323.149.265)		DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi DISHANPAN	7 Dokumen	7 Dokumen	20.000.000	20.000.000	15.550.000	(4.450.000)				Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	10.000.000	9.250.000	(750.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	10.000.000	6.300.000	(3.700.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	5.767.289.770	5.221.985.872	4.954.592.132	(267.393.740)				Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45Orang/bulan	45Orang/bulan	5.767.289.770	5.221.985.872	4.954.592.132	(267.393.740)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi administrasi kepegawaian Jumlah Pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian	70 orang 70 Orang	70 orang 70 Orang	57.400.000	57.400.000	34.100.000	(23.300.000)				Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	65 Paket	32.400.000	32.400.000	21.600.000	(10.800.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	25.000.000	25.000.000	12.500.000	(12.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum DISPABUN Tersedianya Administrasi Umum DISHANPAN Tersedianya Administrasi Umum DISPABUN	12 bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan 12 Bulan	510.166.260	510.166.260	315.498.435	(194.667.825)				Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	89.999.260	89.999.260	70.031.435	(19.967.825)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	85.167.000	85.167.000	77.967.000	(7.200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	35.000.000	35.000.000	17.500.000	(17.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	300.000.000	300.000.000	150.000.000	(150.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	10 unit 10 Unit	10 unit 10 Unit	34.790.580	34.790.580	34.790.580	-				Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	24.999.720	24.999.720	24.999.720	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	9.790.860	9.790.860	9.790.860	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	315.000.000	315.000.000	351.662.300	36.662.300				Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	65.152.000	65.152.000	80.839.300	15.687.300	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	249.848.000	249.848.000	270.823.000	20.975.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	72 unit 72 Unit	72 unit 72 Unit	291.684.912	291.684.912	421.684.912	130.000.000				Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	195.000.000	195.000.000	195.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit	34.960.000	34.960.000	34.960.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	61.724.912	61.724.912	191.724.912	130.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Ketahanan Pangan
	Dinas Lingkungan Hidup				43.640.655.000	26.557.265.160	27.685.986.900	1.128.721.740				Dinas Lingkungan Hidup
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				43.640.655.000	26.557.265.160	27.685.986.900	1.128.721.740				Dinas Lingkungan Hidup
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				43.640.655.000	26.557.265.160	27.685.986.900	1.128.721.740				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	100 %	100 %	375.000.000	125.000.000	62.500.000	(62.500.000)				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	125.000.000	125.000.000	62.500.000	(62.500.000)				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.2.01.0004	Peminjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	125.000.000	62.500.000	(62.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Kabupaten Cilacap yang Tersusun	2 dokumen	2 dokumen	250.000.000	-	-	-				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air	39.68 Indeks	39.68 Indeks	471.500.000	471.500.000	562.828.235	91.328.235				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan LH	1804 dokumen	1804 dokumen	415.500.000	415.500.000	523.203.235	107.703.235				Dinas Lingkungan Hidup

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 dokumen	55.000.000	55.000.000	105.000.000	50.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	10.177.250	(4.822.750)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	63.000.000	63.000.000	62.789.930	(210.070)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	27.736.055	(22.263.945)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	232.500.000	232.500.000	317.500.000	85.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan LH	1 dokumen	1 dokumen	56.000.000	56.000.000	39.625.000	(16.375.000)				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	56.000.000	56.000.000	39.625.000	(16.375.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	0.44 Indeks	0.44 indeks	18.608.001.833	1.205.979.740	1.353.979.430	147.999.690				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Kawasan yang Dikelola Keanekaragaman Hayatinya	1046,3 ha	1046,3 ha	18.608.001.833	1.205.979.740	1.353.979.430	147.999.690				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Ha	18.608.001.833	1.205.979.740	1.353.979.430	147.999.690	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan/Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	100 %	100 %	30.000.000	20.000.000	20.000.000	-				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3	15 dokumen	15 dokumen	30.000.000	20.000.000	20.000.000	-				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	1 Fasilitas	1 Fasilitas	30.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase penataan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan atau persetujuan pemerintah yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	24.999.800	(25.000.200)				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	JUmlah Usaha/ Kegiatan yang Dibina dan Diawasi	55 usaha/keg iatan	55 usaha/keg iatan	50.000.000	50.000.000	24.999.800	(25.000.200)				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50 BadanUsaha	50 BadanUsaha	30.000.000	30.000.000	14.999.800	(15.000.200)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Adiwiyata	71.07 %	71.07 %	77.499.650	77.499.650	38.261.280	(39.238.370)				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Kapasitasnya Meningkatkan Melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	223 lembaga	223 lembaga	77.499.650	77.499.650	38.261.280	(39.238.370)				Dinas Lingkungan Hidup

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	77.499.650	77.499.650	38.261.280	(39.238.370)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat/ Kasus Lingkungan yang Ditindaklanjuti	15 kasus	15 kasus	15.000.000	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	15 Pengaduan	15 Pengaduan	15.000.000	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	14.3 %	14.3 %	8.339.985.812	7.556.989.167	8.612.407.462	1.055.418.295				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, dan Diolah	590 ton	157.524,53 ton	8.339.985.812	7.556.989.167	8.612.407.462	1.055.418.295				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis	1 kelompok	1 Kelompok	205.794.000	121.017.450	121.017.450	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 unit	3 unit	300.720.800	212.902.580	1.188.143.180	975.240.600	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	1 Laporan	0 Laporan	297.500.000	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	6 unit	6 unit	100.000.000	100.000.000	99.820.800	(179.200)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	114.324,43 ton	114.324,43 ton	7.385.971.012	7.073.069.137	7.153.486.147	80.417.010	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	43200 ton	43200 ton	50.000.000	50.000.000	49.939.885	(60.115)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	15.673.667.705	17.035.296.603	17.003.510.693	(31.785.910)		DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	21.999.770	21.999.770	21.999.770	-				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	11.999.890	11.999.890	11.999.890	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	9.999.880	9.999.880	9.999.880	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	8.325.653.030	9.687.281.928	9.827.007.908	139.725.980				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	8.325.653.030	9.687.281.928	9.827.007.908	139.725.980	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	756.337.220	756.337.220	521.889.020	(234.448.200)				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	125.217.220	125.217.220	101.953.070	(23.264.150)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	206.407.000	206.407.000	206.407.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	47.543.600	47.543.600	39.608.000	(7.935.600)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	377.169.400	377.169.400	173.920.950	(203.248.450)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	5.656.927.825	5.656.927.825	5.720.094.195	63.166.370				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	240.285.365	240.285.365	308.845.265	68.559.900	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.416.642.460	5.416.642.460	5.411.248.930	(5.393.530)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	124 unit	124 unit	912.749.860	912.749.860	912.519.800	(230.060)				Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	58 Unit	772.000.000	772.000.000	772.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	40.750.000	40.750.000	40.750.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	99.999.860	99.999.860	99.769.800	(230.060)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Lingkungan Hidup
	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				13.286.252.299	14.163.508.960	15.891.015.101	1.727.506.141				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.286.252.299	14.163.508.960	15.891.015.101	1.727.506.141				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				13.286.252.299	14.163.508.960	15.891.015.101	1.727.506.141				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP elektronik Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	99,49 % 36,02 % 28,3 % 99,93 %	99,49 % 36,02 % 28,3 % 99,93 %	1.588.319.840	1.460.519.840	1.721.038.580	260.518.740				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk	7 kegiatan	7 kegiatan	324.446.440	196.646.440	173.850.000	(22.796.440)				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	324.446.440	196.646.440	173.850.000	(22.796.440)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan penataan pendaftaran penduduk	2 kegiatan	2 kegiatan	1.201.145.550	1.201.145.550	1.496.145.550	295.000.000				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6 Dokumen	6 Dokumen	1.201.145.550	1.201.145.550	1.496.145.550	295.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah lembaga pengguna pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan	15 lembaga	15 lembaga	48.867.850	48.867.850	46.003.030	(2.864.820)				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	2500 Orang	2500 Orang	48.867.850	48.867.850	46.003.030	(2.864.820)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1 kegiatan	1 kegiatan	13.860.000	13.860.000	5.040.000	(8.820.000)				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	13.860.000	13.860.000	5.040.000	(8.820.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan akta kelahiran	94.4 %	94.4 %	80.097.750	80.097.750	54.798.400	(25.299.350)				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan pelayanan di pencatatan sipil	10 kegiatan	10 kegiatan	55.000.000	55.000.000	49.850.400	(5.149.600)				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	25.000.000	24.349.200	(650.800)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 layanan	1 layanan	30.000.000	30.000.000	25.501.200	(4.498.800)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 kegiatan	1 kegiatan	25.097.750	25.097.750	4.948.000	(20.149.750)				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	1 Laporan	1 Laporan	25.097.750	25.097.750	4.948.000	(20.149.750)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologi informasi yang terpelihara	100 %	100 %	385.000.000	305.000.000	2.257.296.000	1.952.296.000				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Data kependudukan yang dikelola secara elektronik dan terpelihara dalam kondisi baik	5273 record	5273 record	15.000.000	15.000.000	14.550.750	(449.250)				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	15.000.000	14.550.750	(449.250)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dipelihara	1 aplikasi	1 aplikasi	350.000.000	270.000.000	2.237.783.250	1.967.783.250				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000	270.000.000	2.237.783.250	1.967.783.250	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000	20.000.000	4.962.000	(15.038.000)				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	4.962.000	(15.038.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun	100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	10.400.000	(9.600.000)				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Laporan Informasi Kependudukan	2 dokumen	2 dokumen	20.000.000	20.000.000	10.400.000	(9.600.000)				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	20.000.000	10.400.000	(9.600.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	11.212.834.709	12.297.891.370	11.847.482.121	(450.409.249)		DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen	24.077.100	24.077.100	9.100.000	(14.977.100)				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	17.100.000	17.100.000	9.100.000	(8.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0 Laporan	6.977.100	6.977.100	-	(6.977.100)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	7.541.438.419	8.668.495.080	8.501.483.331	(167.011.749)				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	7.541.438.419	8.668.495.080	8.501.483.331	(167.011.749)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	121 orang	114 orang	84.600.000	84.600.000	84.600.000	-				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		10 paket	69.600.000	69.600.000	69.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 orang	15.000.000	15.000.000	25.000.000	10.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	12 bulan	831.101.920	831.101.920	630.181.520	(200.920.400)				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	151.102.020	151.102.020	151.102.020	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	180.000.100	180.000.100	190.000.100	10.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	49.999.800	49.999.800	24.079.400	(25.920.400)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	450.000.000	450.000.000	275.000.000	(175.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	34 unit	34 unit	182.783.220	182.783.220	182.783.220	-				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 unit	119.611.620	119.611.620	119.611.620	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	22 Unit	63.171.600	63.171.600	63.171.600	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	1.861.983.070	1.861.983.070	1.794.483.070	(67.500.000)				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	538.759.070	538.759.070	501.559.070	(37.200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.323.224.000	1.323.224.000	1.255.724.000	(67.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	144 unit	144 unit	686.850.980	644.850.980	644.850.980	-				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	195.000.000	195.000.000	200.000.000	5.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	50.546.950	50.546.950	62.746.950	12.200.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	441.304.030	399.304.030	399.304.030	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				15.560.652.631	15.286.272.377	14.962.435.448	(323.836.929)				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.560.652.631	15.286.272.377	14.962.435.448	(323.836.929)				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				15.560.652.631	15.286.272.377	14.962.435.448	(323.836.929)				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	100 %	100%	6.264.934.852	5.698.212.852	6.282.073.227	583.860.375				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang menyelenggaraan penataan desa	2 desa	2 desa	6.264.934.852	5.698.212.852	6.282.073.227	583.860.375				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		1 desa	-	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya	269 desa	269 desa	5.964.934.852	5.523.212.852	5.478.120.007	(45.092.845)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	jumlah sarana dan prasarana desa yang terfasilitasi	730 unit	730 unit	300.000.000	175.000.000	803.953.220	628.953.220	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga	100 %	100%	220.000.000	150.000.000	93.519.230	(56.480.770)				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa dan atau pihak ketiga	269 Desa	269 Desa	220.000.000	150.000.000	93.519.230	(56.480.770)				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja saa antar desa dalam kabupaten/kota	21 dokumen	21 dokumen	60.000.000	50.000.000	23.439.550	(26.560.450)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	30 dokumen	30 dokumen	60.000.000	50.000.000	20.079.680	(29.920.320)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	50.000.000	50.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki Dokumen RPJMDes, APBDes dan RKPDes	100 %	100%	815.000.000	700.000.000	395.094.910	(304.905.090)				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Memiliki Dokumen RPJMDes, APBDes dan RKPDes	269 Desa	269 Desa	815.000.000	700.000.000	395.094.910	(304.905.090)				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	23.719.650	(26.280.350)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan produk hukum desa	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	23.719.650	(26.280.350)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	23.446.240	(26.553.760)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	60.000.000	23.759.120	(36.240.880)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	538 orang	269 orang	290.000.000	200.000.000	117.505.100	(82.494.900)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	25.000.000	(25.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	284 dokumen	284 dokumen	50.000.000	50.000.000	40.624.120	(9.375.880)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa	1 dokumen	1 dokumen	60.000.000	50.000.000	23.664.760	(26.335.240)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	269 orang	269 orang	70.000.000	70.000.000	23.695.910	(46.304.090)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	70.000.000	70.000.000	69.960.360	(39.640)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina	12,96 %	0,1296	1.385.000.000	1.240.000.000	1.340.849.880	100.849.880				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina	568 lembaga 568 Lembaga	568 lembaga	1.385.000.000	1.240.000.000	1.340.849.880	100.849.880				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	50.000.000	21.605.220	(28.394.780)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	568Lembaga	200 lembaga	150.000.000	50.000.000	275.000.000	225.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000	70.000.000	35.000.000	(35.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	2 Laporan	2 Laporan	65.000.000	50.000.000	10.544.660	(39.455.340)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah dokumen hasil fasilitas bulan bhakti gotong royong masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	40.000.000	33.700.000	(6.300.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen	4 Dokumen	950.000.000	950.000.000	950.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	6.875.717.779	7.498.059.525	6.850.898.201	(647.161.324)		DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	7 Dokumen	34.893.600	34.893.600	34.893.600	-				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	19.893.870	19.893.870	19.893.870	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4 laporan	4 laporan	14.999.730	14.999.730	14.999.730	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tunjangan ASN	12 bulan	12 Bulan	4.933.824.857	5.556.166.603	5.286.821.649	(269.344.954)				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji dan tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan	35 orang/bulan	4.933.824.857	5.556.166.603	5.286.821.649	(269.344.954)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 orang	60 orang	36.000.000	36.000.000	36.000.000	-				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket	60 paket	36.000.000	36.000.000	36.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 Bulan	921.593.110	921.593.110	566.276.740	(355.316.370)				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	152.847.110	152.847.110	132.362.440	(20.484.670)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor	12 paket	12 paket	99.082.400	99.082.400	99.082.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 paket	12 paket	75.000.000	75.000.000	37.500.100	(37.499.900)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD	400 laporan	400 laporan	594.663.600	594.663.600	297.331.800	(297.331.800)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	50 unit	50 unit	99.674.790	99.674.790	99.674.790	-				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	50 unit	50 unit	99.674.790	99.674.790	99.674.790	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	568.006.000	568.006.000	545.506.000	(22.500.000)				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	124.000.000	124.000.000	124.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	444.006.000	444.006.000	421.506.000	(22.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	98 unit	98 unit	281.725.422	281.725.422	281.725.422	-				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 unit	182.309.422	182.309.422	182.309.422	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	79 Unit	79 unit	59.280.000	59.280.000	59.280.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 Unit	40.136.000	40.136.000	40.136.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Dinas Perhubungan				23.495.289.266	56.288.902.867	58.114.832.344	1.825.929.477				Dinas Perhubungan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				23.495.289.266	56.288.902.867	58.114.832.344	1.825.929.477				Dinas Perhubungan
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				23.495.289.266	56.288.902.867	58.114.832.344	1.825.929.477				Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Perlengkapan jalan Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Rasio Ijin Trayek	0,54 rasio 97,65 % 0,62 rasio	0,54 rasio 97,65 % 0,62 rasio	8.697.475.621	30.577.610.843	32.689.404.763	2.111.793.920				Dinas Perhubungan
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	225.000.000	225.000.000	216.770.460	(8.229.540)				Dinas Perhubungan
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	225.000.000	225.000.000	216.770.460	(8.229.540)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	748 Unit	Unit	6.930.025.103	28.955.901.793	31.232.918.243	2.277.016.450				Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 unit	10 unit	3.981.498.103	2.136.830.543	3.010.293.993	873.463.450	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 unit	1 unit	2.948.527.000	26.819.071.250	28.239.424.250	1.420.353.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2 Unit	2 Unit	364.920.710	205.837.670	305.393.530	99.555.860				Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 unit	1 Unit	364.920.710	205.837.670	305.393.530	99.555.860	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan Uji	14691 Unit	14691 Unit	577.305.808	496.368.640	478.915.130	(17.453.510)				Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	10 unit	10 unit	207.305.808	152.073.040	134.931.130	(17.141.910)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	125.000.000	125.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 unit	10 unit	245.000.000	219.295.600	218.984.000	(311.600)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	3 Laporan	161.492.740	361.492.740	239.018.340	(122.474.400)				Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	3 Laporan	161.492.740	361.492.740	222.218.340	(139.274.400)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	7 Laporan	2 Laporan	140.532.260	34.811.000	17.355.300	(17.455.700)				Dinas Perhubungan
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	7 Laporan	2 Laporan	140.532.260	34.811.000	17.355.300	(17.455.700)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	3120 Unit	3120 Unit	148.199.000	148.199.000	129.033.760	(19.165.240)				Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3120 Unit	3120 Unit	148.199.000	148.199.000	129.033.760	(19.165.240)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-	(75.000.000)				Dinas Perhubungan
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-	(75.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	70.000.000	(5.000.000)				Dinas Perhubungan
2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	70.000.000	(5.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio ketersediaan rambu Angkutan Sungai dan Penyeberangan	0.5 rasio	0.5 rasio	130.000.000	70.000.000	63.335.940	(6.664.060)				Dinas Perhubungan
2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau	1 Laporan	1 Kegiatan	20.000.000	20.000.000	13.904.040	(6.095.960)				Dinas Perhubungan
2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	13.904.040	(6.095.960)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	2 Unit	1 Unit	110.000.000	50.000.000	49.431.900	(568.100)				Dinas Perhubungan
2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	2 Unit	1 Unit	110.000.000	50.000.000	49.431.900	(568.100)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	14.667.813.645	25.641.292.024	25.362.091.641	(279.200.383)		DAU		Dinas Perhubungan
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-				Dinas Perhubungan
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap	12 Bulan	12 Bulan	8.510.359.815	9.040.413.962	9.219.978.409	179.564.447				Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	8.510.359.815	9.040.413.962	9.219.978.409	179.564.447	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Dinas perhubungan Kabupaten Cilacap	1 Bulan	134 Orang	200.657.520	200.657.520	141.881.880	(58.775.640)				Dinas Perhubungan
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		10 paket	200.657.520	200.657.520	141.881.880	(58.775.640)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap	12 Bulan	12 Bulan	1.535.763.000	1.535.763.000	1.047.980.320	(487.782.680)				Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	177.258.000	177.258.000	163.625.370	(13.632.630)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	544.530.000	544.530.000	486.395.400	(58.134.600)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	150.000.000	150.000.000	65.972.050	(84.027.950)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	663.975.000	663.975.000	331.987.500	(331.987.500)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	21 Unit	21 Unit	190.437.310	190.437.310	190.437.310	-				Dinas Perhubungan
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 unit	190.437.310	190.437.310	190.437.310	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3.096.092.000	13.539.516.232	13.510.741.232	(28.775.000)				Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	300.000.000	315.000.000	15.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.796.092.000	13.239.516.232	13.195.741.232	(43.775.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	326 Unit	176 Unit	1.094.504.000	1.094.504.000	1.211.072.490	116.568.490				Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	42 Unit	819.504.000	819.504.000	879.504.000	60.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	125.000.000	125.000.000	147.028.460	22.028.460	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	150.000.000	150.000.000	184.540.030	34.540.030	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perhubungan
	Dinas Komunikasi Dan Informatika				15.233.761.598	15.033.978.463	15.550.298.648	516.320.185				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.233.761.598	15.033.978.463	15.550.298.648	516.320.185				Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				14.808.689.308	14.608.906.173	15.333.049.938	724.143.765				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	73 %	73 %	1.355.866.010	1.133.993.835	633.594.640	(500.399.195)				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media yang mendiseminasikan Informasi Publik	135 Media	135 Media	1.355.866.010	1.133.993.835	633.594.640	(500.399.195)				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3.	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10 Komunitas	10 Komunitas	50.000.000	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	84.959.860	84.959.860	54.732.260	(30.227.600)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	28.200.000	28.200.000	19.989.460	(8.210.540)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	Komunitas	988.743.450	846.871.275	500.872.680	(345.998.595)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/luasnya	1 Media	1 Media	74.500.000	74.500.000	29.211.120	(45.288.880)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	10 konten	10 konten	55.500.000	55.500.000	28.769.120	(26.730.880)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	10 orang	10 orang	43.962.700	43.962.700	20.000	(43.942.700)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengimpleme ntasikan/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai masterplan	75 %	75 %	4.227.388.809	3.850.056.550	5.336.912.186	1.486.855.636				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan integrasi aplikasi e-government	100 %	100 %	4.227.388.809	3.850.056.550	5.336.912.186	1.486.855.636				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemd	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	1 Laporan	69.586.520	69.586.520	513.215.756	443.629.236	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	5.499.400	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	30 OPD	30 OPD	484.339.439	444.374.580	922.970.580	478.596.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Program	6 Program	36.095.450	36.095.450	20.725.850	(15.369.600)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2 Dokumen	2 Dokumen	31.868.000	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	52 PerangkatDaerah	52 PerangkatDaerah	3.600.000.000	3.300.000.000	3.880.000.000	580.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	9.225.434.489	9.624.855.788	9.362.543.112	(262.312.676)		DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000	40.000.000	23.775.000	(16.225.000)				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	25.000.000	15.300.000	(9.700.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	8.475.000	(6.525.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang terfasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49 Orang	49 orang	5.921.372.789	6.620.794.088	6.633.583.812	12.789.724				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	5.921.372.789	6.620.794.088	6.633.583.812	12.789.724	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84 Orang	84 Orang	564.600.000	264.600.000	252.100.000	(12.500.000)				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		10 paket	39.600.000	39.600.000	39.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 orang	25.000.000	25.000.000	12.500.000	(12.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	10 orang	500.000.000	200.000.000	200.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100%	684.650.020	684.650.020	493.113.645	(191.536.375)				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	186.004.110	186.004.110	176.354.690	(9.649.420)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	135.000.000	135.000.000	135.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	60.000.000	60.000.000	29.946.000	(30.054.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	303.645.910	303.645.910	151.812.955	(151.832.955)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Unit	9 Unit	58.905.130	58.905.130	58.866.775	(38.355)				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	58.905.130	58.905.130	58.866.775	(38.355)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1.486.406.550	1.486.406.550	1.431.603.880	(54.802.670)				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	306.800.000	306.800.000	307.724.000	924.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.179.606.550	1.179.606.550	1.123.879.880	(55.726.670)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	125 Unit	125 unit	469.500.000	469.500.000	469.500.000	-				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 unit	160.000.000	160.000.000	160.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	145.000.000	145.000.000	145.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	14.500.000	14.500.000	14.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				325.944.980	325.944.980	150.960.820	(174.984.160)				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	100%	325.944.980	325.944.980	150.960.820	(174.984.160)				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	100 %	100%	325.944.980	325.944.980	150.960.820	(174.984.160)				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	10 orang	10 orang	44.000.000	44.000.000	21.843.240	(22.156.760)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	%	281.944.980	281.944.980	129.117.580	(152.827.400)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				99.127.310	99.127.310	66.287.890	(32.839.420)				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	1.02 indeks	1.02 indeks	99.127.310	99.127.310	66.287.890	(32.839.420)				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	1 Tim	1 Tim	99.127.310	99.127.310	66.287.890	(32.839.420)				Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	99.127.310	99.127.310	66.287.890	(32.839.420)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				8.077.350.498	8.858.243.150	8.153.484.570	(704.758.580)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.077.350.498	8.858.243.150	8.153.484.570	(704.758.580)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				8.077.350.498	8.858.243.150	8.153.484.570	(704.758.580)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kebijakan Penanaman Modal yang Diterbitkan	100 %	100 %	167.779.700	146.067.980	73.033.990	(73.033.990)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	2 Dokumen	1 Perusahaan	83.811.300	62.099.580	10.510.580	(51.589.000)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 Dokumen	1 Dokumen	83.811.300	62.099.580	10.510.580	(51.589.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	83.968.400	83.968.400	62.523.410	(21.444.990)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	83.968.400	83.968.400	62.523.410	(21.444.990)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi di Tingkat Regional dan/atau Nasional yang Dilikuti	100 %	100 %	238.296.260	116.538.860	58.269.260	(58.269.600)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi PM yang diselenggarakan	4 kali	1 Kali	238.296.260	116.538.860	58.269.260	(58.269.600)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	238.296.260	116.538.860	58.269.260	(58.269.600)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	100 %	100 %	328.475.110	98.568.260	80.681.520	(17.886.740)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan sesuai Kewenangan	25000 Izin Terbit	25000 Izin Terbit	328.475.110	98.568.260	80.681.520	(17.886.740)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20000 Pelaku Usaha	20000 Pelaku Usaha	305.445.210	75.538.360	69.168.570	(6.369.790)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5220 PelakuUsaha	5220 PelakuUsaha	23.029.900	23.029.900	11.512.950	(11.516.950)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	75 %	75 %	26.900.000	26.900.000	13.450.000	(13.450.000)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	1303 Perusahaan	850 Perusahaan	26.900.000	26.900.000	13.450.000	(13.450.000)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan	120 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	26.900.000	26.900.000	13.450.000	(13.450.000)	Kab. Cilacap	DAK	SILPA DAK Non Fisik	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Profil Investasi Sektor Perizinan Berusaha	100 %	100 %	32.350.000	32.350.000	16.174.400	(16.175.600)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Dikelola	4 Dokumen	2 Dokumen	32.350.000	32.350.000	16.174.400	(16.175.600)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	2 Dokumen	32.350.000	32.350.000	16.174.400	(16.175.600)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	7.283.549.428	8.437.818.050	7.911.875.400	(525.942.650)		DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	38.499.600	38.499.600	34.249.600	(4.250.000)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	23.874.800	23.874.800	19.624.800	(4.250.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	14.624.800	14.624.800	14.624.800	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	4.856.914.748	6.011.183.370	5.820.282.480	(190.900.890)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	46 Orang/bulan	4.856.914.748	6.011.183.370	5.820.282.480	(190.900.890)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75 orang	75 Orang	50.000.000	50.000.000	46.000.000	(4.000.000)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	42.000.000	42.000.000	42.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	8.000.000	8.000.000	4.000.000	(4.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	875.627.720	875.627.720	578.835.960	(296.791.760)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.054.950	30.054.950	30.054.950	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	179.371.370	179.371.370	140.088.730	(39.282.640)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	136.202.000	136.202.000	143.692.580	7.490.580	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	129.999.400	129.999.400	64.999.700	(64.999.700)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	400.000.000	200.000.000	(200.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	32 unit	33 Unit	171.844.740	171.844.740	171.844.740	-				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	16.814.700	16.814.700	16.814.700	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	15 Unit	115.753.440	115.753.440	115.753.440	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	39.276.600	39.276.600	39.276.600	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	930.987.500	930.987.500	900.987.500	(30.000.000)				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	265.473.000	265.473.000	265.473.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	665.514.500	665.514.500	635.514.500	(30.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	261 unit	261 unit	359.675.120	359.675.120	359.675.120	-				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	123.561.400	123.561.400	123.561.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	81 Unit	81 Unit	20.250.000	20.250.000	20.250.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	160 Unit	103.500.000	103.500.000	103.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	108.114.220	108.114.220	108.114.220	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	4.249.500	4.249.500	4.249.500	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan				8.595.302.055	9.131.742.911	8.625.802.452	(505.940.459)				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.595.302.055	9.131.742.911	8.625.802.452	(505.940.459)				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				805.297.210	760.053.530	834.832.050	74.778.520				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun persatuan penduduk	9,98 %	9,98 %	775.297.880	730.054.200	804.832.720	74.778.520				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan sesuai SNP	60 perpustak aan	60 Perpustakaan	502.488.580	457.244.900	453.891.780	(3.353.120)				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustak aan	30 perpustakaan	29.999.800	29.999.800	29.999.800	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	1 perpustakaan	1 Perpustakaan	24.999.630	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 Orang	40 orang	32.639.800	32.639.800	32.639.800	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah data dan informasi perpustakaan	3 Dokumen	3 Dokumen	84.811.320	84.811.320	81.458.200	(3.353.120)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	266.038.130	266.038.130	215.166.205	(50.871.925)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO 20000 (ITSM : Information Technology	4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	63.999.900	43.755.850	43.755.850	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan	81900 orang	81900 orang	272.809.300	272.809.300	350.940.940	78.131.640				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	2 Orang	2 orang	30.532.660	30.532.660	15.758.500	(14.774.160)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	39.999.770	39.999.770	143.399.770	103.400.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Perpustaka an	1 Perpustakaan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang Yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/ Kota	4 Orang	4 Orang	41.117.000	41.117.000	41.117.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	60 Lokus	60 Lokus	136.159.870	136.159.870	176.537.595	40.377.725	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	25 %	25 %	29.999.330	29.999.330	29.999.330	-				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Judul Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2 Judul	2 Judul	29.999.330	29.999.330	29.999.330	-				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	12Eksemplar	12 Eksemplar	29.999.330	29.999.330	29.999.330	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				7.790.004.845	8.371.689.381	7.790.970.402	(580.718.979)				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	75,34 %	75,34 %	773.954.200	699.974.750	558.649.960	(141.324.790)				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/ arsip dinamis yang dikelola	27600 berkas	27600 berkas	421.661.400	400.661.400	309.336.600	(91.324.800)				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	8500 Berkas	8500 Berkas	167.555.400	167.555.400	167.555.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	52 Laporan	52 Laporan	254.106.000	233.106.000	141.781.200	(91.324.800)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/arsip statis yang dikelola	2100 berkas	2100 berkas	59.999.980	59.999.980	59.999.980	-				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	850 Arsip	850 Arsip	59.999.980	59.999.980	59.999.980	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengguna yang bisa mengakses arsip statis	220 orang	220 orang	292.292.820	239.313.370	189.313.380	(49.999.990)				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	100 Pengguna	59.999.830	59.999.830	59.999.830	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	3 Laporan	232.292.990	179.313.540	129.313.550	(49.999.990)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Jumlah Arsip yang dilindungi dan diselamatkan	50 %	50 %	31.066.630	25.000.000	46.102.080	21.102.080				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip akibat bencana yang diselamatkan	220 berkas	-	6.066.630	-	-	-				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip	0 Arsip	6.066.630	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, kecamatan dan desa/kelurahan yang mengalami pemekaran dan/atau pemecahan yang telah dibuatkan daftar arsip	3 arsip	3 Arsip	25.000.000	25.000.000	46.102.080	21.102.080				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Arsip	3 Arsip	25.000.000	25.000.000	46.102.080	21.102.080	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	6.984.984.015	7.646.714.631	7.186.218.362	(460.496.269)		DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	15.199.490	15.199.490	9.249.490	(5.950.000)				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	9.999.670	9.999.670	6.249.670	(3.750.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	5.199.820	5.199.820	2.999.820	(2.200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	4.860.036.203	5.521.766.819	5.309.147.390	(212.619.429)				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan	44 Orang/ Bulan	4.860.036.203	5.521.766.819	5.309.147.390	(212.619.429)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48 orang	48 orang	55.000.000	55.000.000	30.000.000	(25.000.000)				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut/ kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	-	25.000.000	25.000.000	-	(25.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	695.206.730	695.206.730	520.206.230	(175.000.500)				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	129.666.630	129.666.630	129.666.630	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	170.540.400	170.540.400	170.540.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	349.999.900	349.999.900	174.999.400	(175.000.500)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	14.999.800	14.999.800	14.999.800	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	20 unit	20 unit	156.760.470	156.760.470	156.760.470	-				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 Unit	20 Unit	156.760.470	156.760.470	156.760.470	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 bulan	620.740.700	620.740.700	611.140.900	(9.599.800)				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	239.499.500	239.499.500	261.399.700	21.900.200	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	373.741.200	373.741.200	342.241.200	(31.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	252 Unit	252 unit	582.040.422	582.040.422	549.713.882	(32.326.540)				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	200.000.000	200.000.000	167.673.460	(32.326.540)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	136 Unit	136 Unit	65.995.000	65.995.000	65.995.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	304.046.422	304.046.422	304.046.422	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2.24.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit	51 Unit	11.999.000	11.999.000	11.999.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
	Dinas Perikanan				11.587.569.527	12.784.610.764	12.587.232.160	(197.378.604)				Dinas Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				11.587.569.527	12.784.610.764	12.587.232.160	(197.378.604)				Dinas Perikanan
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				11.587.569.527	12.784.610.764	12.587.232.160	(197.378.604)				Dinas Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	80 %	80 %	1.858.499.470	1.858.499.470	2.127.227.570	268.728.100				Dinas Perikanan
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	12 Kelompok	13 Kelompok	1.089.999.800	1.089.999.800	1.088.425.420	(1.574.380)				Dinas Perikanan
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	35.000.000	34.224.640	(775.360)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1 unit	1 unit	1.054.999.800	1.054.999.800	1.054.200.780	(799.020)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nelayan yang mengikuti fasilitasi, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan	6500 Orang	1005 Orang	698.500.000	698.500.000	698.500.000	-				Dinas Perikanan
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		10 orang	698.500.000	698.500.000	698.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang Sudah Memenuhi Standar Minimal	11 Unit	11 Unit dan tersedianya DED Pengembangan TPI Mertangga	49.999.690	49.999.690	274.999.460	224.999.770				Dinas Perikanan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	11 Layanan	11 layanan dan tersedi	49.999.690	49.999.690	274.999.460	224.999.770	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan Skala Kecil < 10 GT yang Sudah Terdaftar dan Berjin	100 Unit	300 Unit	19.999.980	19.999.980	65.302.690	45.302.710				Dinas Perikanan
3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	100 Rekome ndasi	300 Rekome ndasi	19.999.980	19.999.980	65.302.690	45.302.710	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	80 %	80 %	2.709.239.030	2.709.239.030	2.648.956.390	(60.282.640)				Dinas Perikanan
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mendapat fasilitasi, sosialisasi, pembinaan pendampingan dan pelatihan	46 Kelompok	46 Kelompok	128.500.000	128.500.000	93.660.140	(34.839.860)				Dinas Perikanan
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		10 orang	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	6 Kelompok	6 Kelompok	18.500.000	18.500.000	8.714.720	(9.785.280)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	20 Kelompok	50.000.000	50.000.000	24.945.420	(25.054.580)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan dan BBI yang mendapat bantuan sarana dan prasarana	31 Unit	31 Kelompok	2.580.739.030	2.580.739.030	2.555.296.250	(25.442.780)				Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	35.000.000	30.681.450	(4.318.550)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	3 unit	670.255.380	670.255.380	670.255.380	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5 Dokumen	5 Dokumen	39.988.100	39.988.100	20.112.150	(19.875.950)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit	67 unit	1.835.495.550	1.835.495.550	1.834.247.270	(1.248.280)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Kelompok Masyarakat Pengawas Aktif	80.65 %	80.65 %	30.000.000	30.000.000	14.450.370	(15.549.630)				Dinas Perikanan
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pokmaswas yang Melakukan Pengawasan Sumberdaya Perikanan	6 Kelompok	6 Kelompok	30.000.000	30.000.000	14.450.370	(15.549.630)				Dinas Perikanan
3.25.05.2.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	5 Orang	5 Orang	30.000.000	30.000.000	14.450.370	(15.549.630)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan Bina Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	77,78 %	77,78 %	451.800.000	451.800.000	276.810.620	(174.989.380)				Dinas Perikanan
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Rekomendasi Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang sudah berjin	5 Kelompok	5 Kelompok	30.000.000	30.000.000	18.566.440	(11.433.560)				Dinas Perikanan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000	18.566.440	(11.433.560)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang mendapatkan bantuan Sarana dan Prasarana	1 Kelompok	1 Kelompok	421.800.000	421.800.000	258.244.180	(163.555.820)				Dinas Perikanan
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	57855 Ton	57855 Ton	229.300.000	229.300.000	136.620.670	(92.679.330)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	250 PelakuUsaha	250 PelakuUsaha	192.500.000	192.500.000	121.623.510	(70.876.490)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	6.538.031.027	7.735.072.264	7.519.787.210	(215.285.054)		DAU		Dinas Perikanan
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	7 Dok	38.999.900	38.999.900	28.299.900	(10.700.000)				Dinas Perikanan
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	24.999.900	24.999.900	18.999.900	(6.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	14.000.000	14.000.000	9.300.000	(4.700.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	4.690.026.333	5.887.067.570	5.899.971.356	12.903.786				Dinas Perikanan
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	4.690.026.333	5.887.067.570	5.899.971.356	12.903.786	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55 Orang	55 Orang	53.000.000	53.000.000	43.000.000	(10.000.000)				Dinas Perikanan
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		10 paket	33.000.000	33.000.000	33.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 orang	20.000.000	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	555.821.700	555.821.700	379.832.860	(175.988.840)				Dinas Perikanan
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	95.500.000	95.500.000	82.012.160	(13.487.840)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	135.321.700	135.321.700	135.321.700	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	35.000.000	35.000.000	17.500.000	(17.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	290.000.000	290.000.000	144.999.000	(145.001.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 unit	5 unit	59.961.990	59.961.990	59.961.990	-				Dinas Perikanan
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 unit	59.961.990	59.961.990	59.961.990	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	803.302.000	803.302.000	771.802.000	(31.500.000)				Dinas Perikanan
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	175.000.000	175.000.000	175.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	628.302.000	628.302.000	596.802.000	(31.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	111 unit	111 unit	336.919.104	336.919.104	336.919.104	-				Dinas Perikanan
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	46 Unit	195.000.000	195.000.000	195.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	41.920.000	41.920.000	41.920.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	1 unit	1 unit	99.999.104	99.999.104	99.999.104	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perikanan
	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga				18.952.548.831	18.775.304.345	18.294.562.668	(480.741.677)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.366.285.610	9.025.978.720	8.958.156.360	(67.822.360)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				9.366.285.610	9.025.978.720	8.958.156.360	(67.822.360)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda	100 % 25 %	100 % 25 %	724.854.850	634.547.960	533.205.620	(101.342.340)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diberdayakan dan dikembangkan	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diberdayakan dan dikembangkan	375 orang	375 orang	274.855.020	184.548.130	137.538.580	(47.009.550)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	120 Orang	120 Orang	164.915.900	114.916.030	69.939.660	(44.976.370)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	110 Orang	110 Orang	109.939.120	69.632.100	67.598.920	(2.033.180)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	449.999.830	449.999.830	395.667.040	(54.332.790)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	200 Orang	200 Orang	449.999.830	449.999.830	395.667.040	(54.332.790)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	100 Cabor	100 Cabor	8.611.431.860	8.361.431.860	8.394.951.840	33.519.980				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dibina dan dikembangkan	6 Cabang Olahraga	6 Cabang Olahraga	200.000.000	100.000.000	99.994.800	(5.200)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	20 Unit	20 Unit	200.000.000	100.000.000	99.994.800	(5.200)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	4 Dokumen	4 Dokumen	1.386.431.860	1.386.431.860	1.331.639.540	(54.792.320)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	4 Kegiatan	465.000.000	465.000.000	447.750.200	(17.249.800)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	600 Orang	600 Orang	921.431.860	921.431.860	883.889.340	(37.542.520)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Olahraga Prestasi yang di bina dan dikembangkan	50 orang	50 orang	75.000.000	75.000.000	163.317.500	88.317.500				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	90 orang	190 orang	75.000.000	75.000.000	163.317.500	88.317.500	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan	2 Organisasi	2 Organisasi	6.500.000.000	6.350.000.000	6.350.000.000	-				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	6.500.000.000	6.350.000.000	6.350.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1 unit	1 unit	450.000.000	450.000.000	450.000.000	-				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	450.000.000	450.000.000	450.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang di bina	100 %	100 %	29.998.900	29.998.900	29.998.900	-				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan	1 Laporan	1 Laporan	29.998.900	29.998.900	29.998.900	-				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	29.998.900	29.998.900	29.998.900	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9.586.263.221	9.749.325.625	9.336.406.308	(412.919.317)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				9.586.263.221	9.749.325.625	9.336.406.308	(412.919.317)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	10 %	10 %	803.999.610	703.999.610	602.056.635	(101.942.975)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola	4 Laporan	4 Laporan	61.999.790	61.999.790	30.999.895	(30.999.895)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	50 Orang	50 Orang	61.999.790	61.999.790	30.999.895	(30.999.895)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	2 unit	2 unit	600.000.000	500.000.000	500.000.000	-				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	600.000.000	500.000.000	500.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	41.999.820	41.999.820	21.056.740	(20.943.080)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	2 Laporan	2 Laporan	41.999.820	41.999.820	21.056.740	(20.943.080)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase obyek wisata yang dipromosikan	24 %	24 %	1.010.000.000	985.000.000	901.482.400	(83.517.600)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Wisata yang dipromosikan	6 Dokumen	6 Dokumen	1.010.000.000	985.000.000	901.482.400	(83.517.600)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	12.500.000	(12.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Kegiatan	9 Kegiatan	910.000.000	885.000.000	825.079.380	(59.920.620)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	2 Promosi	75.000.000	75.000.000	63.903.020	(11.096.980)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif (semua 17 Subsektor yang dikembangkan)	33.33 %	33.33 %	100.000.000	100.000.000	194.250.000	94.250.000				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	100.000.000	194.250.000	94.250.000				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	194.250.000	94.250.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan	25 %	25 %	296.200.160	221.200.160	181.544.880	(39.655.280)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan	60 Orang	60 Orang	221.200.160	146.200.160	144.044.880	(2.155.280)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	86.200.160	86.200.160	84.044.880	(2.155.280)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	50 Orang	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		0 Orang	75.000.000	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan kapasitas Pelaku Ekraf	25 Orang	25 Orang	75.000.000	75.000.000	37.500.000	(37.500.000)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	30 Orang	30 Orang	75.000.000	75.000.000	37.500.000	(37.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	7.376.063.451	7.739.125.855	7.457.072.393	(282.053.462)		DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	40.000.000	40.000.000	27.850.000	(12.150.000)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	25.000.000	25.000.000	16.600.000	(8.400.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	15.000.000	11.250.000	(3.750.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	4.707.469.466	5.070.531.870	5.085.838.453	15.306.583				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bln	41 Orang/bln	4.707.469.466	5.070.531.870	5.085.838.453	15.306.583	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75 orang	75 orang	33.600.000	33.600.000	33.600.000	-				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	33.600.000	33.600.000	33.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	791.998.140	791.998.140	528.838.095	(263.160.045)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	179.999.540	179.999.540	155.339.295	(24.660.245)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	134.999.000	134.999.000	134.999.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.000.000	50.000.000	25.000.000	(25.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264 Laporan	264 Laporan	426.999.600	426.999.600	213.499.800	(213.499.800)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	20 unit	20 unit	109.990.830	109.990.830	109.990.830	-				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	18 Unit	109.990.830	109.990.830	109.990.830	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	1.093.993.800	1.093.993.800	1.071.943.800	(22.050.000)				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	129.999.600	129.999.600	159.999.600	30.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	963.994.200	963.994.200	911.944.200	(52.050.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	75 unit	75 unit	599.011.215	599.011.215	599.011.215	-				Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	179.725.020	179.725.020	179.725.020	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	117 Unit	117 Unit	319.286.440	319.286.440	319.286.440	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	99.999.755	99.999.755	99.999.755	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	Dinas Pertanian				61.122.501.455	81.571.286.540	73.202.288.054	(8.368.998.486)				Dinas Pertanian
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				61.122.501.455	81.571.286.540	73.202.288.054	(8.368.998.486)				Dinas Pertanian
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				61.122.501.455	81.571.286.540	73.202.288.054	(8.368.998.486)				Dinas Pertanian
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Populasi ternak Produksi Tanaman Hortikultura	9075397 ekor	9075397 ekor	13.382.968.670	15.780.557.600	12.958.563.660	(2.821.993.940)				Dinas Pertanian
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Produksi Tanaman Pangan	71967 ton	71967 ton	1.560.108.010	4.287.093.400	1.649.125.670	(2.637.967.730)				Dinas Pertanian
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian Hortikultura yang Digunakan	5 jenis	5 jenis	375.000.000	3.536.985.000	915.902.610	(2.621.082.390)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian Hortikultura yang Digunakan	1 Laporan	1 Laporan	175.000.000	70.000.000	54.606.710	(15.393.290)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.02.2.01.0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	1 Laporan	1 Laporan	1.010.108.010	680.108.400	678.616.350	(1.492.050)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan yang Dikelola	4 Jenis	4 Jenis	699.999.800	635.950.250	513.751.590	(122.198.660)				Dinas Pertanian
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	579.999.800	579.999.800	483.720.900	(96.278.900)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	55.950.450	30.030.690	(25.919.760)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kontes Ternak	100 ekor	0 Ekor	100.000.000	-	-	-				Dinas Pertanian
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	0 Laporan	100.000.000	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Populasi Ternak (Kambing, Domba, Sapi, Itik dan Ayam)	155702 ekor	155702 ekor	11.022.860.860	10.857.513.950	10.795.686.400	(61.827.550)				Dinas Pertanian
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 laporan	1 Laporan	11.022.860.860	10.857.513.950	10.795.686.400	(61.827.550)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas pelayanan Jaringan Irigasi	9,8 %	9,8 %	17.729.951.090	29.543.365.690	24.932.131.595	(4.611.234.095)				Dinas Pertanian
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Alsintan yang Dimanfaatkan Kelompok Tani/Gapoktan	545 unit	545 unit	1.957.603.290	6.779.292.890	2.786.958.795	(3.992.334.095)				Dinas Pertanian
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.957.603.290	2.155.527.890	2.152.593.795	(2.934.095)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0 Unit	-	3.989.400.000	-	(3.989.400.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	60 unit	60 unit	-	634.365.000	634.365.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Tersedia	237 unit	141 unit	15.772.347.800	22.764.072.800	22.145.172.800	(618.900.000)				Dinas Pertanian
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Embung pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0 Unit	200.000.000	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	0 Unit	-	618.900.000	-	(618.900.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Prasarana pertanian lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	2 unit	-	250.000.000	250.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jaringan irigasi usaha tani yang Direhabilitasi dan Dipelihara	98 Unit	98 Unit	15.572.347.800	21.895.172.800	21.895.172.800	-	Kab. Cilacap	DAK	Sisa DAK Fisik 2023	Dinas Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	24,90 %	24,90 %	349.999.920	963.600.000	925.194.780	(38.405.220)				Dinas Pertanian
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Angka Kesakitan Ternak	11,650 %	11,650 %	349.999.920	186.000.000	147.594.780	(38.405.220)				Dinas Pertanian
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 Wilayah	1 Wilayah	349.999.920	186.000.000	147.594.780	(38.405.220)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium		1 Laporan	-	234.000.000	777.600.000	543.600.000				Dinas Pertanian
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 bulan	12 bulan	-	200.000.000	-	(200.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 bulan	12 bulan	-	34.000.000	777.600.000	743.600.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		1 Dokumen	-	543.600.000	-	(543.600.000)				Dinas Pertanian
3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	15 Orang	15 Orang	-	543.600.000	-	(543.600.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang Tertangani	100 %	100 %	79.999.860	60.000.000	47.499.810	(12.500.190)				Dinas Pertanian
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Petani yang Mengikuti AUP dan AUTS	1360 orang	1360 orang	79.999.860	60.000.000	47.499.810	(12.500.190)				Dinas Pertanian
3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	1 Laporan	79.999.860	60.000.000	47.499.810	(12.500.190)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	7,8 %	7,8 %	545.000.000	4.797.890.000	5.430.991.000	633.101.000				Dinas Pertanian
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelasnya	235 kelompok	235 kelompok	545.000.000	4.797.890.000	5.430.991.000	633.101.000				Dinas Pertanian
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22 Unit	22 Unit	395.000.000	980.000.000	47.680.200	(932.319.800)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	235 kelompok	235 kelompok	150.000.000	1.617.890.000	279.090.800	(1.338.799.200)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang yang diselenggarakan	22 unit	0 unit	-	2.200.000.000	-	(2.200.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh yg ditingkatkan kapasitasnya		120 Orang	-	-	5.104.220.000	5.104.220.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	29.034.581.915	30.425.873.250	28.907.907.209	(1.517.966.041)		DAU		Dinas Pertanian
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-				Dinas Pertanian
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	23.531.801.285	25.092.046.800	24.219.789.339	(872.257.461)				Dinas Pertanian
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	205 Orang	204 Orang	23.531.801.285	25.092.046.800	24.219.789.339	(872.257.461)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	285 orang	285 orang	175.000.000	175.000.000	162.500.000	(12.500.000)				Dinas Pertanian
3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	2 Orang	25.000.000	25.000.000	12.500.000	(12.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	1.449.926.400	1.449.926.400	946.546.060	(503.380.340)				Dinas Pertanian
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	175.000.000	175.000.000	116.522.360	(58.477.640)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	499.926.400	499.926.400	441.598.700	(58.327.700)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75.000.000	75.000.000	38.425.000	(36.575.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	300 Laporan	700.000.000	700.000.000	350.000.000	(350.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	2 paket	2 paket	249.750.230	199.750.230	199.750.230	-				Dinas Pertanian
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	30 Unit	99.961.570	49.961.570	49.961.570	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	149.788.660	149.788.660	149.788.660	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	2.388.106.000	2.369.151.820	2.277.351.820	(91.800.000)				Dinas Pertanian
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	550.000.000	550.000.000	550.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	1.838.106.000	1.819.151.820	1.727.351.820	(91.800.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	12 bulan	12 bulan	1.199.998.000	1.099.998.000	1.061.969.760	(38.028.240)				Dinas Pertanian
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	130 Unit	115 Unit	450.000.000	450.000.000	411.971.760	(38.028.240)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	110 Unit	99.998.000	99.998.000	99.998.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	29 Unit	29 Unit	650.000.000	550.000.000	550.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Pertanian
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah				19.324.880.129	19.243.639.855	19.129.339.823	(114.300.032)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				687.846.500	550.248.150	662.352.070	112.103.920				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				687.846.500	550.248.150	662.352.070	112.103.920				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	72 %	72 %	32.500.000	32.500.000	18.349.700	(14.150.300)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang di periksa dan diawasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota kewenangan Kabupaten/Kota	90 Unit	90 Unit	32.500.000	32.500.000	18.349.700	(14.150.300)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	32.500.000	32.500.000	18.349.700	(14.150.300)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola koperasi yang memiliki kompetensi	71.84 %	71.84 %	45.000.000	35.821.650	178.139.120	142.317.470				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	30 Orang	230 Orang	45.000.000	35.821.650	178.139.120	142.317.470				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	230 Orang	45.000.000	35.821.650	178.139.120	142.317.470	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	37.28 %	37.28 %	75.000.000	35.000.000	35.000.000	-				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota koperasi yang difasilitasi	30 Orang	30 Orang	75.000.000	35.000.000	35.000.000	-				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit usaha	1 Unit usaha	75.000.000	35.000.000	35.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	12.23 %	12.23 %	90.000.000	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi (Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi)	380 Unit Usaha	380 Unit Usaha	90.000.000	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	380 Orang	145 Orang	90.000.000	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)	Kab. Cilacap	DAK	SiLPA DAK Non Fisik	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	3.3 %	2.70%	445.346.500	406.926.500	410.863.250	3.936.750				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang dikembangkan Usahanya	530 Unit Usaha	300 Unit Usaha	445.346.500	406.926.500	410.863.250	3.936.750				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	530 Unit Usaha	300 Unit Usaha	445.346.500	406.926.500	410.863.250	3.936.750	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				18.637.033.629	18.693.391.705	18.466.987.753	(226.403.952)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				18.637.033.629	18.693.391.705	18.466.987.753	(226.403.952)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang direhabilitasi	75 %	75 %	2.477.925.000	2.106.821.500	2.248.116.690	141.295.190				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	43 Unit	33 Unit	2.087.925.000	1.716.821.500	1.849.308.990	132.487.490				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	8 Unit	8 Unit	2.037.925.000	1.691.345.200	1.824.178.790	132.833.590	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	47 Unit	47 Unit	50.000.000	25.476.300	25.130.200	(346.100)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kelompok Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	4 Kelompok	4 Kelompok	390.000.000	390.000.000	398.807.700	8.807.700				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen	1 dokumen	390.000.000	390.000.000	398.807.700	8.807.700	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Ketersediaan Data Harga Kebutuhan Pokok	100 %	100 %	637.000.000	618.500.000	608.846.820	(9.653.180)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota	4 Laporan	4 Laporan	18.500.000	-	-	-				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	4 Laporan	18.500.000	-	-	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)	1 Laporan	1 Laporan	600.000.000	600.000.000	599.712.230	(287.770)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	9 Laporan	600.000.000	600.000.000	599.712.230	(287.770)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rakor dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota	4 Laporan	4 Laporan	18.500.000	18.500.000	9.134.590	(9.365.410)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	4 Laporan	18.500.000	18.500.000	9.134.590	(9.365.410)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor	4 %	4 %	170.100.000	120.100.000	115.947.760	(4.152.240)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pengembangannya	35 Pelaku usaha	35 Pelaku usaha	170.100.000	120.100.000	115.947.760	(4.152.240)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	25 Pelaku usaha	25 Pelaku usaha	134.000.000	84.000.000	80.126.200	(3.873.800)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10 Pelaku usaha	10 Pelaku usaha	36.100.000	36.100.000	35.821.560	(278.440)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UUTP) yang di tera/ tera ulang dalam tahun berjalan	100 %	100 %	65.670.980	65.670.980	61.893.570	(3.777.410)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelayanan tera	34 Kali	34 Kali	65.670.980	65.670.980	61.893.570	(3.777.410)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	19.460 Unit	18.293 Unit	65.670.980	65.670.980	61.893.570	(3.777.410)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	0.43 %	0.43%	210.850.000	161.271.700	437.025.900	275.754.200				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Kampanye Penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri	5 Paket	6 Paket	210.850.000	161.271.700	437.025.900	275.754.200				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	25 UMKM	60 UMKM	200.850.000	152.271.700	432.271.700	280.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	6 UMKM	10.000.000	9.000.000	4.754.200	(4.245.800)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	15.075.487.649	15.621.027.525	14.995.157.013	(625.870.512)		DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	9.320.129.634	9.865.669.510	9.726.416.318	(139.253.192)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 orang	82 orang	9.320.129.634	9.865.669.510	9.726.416.318	(139.253.192)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200 Orang	185 Orang	135.498.290	135.498.290	118.500.000	(16.998.290)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	120.498.290	120.498.290	111.000.000	(9.498.290)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	1 Orang	15.000.000	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	1.238.514.010	1.238.514.010	916.368.410	(322.145.600)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	134.521.110	134.521.110	112.558.610	(21.962.500)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	381.657.400	381.657.400	381.657.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	174.904.600	174.904.600	148.437.800	(26.466.800)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	225 Laporan	547.430.900	547.430.900	273.714.600	(273.716.300)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	16 unit	11 unit	114.674.860	114.674.860	114.273.450	(401.410)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	11 unit	114.674.860	114.674.860	114.273.450	(401.410)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	3.599.738.855	3.599.738.855	3.452.667.515	(147.071.340)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	1.004.129.315	1.004.129.315	978.629.315	(25.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	2.595.609.540	2.595.609.540	2.474.038.200	(121.571.340)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	113 Unit	142 Unit	626.932.000	626.932.000	626.931.320	(680)				Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	37 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 unit	92 unit	61.450.000	61.450.000	61.450.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	10 unit	365.482.000	365.482.000	365.481.320	(680)	Kab. Cilacap	DAU		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Sekretariat Daerah				98.099.388.058	99.323.108.575	103.096.742.936	3.773.634.361				Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				98.099.388.058	99.323.108.575	103.096.742.936	3.773.634.361				Sekretariat Daerah
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				98.099.388.058	99.323.108.575	103.096.742.936	3.773.634.361				Sekretariat Daerah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase koordinasi bidang Pemerintahan	100 %	100 %	37.543.104.640	37.443.104.640	38.467.881.950	1.024.777.310				Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan	7 Dokumen	7 Dokumen	645.184.300	645.184.300	348.581.220	(296.603.080)				Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	181.956.700	181.956.700	115.221.900	(66.734.800)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	3 Dokumen	428.227.600	428.227.600	208.799.320	(219.428.280)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	35.000.000	24.560.000	(10.440.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	301 Dokumen	501 dokumen	35.977.488.310	35.877.488.310	37.346.901.730	1.469.413.420				Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	300Dokumen	301 dokumen	14.018.159.390	13.918.159.390	14.505.165.010	587.005.620	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	190 Dokumen	191 dokumen	20.819.338.680	20.819.338.680	21.750.946.480	931.607.800	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	19 Dokumen	19 dokumen	1.139.990.240	1.139.990.240	1.090.790.240	(49.200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasikan	60 dokumen	60 dokumen	712.732.030	712.732.030	564.699.000	(148.033.030)				Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	60 Dokumen	170.002.080	170.002.080	145.676.500	(24.325.580)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	37 Kasus	37 Kasus	353.245.750	353.245.750	324.160.000	(29.085.750)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	60 Dokumen	189.484.200	189.484.200	94.862.500	(94.621.700)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen kerja sama daerah	20 dokumen	20 dokumen	207.700.000	207.700.000	207.700.000	-				Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	20 Dokumen	207.700.000	207.700.000	207.700.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi bidang Perekonomian dan SDA	100 %	100 %	16.514.531.530	14.458.639.530	14.352.135.530	(106.504.000)				Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 %	100 %	1.889.780.750	1.889.780.750	2.454.876.550	565.095.800				Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	30 Dokumen	30 Dokumen	308.470.000	308.470.000	1.061.313.600	752.843.600	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	25 Laporan	25 Laporan	659.411.750	659.411.750	635.870.250	(23.541.500)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	30 Dokumen	30 Dokumen	921.899.000	921.899.000	757.692.700	(164.206.300)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Penyerapan APBD	94,75 %	94,75 %	11.987.268.300	9.772.268.300	10.451.766.700	679.498.400				Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	399.500.000	399.500.000	145.468.000	(254.032.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	14 Laporan	14 Laporan	237.360.000	237.360.000	183.254.000	(54.106.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	11.350.408.300	9.135.408.300	10.123.044.700	987.636.400	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	100 %	100%	2.225.729.980	2.225.729.980	887.805.080	(1.337.924.900)				Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1200Dokumen	1200Dokumen	2.072.293.370	2.072.293.370	738.269.870	(1.334.023.500)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen	88.159.600	88.159.600	84.258.200	(3.901.400)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	500 Orang	400 Orang	65.277.010	65.277.010	65.277.010	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	28 Dokumen	28 Dokumen	411.752.500	570.860.500	557.687.200	(13.173.300)				Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	28 Dokumen	28 Dokumen	411.752.500	570.860.500	557.687.200	(13.173.300)	Kab. Cilacap	DBHCHT	Sisa DBHCHT	Sekretariat Daerah
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	44.041.751.888	47.421.364.405	50.276.725.456	2.855.361.051		DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	26.024.000	26.024.000	69.124.000	43.100.000				Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	11.962.000	11.962.000	8.712.000	(3.250.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	14.062.000	14.062.000	60.412.000	46.350.000	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerapan anggaran Setda	90 %	91 %	24.067.345.199	27.446.129.940	26.331.999.186	(1.114.130.754)				Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	158Orang/bulan	155Orang/bulan	24.010.245.199	27.389.029.940	26.281.364.506	(1.107.665.434)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	44.500.000	44.500.000	40.250.000	(4.250.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	12.600.000	12.600.000	10.384.680	(2.215.320)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset Setda dalam kondisi baik	50 %	50 %	144.000.000	144.000.000	143.751.380	(248.620)				Sekretariat Daerah
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	144.000.000	144.000.000	143.751.380	(248.620)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD	100 % 100 %	100%	157.000.000	157.000.000	168.375.000	11.375.000				Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 paket	132.000.000	132.000.000	159.000.000	27.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	8 orang	25.000.000	25.000.000	9.375.000	(15.625.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	12 bulan	5.498.125.000	5.498.125.000	7.073.153.660	1.575.028.660				Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.628.125.000	1.628.125.000	2.466.048.000	837.923.000	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	600.000.000	600.000.000	600.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	270.000.000	270.000.000	157.105.660	(112.894.340)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	1.800.000.000	1.800.000.000	2.750.000.000	950.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000	1.200.000.000	1.100.000.000	(100.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset Setda dalam kondisi baik	50 %	50 %	716.114.300	716.114.300	2.260.232.065	1.544.117.765				Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit	193 unit	558.237.700	558.237.700	2.102.355.465	1.544.117.765	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit	117 unit	157.876.600	157.876.600	157.876.600	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan administrasi perkantoran jasa penunjuang urusan pemerintahan daerah setiap bulan	12 bulan	12 bulan	2.816.096.000	2.816.096.000	2.764.896.000	(51.200.000)				Sekretariat Daerah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	22.000.000	22.000.000	22.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000	1.200.000.000	1.400.000.000	200.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.594.096.000	1.594.096.000	1.342.896.000	(251.200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100 %	100 %	2.720.000.000	2.720.000.000	2.969.100.000	249.100.000				Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	70 Unit	910.000.000	910.000.000	955.100.000	45.100.000	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	17 Unit	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1600 Unit	1600 Unit	610.000.000	610.000.000	814.000.000	204.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan	12 bulan	12 bulan	1.193.581.229	1.194.409.005	2.248.409.005	1.054.000.000				Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2Orang/Bulan	2Orang/Bulan	176.581.229	177.409.005	177.409.005	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.017.000.000	1.017.000.000	2.071.000.000	1.054.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pelayanan pejabat sesuai kebutuhan	100 %	100 %	4.300.000.000	4.300.000.000	4.150.435.060	(149.564.940)				Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	300.000.000	300.000.000	150.435.060	(149.564.940)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen hasil penataan organisasi	162 dokumen	162 dokumen	1.230.252.970	1.230.252.970	1.118.483.210	(111.769.760)				Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	108Dokumen	108Dokumen	216.499.700	216.499.700	166.411.700	(50.088.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	41 Laporan	41 Laporan	645.947.000	645.947.000	704.735.870	58.788.870	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	8 Dokumen	8 Dokumen	257.443.770	257.443.770	162.905.170	(94.538.600)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Dokumen	5 Dokumen	110.362.500	110.362.500	84.430.470	(25.932.030)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100 %	100 %	1.173.213.190	1.173.213.190	978.766.890	(194.446.300)				Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	2 Laporan	2 Laporan	669.539.440	669.539.440	669.539.440	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	2 Laporan	126.298.800	126.298.800	66.947.900	(59.350.900)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3 Laporan	3 Laporan	377.374.950	377.374.950	242.279.550	(135.095.400)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat Daerah
	Sekretariat DPRD				88.756.534.881	89.161.219.852	84.396.663.155	(4.764.556.697)				Sekretariat DPRD
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				88.756.534.881	89.161.219.852	84.396.663.155	(4.764.556.697)				Sekretariat DPRD

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.02	SEKRETARIAT DPRD				88.756.534.881	89.161.219.852	84.396.663.155	(4.764.556.697)				Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi rapat-rapat tepat jadwal	100 %	100 %	45.265.060.860	38.782.750.210	31.160.030.210	(7.622.720.000)				Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah raperda inisiatif DPRD	5 raperda	5 raperda	271.400.000	271.400.000	260.700.000	(10.700.000)				Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	271.400.000	271.400.000	260.700.000	(10.700.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah pelatihan / bintek yang mendukung peningkatan kapasitas DPRD	36 kegiatan	36 kegiatan	3.472.040.860	3.472.040.860	3.860.020.860	387.980.000				Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	250Dokumen	250Dokumen	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	24 Orang	24 Orang	267.500.000	267.500.000	421.500.000	154.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	8 Orang	240.000.000	240.000.000	240.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	714.540.860	714.540.860	948.520.860	233.980.000	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	jumlah aspirasi masyarakat yang terhimpun	180 dokumen	180 dokumen	12.732.250.000	12.732.250.000	12.232.250.000	(500.000.000)				Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	95 Laporan	95 Laporan	1.222.000.000	1.222.000.000	722.000.000	(500.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150Dokumen	150Dokumen	11.510.250.000	11.510.250.000	11.510.250.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi	95 kegiatan	95 kegiatan	28.789.370.000	22.307.059.350	14.807.059.350	(7.500.000.000)				Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	93 Dokumen	93 Dokumen	28.789.370.000	22.307.059.350	14.807.059.350	(7.500.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase implementasi tugas dan kewajiban fasilitasi terhadap DPRD yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	100 %	43.491.474.021	50.378.469.642	53.236.632.945	2.858.163.303		DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	40.000.000	40.000.000	27.900.000	(12.100.000)				Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	25.000.000	16.750.000	(8.250.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	15.000.000	15.000.000	11.150.000	(3.850.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan setwan kabupaten cilacap	12 bulan	12 bulan	5.924.684.949	6.329.369.920	6.929.581.743	600.211.823				Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45Orang/bulan	45Orang/bulan	5.924.684.949	6.329.369.920	6.929.581.743	600.211.823	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhiya administrasi barang milik daerah Sekretariat Daerah dalam pembayaran asuransi kendaraan	24 unit	24 unit	177.678.000	188.300.000	188.300.000	-				Sekretariat DPRD
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	177.678.000	188.300.000	188.300.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang terfasilitasi administrasi kepegawaian setwan	92 orang	92 orang	173.000.000	376.500.000	419.000.000	42.500.000				Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	84 Paket	84 Paket	48.000.000	48.000.000	48.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25 Orang	125.000.000	328.500.000	371.000.000	42.500.000	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum kantor sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap	12 bulan	12 bulan	2.773.166.690	2.773.166.690	2.336.496.640	(436.670.050)				Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	55.453.690	55.453.690	55.453.690	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	275.551.770	275.551.770	262.682.720	(12.869.050)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	119.453.000	119.453.000	119.453.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	142.068.000	142.068.000	70.836.000	(71.232.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	5.892.630	5.892.630	5.892.630	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	374.748.000	374.748.000	474.748.000	100.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93 Laporan	93 Laporan	1.799.999.600	1.799.999.600	1.347.430.600	(452.569.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	274 unit	274 unit	209.349.330	3.035.974.330	3.394.662.430	358.688.100				Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	30.588.420	317.588.420	378.588.420	61.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	178.760.910	2.718.385.910	3.016.074.010	297.688.100	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap	12 bulan	12 bulan	1.456.723.500	1.879.723.500	1.853.959.500	(25.764.000)				Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	15.399.500	15.399.500	15.399.500	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	556.564.000	979.564.000	1.007.800.000	28.236.000	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	884.760.000	884.760.000	830.760.000	(54.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	439 unit	439 unit	1.356.425.320	4.374.988.970	4.391.770.970	16.782.000				Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	42 Unit	585.447.000	613.475.000	667.407.000	53.932.000	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	300 Unit	186.529.320	194.714.970	277.564.970	82.850.000	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	513.449.000	3.495.799.000	3.375.799.000	(120.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	141 Unit	141 Unit	71.000.000	71.000.000	71.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terpenuhinya kesejahteraan anggota DPRD	50 orang	50 orang	30.643.446.832	30.643.446.832	32.978.034.832	2.334.588.000				Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50Orang/Bulan	50Orang/Bulan	30.155.946.832	30.155.946.832	32.490.534.832	2.334.588.000	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	300 Paket	300 Paket	362.500.000	362.500.000	362.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	50 Orang	125.000.000	125.000.000	125.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Administrasi DPRD yang terlayani setiap bulan	12 bulan	12 bulan	736.999.400	736.999.400	716.926.830	(20.072.570)				Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	39.995.000	39.995.000	19.922.430	(20.072.570)	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	697.004.400	697.004.400	697.004.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Sekretariat DPRD
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah				19.598.701.847	20.668.781.851	17.508.181.034	(3.160.600.817)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				19.598.701.847	20.668.781.851	17.508.181.034	(3.160.600.817)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01	PERENCANAAN				18.076.951.847	19.147.031.851	16.377.864.074	(2.769.167.777)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian realisasi target Program tahunan	93 %	93 %	3.016.000.000	3.016.000.000	1.845.096.150	(1.170.903.850)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.680.000.000	1.680.000.000	1.080.559.450	(599.440.550)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 BeritaAcara	2 BeritaAcara	530.000.000	530.000.000	235.748.910	(294.251.090)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	1.150.000.000	1.150.000.000	844.810.540	(305.189.460)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	425.000.000	425.000.000	334.537.500	(90.462.500)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000	175.000.000	121.041.900	(53.958.100)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku	2 Buku	250.000.000	250.000.000	213.495.600	(36.504.400)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	396.000.000	396.000.000	330.149.600	(65.850.400)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	245.000.000	245.000.000	227.325.000	(17.675.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	151.000.000	151.000.000	102.824.600	(48.175.400)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	515.000.000	515.000.000	99.849.600	(415.150.400)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	515.000.000	515.000.000	99.849.600	(415.150.400)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	% realisasi indikator OPD dibawah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase realisasi indikator OPD di bawah rumpun perekonomian Persentase realisasi indiktor OPD di bawah rumpun infrastruktur dan kewilayahan	93 %	93 %	2.174.542.360	2.174.542.360	1.458.903.260	(715.639.100)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinir dalam Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	809.340.360	809.340.360	603.277.980	(206.062.380)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	40.737.780	40.737.780	33.779.780	(6.958.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	18.224.800	18.224.800	16.724.220	(1.500.580)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	18.793.390	18.793.390	16.255.000	(2.538.390)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	10.499.900	10.499.900	9.390.620	(1.109.280)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	31.237.830	31.237.830	27.200.230	(4.037.600)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	27.618.000	27.618.000	23.359.610	(4.258.390)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	23.991.790	23.991.790	20.095.620	(3.896.170)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	9 laporan	638.236.870	638.236.870	456.472.900	(181.763.970)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinir dalam Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	478.052.000	478.052.000	342.078.100	(135.973.900)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	34.440.000	34.440.000	21.696.400	(12.743.600)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	23.648.000	23.648.000	21.778.400	(1.869.600)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	36.855.000	36.855.000	36.515.800	(339.200)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	7 Laporan	3 Laporan	293.543.000	293.543.000	188.289.700	(105.253.300)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.515.000	25.515.000	22.292.400	(3.222.600)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	16.328.000	16.328.000	12.210.000	(4.118.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	19.215.000	19.215.000	15.750.000	(3.465.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	28.508.000	28.508.000	23.545.400	(4.962.600)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dikoordinir dalam Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	887.150.000	887.150.000	513.547.180	(373.602.820)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	315.000.000	315.000.000	281.500.000	(33.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	37.800.000	37.800.000	21.405.000	(16.395.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	38.850.000	38.850.000	21.750.000	(17.100.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	115.500.000	115.500.000	23.800.000	(91.700.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	30.000.000	20.864.060	(9.135.940)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	175.000.000	175.000.000	19.114.060	(155.885.940)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	138.000.000	138.000.000	120.364.060	(17.635.940)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	37.000.000	37.000.000	4.750.000	(32.250.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	12.886.409.487	13.956.489.491	13.073.864.664	(882.624.827)		DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000	40.000.000	38.500.000	(1.500.000)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	25.000.000	23.500.000	(1.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	8.266.830.487	9.336.910.491	8.881.987.864	(454.922.627)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59Orang/bulan	53Orang/bulan	8.266.830.487	9.336.910.491	8.881.987.864	(454.922.627)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 Orang	85 Orang	248.000.000	248.000.000	223.000.000	(25.000.000)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	198.000.000	198.000.000	198.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	50.000.000	50.000.000	25.000.000	(25.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	1.672.087.000	1.672.087.000	1.154.947.000	(517.140.000)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	245.365.000	245.365.000	228.225.000	(17.140.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	353.222.000	353.222.000	353.222.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	73.500.000	73.500.000	73.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425 Laporan	225 Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000	(500.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	91 Unit	47 Unit	779.100.000	779.100.000	802.417.800	23.317.800				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	24 Unit	101.100.000	101.100.000	101.100.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	20 Unit	657.000.000	657.000.000	680.317.800	23.317.800	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit	3 Unit	21.000.000	21.000.000	21.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.324.334.000	1.324.334.000	1.298.954.000	(25.380.000)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	262.500.000	262.500.000	264.120.000	1.620.000	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.061.834.000	1.061.834.000	1.034.834.000	(27.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	201 Unit	170 Unit	556.058.000	556.058.000	674.058.000	118.000.000				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	26 Unit	238.192.000	238.192.000	238.192.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	103 Unit	106.160.000	106.160.000	94.160.000	(12.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	330.000.000	130.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit	40 Unit	11.706.000	11.706.000	11.706.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.521.750.000	1.521.750.000	1.130.316.960	(391.433.040)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase riset daerah yang ditindaklanjuti	40 %	40 %	1.521.750.000	1.521.750.000	1.130.316.960	(391.433.040)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	24 laporan	24 laporan	635.000.000	635.000.000	506.871.600	(128.128.400)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	6 Laporan	6 Laporan	200.000.000	200.000.000	121.284.000	(78.716.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	30.000.000	19.328.000	(10.672.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02.2.01.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	10 Laporan	10 Laporan	275.000.000	275.000.000	275.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	3 Laporan	3 Laporan	130.000.000	130.000.000	91.259.600	(38.740.400)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah laporan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	21 Dokumen	21 Dokumen	285.000.000	285.000.000	151.049.010	(133.950.990)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dokumen	3 Dokumen	90.000.000	90.000.000	41.980.610	(48.019.390)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000	60.000.000	39.482.000	(20.518.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	20 Dokumen	20 Dokumen	135.000.000	135.000.000	69.586.400	(65.413.600)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000	-	(30.000.000)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000	-	(30.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan Fasilitas iPengembangan Inovasi dan Teknologi	219 Laporan	219 Laporan	571.750.000	571.750.000	472.396.350	(99.353.650)				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	15 Dokumen	15 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	100 Laporan	100 Laporan	275.000.000	275.000.000	248.118.700	(26.881.300)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	100 Laporan	100 Laporan	170.000.000	170.000.000	148.912.650	(21.087.350)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	3 Laporan	75.000.000	75.000.000	23.615.000	(51.385.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	36.750.000	36.750.000	36.750.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah				56.427.391.812	32.292.687.198	30.655.053.545	(1.637.633.653)				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				56.427.391.812	32.292.687.198	30.655.053.545	(1.637.633.653)				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02	KEUANGAN				56.427.391.812	32.292.687.198	30.655.053.545	(1.637.633.653)				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-0.087 %	-0.087 %	2.545.844.160	2.545.844.160	2.037.993.300	(507.850.860)				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pengelolaan Keuangan	58 Dokumen	58 Dokumen	1.415.840.100	1.415.840.100	1.324.735.590	(91.104.510)				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	56.238.000	56.238.000	51.038.000	(5.200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	62.065.600	62.065.600	56.865.600	(5.200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	148.831.200	148.831.200	142.831.200	(6.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8 Dokumen	8 Dokumen	141.276.000	141.276.000	135.276.000	(6.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	30 Dokumen	30 Dokumen	160.803.300	160.803.300	92.098.790	(68.704.510)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	846.626.000	846.626.000	846.626.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	78 Dokumen	78 Dokumen	484.035.000	484.035.000	283.743.450	(200.291.550)				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	56.390.000	56.390.000	39.190.000	(17.200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	4 Dokumen	140.200.000	140.200.000	116.500.000	(23.700.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50 Dokumen	50 Dokumen	76.714.000	76.714.000	54.814.000	(21.900.000)	Kab. Cilacap	DAU	Sisa Dana Insentif Fiskal	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	12 Dokumen	210.731.000	210.731.000	73.239.450	(137.491.550)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	28 dokumen	28 dokumen	645.969.060	645.969.060	429.514.260	(216.454.800)				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	19 Dokumen	17 Dokumen	64.664.000	64.664.000	51.560.000	(13.104.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	7 Laporan	236.939.200	236.939.200	221.784.260	(15.154.940)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	82.842.520	82.842.520	24.140.000	(58.702.520)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	368 Orang	368 Orang	261.523.340	261.523.340	132.030.000	(129.493.340)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	ya ya/tidak	ya ya/tidak	11.315.224.076	11.315.224.076	10.593.527.106	(721.696.970)				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Aset/Barang Milik Daerah	951 Laporan	951 Laporan	11.315.224.076	11.315.224.076	10.593.527.106	(721.696.970)				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	386.904.780	386.904.780	360.675.200	(26.229.580)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	930 Laporan	930 Laporan	200.000.000	200.000.000	173.700.410	(26.299.590)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.712.037.000	5.712.037.000	5.668.702.020	(43.334.980)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4.504.324.866	4.504.324.866	3.568.619.356	(935.705.510)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	237.555.000	237.555.000	486.465.440	248.910.440	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	240 Orang	240 Orang	274.402.430	274.402.430	135.364.680	(139.037.750)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	42.566.323.576	18.431.618.962	18.023.533.139	(408.085.823)		DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	41.124.000	41.124.000	33.674.000	(7.450.000)				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	25.000.000	20.900.000	(4.100.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	16.124.000	16.124.000	12.774.000	(3.350.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	9.215.279.944	9.080.575.330	8.757.480.967	(323.094.363)				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59Orang/bulan	73Orang/bulan	9.215.279.944	9.080.575.330	8.757.480.967	(323.094.363)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	79.600.000	79.600.000	67.100.000	(12.500.000)				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	90 Paket	91 Paket	54.600.000	54.600.000	54.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	25.000.000	25.000.000	12.500.000	(12.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Dokumen	48 Dokumen	1.204.500.000	1.204.500.000	1.000.827.540	(203.672.460)				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Paket	98.000.000	98.000.000	82.595.640	(15.404.360)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Paket	480.000.000	480.000.000	480.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12 Paket	176.500.000	176.500.000	88.231.900	(88.268.100)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	450.000.000	450.000.000	350.000.000	(100.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	55 Unit	55 Unit	4.810.564.730	4.810.564.730	5.072.335.730	261.771.000				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	10 Unit	4.128.729.730	4.128.729.730	4.128.729.730	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 Unit	47 Unit	681.835.000	681.835.000	943.606.000	261.771.000	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	24 Laporan	26.138.464.902	2.138.464.902	2.015.324.902	(123.140.000)				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25.056.242.902	1.056.242.902	812.242.902	(244.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.082.222.000	1.082.222.000	1.103.082.000	20.860.000	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	210 Unit	210 Unit	1.076.790.000	1.076.790.000	1.076.790.000	-				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	260.000.000	260.000.000	360.000.000	100.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123 Unit	123 Unit	90.371.000	90.371.000	90.371.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	712.419.000	712.419.000	712.419.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	56 Unit	56 Unit	14.000.000	14.000.000	14.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)				632.747.058.797	617.589.201.911	634.083.840.697	16.494.638.786				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				632.747.058.797	617.589.201.911	634.083.840.697	16.494.638.786				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)
5.02	KEUANGAN				632.747.058.797	617.589.201.911	634.083.840.697	16.494.638.786				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-0.087 %	-0.087 %	632.747.058.797	617.589.201.911	634.083.840.697	16.494.638.786				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3 Laporan	3 Laporan	632.747.058.797	617.589.201.911	634.083.840.697	16.494.638.786				Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	570.775.508.797	536.346.773.911	565.182.012.697	28.835.238.786	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000.000	19.000.000.000	3.727.950.000	(15.272.050.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	51.971.550.000	62.242.428.000	65.173.878.000	2.931.450.000	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)
	Badan Pendapatan Daerah				26.902.986.540	26.488.719.524	26.066.175.584	(422.543.940)				Badan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				26.902.986.540	26.488.719.524	26.066.175.584	(422.543.940)				Badan Pendapatan Daerah
5.02	KEUANGAN				26.902.986.540	26.488.719.524	26.066.175.584	(422.543.940)				Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	11.4 % 0.053 %	11.4 % 0.053 %	10.102.275.210	7.940.139.010	7.425.286.490	(514.852.520)				Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	12000000000 0 Rupiah	12000000000 Rupiah	10.102.275.210	7.940.139.010	7.425.286.490	(514.852.520)				Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	142.199.270	142.199.270	132.144.620	(10.054.650)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	5 Laporan	80.816.310	80.816.310	78.654.990	(2.161.320)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1 Unit	572.834.050	572.834.050	568.908.550	(3.925.500)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2.663.004.540	500.868.340	490.130.580	(10.737.760)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan	219.256.210	219.256.210	129.984.000	(89.272.210)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1250000 Obyek Pajak	1250000 Obyek Pajak	27.810.120	27.810.120	15.097.120	(12.713.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2.760.898.240	2.760.898.240	2.721.764.880	(39.133.360)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 Dokumen	4 Dokumen	30.756.000	30.756.000	30.756.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	164.405.400	164.405.400	137.579.200	(26.826.200)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	110Dokumen	110Dokumen	63.874.700	63.874.700	42.234.700	(21.640.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	10 Laporan	10 Laporan	3.153.076.510	3.153.076.510	2.856.722.190	(296.354.320)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 Laporan	3 Laporan	223.343.860	223.343.860	221.309.660	(2.034.200)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	16.800.711.330	18.548.580.514	18.640.889.094	92.308.580		DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000	40.000.000	35.500.000	(4.500.000)				Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	25.000.000	20.500.000	(4.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	12.302.832.850	14.050.702.034	14.320.774.334	270.072.300				Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59Orang/bulan	68Orang/bulan	12.302.832.850	14.050.702.034	14.320.774.334	270.072.300	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	74.499.840	74.499.840	55.534.710	(18.965.130)				Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	75 Paket	49.499.840	49.499.840	48.900.000	(599.840)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	2 Orang	25.000.000	25.000.000	6.634.710	(18.365.290)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Dokumen	48 Dokumen	1.191.061.790	1.191.061.790	819.203.400	(371.858.390)				Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Paket	122.911.590	122.911.590	106.649.300	(16.262.290)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Paket	368.315.700	368.315.700	368.315.700	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12 Paket	159.999.700	159.999.700	74.323.000	(85.676.700)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	539.834.800	539.834.800	269.915.400	(269.919.400)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	55 Unit	62 Unit	1.299.999.850	1.299.999.850	1.618.809.650	318.809.800				Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	900.000.000	900.000.000	900.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	249 Unit	28 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 Unit	33 Unit	199.999.850	199.999.850	518.809.650	318.809.800	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	24 Laporan	1.199.359.000	1.199.359.000	1.098.109.000	(101.250.000)				Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	311.359.000	311.359.000	311.359.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	888.000.000	888.000.000	786.750.000	(101.250.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	210 Unit	339 Unit	692.958.000	692.958.000	692.958.000	-				Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	32 Unit	175.000.000	175.000.000	175.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123 Unit	222 Unit	151.988.000	151.988.000	151.988.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	344.970.000	344.970.000	344.970.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56 Unit	84 Unit	21.000.000	21.000.000	21.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Pendapatan Daerah
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				172.396.038.562	71.092.143.089	29.049.217.315	(42.042.925.774)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				172.396.038.562	71.092.143.089	29.049.217.315	(42.042.925.774)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03	KEPEGAWAIAN				169.160.056.742	69.008.780.849	27.114.037.275	(41.894.743.574)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN Persentase Penempatan ASN sesuai Kompetensi Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase kepatuhan ASN terhadap peraturan perundangan dibidang kepegawaian	63.38 %	63.38 % 99.32 % 42.89 % 99.92 %	3.269.637.200	4.118.476.780	4.344.623.900	226.147.120				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta dokumen pengadaan calon ASN	11 Dokumen	11 Dokumen	776.238.550	776.238.550	571.810.010	(204.428.540)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	40.739.760	40.739.760	32.738.400	(8.001.360)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	3 Dokumen	230.499.530	230.499.530	189.828.170	(40.671.360)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.630	99.999.630	82.902.400	(17.097.230)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	340.000.000	340.000.000	224.120.120	(115.879.880)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	39.999.630	39.999.630	27.535.000	(12.464.630)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	25.000.000	14.685.920	(10.314.080)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	2826 dokumen	530 dokumen	845.600.000	1.741.820.000	2.159.140.000	417.320.000				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	520Dokumen	520 Dokumen	368.400.000	368.400.000	284.900.000	(83.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	27.200.000	27.200.000	27.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	4 Dokumen	450.000.000	1.346.220.000	1.847.040.000	500.820.000	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti fasilitasi peningkatan kompetensi	469 orang	264 orang	1.090.399.520	1.043.019.100	1.156.443.250	113.424.150				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	120 Orang	358.000.000	358.000.000	515.500.000	157.500.000	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	2 Dokumen	250.950.000	250.950.000	242.358.500	(8.591.500)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	87.499.740	87.499.740	76.313.730	(11.186.010)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	24 Orang	24 Orang	334.800.000	287.419.580	287.271.020	(148.560)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	10 Orang	10 Orang	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen	0	24.149.780	24.149.780	-	(24.149.780)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen penunjang penilaian dan evaluasi kinerja ASN	20 dokumen	20 dokumen	557.399.130	557.399.130	457.230.640	(100.168.490)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	50.499.670	50.499.670	37.666.500	(12.833.170)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	2 Dokumen	56.899.930	56.899.930	44.166.100	(12.733.830)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	245 Orang	260 Orang	299.999.930	299.999.930	281.318.990	(18.680.940)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	315 Orang	315 Orang	112.999.770	112.999.770	67.414.420	(45.585.350)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan	36.999.830	36.999.830	26.664.630	(10.335.200)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	165.890.419.542	64.890.304.069	22.769.413.375	(42.120.890.694)		DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	43.550.000	43.550.000	35.212.000	(8.338.000)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	29.250.000	29.250.000	20.281.000	(8.969.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	14.300.000	14.300.000	12.000.000	(2.300.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	163.301.008.212	62.300.892.739	20.583.180.340	(41.717.712.399)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60Orang/bulan	63 Orang/bulan	163.301.008.212	62.300.892.739	20.583.180.340	(41.717.712.399)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 orang	80 orang	73.000.000	73.000.000	48.000.000	(25.000.000)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	48.000.000	48.000.000	48.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0	25.000.000	25.000.000	-	(25.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.010.499.100	1.010.499.100	660.658.805	(349.840.295)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	176.499.380	176.499.380	164.926.105	(11.573.275)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	130.000.000	130.000.000	145.000.000	15.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	44.999.820	44.999.820	31.733.000	(13.266.820)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	650.000.000	650.000.000	324.999.800	(325.000.200)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	400Dokumen	400 Dokumen	8.999.900	8.999.900	8.999.900	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	20 unit	34 unit	209.703.730	209.703.730	234.703.730	25.000.000				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	15 Unit	78.798.860	78.798.860	93.798.860	15.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	19 Unit	130.904.870	130.904.870	255.904.870	125.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	796.738.500	796.738.500	751.738.500	(45.000.000)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	285.000.000	285.000.000	285.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	511.738.500	511.738.500	454.238.500	(57.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	415 unit	415 unit	455.920.000	455.920.000	455.920.000	-				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	146.000.000	146.000.000	150.600.000	4.600.000	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	272 Unit	272 Unit	114.986.000	114.986.000	114.986.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	173.934.000	173.934.000	274.300.000	100.366.000	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	130 Unit	130 Unit	21.000.000	21.000.000	21.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.235.981.820	2.083.362.240	1.935.180.040	(148.182.200)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kesesuaian Kompetensi ASN dengan Persyaratan/Standar Jabatan	56,55 %	56,55 %	3.235.981.820	2.083.362.240	1.935.180.040	(148.182.200)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi teknis	560 orang	560 orang	346.999.650	346.999.650	233.677.770	(113.321.880)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.04.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	16.999.850	16.999.850	10.242.690	(6.757.160)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	560 Orang	560 Orang	329.999.800	329.999.800	223.435.080	(106.564.720)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah dokumen kerjasama dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi	16 dokumen	11 dokumen	2.888.982.170	1.736.362.590	1.701.502.270	(34.860.320)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	10 Dokumen	7 Dokumen	320.450.000	320.450.000	224.315.000	(96.135.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan	4 Laporan	2.568.532.170	1.415.912.590	1.257.652.270	(158.260.320)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Inspektorat				16.481.469.415	34.913.066.061	29.625.832.855	(5.287.233.206)				Inspektorat Daerah
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				16.481.469.415	34.913.066.061	29.625.832.855	(5.287.233.206)				Inspektorat Daerah
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				16.481.469.415	34.913.066.061	29.625.832.855	(5.287.233.206)				Inspektorat Daerah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai kinerja baik	80 %	80 %	1.413.329.210	3.295.097.330	2.647.097.330	(648.000.000)				Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Pengawasan Internal	302 Dokumen	284 Dokumen	750.030.170	1.627.238.290	979.238.290	(648.000.000)				Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan	7 Laporan	145.563.140	330.251.260	330.251.260	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	109 Laporan	109 Laporan	190.557.830	838.557.830	190.557.830	(648.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	11 Laporan	5 Laporan	40.725.680	40.725.680	40.725.680	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	25 Laporan	13 Laporan	197.084.680	197.084.680	197.084.680	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	150 Dokumen	150 Dokumen	176.098.840	220.618.840	220.618.840	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	69 Dokumen	232 Dokumen	663.299.040	1.667.859.040	1.667.859.040	-				Inspektorat Daerah
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	16 Laporan	16 Laporan	215.877.680	294.077.680	294.077.680	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	53 Laporan	216 Laporan	447.421.360	1.373.781.360	1.373.781.360	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi	88 %	88 %	1.784.661.520	5.323.387.480	5.323.387.480	-				Inspektorat Daerah
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	3 Dokumen	4 Dokumen	117.426.400	811.866.400	811.866.400	-				Inspektorat Daerah
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomend asi	2 Rekomend asi	109.232.840	799.232.840	799.232.840	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomend asi	2 Rekomend asi	8.193.560	12.633.560	12.633.560	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Dokumen / Laporan Pendampingan dan Aistensi	166 Dokumen	100 Dokumen	1.667.235.120	4.511.521.080	4.511.521.080	-				Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 perangkat daerah	50 perangkat daerah	614.492.720	2.243.145.680	2.243.145.680	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	54 perangkat daerah	5 perangkat daerah	40.583.200	40.583.200	40.583.200	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	56 Kegiatan	43 Kegiatan	937.980.360	1.576.925.360	1.576.925.360	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	54 perangkat daerah	54 perangkat daerah	74.178.840	650.866.840	650.866.840	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	13.283.478.685	26.294.581.251	21.655.348.045	(4.639.233.206)		DAU		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	41.454.000	73.159.840	73.159.840	-				Inspektorat Daerah
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	29.449.920	49.355.760	49.355.760	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	12.004.080	23.804.080	23.804.080	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	9.632.129.655	11.610.833.301	11.732.871.483	122.038.182				Inspektorat Daerah
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59Orang/bulan	59Orang/bulan	9.632.129.655	11.610.833.301	11.732.871.483	122.038.182	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	947.949.360	4.984.637.860	4.484.637.860	(500.000.000)				Inspektorat Daerah
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	40.800.000	112.014.700	112.014.700	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	132 Orang	132 Orang	840.000.000	4.800.000.000	4.300.000.000	(500.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 Orang	74 Orang	67.149.360	72.623.160	72.623.160	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.292.110.100	4.609.148.375	1.778.376.987	(2.830.771.388)				Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	110.292.100	110.292.100	110.292.100	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	132.118.100	178.347.800	178.347.800	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	59.699.900	62.143.900	62.143.900	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	990.000.000	4.258.364.575	1.427.593.187	(2.830.771.388)	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	20 Unit	148 Unit	307.174.070	3.397.698.700	1.998.698.700	(1.399.000.000)				Inspektorat Daerah
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	62 Unit	232.692.340	3.170.165.270	1.771.165.270	(1.399.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	47 Unit	74.481.730	227.533.430	227.533.430	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	713.101.200	992.087.800	960.587.800	(31.500.000)				Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	172.383.200	180.869.800	180.869.800	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	540.718.000	811.218.000	779.718.000	(31.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	178 Unit	178 Unit	349.560.300	627.015.375	627.015.375	-				Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	209.265.300	209.265.300	209.265.300	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	56 Unit	45.510.000	45.510.000	45.510.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	82.547.000	360.002.075	360.002.075	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	79 Unit	79 Unit	12.238.000	12.238.000	12.238.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Inspektorat Daerah
	Kecamatan Cilacap Selatan				7.968.968.993	8.724.689.181	8.573.139.832	(151.549.349)				Kecamatan Cilacap Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN				7.968.968.993	8.724.689.181	8.573.139.832	(151.549.349)				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01	KECAMATAN				7.968.968.993	8.724.689.181	8.573.139.832	(151.549.349)				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100 %	14.999.910	14.999.910	11.246.000	(3.753.910)				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	14.999.910	14.999.910	11.246.000	(3.753.910)				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	14.999.910	14.999.910	11.246.000	(3.753.910)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100%	134.997.340	134.997.340	126.592.010	(8.405.330)				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	99.997.700	99.997.700	91.592.370	(8.405.330)				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	4.997.830	4.997.830	4.500.000	(497.830)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	94.999.870	94.999.870	87.092.370	(7.907.500)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	34.999.640	34.999.640	34.999.640	-				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	10 lembaga	10 lembaga	34.999.640	34.999.640	34.999.640	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	33.500.000	33.500.000	33.500.000	-				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	33.500.000	33.500.000	33.500.000	-				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	33.500.000	33.500.000	33.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	49.999.920	49.999.920	49.999.660	(260)				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	49.999.920	49.999.920	49.999.660	(260)				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	50 orang	50 orang	29.999.920	29.999.920	29.999.660	(260)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	26.499.800	26.499.800	25.000.000	(1.499.800)				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	26.499.800	26.499.800	25.000.000	(1.499.800)				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan	1 Laporan	1.499.800	1.499.800	-	(1.499.800)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100%	7.708.972.023	8.464.692.211	8.326.802.162	(137.890.049)		DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	19.999.320	19.999.320	19.999.320	-				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	9.999.660	9.999.660	9.999.660	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	9.999.660	9.999.660	9.999.660	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	5.657.150.456	6.412.870.644	6.338.515.595	(74.355.049)				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	5.657.150.456	6.412.870.644	6.338.515.595	(74.355.049)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	384.958.540	384.958.540	379.923.540	(5.035.000)				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	39.962.950	39.962.950	39.962.950	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	114.999.670	114.999.670	114.999.670	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	39.996.720	39.996.720	39.996.720	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	139.999.200	139.999.200	139.999.200	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	4.965.000	(5.035.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	98.383.040	98.383.040	98.383.040	-				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	11 Unit	71.788.040	71.788.040	71.788.040	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	10 unit	26.595.000	26.595.000	26.595.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.298.780.680	1.298.780.680	1.240.280.680	(58.500.000)				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	188.000.000	188.000.000	188.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.110.780.680	1.110.780.680	1.052.280.680	(58.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	249.699.987	249.699.987	249.699.987	-				Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	114.502.987	114.502.987	114.502.987	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	65.260.000	65.260.000	65.260.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	69.937.000	69.937.000	69.937.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Selatan
	Kelurahan Sidakaya				1.165.600.000	1.165.600.000	1.112.406.050	(53.193.950)				Kelurahan Sidakaya
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.165.600.000	1.165.600.000	1.112.406.050	(53.193.950)				Kelurahan Sidakaya
7.01	KECAMATAN				1.165.600.000	1.165.600.000	1.112.406.050	(53.193.950)				Kelurahan Sidakaya
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100%	1.165.600.000	1.165.600.000	1.112.406.050	(53.193.950)				Kelurahan Sidakaya
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	1.165.600.000	1.165.600.000	1.112.406.050	(53.193.950)				Kelurahan Sidakaya
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	894.284.950	894.284.950	894.284.950	-	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Sidakaya
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas/ormas	271.315.050	271.315.050	218.121.100	(53.193.950)	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Sidakaya

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kelurahan Cilacap				1.199.800.000	1.199.800.000	1.155.700.500	(44.099.500)				Kelurahan Cilacap
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.199.800.000	1.199.800.000	1.155.700.500	(44.099.500)				Kelurahan Cilacap
7.01	KECAMATAN				1.199.800.000	1.199.800.000	1.155.700.500	(44.099.500)				Kelurahan Cilacap
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100%	1.199.800.000	1.199.800.000	1.155.700.500	(44.099.500)				Kelurahan Cilacap
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	1.199.800.000	1.199.800.000	1.155.700.500	(44.099.500)				Kelurahan Cilacap
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	12 Unit	913.901.300	913.901.300	913.901.300	-	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Cilacap
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	9 Pokmas/ Ormas	285.898.700	285.898.700	241.799.200	(44.099.500)	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Cilacap
	Kelurahan Tambakreja				1.234.000.000	1.234.000.000	1.210.689.050	(23.310.950)				Kelurahan Tambakreja
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.234.000.000	1.234.000.000	1.210.689.050	(23.310.950)				Kelurahan Tambakreja
7.01	KECAMATAN				1.234.000.000	1.234.000.000	1.210.689.050	(23.310.950)				Kelurahan Tambakreja
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100%	1.234.000.000	1.234.000.000	1.210.689.050	(23.310.950)				Kelurahan Tambakreja
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	1.234.000.000	1.234.000.000	1.210.689.050	(23.310.950)				Kelurahan Tambakreja
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	953.378.350	953.378.350	953.378.350	-	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Tambakreja
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas/Ormas	280.621.650	280.621.650	257.310.700	(23.310.950)	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Tambakreja
	Kelurahan Tegalkamulyan				1.201.538.350	1.201.538.350	1.173.316.850	(28.221.500)				Kelurahan Tegalkamulyan
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.201.538.350	1.201.538.350	1.173.316.850	(28.221.500)				Kelurahan Tegalkamulyan
7.01	KECAMATAN				1.201.538.350	1.201.538.350	1.173.316.850	(28.221.500)				Kelurahan Tegalkamulyan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100%	1.201.538.350	1.201.538.350	1.173.316.850	(28.221.500)				Kelurahan Tegalkamulyan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	1.201.538.350	1.201.538.350	1.173.316.850	(28.221.500)				Kelurahan Tegalkamulyan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	941.700.850	941.700.850	941.700.850	-	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Tegalkamulyan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	4 Pokmas/Ormas	259.837.500	259.837.500	231.616.000	(28.221.500)	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Tegalkamulyan
	Kelurahan Tegalreja				1.140.400.000	1.140.400.000	1.065.162.500	(75.237.500)				Kelurahan Tegalreja
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.140.400.000	1.140.400.000	1.065.162.500	(75.237.500)				Kelurahan Tegalreja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01	KECAMATAN				1.140.400.000	1.140.400.000	1.065.162.500	(75.237.500)				Kelurahan Tegalreja
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100%	1.140.400.000	1.140.400.000	1.065.162.500	(75.237.500)				Kelurahan Tegalreja
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	1.140.400.000	1.140.400.000	1.065.162.500	(75.237.500)				Kelurahan Tegalreja
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	864.572.500	864.572.500	864.572.500	-	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Tegalreja
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas/ Ormas	275.827.500	275.827.500	200.590.000	(75.237.500)	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Tegalreja
	Kecamatan Cilacap Tengah				8.646.415.349	9.231.468.232	9.232.559.538	1.091.306				Kecamatan Cilacap Tengah
7	UNSUR KEWILAYAHAN				8.646.415.349	9.231.468.232	9.232.559.538	1.091.306				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01	KECAMATAN				8.646.415.349	9.231.468.232	9.232.559.538	1.091.306				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Implementasi Pelimpahan kewenangan (%)	100 %	100%	15.000.000	15.000.000	3.837.440	(11.162.560)				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	15.000.000	15.000.000	3.837.440	(11.162.560)				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	3.837.440	(11.162.560)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan yang Memiliki Kelembagaan Aktif	100 %	100%	125.904.560	125.904.560	120.573.930	(5.330.630)				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	72.500.000	72.500.000	67.169.370	(5.330.630)				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	72.500.000	72.500.000	67.169.370	(5.330.630)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	53.404.560	53.404.560	53.404.560	-				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	53.404.560	53.404.560	53.404.560	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	28.799.620	28.799.620	23.799.620	(5.000.000)				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	28.799.620	28.799.620	23.799.620	(5.000.000)				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	9.000.000	9.000.000	4.000.000	(5.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14 Laporan	2 Laporan	19.799.620	19.799.620	19.799.620	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	46.871.800	46.871.800	29.116.000	(17.755.800)				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	46.871.800	46.871.800	29.116.000	(17.755.800)				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta	50 Orang	50 Orang	24.899.900	24.899.900	11.116.000	(13.783.900)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	21.971.900	21.971.900	18.000.000	(3.971.900)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	51.199.320	51.199.320	20.956.000	(30.243.320)				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	51.199.320	51.199.320	20.956.000	(30.243.320)				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemeirntahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	16.199.700	16.199.700	2.731.000	(13.468.700)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6 Dokumen	5 Dokumen	23.000.000	23.000.000	14.225.000	(8.775.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	11.999.620	11.999.620	4.000.000	(7.999.620)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 % 100 %	8.378.640.049	8.963.692.932	9.034.276.548	70.583.616		DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	38.949.800	38.949.800	38.949.800	-				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	24.249.800	24.249.800	24.249.800	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	14.700.000	14.700.000	14.700.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	6.326.905.049	6.911.957.932	6.747.321.548	(164.636.384)				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	46 Orang/bulan	6.326.905.049	6.911.957.932	6.747.321.548	(164.636.384)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Setiap Bulan	14 %	87 Paket	52.500.000	52.500.000	52.500.000	-				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	87 Paket	52.500.000	52.500.000	52.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	357.466.290	357.466.290	361.926.290	4.460.000				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	17.041.960	17.041.960	17.041.960	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	130.913.770	130.913.770	130.913.770	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	29.999.260	29.999.260	29.999.260	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	148.511.300	148.511.300	148.511.300	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	25.000.000	25.000.000	32.500.000	7.500.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8 Laporan	6.000.000	6.000.000	2.960.000	(3.040.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	54.462.760	54.462.760	74.462.760	20.000.000				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Unit	7 Unit	32.261.340	32.261.340	52.261.340	20.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	72 Unit	10 Unit	22.201.420	22.201.420	22.201.420	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.333.906.900	1.333.906.900	1.344.666.900	10.760.000				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	139.598.900	139.598.900	148.598.900	9.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.194.308.000	1.194.308.000	1.196.068.000	1.760.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	214.449.250	214.449.250	414.449.250	200.000.000				Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit	97.840.430	97.840.430	97.840.430	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit	24.010.000	24.010.000	24.010.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	92.598.820	92.598.820	292.598.820	200.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Tengah
	Kelurahan Lomanis				1.050.400.000	1.050.400.000	999.424.320	(50.975.680)				Kelurahan Lomanis
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.050.400.000	1.050.400.000	999.424.320	(50.975.680)				Kelurahan Lomanis
7.01	KECAMATAN				1.050.400.000	1.050.400.000	999.424.320	(50.975.680)				Kelurahan Lomanis
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100%	1.050.400.000	1.050.400.000	999.424.320	(50.975.680)				Kelurahan Lomanis

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	1.050.400.000	1.050.400.000	999.424.320	(50.975.680)				Kelurahan Lomanis
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	10 Unit	905.414.220	905.414.220	905.414.220	-	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Lomanis
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	6 Lembaga Kemasyara	144.985.780	144.985.780	94.010.100	(50.975.680)	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Lomanis
	Kelurahan Gunungsimping				1.145.800.000	1.145.800.000	1.145.800.000	-				Kelurahan Gunungsimping
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.145.800.000	1.145.800.000	1.145.800.000	-				Kelurahan Gunungsimping
7.01	KECAMATAN				1.145.800.000	1.145.800.000	1.145.800.000	-				Kelurahan Gunungsimping
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100%	1.145.800.000	1.145.800.000	1.145.800.000	-				Kelurahan Gunungsimping
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	1.145.800.000	1.145.800.000	1.145.800.000	-				Kelurahan Gunungsimping
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	7 Unit	955.313.900	955.313.900	955.313.900	-	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Gunungsimping
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	4 Lembaga Kemasyara	190.486.100	190.486.100	190.486.100	-	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Gunungsimping
	Kelurahan Sidanegara				1.316.800.000	1.316.800.000	1.257.566.850	(59.233.150)				Kelurahan Sidanegara
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.316.800.000	1.316.800.000	1.257.566.850	(59.233.150)				Kelurahan Sidanegara
7.01	KECAMATAN				1.316.800.000	1.316.800.000	1.257.566.850	(59.233.150)				Kelurahan Sidanegara
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100%	1.316.800.000	1.316.800.000	1.257.566.850	(59.233.150)				Kelurahan Sidanegara
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	1.316.800.000	1.316.800.000	1.257.566.850	(59.233.150)				Kelurahan Sidanegara
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	13 Unit	775.852.400	775.852.400	775.852.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Sidanegara
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	9 Lembaga Kemasyara	540.947.600	540.947.600	481.714.450	(59.233.150)	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Sidanegara
	Kelurahan Donan				1.268.200.000	1.268.200.000	1.228.692.480	(39.507.520)				Kelurahan Donan
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.268.200.000	1.268.200.000	1.228.692.480	(39.507.520)				Kelurahan Donan
7.01	KECAMATAN				1.268.200.000	1.268.200.000	1.228.692.480	(39.507.520)				Kelurahan Donan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100%	1.268.200.000	1.268.200.000	1.228.692.480	(39.507.520)				Kelurahan Donan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	1.268.200.000	1.268.200.000	1.228.692.480	(39.507.520)				Kelurahan Donan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	12 Unit	934.490.960	934.490.960	934.490.960	-	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Donan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	2 Lembaga Kemasyara	333.709.040	333.709.040	294.201.520	(39.507.520)	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Donan
	Kelurahan Kutawaru				1.127.800.000	1.127.800.000	1.074.570.000	(53.230.000)				Kelurahan Kutawaru
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.127.800.000	1.127.800.000	1.074.570.000	(53.230.000)				Kelurahan Kutawaru
7.01	KECAMATAN				1.127.800.000	1.127.800.000	1.074.570.000	(53.230.000)				Kelurahan Kutawaru
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100%	1.127.800.000	1.127.800.000	1.074.570.000	(53.230.000)				Kelurahan Kutawaru
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	1.127.800.000	1.127.800.000	1.074.570.000	(53.230.000)				Kelurahan Kutawaru
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	13 Unit	875.950.000	875.950.000	875.950.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Kutawaru
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	6 Lembaga Kemasyara	251.850.000	251.850.000	198.620.000	(53.230.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Kutawaru
	Kecamatan Cilacap Utara				8.553.347.026	9.415.026.390	9.283.843.232	(131.183.158)				Kecamatan Cilacap Utara
7	UNSUR KEWILAYAHAN				8.553.347.026	9.415.026.390	9.283.843.232	(131.183.158)				Kecamatan Cilacap Utara
7.01	KECAMATAN				8.553.347.026	9.415.026.390	9.283.843.232	(131.183.158)				Kecamatan Cilacap Utara
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-				Kecamatan Cilacap Utara
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-				Kecamatan Cilacap Utara
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	143.000.000	143.000.000	113.037.700	(29.962.300)				Kecamatan Cilacap Utara
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000	105.000.000	80.037.700	(24.962.300)				Kecamatan Cilacap Utara
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	-	(5.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	80.037.700	(19.962.300)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	33.000.000	33.000.000	33.000.000	-				Kecamatan Cilacap Utara
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	10 lembaga	10 lembaga	33.000.000	33.000.000	33.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi Jumlah UMKM yang Terfasilitasi Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Kegiatan 25 UMKM 1 Laporan	1 Kegiatan 25 UMKM 1 Laporan	5.000.000	5.000.000	-	(5.000.000)				Kecamatan Cilacap Utara
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	-	(5.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitas forkompincam (%)	100%	100%	52.000.000	52.000.000	31.414.000	(20.586.000)				Kecamatan Cilacap Utara
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	52.000.000	52.000.000	31.414.000	(20.586.000)				Kecamatan Cilacap Utara
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	50 orang	50 orang	35.000.000	35.000.000	22.614.000	(12.386.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000	17.000.000	8.800.000	(8.200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	20.000.000	20.000.000	10.372.000	(9.628.000)				Kecamatan Cilacap Utara
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	10.372.000	(9.628.000)				Kecamatan Cilacap Utara
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	5.372.000	(9.628.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	8.323.347.026	9.185.026.390	9.114.019.532	(71.006.858)		DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	17.795.600	17.795.600	17.795.600	-				Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	9.795.600	9.795.600	9.795.600	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	6.018.486.813	6.880.166.177	6.724.049.319	(156.116.858)				Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	6.013.486.813	6.875.166.177	6.719.049.319	(156.116.858)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	14 %	14 %	20.000.000	20.000.000	101.400.000	81.400.000				Kecamatan Cilacap Utara

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	105 Paket	15.000.000	15.000.000	101.400.000	86.400.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	5.000.000	5.000.000	-	(5.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	295.595.000	295.595.000	291.705.000	(3.890.000)				Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	70.011.000	70.011.000	70.011.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	170.000.000	170.000.000	170.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	30.584.000	30.584.000	30.584.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	7.000.000	3.110.000	(3.890.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	215.422.500	215.422.500	266.184.260	50.761.760				Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	26.443.860	26.443.860	26.443.860	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	65.710.160	65.710.160	138.210.160	72.500.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	104.246.080	104.246.080	82.507.840	(21.738.240)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	19.022.400	19.022.400	19.022.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.509.760.280	1.509.760.280	1.446.760.280	(63.000.000)				Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	145.000.000	145.000.000	153.400.000	8.400.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.522.280	24.522.280	24.522.280	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.340.238.000	1.340.238.000	1.268.838.000	(71.400.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	246.286.833	246.286.833	266.125.073	19.838.240				Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit	87.286.833	87.286.833	87.286.833	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	5.000.000	5.000.000	-	(5.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	54.000.000	54.000.000	57.100.000	3.100.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	85.000.000	85.000.000	106.738.240	21.738.240	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cilacap Utara
	Kelurahan Mertasinga				1.163.800.000	1.163.800.000	1.158.242.480	(5.557.520)				Kelurahan Mertasinga
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.163.800.000	1.163.800.000	1.158.242.480	(5.557.520)				Kelurahan Mertasinga
7.01	KECAMATAN				1.163.800.000	1.163.800.000	1.158.242.480	(5.557.520)				Kelurahan Mertasinga
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	1.163.800.000	1.163.800.000	1.158.242.480	(5.557.520)				Kelurahan Mertasinga
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	1.163.800.000	1.163.800.000	1.158.242.480	(5.557.520)				Kelurahan Mertasinga
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000	994.442.480	(5.557.520)	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Mertasinga
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	163.800.000	163.800.000	163.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Mertasinga
	Kelurahan Gumilir				1.198.000.000	1.198.000.000	1.177.000.000	(21.000.000)				Kelurahan Gumilir
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.198.000.000	1.198.000.000	1.177.000.000	(21.000.000)				Kelurahan Gumilir
7.01	KECAMATAN				1.198.000.000	1.198.000.000	1.177.000.000	(21.000.000)				Kelurahan Gumilir
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	1.198.000.000	1.198.000.000	1.177.000.000	(21.000.000)				Kelurahan Gumilir
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	1.198.000.000	1.198.000.000	1.177.000.000	(21.000.000)				Kelurahan Gumilir
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	979.000.000	979.000.000	979.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Gumilir
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	219.000.000	219.000.000	198.000.000	(21.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Gumilir
	Kelurahan Karangtalun				1.097.200.000	1.097.200.000	1.054.878.800	(42.321.200)				Kelurahan Karangtalun
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.097.200.000	1.097.200.000	1.054.878.800	(42.321.200)				Kelurahan Karangtalun
7.01	KECAMATAN				1.097.200.000	1.097.200.000	1.054.878.800	(42.321.200)				Kelurahan Karangtalun
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	1.097.200.000	1.097.200.000	1.054.878.800	(42.321.200)				Kelurahan Karangtalun

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	1.097.200.000	1.097.200.000	1.054.878.800	(42.321.200)				Kelurahan Karangtalun
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	930.070.000	930.070.000	930.070.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Karangtalun
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	167.130.000	167.130.000	124.808.800	(42.321.200)	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Karangtalun
	Kelurahan Tritih Kulon				1.192.600.000	1.192.600.000	1.174.975.500	(17.624.500)				Kelurahan Tritih Kulon
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.192.600.000	1.192.600.000	1.174.975.500	(17.624.500)				Kelurahan Tritih Kulon
7.01	KECAMATAN				1.192.600.000	1.192.600.000	1.174.975.500	(17.624.500)				Kelurahan Tritih Kulon
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	1.192.600.000	1.192.600.000	1.174.975.500	(17.624.500)				Kelurahan Tritih Kulon
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	1.192.600.000	1.192.600.000	1.174.975.500	(17.624.500)				Kelurahan Tritih Kulon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	980.000.000	980.000.000	980.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Tritih Kulon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	212.600.000	212.600.000	194.975.500	(17.624.500)	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Tritih Kulon
	Kelurahan Kebonmanis				1.127.800.000	1.127.800.000	1.108.481.400	(19.318.600)				Kelurahan Kebonmanis
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.127.800.000	1.127.800.000	1.108.481.400	(19.318.600)				Kelurahan Kebonmanis
7.01	KECAMATAN				1.127.800.000	1.127.800.000	1.108.481.400	(19.318.600)				Kelurahan Kebonmanis
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	1.127.800.000	1.127.800.000	1.108.481.400	(19.318.600)				Kelurahan Kebonmanis
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	1.127.800.000	1.127.800.000	1.108.481.400	(19.318.600)				Kelurahan Kebonmanis
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	926.500.000	926.500.000	913.481.400	(13.018.600)	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Kebonmanis
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	201.300.000	201.300.000	195.000.000	(6.300.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kelurahan Kebonmanis
	Kecamatan Jeruklegi				2.935.717.228	3.290.964.772	3.120.503.419	(170.461.353)				Kecamatan Jeruklegi
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.935.717.228	3.290.964.772	3.120.503.419	(170.461.353)				Kecamatan Jeruklegi
7.01	KECAMATAN				2.935.717.228	3.290.964.772	3.120.503.419	(170.461.353)				Kecamatan Jeruklegi
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	7.400.000	(7.600.000)				Kecamatan Jeruklegi
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	15.000.000	15.000.000	7.400.000	(7.600.000)				Kecamatan Jeruklegi

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	7.400.000	(7.600.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	32.750.000	32.750.000	37.750.000	5.000.000				Kecamatan Jeruklegi
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000	21.000.000	26.000.000	5.000.000				Kecamatan Jeruklegi
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	21.000.000	21.000.000	26.000.000	5.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	Lembaga	Lembaga	11.750.000	11.750.000	11.750.000	-				Kecamatan Jeruklegi
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	Lembaga	11.750.000	11.750.000	11.750.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	6.000.000	6.000.000	3.500.000	(2.500.000)				Kecamatan Jeruklegi
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	6.000.000	3.500.000	(2.500.000)				Kecamatan Jeruklegi
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	6.000.000	3.500.000	(2.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	39.100.000	39.100.000	39.100.000	-				Kecamatan Jeruklegi
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	39.100.000	39.100.000	39.100.000	-				Kecamatan Jeruklegi
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta	Orang	Orang	22.700.000	22.700.000	22.700.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	16.400.000	16.400.000	16.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	43.162.080	43.162.080	20.750.000	(22.412.080)				Kecamatan Jeruklegi
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	43.162.080	43.162.080	20.750.000	(22.412.080)				Kecamatan Jeruklegi
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	16.700.000	16.700.000	8.350.000	(8.350.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	7.700.240	7.700.240	3.150.000	(4.550.240)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	11.300.000	11.300.000	6.100.000	(5.200.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.461.840	7.461.840	3.150.000	(4.311.840)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 % 100 %	2.799.705.148	3.154.952.692	3.012.003.419	(142.949.273)		DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	16.450.000	16.450.000	16.450.000	-				Kecamatan Jeruklegi
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	6.450.000	6.450.000	6.450.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.504.515.568	2.859.763.112	2.725.313.839	(134.449.273)				Kecamatan Jeruklegi
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Orang	2.504.515.568	2.859.763.112	2.725.313.839	(134.449.273)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	14 %	22 Orang/bulan	13.200.000	13.200.000	13.200.000	-				Kecamatan Jeruklegi
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	22 paket	13.200.000	13.200.000	13.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	103.743.280	103.743.280	93.743.280	(10.000.000)				Kecamatan Jeruklegi
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	4.633.870	4.633.870	4.633.870	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	25.480.920	25.480.920	25.480.920	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	6.993.290	6.993.290	6.993.290	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 paket	1 paket	41.635.200	41.635.200	41.635.200	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	5.000.000	(10.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	125.796.300	125.796.300	127.296.300	1.500.000				Kecamatan Jeruklegi
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	44.000.000	44.000.000	54.500.000	10.500.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	81.796.300	81.796.300	72.796.300	(9.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	36.000.000	36.000.000	36.000.000	-				Kecamatan Jeruklegi

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan	Kendaraan	36.000.000	36.000.000	36.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Jeruklegi
	Kecamatan Kawunganten				3.442.003.895	3.774.920.829	3.770.833.555	(4.087.274)				Kecamatan Kawunganten
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.442.003.895	3.774.920.829	3.770.833.555	(4.087.274)				Kecamatan Kawunganten
7.01	KECAMATAN				3.442.003.895	3.774.920.829	3.770.833.555	(4.087.274)				Kecamatan Kawunganten
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	7.175.630	(7.824.370)				Kecamatan Kawunganten
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	15.000.000	15.000.000	7.175.630	(7.824.370)				Kecamatan Kawunganten
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2 Laporan	15.000.000	15.000.000	7.175.630	(7.824.370)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	34.590.700	34.590.700	33.129.560	(1.461.140)				Kecamatan Kawunganten
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	34.590.700	34.590.700	33.129.560	(1.461.140)				Kecamatan Kawunganten
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakat an	3 Lembaga K emasyarakat an	12.045.250	12.045.250	12.045.250	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	10 Laporan	22.545.450	22.545.450	21.084.310	(1.461.140)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	4.723.630	4.723.630	2.378.270	(2.345.360)				Kecamatan Kawunganten
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterampilan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterampilan Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	4.723.630	4.723.630	2.378.270	(2.345.360)				Kecamatan Kawunganten
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	4.723.630	4.723.630	2.378.270	(2.345.360)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	37.849.160	37.849.160	33.121.480	(4.727.680)				Kecamatan Kawunganten
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	37.849.160	37.849.160	33.121.480	(4.727.680)				Kecamatan Kawunganten
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta	50 Orang	235 Orang	24.249.900	24.249.900	19.873.740	(4.376.160)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	13.599.260	13.599.260	13.247.740	(351.520)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	14.648.530	14.648.530	9.002.760	(5.645.770)				Kecamatan Kawunganten
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	14.648.530	14.648.530	9.002.760	(5.645.770)				Kecamatan Kawunganten
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	36 Dokumen	6.719.630	6.719.630	4.809.380	(1.910.250)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	7.928.900	7.928.900	4.193.380	(3.735.520)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.335.191.875	3.668.108.809	3.686.025.855	17.917.046		DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	20.679.760	20.679.760	20.679.760	-				Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	15.519.630	15.519.630	15.519.630	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.160.130	5.160.130	5.160.130	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.711.011.470	3.043.928.404	3.095.555.450	51.627.046				Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulam	30 Orang/Bulam	2.711.011.470	3.043.928.404	3.095.555.450	51.627.046	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	14 %	14 %	16.800.000	16.800.000	16.800.000	-				Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	28 Paket	16.800.000	16.800.000	16.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	99.541.850	99.541.850	88.331.850	(11.210.000)				Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	31.832.750	31.832.750	31.832.750	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	35.159.100	35.159.100	35.159.100	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	22.550.000	22.550.000	11.340.000	(11.210.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	40.219.820	40.219.820	40.219.820	-				Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	9 Unit	20.318.360	20.318.360	20.318.360	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	4 Unit	19.901.460	19.901.460	19.901.460	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	199.003.000	199.003.000	176.503.000	(22.500.000)				Kecamatan Kawunganten

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	26.071.000	26.071.000	26.071.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	172.932.000	172.932.000	150.432.000	(22.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	247.935.975	247.935.975	247.935.975	-				Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	10 Unit	35.781.800	35.781.800	35.781.800	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	12.220.000	12.220.000	12.220.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	199.934.175	199.934.175	199.934.175	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kawunganten
	Kecamatan Bantarsari				2.346.696.870	2.722.621.421	2.972.040.495	249.419.074				Kecamatan Bantarsari
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.346.696.870	2.722.621.421	2.972.040.495	249.419.074				Kecamatan Bantarsari
7.01	KECAMATAN				2.346.696.870	2.722.621.421	2.972.040.495	249.419.074				Kecamatan Bantarsari
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100%	14.998.590	14.998.590	12.547.800	(2.450.790)				Kecamatan Bantarsari
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	14.998.590	14.998.590	12.547.800	(2.450.790)				Kecamatan Bantarsari
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 laporan	14.998.590	14.998.590	12.547.800	(2.450.790)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100%	26.999.630	26.999.630	31.999.630	5.000.000				Kecamatan Bantarsari
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	26.999.630	26.999.630	31.999.630	5.000.000				Kecamatan Bantarsari
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakat an	3 Lembaga Kemasyarakatan	6.999.830	6.999.830	6.999.830	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	19.999.800	19.999.800	24.999.800	5.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	6.000.000	6.000.000	3.500.000	(2.500.000)				Kecamatan Bantarsari
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daetah Dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 laporan	6.000.000	6.000.000	3.500.000	(2.500.000)				Kecamatan Bantarsari

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	6.000.000	3.500.000	(2.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	40.000.000	40.000.000	35.400.000	(4.600.000)				Kecamatan Bantarsari
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	40.000.000	40.000.000	35.400.000	(4.600.000)				Kecamatan Bantarsari
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	50 orang	50 orang	15.000.000	15.000.000	13.400.000	(1.600.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 lpaoran	4 lpaoran	25.000.000	25.000.000	22.000.000	(3.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	17.992.450	17.992.450	4.400.000	(13.592.450)				Kecamatan Bantarsari
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	17.992.450	17.992.450	4.400.000	(13.592.450)				Kecamatan Bantarsari
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	5.999.900	5.999.900	2.000.000	(3.999.900)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	5.999.750	5.999.750	900.000	(5.099.750)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.992.800	5.992.800	1.500.000	(4.492.800)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100%	2.240.706.200	2.616.630.751	2.884.193.065	267.562.314		DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	19.999.290	19.999.290	19.999.290	-				Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	9.999.950	9.999.950	9.999.950	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	9.999.340	9.999.340	9.999.340	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.828.970.560	2.204.895.111	2.302.598.794	97.703.683				Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	1.828.970.560	2.204.895.111	2.302.598.794	97.703.683	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	14 %	100%	10.800.000	10.800.000	10.800.000	-				Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	18 Paket	10.800.000	10.800.000	10.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	132.837.770	132.837.770	110.493.770	(22.344.000)				Kecamatan Bantarsari

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.492.270	27.492.270	27.492.270	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	5.660.000	5.660.000	5.660.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	47.480.700	47.480.700	47.480.700	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	7.610.800	7.610.800	7.610.800	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	44.594.000	44.594.000	22.250.000	(22.344.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	201.336.600	201.336.600	178.836.600	(22.500.000)				Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	39.999.600	39.999.600	39.999.600	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	161.337.000	161.337.000	138.837.000	(22.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	46.761.980	46.761.980	261.464.611	214.702.631				Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit			214.702.631	214.702.631	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	11.761.980	11.761.980	11.761.980	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Bantarsari
	Kecamatan Kesugihan				3.351.552.635	3.374.835.388	3.291.139.425	(83.695.963)				Kecamatan Kesugihan
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.351.552.635	3.374.835.388	3.291.139.425	(83.695.963)				Kecamatan Kesugihan
7.01	KECAMATAN				3.351.552.635	3.374.835.388	3.291.139.425	(83.695.963)				Kecamatan Kesugihan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100 %	14.999.800	14.999.800	3.258.000	(11.741.800)				Kecamatan Kesugihan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	14.999.800	14.999.800	3.258.000	(11.741.800)				Kecamatan Kesugihan
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	14.999.800	14.999.800	3.258.000	(11.741.800)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	27.628.000	27.628.000	31.078.660	3.450.660				Kecamatan Kesugihan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	27.628.000	27.628.000	31.078.660	3.450.660				Kecamatan Kesugihan
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakat an	3 Lembaga K emasyarakat an	9.200.000	9.200.000	8.770.000	(430.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	18.428.000	18.428.000	22.308.660	3.880.660	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-				Kecamatan Kesugihan
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-				Kecamatan Kesugihan
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitas forkompincam (%)	100%	100%	37.500.000	37.500.000	29.159.400	(8.340.600)				Kecamatan Kesugihan
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	37.500.000	37.500.000	29.159.400	(8.340.600)				Kecamatan Kesugihan
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	50 orang	50 orang	21.000.000	21.000.000	13.159.400	(7.840.600)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	16.500.000	16.500.000	16.000.000	(500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	45.574.140	45.574.140	33.299.310	(12.274.830)				Kecamatan Kesugihan
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	45.574.140	45.574.140	33.299.310	(12.274.830)				Kecamatan Kesugihan
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	28.974.800	28.974.800	20.000.000	(8.974.800)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	6.499.640	6.499.640	6.201.640	(298.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	6.200.000	6.200.000	5.808.000	(392.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan	1 Laporan	3.899.700	3.899.700	1.289.670	(2.610.030)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.222.850.695	3.246.133.448	3.191.344.055	(54.789.393)		DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	10.794.900	10.794.900	10.794.900	-				Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	6.085.000	6.085.000	6.085.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	4.709.900	4.709.900	4.709.900	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.834.199.844	2.857.482.597	2.818.691.824	(38.790.773)				Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	2.834.199.844	2.857.482.597	2.818.691.824	(38.790.773)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	14 %	30 Orang	16.200.000	16.200.000	16.200.000	-				Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	27 Paket	16.200.000	16.200.000	16.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	118.848.500	118.848.500	112.469.500	(6.379.000)				Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	34.998.900	34.998.900	34.998.900	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	54.491.600	54.491.600	57.791.600	3.300.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	19.358.000	19.358.000	9.679.000	(9.679.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	19.869.040	19.869.040	19.249.420	(619.620)				Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	19.869.040	19.869.040	19.249.420	(619.620)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	158.462.951	158.462.951	149.462.951	(9.000.000)				Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	103.462.951	103.462.951	94.462.951	(9.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	64.475.460	64.475.460	64.475.460	-				Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	11 Unit	32.500.000	32.500.000	32.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	11.988.000	11.988.000	11.988.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	19.987.460	19.987.460	19.987.460	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kesugihan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kecamatan Adipala				3.235.552.497	3.114.138.771	3.133.277.062	19.138.291				Kecamatan Adipala
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.235.552.497	3.114.138.771	3.133.277.062	19.138.291				Kecamatan Adipala
7.01	KECAMATAN				3.235.552.497	3.114.138.771	3.133.277.062	19.138.291				Kecamatan Adipala
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	6.009.200	(8.990.800)				Kecamatan Adipala
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	15.000.000	15.000.000	6.009.200	(8.990.800)				Kecamatan Adipala
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	6.009.200	(8.990.800)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	35.419.200	35.419.200	39.568.020	4.148.820				Kecamatan Adipala
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	35.419.200	35.419.200	39.568.020	4.148.820				Kecamatan Adipala
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakat an	3 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	15.000.000	14.148.820	(851.180)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	20.419.200	20.419.200	25.419.200	5.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	10.000.000	10.000.000	3.400.000	(6.600.000)				Kecamatan Adipala
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	3.400.000	(6.600.000)				Kecamatan Adipala
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	3.400.000	(6.600.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	61.251.660	61.251.660	43.790.240	(17.461.420)				Kecamatan Adipala
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	61.251.660	61.251.660	43.790.240	(17.461.420)				Kecamatan Adipala
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	50 orang	50 orang	38.751.660	38.751.660	22.942.360	(15.809.300)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	22.500.000	22.500.000	20.847.880	(1.652.120)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	45.000.000	45.000.000	34.683.420	(10.316.580)				Kecamatan Adipala

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	45.000.000	45.000.000	34.683.420	(10.316.580)				Kecamatan Adipala
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	9.000.000	3.328.580	(5.671.420)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000	13.000.000	11.990.130	(1.009.870)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000	13.000.000	11.990.130	(1.009.870)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	7.374.580	(2.625.420)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.068.881.637	2.947.467.911	3.005.826.182	58.358.271		DAU		Kecamatan Adipala
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhiya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-				Kecamatan Adipala
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.432.082.317	2.310.668.591	2.390.026.862	79.358.271				Kecamatan Adipala
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	2.432.082.317	2.310.668.591	2.390.026.862	79.358.271	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	14 %	22 Orang	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-				Kecamatan Adipala
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	1 Paket	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	140.000.000	140.000.000	132.500.000	(7.500.000)				Kecamatan Adipala
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	70.000.000	70.000.000	70.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	36.199.320	36.199.320	36.199.320	-				Kecamatan Adipala
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Paket	36.199.320	36.199.320	36.199.320	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	216.022.000	216.022.000	202.522.000	(13.500.000)				Kecamatan Adipala
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	65.802.000	65.802.000	65.802.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	150.220.000	150.220.000	136.720.000	(13.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	212.578.000	212.578.000	212.578.000	-				Kecamatan Adipala
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	14 Unit	48.000.000	48.000.000	48.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	9.580.000	9.580.000	9.580.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	6 Unit	2 Unit	4.998.000	4.998.000	4.998.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Adipala
	Kecamatan Maos				3.022.112.225	3.314.974.065	3.252.793.681	(62.180.384)				Kecamatan Maos
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.022.112.225	3.314.974.065	3.252.793.681	(62.180.384)				Kecamatan Maos
7.01	KECAMATAN				3.022.112.225	3.314.974.065	3.252.793.681	(62.180.384)				Kecamatan Maos
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100 %	14.999.870	14.999.870	7.439.000	(7.560.870)				Kecamatan Maos
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	14.999.870	14.999.870	7.439.000	(7.560.870)				Kecamatan Maos
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	14.999.870	14.999.870	7.439.000	(7.560.870)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	41.554.770	41.554.770	41.364.770	(190.000)				Kecamatan Maos
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	41.554.770	41.554.770	41.364.770	(190.000)				Kecamatan Maos
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakat an	3 Lembaga K emasyarakat an	11.999.960	11.999.960	11.999.960	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	6 laporan	29.554.810	29.554.810	29.364.810	(190.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	7.499.780	7.499.780	7.441.020	(58.760)				Kecamatan Maos

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	7.499.780	7.499.780	7.441.020	(58.760)				Kecamatan Maos
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan	12 laporan	12 laporan	7.499.780	7.499.780	7.441.020	(58.760)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	44.798.500	44.798.500	39.459.440	(5.339.060)				Kecamatan Maos
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	44.798.500	44.798.500	39.459.440	(5.339.060)				Kecamatan Maos
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	230 orang	200 orang	26.198.780	26.198.780	21.065.040	(5.133.740)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	18.599.720	18.599.720	18.394.400	(205.320)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	29.556.630	29.556.630	15.206.200	(14.350.430)				Kecamatan Maos
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	29.556.630	29.556.630	15.206.200	(14.350.430)				Kecamatan Maos
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	6.399.710	6.399.710	3.000.000	(3.399.710)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	7.899.610	7.899.610	4.156.200	(3.743.410)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	6.399.740	6.399.740	3.000.000	(3.399.740)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	6.799.700	6.799.700	4.450.000	(2.349.700)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan	0 Laporan	2.057.870	2.057.870	600.000	(1.457.870)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.883.702.675	3.176.564.515	3.141.883.251	(34.681.264)		DAU		Kecamatan Maos
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	13.399.610	13.399.610	13.399.610	-				Kecamatan Maos
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	6.249.690	6.249.690	6.249.690	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	7.149.920	7.149.920	7.149.920	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.484.889.319	2.777.751.159	2.766.836.095	(10.915.064)				Kecamatan Maos
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	2.484.889.319	2.777.751.159	2.766.836.095	(10.915.064)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	14 %	14 %	13.800.000	13.800.000	13.800.000	-				Kecamatan Maos
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	105 Paket	13.800.000	13.800.000	13.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	133.461.080	133.461.080	118.694.880	(14.766.200)				Kecamatan Maos
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.498.880	40.498.880	40.498.880	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	53.480.000	53.480.000	53.480.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	29.482.200	29.482.200	14.716.000	(14.766.200)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	15.569.220	15.569.220	15.569.220	-				Kecamatan Maos
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	15.569.220	15.569.220	15.569.220	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	144.127.600	144.127.600	135.127.600	(9.000.000)				Kecamatan Maos
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	36.000.000	36.000.000	36.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	108.127.600	108.127.600	99.127.600	(9.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	78.455.846	78.455.846	78.455.846	-				Kecamatan Maos
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	28.010.390	28.010.390	28.010.390	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	12.320.000	12.320.000	12.320.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	34.980.456	34.980.456	34.980.456	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	6 Unit	6 Unit	3.145.000	3.145.000	3.145.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Maos
	Kecamatan Sampang				3.067.507.585	3.167.476.268	3.118.947.686	(48.528.582)				Kecamatan Sampang
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.067.507.585	3.167.476.268	3.118.947.686	(48.528.582)				Kecamatan Sampang
7.01	KECAMATAN				3.067.507.585	3.167.476.268	3.118.947.686	(48.528.582)				Kecamatan Sampang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100%	15.000.000	15.000.000	13.713.560	(1.286.440)				Kecamatan Sampang

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	15.000.000	15.000.000	13.713.560	(1.286.440)				Kecamatan Sampang
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	13.713.560	(1.286.440)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	37.999.700	37.999.700	35.321.190	(2.678.510)				Kecamatan Sampang
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	37.999.700	37.999.700	35.321.190	(2.678.510)				Kecamatan Sampang
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	12.999.940	12.999.940	12.999.940	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	24.999.760	24.999.760	22.321.250	(2.678.510)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	5.999.910	5.999.910	5.634.640	(365.270)				Kecamatan Sampang
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	5.999.910	5.999.910	5.634.640	(365.270)				Kecamatan Sampang
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	5.999.910	5.999.910	5.634.640	(365.270)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	57.399.770	57.399.770	47.222.360	(10.177.410)				Kecamatan Sampang
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	57.399.770	57.399.770	47.222.360	(10.177.410)				Kecamatan Sampang
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	50 orang	50 orang	29.999.890	29.999.890	22.072.480	(7.927.410)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	27.399.880	27.399.880	25.149.880	(2.250.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	10.999.610	10.999.610	9.832.180	(1.167.430)				Kecamatan Sampang
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	10.999.610	10.999.610	9.832.180	(1.167.430)				Kecamatan Sampang
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	10 Dokumen	5.999.690	5.999.690	5.367.250	(632.440)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	10 Dokumen	4.999.920	4.999.920	4.464.930	(534.990)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100%	2.940.108.595	3.040.077.278	3.007.223.756	(32.853.522)		DAU		Kecamatan Sampang

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	7 Dokumen	25.294.750	25.294.750	25.294.750	-				Kecamatan Sampang
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	15.294.830	15.294.830	15.294.830	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan	9.999.920	9.999.920	9.999.920	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.483.897.704	2.583.866.387	2.564.663.365	(19.203.022)				Kecamatan Sampang
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	2.483.897.704	2.583.866.387	2.564.663.365	(19.203.022)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	14 %	23 Orang	13.800.000	13.800.000	13.800.000	-				Kecamatan Sampang
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	105 Paket	1 Paket	13.800.000	13.800.000	13.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	130.209.800	130.209.800	120.059.300	(10.150.500)				Kecamatan Sampang
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	37.999.400	37.999.400	37.999.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60.211.200	60.211.200	60.211.200	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	19.999.200	19.999.200	9.848.700	(10.150.500)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	53.428.040	53.428.040	53.428.040	-				Kecamatan Sampang
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	4 Unit	53.428.040	53.428.040	53.428.040	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	159.208.000	159.208.000	155.708.000	(3.500.000)				Kecamatan Sampang
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	40.000.000	50.000.000	10.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	119.208.000	119.208.000	105.708.000	(13.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	74.270.301	74.270.301	74.270.301	-				Kecamatan Sampang
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	10 Unit	34.910.301	34.910.301	34.910.301	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	11.860.000	11.860.000	11.860.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	1 unit	1 unit	27.500.000	27.500.000	27.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sampang
	Kecamatan Kroya				2.991.536.769	3.319.338.719	3.191.765.075	(127.573.644)				Kecamatan Kroya
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.991.536.769	3.319.338.719	3.191.765.075	(127.573.644)				Kecamatan Kroya
7.01	KECAMATAN				2.991.536.769	3.319.338.719	3.191.765.075	(127.573.644)				Kecamatan Kroya
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	3.379.800	(11.620.200)				Kecamatan Kroya
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	15.000.000	15.000.000	3.379.800	(11.620.200)				Kecamatan Kroya
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	3.379.800	(11.620.200)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	33.565.080	33.565.080	37.999.900	4.434.820				Kecamatan Kroya
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	33.565.080	33.565.080	37.999.900	4.434.820				Kecamatan Kroya
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakat an	54 Lembaga Kemasyarakatan	11.207.080	11.207.080	11.207.080	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	22.358.000	22.358.000	26.792.820	4.434.820	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-				Kecamatan Kroya
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-				Kecamatan Kroya
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	38.600.000	38.600.000	28.604.000	(9.996.000)				Kecamatan Kroya
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	38.600.000	38.600.000	28.604.000	(9.996.000)				Kecamatan Kroya
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	50 orang	50 orang	20.600.000	20.600.000	19.104.000	(1.496.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	18.000.000	18.000.000	9.500.000	(8.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	13.400.000	13.400.000	10.400.000	(3.000.000)				Kecamatan Kroya
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	13.400.000	13.400.000	10.400.000	(3.000.000)				Kecamatan Kroya
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.400.000	3.400.000	3.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	7.000.000	4.000.000	(3.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.887.971.689	3.215.773.639	3.108.381.375	(107.392.264)		DAU		Kecamatan Kroya
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	18.750.000	18.750.000	18.750.000	-				Kecamatan Kroya
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	8.750.000	8.750.000	8.750.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.504.969.559	2.832.771.509	2.737.429.245	(95.342.264)				Kecamatan Kroya
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	2.504.969.559	2.832.771.509	2.737.429.245	(95.342.264)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	123.733.430	123.733.430	116.183.430	(7.550.000)				Kecamatan Kroya
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.575.440	25.575.440	25.575.440	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	10.299.990	10.299.990	10.299.990	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	62.758.000	62.758.000	62.758.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.100.000	15.100.000	7.550.000	(7.550.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	24.980.700	24.980.700	24.980.700	-				Kecamatan Kroya
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	6 Unit	24.980.700	24.980.700	24.980.700	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	147.968.000	147.968.000	143.468.000	(4.500.000)				Kecamatan Kroya

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	67.000.000	67.000.000	67.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	80.968.000	80.968.000	76.468.000	(4.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	67.570.000	67.570.000	67.570.000	-				Kecamatan Kroya
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit	39.000.000	39.000.000	39.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	8.200.000	8.200.000	8.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	20.370.000	20.370.000	20.370.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kroya
	Kecamatan Binangun				3.380.657.676	3.368.035.347	3.342.845.287	(25.190.060)				Kecamatan Binangun
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.380.657.676	3.368.035.347	3.342.845.287	(25.190.060)				Kecamatan Binangun
7.01	KECAMATAN				3.380.657.676	3.368.035.347	3.342.845.287	(25.190.060)				Kecamatan Binangun
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	5.197.930	(9.802.070)				Kecamatan Binangun
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	15.000.000	15.000.000	5.197.930	(9.802.070)				Kecamatan Binangun
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	5.197.930	(9.802.070)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	34.355.720	34.355.720	39.355.720	5.000.000				Kecamatan Binangun
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	34.355.720	34.355.720	39.355.720	5.000.000				Kecamatan Binangun
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakatan an	6 Lembaga Kemasyarakatan	13.106.220	13.106.220	13.106.220	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan	3 laporan	21.249.500	21.249.500	26.249.500	5.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	12.499.820	12.499.820	12.499.820	-				Kecamatan Binangun
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	12.499.820	12.499.820	12.499.820	-				Kecamatan Binangun
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	17 laporan	17 laporan	12.499.820	12.499.820	12.499.820	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	43.886.080	43.886.080	36.438.520	(7.447.560)				Kecamatan Binangun
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	43.886.080	43.886.080	36.438.520	(7.447.560)				Kecamatan Binangun
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	315 orang	315 orang	26.937.260	26.937.260	21.841.320	(5.095.940)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	16.948.820	16.948.820	14.597.200	(2.351.620)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	19.544.910	19.544.910	12.180.970	(7.363.940)				Kecamatan Binangun
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	19.544.910	19.544.910	12.180.970	(7.363.940)				Kecamatan Binangun
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	51 Dokumen	11.545.280	11.545.280	6.305.450	(5.239.830)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	17 dokumen	7.999.630	7.999.630	5.875.520	(2.124.110)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.255.371.146	3.242.748.817	3.237.172.327	(5.576.490)		DAU		Kecamatan Binangun
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	7 Dokumen	14.374.960	14.374.960	14.374.960	-				Kecamatan Binangun
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	8.749.960	8.749.960	8.749.960	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan	5.625.000	5.625.000	5.625.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.885.646.486	2.873.024.157	2.888.435.017	15.410.860				Kecamatan Binangun
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 orang/bulan	24 orang/bulan	2.885.646.486	2.873.024.157	2.888.435.017	15.410.860	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	138.116.430	138.116.430	130.629.080	(7.487.350)				Kecamatan Binangun
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	41.605.380	41.605.380	41.605.380	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	11 paket	11 paket	62.511.200	62.511.200	62.511.200	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	14.999.850	14.999.850	7.512.500	(7.487.350)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	159.885.270	159.885.270	146.385.270	(13.500.000)				Kecamatan Binangun
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	49.805.030	49.805.030	49.805.030	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	110.080.240	110.080.240	96.580.240	(13.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	57.348.000	57.348.000	57.348.000	-				Kecamatan Binangun
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	12 unit	47.238.000	47.238.000	47.238.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16 unit	16 unit	10.110.000	10.110.000	10.110.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Binangun
	Kecamatan Nusawungu				3.184.097.386	3.450.192.570	3.454.340.127	4.147.557				Kecamatan Nusawungu
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.184.097.386	3.450.192.570	3.454.340.127	4.147.557				Kecamatan Nusawungu
7.01	KECAMATAN				3.184.097.386	3.450.192.570	3.454.340.127	4.147.557				Kecamatan Nusawungu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	8.366.400	(6.633.600)				Kecamatan Nusawungu
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	15.000.000	15.000.000	8.366.400	(6.633.600)				Kecamatan Nusawungu
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	8.366.400	(6.633.600)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	32.000.000	32.000.000	35.000.000	3.000.000				Kecamatan Nusawungu
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000	32.000.000	35.000.000	3.000.000				Kecamatan Nusawungu
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakat an	3 Lembaga K emasyarakat an	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	23.000.000	23.000.000	26.000.000	3.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	6.000.000	6.000.000	5.000.000	(1.000.000)				Kecamatan Nusawungu
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	6.000.000	5.000.000	(1.000.000)				Kecamatan Nusawungu

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	6.000.000	5.000.000	(1.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	57.600.000	57.600.000	48.736.400	(8.863.600)				Kecamatan Nusawungu
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	57.600.000	57.600.000	48.736.400	(8.863.600)				Kecamatan Nusawungu
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	50 orang	50 orang	27.000.000	27.000.000	18.136.400	(8.863.600)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	30.600.000	30.600.000	30.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	22.900.000	22.900.000	19.070.400	(3.829.600)				Kecamatan Nusawungu
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	22.900.000	22.900.000	19.070.400	(3.829.600)				Kecamatan Nusawungu
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	7.012.000	(2.988.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	4.100.000	4.100.000	4.062.000	(38.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	3.500.000	2.950.000	(550.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan	17 Laporan	2.300.000	2.300.000	2.046.400	(253.600)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.050.597.386	3.316.692.570	3.338.166.927	21.474.357		DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	27.300.000	27.300.000	27.300.000	-				Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	12.700.000	12.700.000	12.700.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	14.600.000	14.600.000	14.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.582.174.261	2.848.269.445	2.889.531.802	41.262.357				Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	2.582.174.261	2.848.269.445	2.889.531.802	41.262.357	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	14 %	14 %	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-				Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	105 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	105.500.000	105.500.000	98.723.700	(6.776.300)				Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.000.000	4.000.000	5.673.700	1.673.700	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.600.000	30.600.000	30.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	44.000.000	44.000.000	44.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	16.900.000	16.900.000	8.450.000	(8.450.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	23.986.830	23.986.830	23.986.830	-				Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	7 Unit	23.986.830	23.986.830	23.986.830	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	195.575.000	195.575.000	182.075.000	(13.500.000)				Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	56.575.000	56.575.000	56.575.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	139.000.000	139.000.000	125.500.000	(13.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	101.061.295	101.061.295	101.549.595	488.300				Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit	39.500.000	39.500.000	39.988.300	488.300	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	8.860.000	8.860.000	8.860.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	49.767.295	49.767.295	49.767.295	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	37 Unit	2.934.000	2.934.000	2.934.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Nusawungu
	Kecamatan Sidareja				3.118.667.149	3.423.754.678	3.370.429.056	(53.325.622)				Kecamatan Sidareja
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.118.667.149	3.423.754.678	3.370.429.056	(53.325.622)				Kecamatan Sidareja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01	KECAMATAN				3.118.667.149	3.423.754.678	3.370.429.056	(53.325.622)				Kecamatan Sidareja
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100 %	14.999.970	14.999.970	6.916.000	(8.083.970)				Kecamatan Sidareja
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	14.999.970	14.999.970	6.916.000	(8.083.970)				Kecamatan Sidareja
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	14.999.970	14.999.970	6.916.000	(8.083.970)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	37.998.810	37.998.810	40.498.810	2.500.000				Kecamatan Sidareja
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	37.998.810	37.998.810	40.498.810	2.500.000				Kecamatan Sidareja
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakat an	10 Lembaga	7.998.810	7.998.810	7.998.810	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	30.000.000	32.500.000	2.500.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	8.200.000	8.200.000	8.200.000	-				Kecamatan Sidareja
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	8.200.000	8.200.000	8.200.000	-				Kecamatan Sidareja
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	8.200.000	8.200.000	8.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	47.495.160	47.495.160	45.915.400	(1.579.760)				Kecamatan Sidareja
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	47.495.160	47.495.160	45.915.400	(1.579.760)				Kecamatan Sidareja
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	50 orang	50 orang	29.995.160	29.995.160	29.515.400	(479.760)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000	17.500.000	16.400.000	(1.100.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	11.000.000	11.000.000	6.000.000	(5.000.000)				Kecamatan Sidareja
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	11.000.000	11.000.000	6.000.000	(5.000.000)				Kecamatan Sidareja
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	10 Dokumen	6.000.000	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.998.973.209	3.304.060.738	3.262.898.846	(41.161.892)		DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	23.549.410	23.549.410	23.549.410	-				Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	11.200.000	11.200.000	11.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan	12.349.410	12.349.410	12.349.410	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.608.432.579	2.913.520.108	2.907.133.216	(6.386.892)				Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	2.608.432.579	2.913.520.108	2.907.133.216	(6.386.892)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	14 %	14 %	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-				Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	20 Paket	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	115.062.320	115.062.320	93.787.320	(21.275.000)				Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.820.760	24.820.760	24.820.760	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	3.378.560	3.378.560	3.378.560	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	37.132.000	37.132.000	37.132.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	5.215.000	5.215.000	5.215.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.016.000	2.016.000	2.016.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	42.500.000	42.500.000	21.225.000	(21.275.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	19.901.460	19.901.460	19.901.460	-				Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	19.901.460	19.901.460	19.901.460	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	166.318.000	166.318.000	152.818.000	(13.500.000)				Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	39.670.000	39.670.000	39.670.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	126.648.000	126.648.000	113.148.000	(13.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	53.709.440	53.709.440	53.709.440	-				Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit	34.642.432	34.642.432	34.642.432	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	7.430.000	7.430.000	7.430.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	1 unit	1 unit	11.637.008	11.637.008	11.637.008	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Sidareja
	Kecamatan Kedungreja				3.032.947.885	3.011.960.206	2.960.823.029	(51.137.177)				Kecamatan Kedungreja
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.032.947.885	3.011.960.206	2.960.823.029	(51.137.177)				Kecamatan Kedungreja
7.01	KECAMATAN				3.032.947.885	3.011.960.206	2.960.823.029	(51.137.177)				Kecamatan Kedungreja
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100 %	14.999.860	14.999.860	6.658.000	(8.341.860)				Kecamatan Kedungreja
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	14.999.860	14.999.860	6.658.000	(8.341.860)				Kecamatan Kedungreja
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	14.999.860	14.999.860	6.658.000	(8.341.860)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	30.133.740	30.133.740	32.873.880	2.740.140				Kecamatan Kedungreja
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	30.133.740	30.133.740	32.873.880	2.740.140				Kecamatan Kedungreja
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakat an	3 Lembaga Kemasyarakatan	9.998.540	9.998.540	9.998.540	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Lapoan	20.135.200	20.135.200	22.875.340	2.740.140	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	3.199.230	3.199.230	3.000.090	(199.140)				Kecamatan Kedungreja
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	3.199.230	3.199.230	3.000.090	(199.140)				Kecamatan Kedungreja
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14 Laporan	1 Laporan	3.199.230	3.199.230	3.000.090	(199.140)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	47.503.380	47.503.380	41.679.190	(5.824.190)				Kecamatan Kedungreja
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	47.503.380	47.503.380	41.679.190	(5.824.190)				Kecamatan Kedungreja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	170 Orang	135 Orang	29.997.730	29.997.730	24.259.190	(5.738.540)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	17.505.650	17.505.650	17.420.000	(85.650)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	7.496.320	7.496.320	6.600.000	(896.320)				Kecamatan Kedungreja
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	7.496.320	7.496.320	6.600.000	(896.320)				Kecamatan Kedungreja
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.893.380	2.893.380	2.200.000	(693.380)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	2 Dokumen	4.602.940	4.602.940	4.400.000	(202.940)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.929.615.355	2.908.627.676	2.870.011.869	(38.615.807)		DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	7 Dokumen	20.699.790	20.699.790	20.699.790	-				Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	13.699.830	13.699.830	13.699.830	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan	6.999.960	6.999.960	6.999.960	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.506.262.347	2.485.274.668	2.431.063.381	(54.211.287)				Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 org/bin	16 org/bin	2.506.262.347	2.485.274.668	2.431.063.381	(54.211.287)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	14 %	18 Paket	10.800.000	10.800.000	10.800.000	-				Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	18 Paket	10.800.000	10.800.000	10.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	125.225.260	125.225.260	105.725.260	(19.500.000)				Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.997.670	14.997.670	14.997.670	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	19.998.930	19.998.930	19.998.930	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.500.060	5.500.060	5.500.060	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	39.749.600	39.749.600	39.749.600	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.979.000	5.979.000	5.979.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan	130 Paket	39.000.000	39.000.000	19.500.000	(19.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	16.097.030	16.097.030	64.692.510	48.595.480				Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	5 Unit	16.097.030	16.097.030	64.692.510	48.595.480	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	188.417.130	188.417.130	174.917.130	(13.500.000)				Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	66.410.000	66.410.000	66.410.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	122.007.130	122.007.130	108.507.130	(13.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	62.113.798	62.113.798	62.113.798	-				Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	15 Unit	35.461.898	35.461.898	35.461.898	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	11.620.000	11.620.000	11.620.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	15.031.900	15.031.900	15.031.900	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kedungreja
	Kecamatan Gandrungmangu				2.855.860.040	3.037.927.474	3.101.731.704	63.804.230				Kecamatan Gandrungmangu
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.855.860.040	3.037.927.474	3.101.731.704	63.804.230				Kecamatan Gandrungmangu
7.01	KECAMATAN				2.855.860.040	3.037.927.474	3.101.731.704	63.804.230				Kecamatan Gandrungmangu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100%	15.000.000	15.000.000	9.270.000	(5.730.000)				Kecamatan Gandrungmangu
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	15.000.000	15.000.000	9.270.000	(5.730.000)				Kecamatan Gandrungmangu
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	9.270.000	(5.730.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100%	39.348.230	39.348.230	41.694.300	2.346.070				Kecamatan Gandrungmangu
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	39.348.230	39.348.230	41.694.300	2.346.070				Kecamatan Gandrungmangu
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakat an	3 Lembaga K emasyarakat an	14.347.460	14.347.460	13.894.300	(453.160)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.770	25.000.770	27.800.000	2.799.230	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	3.500.000	3.500.000	2.386.100	(1.113.900)				Kecamatan Gandrungmangu
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000	3.500.000	2.386.100	(1.113.900)				Kecamatan Gandrungmangu
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	12 Laporan	6 Laporan	3.500.000	3.500.000	2.386.100	(1.113.900)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitas forkompincam (%)	100%	100%	43.187.810	43.187.810	40.440.200	(2.747.610)				Kecamatan Gandrungmangu
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	43.187.810	43.187.810	40.440.200	(2.747.610)				Kecamatan Gandrungmangu
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	335 orang	335 orang	25.488.980	25.488.980	23.040.200	(2.448.780)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	17.698.830	17.698.830	17.400.000	(298.830)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	15.815.898	15.815.898	10.656.238	(5.159.660)				Kecamatan Gandrungmangu
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	15.815.898	15.815.898	10.656.238	(5.159.660)				Kecamatan Gandrungmangu
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.496.230	3.496.230	1.098.730	(2.397.500)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	8.819.660	8.819.660	8.559.400	(260.260)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	6 Dokumen	3.500.008	3.500.008	998.108	(2.501.900)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100%	2.739.008.102	2.921.075.536	2.997.284.866	76.209.330		DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	23.999.560	23.999.560	23.999.560	-				Kecamatan Gandrungmangu
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.499.940	10.499.940	10.499.940	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	13.499.620	13.499.620	13.499.620	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.293.630.390	2.475.697.824	2.605.862.154	130.164.330				Kecamatan Gandrungmangu
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang / Bulan	26 Orang/ Bulan	2.293.630.390	2.475.697.824	2.605.862.154	130.164.330	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	121.030.990	121.030.990	98.575.990	(22.455.000)				Kecamatan Gandrungmangu
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.497.260	1.497.260	1.497.260	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	21.511.530	21.511.530	21.511.530	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	43.992.400	43.992.400	43.992.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	8.999.800	8.999.800	8.999.800	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	45.030.000	45.030.000	22.575.000	(22.455.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	250.281.300	250.281.300	218.781.300	(31.500.000)				Kecamatan Gandrungmangu
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	63.406.000	63.406.000	63.406.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	186.875.300	186.875.300	155.375.300	(31.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	50.065.862	50.065.862	50.065.862	-				Kecamatan Gandrungmangu
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	6 Unit	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	5.810.000	5.810.000	5.810.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	9.255.862	9.255.862	9.255.862	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Gandrungmangu
	Kecamatan Patimuan				2.565.516.720	2.987.918.083	2.907.104.943	(80.813.140)				Kecamatan Patimuan
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.565.516.720	2.987.918.083	2.907.104.943	(80.813.140)				Kecamatan Patimuan
7.01	KECAMATAN				2.565.516.720	2.987.918.083	2.907.104.943	(80.813.140)				Kecamatan Patimuan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100 %	14.999.950	14.999.950	11.124.890	(3.875.060)				Kecamatan Patimuan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	14.999.950	14.999.950	11.124.890	(3.875.060)				Kecamatan Patimuan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	14.999.950	14.999.950	11.124.890	(3.875.060)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	35.821.210	35.821.210	39.838.850	4.017.640				Kecamatan Patimuan
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	35.821.210	35.821.210	39.838.850	4.017.640				Kecamatan Patimuan
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakat an	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.724.670	9.724.670	9.724.670	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	6.097.360	6.097.360	5.542.760	(554.600)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	19.999.180	19.999.180	24.571.420	4.572.240	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	8.499.420	8.499.420	6.236.670	(2.262.750)				Kecamatan Patimuan
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	4.499.710	4.499.710	3.646.870	(852.840)				Kecamatan Patimuan
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	4.499.710	4.499.710	3.646.870	(852.840)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.04.2.02	Koordniasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	2 Laporan	3.999.710	3.999.710	2.589.800	(1.409.910)				Kecamatan Patimuan
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	12 Laporan	3.999.710	3.999.710	2.589.800	(1.409.910)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	43.849.710	43.849.710	41.396.430	(2.453.280)				Kecamatan Patimuan
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	43.849.710	43.849.710	41.396.430	(2.453.280)				Kecamatan Patimuan
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	50 orang	50 orang	24.551.950	24.551.950	24.514.750	(37.200)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	19.297.760	19.297.760	16.881.680	(2.416.080)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	21.487.230	21.487.230	7.973.180	(13.514.050)				Kecamatan Patimuan
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	21.487.230	21.487.230	7.973.180	(13.514.050)				Kecamatan Patimuan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	7 Dokumen	6.999.700	6.999.700	1.836.740	(5.162.960)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	7 Dokumen	6.997.900	6.997.900	3.587.900	(3.410.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan	7 Laporan	7.489.630	7.489.630	2.548.540	(4.941.090)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.440.859.200	2.863.260.563	2.800.534.923	(62.725.640)		DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	14.853.110	14.853.110	14.853.110	-				Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	8.186.130	8.186.130	8.186.130	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	6.666.980	6.666.980	6.666.980	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.065.808.270	2.488.209.633	2.452.333.993	(35.875.640)				Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	2.065.808.270	2.488.209.633	2.452.333.993	(35.875.640)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	105.038.920	105.038.920	91.688.920	(13.350.000)				Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.998.340	3.998.340	3.998.340	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.991.180	25.991.180	25.991.180	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	38.607.400	38.607.400	38.607.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	9.892.000	9.892.000	9.892.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	26.550.000	26.550.000	13.200.000	(13.350.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	17.698.110	17.698.110	17.698.110	-				Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	3 Unit	17.698.110	17.698.110	17.698.110	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	141.999.980	141.999.980	128.499.980	(13.500.000)				Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	25.558.500	25.558.500	25.558.500	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	116.441.480	116.441.480	102.941.480	(13.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	95.460.810	95.460.810	95.460.810	-				Kecamatan Patimuan

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	12 Unit	35.597.970	35.597.970	35.597.970	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15 Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	37.362.840	37.362.840	37.362.840	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	30 Unit	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Patimuan
	Kecamatan Cipari				2.542.369.570	2.822.059.321	2.704.920.457	(117.138.864)				Kecamatan Cipari
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.542.369.570	2.822.059.321	2.704.920.457	(117.138.864)				Kecamatan Cipari
7.01	KECAMATAN				2.542.369.570	2.822.059.321	2.704.920.457	(117.138.864)				Kecamatan Cipari
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100%	14.999.860	14.999.860	7.214.600	(7.785.260)				Kecamatan Cipari
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	14.999.860	14.999.860	7.214.600	(7.785.260)				Kecamatan Cipari
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	14.999.860	14.999.860	7.214.600	(7.785.260)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100%	41.225.640	41.225.640	40.182.800	(1.042.840)				Kecamatan Cipari
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000	33.000.000	36.787.800	3.787.800				Kecamatan Cipari
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakat an	11 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000	13.000.000	12.177.000	(823.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	20.000.000	20.000.000	24.610.800	4.610.800	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi Jumlah UMKM yang Terfasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Kegiatan 25 UMKM 1 Laporan	1 Kegiatan 11 Lembaga 1 Laporan	8.225.640	8.225.640	3.395.000	(4.830.640)				Kecamatan Cipari
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1 laporan	1 laporan	8.225.640	8.225.640	3.395.000	(4.830.640)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	2.500.000	2.500.000	2.329.300	(170.700)				Kecamatan Cipari
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.329.300	(170.700)				Kecamatan Cipari

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.329.300	(170.700)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	47.424.440	47.424.440	44.175.600	(3.248.840)				Kecamatan Cipari
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	47.424.440	47.424.440	44.175.600	(3.248.840)				Kecamatan Cipari
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestraian Bhineka Tunggal Ika serta	270 orang	270 orang	29.593.400	29.593.400	26.689.600	(2.903.800)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	17.831.040	17.831.040	17.486.000	(345.040)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	34.060.980	34.060.980	13.596.040	(20.464.940)				Kecamatan Cipari
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	34.060.980	34.060.980	13.596.040	(20.464.940)				Kecamatan Cipari
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	2 Dokumen	14.000.000	14.000.000	3.635.000	(10.365.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	2 Dokumen	12.232.740	12.232.740	6.599.240	(5.633.500)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.828.240	7.828.240	3.361.800	(4.466.440)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100%	2.402.158.650	2.681.848.401	2.597.422.117	(84.426.284)		DAU		Kecamatan Cipari
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	7 Dokumen	23.314.140	23.314.140	23.314.140	-				Kecamatan Cipari
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	14.956.900	14.956.900	14.956.900	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Dokumen	8.357.240	8.357.240	8.357.240	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.995.160.180	2.274.849.931	2.224.923.647	(49.926.284)				Kecamatan Cipari
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	15 orang/bulan	1.995.160.180	2.274.849.931	2.224.923.647	(49.926.284)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	14 %	18 paket	10.800.000	10.800.000	10.800.000	-				Kecamatan Cipari
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	18 paket	10.800.000	10.800.000	10.800.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	127.791.980	127.791.980	106.791.980	(21.000.000)				Kecamatan Cipari
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	6.464.940	6.464.940	6.464.940	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	20.280.620	20.280.620	20.280.620	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	12 Paket	9.685.120	9.685.120	9.685.120	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	40.752.300	40.752.300	40.752.300	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	8.609.000	8.609.000	8.609.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 Laporan	140 Laporan	42.000.000	42.000.000	21.000.000	(21.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	33.615.640	33.615.640	33.615.640	-				Kecamatan Cipari
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	99 unit	9.819.810	9.819.810	9.819.810	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	6 unit	23.795.830	23.795.830	23.795.830	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	155.346.091	155.346.091	141.846.091	(13.500.000)				Kecamatan Cipari
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	55.303.011	55.303.011	55.303.011	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.043.080	100.043.080	86.543.080	(13.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	56.130.619	56.130.619	56.130.619	-				Kecamatan Cipari
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	13 Unit	36.704.819	36.704.819	36.704.819	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15 Unit	9.460.000	9.460.000	9.460.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1 Unit	9.965.800	9.965.800	9.965.800	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cipari
	Kecamatan Karangpucung				3.019.560.068	3.312.240.373	3.290.151.316	(22.089.057)				Kecamatan Karangpucung
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.019.560.068	3.312.240.373	3.290.151.316	(22.089.057)				Kecamatan Karangpucung
7.01	KECAMATAN				3.019.560.068	3.312.240.373	3.290.151.316	(22.089.057)				Kecamatan Karangpucung
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100%	15.000.000	15.000.000	3.535.000	(11.465.000)				Kecamatan Karangpucung

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	15.000.000	15.000.000	3.535.000	(11.465.000)				Kecamatan Karangpucung
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	3.535.000	(11.465.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	43.791.030	43.791.030	48.483.950	4.692.920				Kecamatan Karangpucung
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	43.791.030	43.791.030	48.483.950	4.692.920				Kecamatan Karangpucung
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	13.245.160	13.245.160	13.245.160	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	6 laporan	6 laporan	30.545.870	30.545.870	35.238.790	4.692.920	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-				Kecamatan Karangpucung
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-				Kecamatan Karangpucung
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan	4 laporan	4 laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	62.863.460	62.863.460	53.195.550	(9.667.910)				Kecamatan Karangpucung
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	62.863.460	62.863.460	53.195.550	(9.667.910)				Kecamatan Karangpucung
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	330 orang	305 orang	42.835.820	42.835.820	34.195.550	(8.640.270)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	20.027.640	20.027.640	19.000.000	(1.027.640)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	28.116.410	28.116.410	23.100.450	(5.015.960)				Kecamatan Karangpucung
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	28.116.410	28.116.410	23.100.450	(5.015.960)				Kecamatan Karangpucung
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	42 dokumen	8.118.000	8.118.000	6.624.000	(1.494.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 dokumen	4.961.140	4.961.140	3.312.000	(1.649.140)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 dokumen	5.118.180	5.118.180	3.858.180	(1.260.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06.2.01.0009	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	14 dokumen	4.437.800	4.437.800	4.254.600	(183.200)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan	14 dokumen	5.481.290	5.481.290	5.051.670	(429.620)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.867.789.168	3.160.469.473	3.159.836.366	(633.107)		DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	7 dokumen	31.488.240	31.488.240	31.488.240	-				Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	22.413.240	22.413.240	22.413.240	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 laporan	9.075.000	9.075.000	9.075.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.353.413.987	2.646.094.292	2.703.511.185	57.416.893				Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	19 orang	18 orang	2.353.413.987	2.646.094.292	2.703.511.185	57.416.893	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang terfasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	14 %	26 orang	15.600.000	15.600.000	15.600.000	-				Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	26 Paket	15.600.000	15.600.000	15.600.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	156.644.930	156.644.930	130.094.930	(26.550.000)				Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	25.910.100	25.910.100	25.910.100	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	12 paket	9.719.430	9.719.430	9.719.430	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	12 paket	12 paket	55.176.600	55.176.600	55.176.600	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	12.738.800	12.738.800	12.738.800	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 paket	12 paket	53.100.000	53.100.000	26.550.000	(26.550.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	14.258.500	14.258.500	14.258.500	-				Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	2 unit	14.258.500	14.258.500	14.258.500	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	235.449.600	235.449.600	203.949.600	(31.500.000)				Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	50.535.600	50.535.600	50.535.600	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	12 laporan	184.914.000	184.914.000	153.414.000	(31.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	60.933.911	60.933.911	60.933.911	-				Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	15 unit	36.335.211	36.335.211	36.335.211	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	30 unit	30 unit	15.191.000	15.191.000	15.191.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 unit	1 unit	9.407.700	9.407.700	9.407.700	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Karangpucung
	Kecamatan Cimanggu				3.586.916.929	3.397.808.531	3.127.046.527	(270.762.004)				Kecamatan Cimanggu
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.586.916.929	3.397.808.531	3.127.046.527	(270.762.004)				Kecamatan Cimanggu
7.01	KECAMATAN				3.586.916.929	3.397.808.531	3.127.046.527	(270.762.004)				Kecamatan Cimanggu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100%	15.000.000	15.000.000	9.900.000	(5.100.000)				Kecamatan Cimanggu
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	15.000.000	15.000.000	9.900.000	(5.100.000)				Kecamatan Cimanggu
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	9.900.000	(5.100.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	25.000.000	25.000.000	28.962.000	3.962.000				Kecamatan Cimanggu
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	28.962.000	3.962.000				Kecamatan Cimanggu
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakat an	15 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	10.000.000	8.962.000	(1.038.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	20.000.000	5.000.000	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	9.500.000	9.500.000	8.500.000	(1.000.000)				Kecamatan Cimanggu
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	4.500.000	(500.000)				Kecamatan Cimanggu
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14 Laporan	15 Kegiatan	5.000.000	5.000.000	4.500.000	(500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daetah Dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	12 Laporan	4.500.000	4.500.000	4.000.000	(500.000)				Kecamatan Cimanggu
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	12 Laporan	4.500.000	4.500.000	4.000.000	(500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	31.800.000	31.800.000	30.390.880	(1.409.120)				Kecamatan Cimanggu
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	31.800.000	31.800.000	30.390.880	(1.409.120)				Kecamatan Cimanggu
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	50 orang	50 orang	15.000.000	15.000.000	13.990.880	(1.009.120)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	16.800.000	16.800.000	16.400.000	(400.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	22.500.000	22.500.000	20.964.000	(1.536.000)				Kecamatan Cimanggu
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	22.500.000	22.500.000	20.964.000	(1.536.000)				Kecamatan Cimanggu
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	15 Dokumen	5.000.000	5.000.000	4.616.000	(384.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	15 Dokumen	7.500.000	7.500.000	7.116.000	(384.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	15 Dokumen	5.000.000	5.000.000	4.616.000	(384.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan	15 Laporan	5.000.000	5.000.000	4.616.000	(384.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.483.116.929	3.294.008.531	3.028.329.647	(265.678.884)		DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	6 Dokumen	12.800.000	12.800.000	12.800.000	-				Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	6.400.000	6.400.000	6.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3 Laporan	6.400.000	6.400.000	6.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.945.894.721	2.756.786.523	2.561.094.569	(195.691.954)				Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	2.945.894.721	2.756.786.523	2.561.094.569	(195.691.954)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	14 %	32 Paket	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-				Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	32 Paket	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	120.292.850	120.292.650	100.392.650	(19.900.000)				Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	4.999.800	4.999.800	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.998.750	24.998.750	24.998.750	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	4.986.400	4.986.400	4.986.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.307.700	40.307.700	40.307.700	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	40.000.000	20.100.000	(19.900.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	92.493.330	92.493.330	55.906.400	(36.586.930)				Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	1 Unit	22.493.330	22.493.330	1.846.890	(20.646.440)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	70.000.000	70.000.000	54.059.510	(15.940.490)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	227.872.017	227.872.017	214.372.017	(13.500.000)				Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	51.291.217	51.291.217	51.291.217	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	176.580.800	176.580.800	163.080.800	(13.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	67.764.011	67.764.011	67.764.011	-				Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	12 Unit	36.566.783	36.566.783	36.566.783	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	6.980.000	6.980.000	6.980.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	24.217.228	24.217.228	24.217.228	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Cimanggu
	Kecamatan Majenang				3.404.980.442	3.533.655.066	3.460.129.041	(73.526.025)				Kecamatan Majenang
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.404.980.442	3.533.655.066	3.460.129.041	(73.526.025)				Kecamatan Majenang
7.01	KECAMATAN				3.404.980.442	3.533.655.066	3.460.129.041	(73.526.025)				Kecamatan Majenang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100%	14.999.520	14.999.520	3.920.000	(11.079.520)				Kecamatan Majenang

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	14.999.520	14.999.520	3.920.000	(11.079.520)				Kecamatan Majenang
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	14.999.520	14.999.520	3.920.000	(11.079.520)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100%	27.906.330	27.906.330	30.505.690	2.599.360				Kecamatan Majenang
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	27.906.330	27.906.330	30.505.690	2.599.360				Kecamatan Majenang
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	8.333.690	8.333.690	8.333.690	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	19.572.640	19.572.640	22.172.000	2.599.360	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	2.583.580	2.583.580	2.100.000	(483.580)				Kecamatan Majenang
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	2.583.580	2.583.580	2.100.000	(483.580)				Kecamatan Majenang
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	2.583.580	2.583.580	2.100.000	(483.580)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	30.503.540	30.503.540	29.467.400	(1.036.140)				Kecamatan Majenang
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	30.503.540	30.503.540	29.467.400	(1.036.140)				Kecamatan Majenang
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	200 Orang	200 Orang	13.130.260	13.130.260	12.467.400	(662.860)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	17.373.280	17.373.280	17.000.000	(373.280)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	11.821.280	11.821.280	8.934.560	(2.886.720)				Kecamatan Majenang
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	11.821.280	11.821.280	8.934.560	(2.886.720)				Kecamatan Majenang
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	34 Dokumen	4.149.620	4.149.620	3.900.000	(249.620)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	34 Dokumen	5.891.180	5.891.180	3.793.040	(2.098.140)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan	17 Laporan	1.780.480	1.780.480	1.241.520	(538.960)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100%	3.317.166.192	3.445.840.816	3.385.201.391	(60.639.425)		DAU		Kecamatan Majenang
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	7 Dokumen	19.751.060	19.751.060	19.751.060	-				Kecamatan Majenang
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	13.844.930	13.844.930	13.844.930	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan	5.906.130	5.906.130	5.906.130	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.620.118.767	2.748.793.391	2.733.682.966	(15.110.425)				Kecamatan Majenang
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	2.620.118.767	2.748.793.391	2.733.682.966	(15.110.425)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	14 %	1 Dokumen	4.950.000	4.950.000	4.950.000	-				Kecamatan Majenang
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	105 Paket	33 Paket	4.950.000	4.950.000	4.950.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	186.010.920	186.010.920	161.481.920	(24.529.000)				Kecamatan Majenang
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	4.786.030	4.786.030	4.786.030	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	42 Paket	35.477.490	35.477.490	35.477.490	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	84.444.800	84.444.800	84.444.800	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	12.322.600	12.322.600	12.322.600	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	48.980.000	48.980.000	24.451.000	(24.529.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	45.958.700	45.958.700	45.958.700	-				Kecamatan Majenang
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	14 Unit	42.515.500	42.515.500	42.515.500	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	3.443.200	3.443.200	3.443.200	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	371.244.500	371.244.500	350.244.500	(21.000.000)				Kecamatan Majenang
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	92.910.500	92.910.500	92.910.500	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	278.334.000	278.334.000	257.334.000	(21.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	69.132.245	69.132.245	69.132.245	-				Kecamatan Majenang
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	11 Unit	41.602.145	41.602.145	41.602.145	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	12.760.000	12.760.000	12.760.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	13.370.100	13.370.100	13.370.100	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	4 Unit	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Majenang
	Kecamatan Wanareja				2.936.408.708	3.181.133.183	3.096.483.366	(84.649.817)				Kecamatan Wanareja
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.936.408.708	3.181.133.183	3.096.483.366	(84.649.817)				Kecamatan Wanareja
7.01	KECAMATAN				2.936.408.708	3.181.133.183	3.096.483.366	(84.649.817)				Kecamatan Wanareja
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100%	14.999.920	14.999.920	13.980.600	(1.019.320)				Kecamatan Wanareja
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	14.999.920	14.999.920	13.980.600	(1.019.320)				Kecamatan Wanareja
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	14.999.920	14.999.920	13.980.600	(1.019.320)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100%	27.635.740	27.635.740	26.356.510	(1.279.230)				Kecamatan Wanareja
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	27.635.740	27.635.740	26.356.510	(1.279.230)				Kecamatan Wanareja
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakat an	3 Lembaga K emasyarakat an	7.649.980	7.649.980	7.649.980	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	19.985.760	19.985.760	18.706.530	(1.279.230)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	5.000.000	5.000.000	4.210.000	(790.000)				Kecamatan Wanareja
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daetah Dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	4.210.000	(790.000)				Kecamatan Wanareja
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	4.210.000	(790.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	36.273.800	36.273.800	33.453.350	(2.820.450)				Kecamatan Wanareja
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	36.273.800	36.273.800	33.453.350	(2.820.450)				Kecamatan Wanareja
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	50 orang	50 orang	20.199.800	20.199.800	17.853.350	(2.346.450)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	16.074.000	16.074.000	15.600.000	(474.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	11.834.750	11.834.750	5.488.520	(6.346.230)				Kecamatan Wanareja
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	11.834.750	11.834.750	5.488.520	(6.346.230)				Kecamatan Wanareja
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4.725.000	4.725.000	950.000	(3.775.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.110.000	2.110.000	755.000	(1.355.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan	1 Laporan	4.999.750	4.999.750	3.783.520	(1.216.230)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.840.664.498	3.085.388.973	3.012.994.386	(72.394.587)		DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	7 Dokumen	13.960.040	13.960.040	13.960.040	-				Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	8.437.370	8.437.370	8.437.370	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan	5.522.670	5.522.670	5.522.670	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.180.197.755	2.424.922.230	2.410.277.643	(14.644.587)				Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	2.180.197.755	2.424.922.230	2.410.277.643	(14.644.587)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	14 %	1 dokumen	16.200.000	16.200.000	16.200.000	-				Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	27 paket	16.200.000	16.200.000	16.200.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	155.418.610	155.418.610	120.168.610	(35.250.000)				Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	34.248.110	34.248.110	34.248.110	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	41.190.500	41.190.500	41.190.500	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	69.980.000	69.980.000	34.730.000	(35.250.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-				Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	214.278.358	214.278.358	191.778.358	(22.500.000)				Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	36.501.448	36.501.448	36.501.448	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	177.776.910	177.776.910	155.276.910	(22.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	255.609.735	255.609.735	255.609.735	-				Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	10 unit	42.000.000	42.000.000	42.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	10.730.000	10.730.000	10.730.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	201.407.235	201.407.235	201.407.235	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	12 unit	1.472.500	1.472.500	1.472.500	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Wanareja
	Kecamatan Dayeuhluhur				2.165.603.210	2.612.133.564	2.587.282.359	(24.851.205)				Kecamatan Dayeuhluhur
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.165.603.210	2.612.133.564	2.587.282.359	(24.851.205)				Kecamatan Dayeuhluhur
7.01	KECAMATAN				2.165.603.210	2.612.133.564	2.587.282.359	(24.851.205)				Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	5.925.000	(9.075.000)				Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	15.000.000	15.000.000	5.925.000	(9.075.000)				Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	5.925.000	(9.075.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	41.875.900	41.875.900	43.919.590	2.043.690				Kecamatan Dayeuhluhur

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	41.875.900	41.875.900	43.919.590	2.043.690				Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakat an	3 Lembaga K emasyarakat an	11.876.000	11.876.000	11.876.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	29.999.900	29.999.900	32.043.590	2.043.690	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-				Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-				Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	31.000.000	31.000.000	23.500.000	(7.500.000)				Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	31.000.000	31.000.000	23.500.000	(7.500.000)				Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	50 orang	50 orang	10.000.000	10.000.000	6.750.000	(3.250.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	21.000.000	21.000.000	16.750.000	(4.250.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	24.824.000	24.824.000	18.574.000	(6.250.000)				Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	24.824.000	24.824.000	18.574.000	(6.250.000)				Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4.212.000	4.212.000	2.362.000	(1.850.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.606.000	2.606.000	758.000	(1.848.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4.412.000	4.412.000	4.412.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	7.134.000	7.134.000	7.134.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.460.000	6.460.000	3.908.000	(2.552.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.049.903.310	2.496.433.664	2.492.363.769	(4.069.895)		DAU		Kecamatan Dayeuhluhur

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	16.400.000	16.400.000	16.400.000	-				Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	11.400.000	11.400.000	11.400.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.647.386.100	2.093.916.454	2.138.046.559	44.130.105				Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	1.647.386.100	2.093.916.454	2.138.046.559	44.130.105	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	151.421.810	151.421.810	116.721.810	(34.700.000)				Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.991.680	3.991.680	3.991.680	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.999.000	24.999.000	24.999.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	3.999.630	3.999.630	3.999.630	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	39.997.500	39.997.500	39.997.500	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	9.034.000	9.034.000	9.034.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	69.400.000	69.400.000	34.700.000	(34.700.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	11.538.760	11.538.760	11.538.760	-				Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	2 unit	11.538.760	11.538.760	23.077.520	11.538.760	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	181.647.500	181.647.500	168.147.500	(13.500.000)				Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	53.999.500	53.999.500	42.460.740	(11.538.760)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	127.648.000	127.648.000	114.148.000	(13.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	41.509.140	41.509.140	41.509.140	-				Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	4.509.140	4.509.140	4.509.140	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Dayeuhluhur
	Kecamatan Kungplaut				2.807.895.899	3.250.336.573	3.130.221.042	(120.115.531)				Kecamatan Kungplaut
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.807.895.899	3.250.336.573	3.130.221.042	(120.115.531)				Kecamatan Kungplaut
7.01	KECAMATAN				2.807.895.899	3.250.336.573	3.130.221.042	(120.115.531)				Kecamatan Kungplaut
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	6.192.300	(8.807.700)				Kecamatan Kungplaut
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase implementasi pelimpahan kewenangan	100%	100%	15.000.000	15.000.000	6.192.300	(8.807.700)				Kecamatan Kungplaut
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	6.192.300	(8.807.700)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kungplaut
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif	100 %	100 %	38.993.810	38.993.810	37.716.890	(1.276.920)				Kecamatan Kungplaut
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	38.993.810	38.993.810	37.716.890	(1.276.920)				Kecamatan Kungplaut
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyarakat an	3 Lembaga K emasyarakat an	14.999.880	14.999.880	14.999.880	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kungplaut
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	23.993.930	23.993.930	22.717.010	(1.276.920)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kungplaut
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman dan ketertiban (%)	100%	100%	19.971.680	19.971.680	13.355.680	(6.616.000)				Kecamatan Kungplaut
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	9.985.840	9.985.840	6.677.840	(3.308.000)				Kecamatan Kungplaut
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	9.985.840	9.985.840	6.677.840	(3.308.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kungplaut
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daetah Dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	9.985.840	9.985.840	6.677.840	(3.308.000)				Kecamatan Kungplaut
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	9.985.840	9.985.840	6.677.840	(3.308.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kungplaut
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi forkompincam (%)	100%	100%	44.900.310	44.900.310	29.362.390	(15.537.920)				Kecamatan Kungplaut

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	44.900.310	44.900.310	29.362.390	(15.537.920)				Kecamatan Kumpullaut
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	50 orang	50 orang	34.900.510	34.900.510	22.512.590	(12.387.920)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	9.999.800	9.999.800	6.849.800	(3.150.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi terkait tata pemerintahan desa (%)	100%	100%	29.784.710	29.784.710	17.972.840	(11.811.870)				Kecamatan Kumpullaut
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	29.784.710	29.784.710	17.972.840	(11.811.870)				Kecamatan Kumpullaut
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	9.913.070	9.913.070	4.548.090	(5.364.980)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	9.935.460	9.935.460	8.935.460	(1.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	9.936.180	9.936.180	4.489.290	(5.446.890)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.659.245.389	3.101.686.063	3.025.620.942	(76.065.121)		DAU		Kecamatan Kumpullaut
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	14.981.810	14.981.810	14.981.810	-				Kecamatan Kumpullaut
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4 Dokumen	9.982.550	9.982.550	9.982.550	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan	4.999.260	4.999.260	4.999.260	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.858.761.408	2.301.202.082	2.275.536.961	(25.665.121)				Kecamatan Kumpullaut
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	orang/bulan	1.858.761.408	2.301.202.082	2.275.536.961	(25.665.121)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	176.043.990	176.043.990	146.043.990	(30.000.000)				Kecamatan Kumpullaut
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.999.760	11.999.760	11.999.760	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23.507.600	23.507.600	23.507.600	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.563.230	20.563.230	20.563.230	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	44.973.400	44.973.400	44.973.400	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	229.282.000	229.282.000	208.882.000	(20.400.000)				Kecamatan Kumpullaut
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	184.282.000	184.282.000	163.882.000	(20.400.000)	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	380.176.181	380.176.181	380.176.181	-				Kecamatan Kumpullaut
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit	59.956.716	59.956.716	59.956.716	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	20.242.550	20.242.550	20.242.550	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	1 unit	1 unit	299.976.915	299.976.915	299.976.915	-	Kab. Cilacap	DAU		Kecamatan Kumpullaut
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				10.019.405.467	10.225.359.148	9.956.965.120	(268.394.028)				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				10.019.405.467	10.225.359.148	9.956.965.120	(268.394.028)				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				10.019.405.467	10.225.359.148	9.956.965.120	(268.394.028)				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	cakupan kecamatan yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara	24 kecamatan	10 Kecamatan	803.511.160	803.511.160	821.224.140	17.712.980				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen/laporan aktivitas pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Laporan	3 Laporan	803.511.160	803.511.160	821.224.140	17.712.980				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	200 Orang	803.511.160	803.511.160	821.224.140	17.712.980	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada (%)	70 %	70 %	3.253.634.000	3.253.634.000	3.213.634.000	(40.000.000)				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah dokumen/laporan aktivitas pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	6 Laporan	6 Laporan	3.253.634.000	3.253.634.000	3.213.634.000	(40.000.000)				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	640 Orang	440	152.000.000	152.000.000	112.000.000	(40.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	3.101.634.000	3.101.634.000	3.101.634.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM/Ormas yang dibina/ bintek kebangsaan	80 %	75 %	40.000.000	20.000.000	20.000.000	-				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen/laporan aktivitas pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	20.000.000	20.000.000	-				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	100 Orang	40.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	24 kecamatan	15 Kecamatan	245.000.000	150.000.000	100.000.000	(50.000.000)				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen/laporan aktivitas pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	10 Laporan	5 Laporan	245.000.000	150.000.000	100.000.000	(50.000.000)				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1225 Orang	500 Orang	245.000.000	150.000.000	100.000.000	(50.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial	24 kecamatan	24 Kecamatan	811.279.800	797.154.630	761.646.000	(35.508.630)				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen/laporan aktivitas pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	9 Laporan	5 Laporan	811.279.800	797.154.630	761.646.000	(35.508.630)				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		RKPD (Rp)	APBD (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	LOKASI	Sumber Dana	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 Laporan	4 Laporan	123.279.800	109.154.630	80.000.000	(29.154.630)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	688.000.000	688.000.000	681.646.000	(6.354.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.865.980.507	5.201.059.358	5.040.460.980	(160.598.378)		DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	38.675.000	38.675.000	26.575.000	(12.100.000)				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	23.937.500	23.937.500	15.687.500	(8.250.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	14.737.500	14.737.500	10.887.500	(3.850.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	3.438.745.762	3.773.824.613	3.889.173.235	115.348.622				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23Orang/bulan	25Orang/bulan	3.438.745.762	3.773.824.613	3.889.173.235	115.348.622	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	43.000.000	43.000.000	28.000.000	(15.000.000)				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	2 Orang	25.000.000	25.000.000	10.000.000	(15.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	581.145.000	581.145.000	354.798.000	(226.347.000)				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	51.250.000	51.250.000	51.250.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	77.395.000	77.395.000	77.395.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	52.500.000	52.500.000	26.153.000	(26.347.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	400.000.000	200.000.000	(200.000.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	9 Unit	9 Unit	110.367.640	110.367.640	110.367.640	-				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	110.367.640	110.367.640	110.367.640	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	410.729.700	410.729.700	388.229.700	(22.500.000)				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	102.957.700	102.957.700	102.957.700	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	52.500.000	52.500.000	52.500.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	255.272.000	255.272.000	232.772.000	(22.500.000)	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	54 Unit	54 Unit	243.317.405	243.317.405	243.317.405	-				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	166.945.405	166.945.405	166.945.405	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	39.900.000	39.900.000	39.900.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	36.472.000	36.472.000	36.472.000	-	Kab. Cilacap	DAU		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang merupakan hasil penyesuaian antara perencanaan dan penganggaran tahun 2025, sehingga diharapkan dapat menghasilkan program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien guna mencapai prioritas dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan pekerjaan pada kegiatan/sub kegiatan alternatif, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang merupakan penjabaraan dari kebijakan pembangunan daerah melalui program-program prioritas sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2025, difokuskan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2025 dengan mengacu pada isu-isu strategis, kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan dimaksud, serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan daerah, maka Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025. Di samping itu, Perubahan RKPD Tahun 2025 juga menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 serta penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 menjadi ukuran pencapaian kinerja seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen rencana kerja (Renja) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan solusi pemecahan

masalah yang mendesak bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pada tahun yang direncanakan. Diharapkan apa yang menjadi target dan tujuan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 dapat tercapai melalui Perubahan RKPD Tahun 2025 ini, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat secara adil dan merata serta meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama peningkatan kesejahteraan dan perekonomian seluruh masyarakat di Kabupaten Cilacap. Dalam upaya mencapai target dan tujuan tersebut, sangat diperlukan komitmen dan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan melalui sinergi, kerjasama dan kolaborasi *pentahelix* dari jajaran pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi dan media.

